

ENSIKLOPEDIA PAHLAWAN NASIONAL

Kuncoro Hadi



Kuncoro Hadi & Sustianingsih

Ensiklopedia
Pahlawan
Nasional



Ensiklopedia

Pahlawan Nasional

Penulis : Kuncoro Hadi & Sustianingsih
Editor : Qoni
Desain Cover : Aulia[r]
Layout : Lendo
Cetakan : 2015
ISBN : 978-602-9434-61-3

Diterbitkan Oleh :

Istana Media

(Grup Relasi Inti Media, anggota IKAPI)

Jl. Suryodiningratan Gg. Rahmat No. 644B

Mj II Rt.34/Rw.10 Mantrijeron

Yogyakarta

Tlp/Fax: 0274-413728

Pengantar

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, Hero [pahlawan] berarti orang yang dihormati karena keberaniannya. Pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran, seorang pejuang yang gagah berani membela kelompok atau bangsa-negaranya. Untuk itu, seorang pahlawan berhak mendapat kehormatan dengan menyandang gelar dari negara. Dalam hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberi batasan yang jelas bahwa gelar merupakan penghargaan negara yang diberikan pemimpin negara [presiden] kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Sehingga gelar pahlawan nasional merupakan gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi seorang pahlawan mempunyai dua unsur penting. *Pertama*, tindak kepahlawanan yang berarti melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani

sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. *Kedua*, nilai kepahlawanan yang bermakna memiliki sikap dan perilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan negara.

Dalam aturan resmi negara, berdasar Peraturan Presiden Nomor 33/1964 mengenai Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan dan Peraturan Presiden Nomor 5/1964 mengenai Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, ada sepuluh criteria pemberian gelar pahlawan pada seseorang. [1] Warga Indonesia yang telah meninggal dunia, [2] Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, [3] Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, [4] Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, [5] Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya, tidak sesaat, dan melebihi tugas yang diembannya, [6] Perjuangannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, [7] Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi, [8] Memiliki akhlak dan moral yang tinggi, [9] Pantang menyerah pada lawan ataupun musuh dalam perjuangannya, [10] Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangannya.

Gelar pahlawan Indonesia dikukuhkan melalui keputusan presiden [keppres] Republik Indonesia dan telah diberikan sejak tahun 1959 hingga sekarang—2012. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyebut bahwa gelar pahlawan Indonesia mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan oleh negara, terutama; [1] Pahlawan Kemerdekaan Nasional, [2] Pahlawan Proklamator, [3] Pahlawan Nasional, [4] Pahlawan Revolusi. Memang dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, terutama pasal 4 ayat 1 juga disebutkan tentang pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan Ampera, tetapi nama-nama dalam dua gelar pahlawan itu tidak dimasukkan dalam daftar resmi pahlawan nasional republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia per Januari 2010. Gelar pahlawan Perintis Kemerdekaan, pahlawan Ampera, termasuk juga yang terbaru—pahlawan Reformasi memang masih “abu-abu”, masih terjadi perdebatan dan belum ada konsensus secara utuh tentang tiga gelar tersebut seperti pendapat sejarawan LIPI Asvi Warman Adam yang menyebut ketiga gelar itu bukan bagian dari Pahlawan Nasional Indonesia¹. Untuk itu biografi tokoh ketiga gelar itu tidak dimasukkan dalam Ensiklopedi Pahlawan Indonesia.

Jadi Ensiklopedia Pahlawan Indonesia ini memuat 156 biografi pahlawan yang masuk dalam kategori pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, pahlawan kebangkitan nasional/ pahlawan nasional, dan pahlawan revolusi. Jumlah 156 tokoh ini sesuai dengan daftar pahlawan nasional Republik Indonesia

1 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt504d66788a0e7/beda-pendapat-gelar-pahlawan-untuk-soekarno-hatta>

yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia per Januari 2010² sebanyak 147 nama ditambah dengan 9 nama baru pahlawan yang ditetapkan pemerintah melalui keputusan presiden periode 2010 hingga 2011, termasuk juga gelar pahlawan nasional periode 2012 yang diberikan pada dua tokoh lama, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang sebelumnya telah menyandang gelar pahlawan proklamator.

² <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Pahlawan&opsi=mulai-1>

Daftar Isi

Pengantar ~v

Daftar Isi ~ix

Abdoel Moeis ~1

Ki Hadjar Dewantara ~6

Raden Mas Soerjopranoto ~11

Mohammad Husni Thamrin ~14

Kyai Haji Samanhudi ~17

Hadji Oemar Said Tjokroaminoto
(HOS Cokroaminoto) ~20

Ernest Douwes Dekker [Danudirdja
Setiabudhi] ~23

Sisingamangaraja XII ~27

Sam Ratulangi ~30

dr. Soetomo ~33

Kyai Haji Ahmad Dahlan ~36

Haji Agus Salim ~40

Jenderal Gatot Subroto ~44

Sukarjo Wiryopranoto ~47

Ferdinand Lumbantobing ~50

Kiai Haji Zainul Arifin ~52

Tan Malaka ~55

Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J. ~59

Ir. Raden Juanda Kartawijaya ~63

dr. Saharjo S.H. ~66

Cut Nyak Dhien ~69

Cut Nyak Meutia ~72

Raden Ajeng Kartini ~75

dr. Tjipto Mangoenkoesoemo ~78

Kiai Haji Fakhruddin ~81

Kiai Haji Mas Mansoer ~85

Alimin ~89

dr. Moewardi ~92

Wahid Hasyim ~95

Sri Susuhunan Pakubuwana VI ~99

Kyai Haji Mohammad Hasyim

Asyari ~102

Raden Mas Tumenggung

Ario Suryo ~106

Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ~109

Prof. Dr. Soepomo ~112

Buku Pintar Super Lengkap Pahlawan Nasional

Dr. Kusumah Atmaja S.H. ~114	Maria Walanda Maramis ~177
Jenderal Ahmad Yani ~117	Supeno ~180
Letnan Jenderal Suprpto ~120	Sultan Ageng Tirtayasa ~183
Letnan Jenderal Haryono ~123	Wage Rudolf Supratman ~186
Letnan Jenderal Siswondo	Nyai Ahmad Dahlan ~189
Parman ~126	Kiai Haji Zainal Mustafa ~192
Mayor Jenderal Panjaitan ~129	Sultan Hasanuddin ~196
Mayor Jenderal Sutoyo	Kapitan Pattimura ~199
Siswomiharjo ~132	Pangeran Diponegoro ~203
Kapten Pierre Tendean ~134	Tuanku Imam Bonjol ~207
Karel Satsuit Tubun ~137	Teungku Cik di Tiro ~210
Brigadir Jenderal Katamso	Teuku Umar ~213
Darmokusumo ~139	Wahidin Sudirohusodo ~216
Kolonel Sugiono ~142	Oto Iskandar di Nata ~219
Sutan Syahrir ~146	Robert Wolter Monginsidi ~222
Laksamana Laut Martadinata ~149	Prof. Mohammad Yamin S.H. ~225
Dewi Sartika ~152	Yos Sudarso ~228
Wilhelmus Zakaria Johannes ~156	Prof. Dr. Suharso ~231
Pangeran Antasari ~159	Marsekal Muda Abdulrachman
Usman Janatin ~162	Saleh ~233
Kopral Harun bin Said [Tohir] ~165	Marsekal Muda Agustinus
Jenderal Basuki Rahmat ~169	Adisucipto ~236
Arie Frederik Lasut ~172	Teuku Nyak Arief ~239
Martha Christina Tiahahu ~175	Nyi Ageng Serang ~242

[x]

Hajjah Rangkayo Rasuna Said ~244	Syech Yusuf Tajul Khalwati ~315
Abdul Halim Perdanakusuma ~247	Siti Hartinah ~319
Marsekal Madya Iswahyudi ~250	Adam Malik ~322
I Gusti Ngurah Rai ~252	Tjilik Riwut ~326
Supriyadi ~255	La Madukelleng ~329
Sultan Agung Hanyokrokusumo ~258	Sultan Syarif Kasim II ~332
Untung Suropati ~261	H. Ilyas Yakoub ~334
Tengku Amir Hamzah ~264	Prof. Dr. Hazairin ~337
Sultan Thaha Sjaifuddin ~266	Abdul Kadir Raden Temenggung Setia Pahlawan ~340
Sultan Mahmud Badaruddin II ~269	Fatmawati ~343
Soekarno ~272	Ranggong Daeng Romo ~346
Drs. Mohammad Hatta ~278	Brigadir Jenderal Hasan Basry ~349
Suroso R.P ~281	Gusti Pangeran Harya Jatikusumo ~352
Radin Inten II ~283	Andi Jemma ~355
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I ~285	Pong Tiku ~358
Sri Sultan Hamengkubuwana IX ~289	Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri ~361
Sultan Iskandar Muda ~293	Nani Wartabone ~365
I Gusti Ketut Jelantik ~297	Maskoen Soemadiredja ~368
Frans Kaisiepo ~300	Andi Mappanyukki ~371
Silas Papare ~303	Raja Ali Haji ~374
Marthen Indey ~306	Kiai Haji Ahmad Rifai ~377
Nuku Muhammad Amiruddin ~309	Gatot Mangkupraja ~381
Tuanku Tambusai ~311	Ismail Marzuki ~384

Buku Pintar Super Lengkap Pahlawan Nasional

Kiras Bangun [Garamata] ~387	Johannes Abraham Dimara ~456
Bagindo Azizchan ~391	Syafruddin Prawiranegara ~459
Andi Abdullah Bau Massepe ~394	Idham Chalid ~463
Teuku Mohammad Hasan ~397	Haji Abdul Malik Karim
Raden Mas Tirto Adhi Soerjo ~400	Amrullah ~466
Kiayi Haji Noer Alie ~402	Ki Sarmidi Mangunsarkoro ~470
Pajonga Daeng Ngalie ~406	I Gusti Ketut Pudja ~474
Opu Daeng Risadju ~409	Pakubuwana X ~478
Izaak Huru Doko ~413	Ignatius Joseph Kasimo
Sri Sultan Hamengku Buwana I ~416	Hendrowahyono ~481
Haji Andi Sultan Daeng Raja ~419	
Mayor Jenderal Adenan	Daftar Pustaka ~485
Kapau Gani ~422	
Ide Anak Agung Gde Agung ~424	
Mayor Jenderal TNI Prof. Dr.	
Moestopo ~427	
Slamet Riyadi ~429	
Muhammad Natsir ~432	
Kiai Haji Abdul Halim ~436	
Sutomo ~440	
Jahja Daniel Dharma ~444	
Herman Johannes ~447	
Achmad Subardjo ~450	
Johanes Leimena ~453	

Abdoel Moeis



Lahir: Sungai Puar Agam Sumatera Barat 3 Juli 1883|
Meninggal: Bandung Jawa Barat 17 Juni 1959| **Gelar:**
pahlawan kemerdekaan Indonesia| **Dasar penetapan:**
Keppres No. 218 Tahun 1959| **Tanggal penetapan:** 30
Agustus 1959

■ Dari seruan “Kemerdekaan Hindia” hingga novel Salah Asuhan

Tepat delapan hari setelah menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Neratja* Bandung, ia segera menulis tajam, “...*Perhimpoeanan-perhimpoeanan terseboet hanya satoe toejoeannja, jaitoe kemerdekaan Hindia*”. Seruan itu ditujukan bagi kaum pergerakan pribumi pada 16 Oktober 1917 tepat di hari pemilihan umum Volksraad Hindia Belanda. Abdoel Moeis memang tegas soal kemerdekaan bangsa pribumi Hindia [Indonesia]. Berkali-kali ia menyerukan slogan “Hindia boeat anak Hindia”. Seruan itu lantang menuntut kemerdekaan, satu hal yang dilarang pemerintah kolonial masa itu. Abdoel Moeis memang politikus kritis pada masanya, sekaligus

sastrawan hebat yang melahirkan novel *Salah Asuhan* yang terbit pada 1928 dan dianggap sebagai sastra Indonesia modern terbaik sepanjang masa.

Abdoel Moeis yang berasal dari lereng gunung Marapi yang subur serta wilayah penghasil logam dan tekstil, merupakan seorang Minangkabau, putra Datuk Tumangguang Sutan Sulaiman, seorang demang yang keras menentang kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Selesai sekolah ELS [*Europeesche Lagere School*] dan HBS [*Hogere Burger School*], Abdoel Moeis melanjutkan pendidikannya ke Stovia [*School tot Opleiding van Indische Artsen*] di Batavia meski tidak sampai lulus. Akan tetapi, kemampuan Abdul Muis dalam bahasa Belanda yang melebihi orang Belanda membuat Mr. Abendanon, Directeur Onderwzjs [Direktur Pendidikan] mengangkatnya sebagai seorang *klerk* [juru tulis]. Jadilah Moeis seorang pegawai negeri kolonial meski hanya bertahan selama dua tahun [1903-1905].

Di Bandung, selepas memutuskan berhenti jadi pegawai kolonial, Moeis jadi wartawan dan langsung bergabung dengan majalah *Bintang Hindia* hingga tahun 1912, lalu sempat sebentar menjadi mantri lumbung, lalu bergabung dengan surat kabar Belanda *Preanger Bode* sebagai korektor, Hanya dalam tempo tiga bulan, ia diangkat menjadi *hoofdcorrector* [korektor kepala] karena kemampuan berbahasa Belandanya yang luar biasa.

Keresahan sebagai seorang pribumi yang merasakan ketidakadilan di bawah “kaki” kolonial, membuatnya terjun dalam bidang politik. Moeis lalu masuk organisasi SI [Sarekat Islam] pada 1913, sebelumnya nama Moeis naik daun saat artikel-artikelnya

yang mengecam pemerintah kolonial yang merendahkan kaum pribumi sering dimuat *De Express* milik IP [*Indische Partij*]. Moeis ikut mengurus surat kabar *Oetoesan Hindia* milik SI pada 1915 dan ikut pula mendirikan surat kabar harian *Kaoem Moeda* di Bandung. Pengalaman dalam media semakin banyak dan ia juga semakin kritis saat bergabung dalam surat kabar *Neratja*, ia semakin lantang menyerukan kemerdekaan bangsa pribumi. Moeis semakin radikal. Kepada anggota sarekat, ia selalu menanamkan semangat perjuangan melawan pemerintah kolonial. Ketika kongres Sarekat Islam diadakan pada 1916, ia menganjurkan agar Sarekat Islam (SI) bersiap-siap menempuh cara kekerasan menghadapi pemerintah apabila cara lunak tidak berhasil.

Abdoel Moeis juga ikut terlibat dalam *Komite Boemi Poetra* untuk mengadakan perlawanan terhadap maksud pemerintah kolonial yang akan mengadakan perayaan besar-besaran 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Prancis. Melalui komite ini juga, Moeis turut mendesak Ratu Belanda agar memberikan kebebasan bagi bangsa pribumi dalam berpolitik dan bernegara.

Pada 1917, Moeis dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam untuk pergi ke negeri Belanda mempropagandakan komite *Indie Weerbaar*. Dalam kunjungan itu, ia mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan THS [*Technische Hooge School*] di Priangan. Sekembalinya dari negeri Belanda, pada 1918, Abdoel Moeis ditunjuk sebagai anggota *Volksraad* mewakili Central Sarekat Islam.

Semangat perlawanannya tidak pernah padam. Pada 1919, Moeis pergi ke Sulawesi dan menggelar pidato menentang kerja rodi

pemerintah kolonial. Akibatnya kerusuhan terjadi, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli terbunuh. Abdoel Moeis dipersalahkan dan dihukum karena dianggap menghasut rakyat. Moeis tidak patah arang, selepas hukuman ia menjadi pemimpin Pengurus Besar Perkumpulan Buruh Pegadaian dan segera terlibat dalam aksi pemogokan kaum buruh di Yogyakarta pada 11 Januari 1922 yang membuat pemerintah kerepotan. Setahun kemudian, Abdoel Moeis berulah lagi. Ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah, memprotes aturan *landrentestelsel* [Undang-undang Pengawasan Tanah] yang memberatkan masyarakat Minangkabau.

Pemerintah kolonial akhirnya bertindak tegas. Abdoel Moeis segera ditangkap, dilarang untuk tinggal di Sumatera selamanya, lalu diasingkan ke Garut Jawa Barat, dan dilarang keras untuk terlibat urusan politik. Abdoel Moeis memang berhenti sejenak dari aktivitas politik. Kala itu, ia hanya menjadi petani dan menulis novel terkenalnya, *Salah Asuhan*. Akan tetapi, tidak menunggu waktu terlalu lama untuk Moeis terlibat lagi dalam perjuangan kaum pribumi. Pada 1926, ia menjadi anggota *Regentschapsraad* [dewan kota] Garut. Enam tahun kemudian diangkat menjadi *Regentschapsraad Controleur* hingga Jepang masuk ke Nusantara pada 1942. Selepas kemerdekaan tahun 1945, Abdoel Moeis masih aktif dalam politik dengan mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Akan tetapi, usia tua tidak mampu lagi menopang kegiatan Abdoel Moeis. Pada umur 75 tahun ia tutup usia dan dimakamkan di

taman makam pahlawan Cikutra Bandung. Tepat dua bulan selepas kematiannya, presiden Soekarno yang begitu mengagumi kiprah Abdoel Moeis yang tanpa henti hingga akhir hayatnya berjuang bagi kaum pribumi, memberinya gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Ki Hadjar Dewantara



Lahir: Yogyakarta 2 Mei 1889 | **meninggal:** Yogyakarta, 26 April 1959 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 305 Tahun 1959 | **tanggal penetapan:** 28 November 1959

■ “Seandainya Aku Seorang Belanda”

Di awal abad 14 Masehi, di negeri koloni Hindia Belanda, pemerintah sibuk menyiapkan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang jatuh pada 15 November 1913. Panitia telah dibentuk jauh-jauh hari untuk mempersiapkan kemeriahan dan orang-orang pribumi dilibatkan dalam persiapan ini. Lalu tiba-tiba pada 13 Juli 1913, seorang anak muda yang baru berumur 24 tahun menulis sindiran dalam surat kabar Bandung *De Express* berjudul “*Als ik een Nederlander was*” yang mengkritik soal perayaan itu. Pemerintah tersinggung dan *Raad van Indie* [dewan Hindia] segera bersidang pada akhir bulan serta mengeluarkan ancaman bahwa sang penulis bisa dikenai *delichtpers* dengan hukuman hingga 1 tahun penjara

atau denda hingga 500 Gulden. Sang pemuda tetap tak bergeming dan ia makin berani menantang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisannya.

Pemuda itulah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, keturunan Pakualam III. Suwardi memang tergolong pemberani. Mungkin ini hasil didikan ayahnya. Saat ia terjerat kasus di Bandung, pemerintah membujuk ayah Suwardi agar menasihati anaknya untuk tidak terlalu kritis terhadap pemerintah. Ayahnya, KPH Suryaningrat, memang segera menemui anaknya di Bandung, tapi bukan untuk menasihati melainkan berujar, "...seorang satria tidak akan menjilat ludahnya kembali". Jadilah Suwardi makin berani, ia segera menulis artikel garang bertajuk "*Een voor Allen maar Ook Allen voor Een*" pada 28 Juli 1913 dan membuat pemerintah marah. Tulisan itu dianggap agitatif. Tanpa waktu lama, pemerintah segera menangkap Suwardi lalu menjatuhkan hukuman buang ke pulau Bangka. Suwardi menolaknya dan meminta dibuang ke Belanda.

Suwardi memang punya bakat kritis dan makin terasah saat terlibat dalam perkumpulan *insulinde*. Ia juga makin mempunyai pengaruh saat mendirikan *Indische Partij* [IP] bersama dua kawan karibnya di Bandung. Jadilah nama Suwardi melambung sebagai bagian dari "*Janget Tinatelon*" [tiga serangkai] yang terkenal sangat kritis.

Awalnya Suwardi hanyalah pemuda yang studi di STOVIA. Ia ingin menjadi dokter bumi putra, tetapi ia tidak menamatkan studinya karena bea siswanya dicabut. Suwardi lalu bekerja di

laboratorium pabrik gula Kalibor, Banyumas, Jawa Tengah hingga pada 1911 Suwardi kembali ke Yogyakarta menjadi pembantu apoteker.

Dunia obat memang bukan hidupnya, Suwardi justru tertarik menjadi wartawan di pelbagai surat kabar seperti, *Sedyotomo*, *Midden Java*, *De Express*, *Oetoesan Hindia*, *Kaoem Moeda*, *Tjahaja Timoer* dan *Poesara*. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya. Dalam organisasi, sebelum terlibat *Insulinde*, Suwardi telah aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat pribumi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Indische Partij atau tepatnya *National Indische Partij* yang didirikan pada 25 Desember 1912 menjadi partai pelopor dalam menuntut kemerdekaan Hindia [Indonesia]. Partai ini segera tidak berdaya saat gubernur jenderal Idenburg menolaknya pada 11 Maret 1913. Sekian bulan setelahnya, tepatnya pada 6 September 1913, Suwardi yang ditemani istrinya beserta dua rekan karibnya dalam “tiga serangkai” berangkat menuju tanah pembuangan.

Di Belanda, Soewardi aktif dalam *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia). Ia ikut menyemarakkan majalah *Hindia Poetra* dan juga *Het Indonesisch Verbond van Student*. Bersama istrinya, ia juga mendirikan *Indonesisch Persbureau* yang bertujuan sebagai pusat propaganda perjuangan pergerakan nasional Hindia

[Indonesia]. Di samping itu, Suwardi juga menempuh pendidikan keguruan hingga memperoleh *Europeesche Akte*.

Pada Agustus 1917, pengasingan Suwardi sesungguhnya telah selesai, tapi karena Perang Dunia pertama masih berkecamuk hebat, ia belum bisa kembali ke Hindia Belanda. Baru Juli 1919, Suwardi bisa meninggalkan negeri Belanda. Segera setelah tiba di tanah air, Suwardi terlibat lagi dalam pergerakan. Kali ini ia berada di Semarang dan aktif menulis dalam *Persatoean Hindia* yang segera menggiringnya ke penjara hingga tahun 1921.

Setelahnya, ia kembali ke Yogyakarta dan mendirikan *Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa* pada 3 Juli 1922. Ia mendobrak sistem pendidikan barat dan pesantren dan mengajukan sistem pendidikan nasional. Ia juga segera mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan agar dekat dengan rakyat. Ia juga segera memberi semboyan sistem pendidikan dalam bahasa Jawa, **“ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”**. Slogan yang nantinya begitu terkenal. Taman Siswa maju pesat meski riak menghadangnya. Pada tahun 1932, muncul ordonansi sekolah liar yang membatasi gerak sekolah-sekolah pribumi sampai pada pendudukan Jepang, tepatnya pada 13 Maret 1944, Taman Siswa dibubarkan dan hanya diizinkan mengadakan sekolah kejuruan.

Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta berhenti, ia ikut terlibat dalam Putera [pusat Tenaga Rakyat] bentukan Jepang dan masih aktif dalam pendidikan hingga selepas kemerdekaan Indonesia

1945, ia diangkat menjadi menteri pendidikan Indonesia [menteri pengajaran Indonesia] pertama dan masih mengurus lembaga, Taman Siswa. Peran sentralnya dalam pendidikan Indonesia diakui hingga mendapat gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957. Dua tahun setelahnya, dalam usia 69 tahun, ia dipanggil sang Khalik dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, makam milik keluarga Taman Siswa. Karena jasanya yang begitu besar, Ki Hajar Dewantara digelari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Tujuh bulan selepas kepergiannya, presiden Soekarno segera memberi gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara.

Raden Mas Soerjopranoto



lahir: Yogyakarta 11 Januari 1871 | **meninggal:** Cimahi 15 Oktober 1959 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 310 Tahun 1959 | **tanggal penetapan:** 30 November 1959

■ “De stakings Koning”

Sekali waktu, keresahan melanda kaum buruh pabrik gula akibat kesewang-wenangan kumpulan tuan-tuan pabrik. Seorang ningrat Jogja segera bertindak. Pada 20 Agustus 1920, ia gerakkan serikat buruh pabrik gula dalam P.F.B. (*Personeel Fabrieks Bond*) untuk melakukan tindakan mogok kerja. Di selatan Yogyakarta, tepatnya pabrik gula Madu Kismo, gerakan mogok massal dilancarkan. Aksi meluas ke beberapa wilayah Hindia Belanda. Koran *De Express* segera mengangkat berita ini dan memberi julukan pada pelaku penggeraknya sebagai “*De stakings Koning*”, si raja Mogok.

Nama aslinya Raden Mas Soerjopranoto dengan nama kecil Iskandar. Ia memang tidak setenar adiknya, Ki Hajar Dewantara.

Akan tetapi, perjuangannya tidak kalah dengan sang adik. Masa kecil dan remajanya dihabiskan dengan sekolah. Ia masuk *Europeesche Lagere School* (ELS), lalu mengambil *Klein Ambtenaren Cursus* [Kursus Pegawai Rendah], setingkat dengan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* [MULO] dan berikutnya masuk ke *Middelbare Landbouw School* [MLS], Sekolah Pertanian di Buitenzorg [Bogor].

Di sanalah kemudian Soerjopranoto bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan. Pada 1908, ia pernah berembuk dengan para pelajar STOVIA di Batavia untuk membuat perhimpunan, tetapi gagal. Ajan tetapi, langkahnya tidak berhenti begitu saja. Saat ia memutuskan keluar dari dinas pertanian kolonial di Temanggung, ia segera bergabung dengan Boedi Oetomo, sebagai sekretaris cabang Yogyakarta. Soerjopranoto semakin bersemangat. Pada 1911, Soerjopranoto masuk Sarekat Islam dan segera menjadi orang penting. Soerjopranoto menjadi orang kedua dalam partai dan segera terlibat dengan gerakan buruh milik SI. Ia menjadi berani dengan gerakan pemogokan buruh sejak P.F.B. [Personeel Fabrieks Bond].

Pada 12 Februari 1912, ia terlibat dalam pendirian asuransi jiwa O.L.Mij [*Onderlonge Levensverzekering Maatschappij*] Bumi Putera yang diperuntukkan bagi kaum pribumi. Setelah itu bahkan Soerjopranoto menggagas sendiri *Arbeids leger* [barisan kerja] Adhi Dharma untuk membantu ekonomi kaum pribumi termasuk mendirikan sekolah rakyat pribumi.

Soerjopranoto terus bergerak melawan ketidakadilan pemerintah kolonial hingga tiga kali masuk penjara, pertama di

penjara Malang pada 1923 selama 3 bulan, kedua di Semarang pada 1926 selama 6 bulan, dan ketiga di Sukamiskin Bandung pada 1933 selama 16 bulan.

Soerjopranoto tidak pernah berhenti meski berkali-kali keluar masuk penjara. Pemerintah kolonial segera membujuknya. Ia ditawarkan menjadi anggota Volksraad, tetapi ditolaknyanya dan lebih memilih berada di jalan-jalan untuk menggerakkan aksi mogok, di tengah-tengah rakyat pribumi.

Sejak Jepang masuk, Soerjopranoto menjadi guru di Taman Siswa milik adiknya, meski juga masuk dalam keanggotaan *Cuo Sangi In* [dewan pertimbangan]. Selepas kemerdekaan, Soerjopranoto lebih memilih untuk mengurangi aktivitas politiknya dengan tetap mengajar di Taman Siswa. Hingga pada 15 Oktober 1959 tengah malam, ia meninggal dunia dalam usia 88 tahun. Jenazahnya segera dibawa pulang ke Yogyakarta dan dikebumikan di makam keluarga **“Rachmat Jati”** di Kota Gede. Satu bulan berikutnya, presiden Soekarno memberi gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada tokoh yang dijuluki orang Belanda sebagai *“de Javaanse Edelman met een ontembare wil”* ini. Seorang bangsawan Jawa dengan tekad yang tidak terjinakkan.

Mohammad Husni Thamrin



lahir: Batavia 16 Februari 1894 | **meninggal:** Batavia 11 Januari 1941 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 175 Tahun 1960 | **tanggal penetapan:** 28 Juli 1960

■ Pejuang dari Betawi

Pada 31 Agustus 1940, saat pemerintah kolonial merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina, seorang anggota Volkstraad tidak mengibarkan bendera merah putih biru Belanda di depan rumahnya. Ini tanda pembangkangan. Sekali waktu, saat Jepang mulai unjuk gigi di Asia Pasifik, ia juga mempelesetkan JINTAN, obat kumur Jepang, menjadi “Jenderal Japan Ini Nanti Toeloeng Anak Negeri”. Selain itu, tokoh Jepang Kobajashi dipanjangkan menjadi “Koloni Orang Belanda akan Japan Ambil Seantero Indonesia”. Pemerintah segera menganggapnya sangat berbahaya karena tidak setia dengan Belanda dan main mata dengan pihak Jepang.

Sang pembangkang itulah Mohammad Husni Thamrin. Ia tokoh Betawi kelahiran Sawah Besar anak seorang wedana bernama

Tabri Thamrin di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Wijck. Selepas Husni Tamrin menamatkan sekolah Koning Williem II, ia yang fasih bahasa Belanda bekerja di kantor kepatihan, kemudian di kantor Residen, dan akhirnya di perusahaan pelayaran *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* [KPM].

Ia lalu diangkat menjadi anggota Dewan Kota Batavia tahun 1919. Empat puluh tahun kemudian ia mendirikan Persatuan Kaum Betawi yang bertujuan memajukan pendidikan, perdagangan, kerajinan, dan kesehatan untuk penduduk Batavia.

Dalam Dewan Kota ia mempunyai pengaruh yang besar. Karena dianggap mampu, diangkat menjadi Wakil Wali Kota, tetapi hal itu tidak mencegahnya untuk mengancam tindakan Pemerintah Belanda yang menindas rakyat. Pada 1927, Thamrin diangkat menjadi anggota *Volksraad* dan kemudian membentuk Fraksi Nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam dewan. Ia juga segera mengadakan peninjauan ke Sumatera Timur untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita akibat adanya *poenale sanctie*.

Tindakan pengusaha perkebunan yang sewenang-wenang terhadap buruh, dibeberkan dalam pidatonya di *Volksraad*. Pidato itu berpengaruh di luar negeri. Di Amerika Serikat timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Deli. Akibatnya, *poenale sanctie* diperlunak dan akhirnya dihapuskan sama sekali.

Thamrin bergabung dengan **Partai Indonesia Raya** [Parindra] dan segera menjadi ketua selepas dr. Sutomo meninggal dunia

pada Mei 1938. Sementara itu perjuangan dalam Volksraad tetap dilanjutkan. Tahun 1939 ia mengajukan mosi agar istilah *Nederlands Indie*, *Nederland Indische* dan *Inlander* diganti dengan istilah Indonesia, Indonesisch, dan Indonesier. Mosi itu ditolak oleh Pemerintah Belanda walaupun mendapat dukungan sebagian besar anggota Volksraad.

Sejak itu, rasa tidak senangnya terhadap pemerintah jajahan semakin besar. Akibatnya, pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi tindak-tanduknya. Tanggal 6 Januari 1941 Muhammad Husni Thamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Itulah akhir dari kiprah Thamrin dalam ranah pergerakan. Penahanan rumah yang dikenakan terhadapnya membuatnya jatuh sakit.

Di rumahnya di jalan Sawah Besar No 32, Thamrin muntah-muntah dan demam karena gangguan ginjal, kecemasan dan malaria. Istrinya meminta polisi agar mengizinkan kunjungan dokternya. Akhirnya sang dokter datang, tetapi sudah terlambat, tanggal 10 Januari 1941, suhu badan Thamrin sangat tinggi dan ia hampir tidak bisa bicara. Dokter memberi suntikan untuk menurunkan panasnya, namun penyakitnya tidak tertolong lagi, esok subuh 11 Januari 1941, ia meninggal. Segera ia dimakamkan di Pekuburan Karet, Batavia. Di saat pemakamannya, lebih dari 20.000 orang mengantarnya. 19 tahun selepas kepergiannya, presiden Soekarno yang pernah diberi uang 50 Gulden saat di penjara di Bandung oleh Thamrin memberikan gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada pejuang dari Betawi itu.

Kyai Haji Samanhudi



lahir: Surakarta 1868 | **meninggal:** Klaten 28 Desember 1956 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 175 Tahun 1960 | **tanggal penetapan:** 28 Juli 1960

■ Pedagang Sekaligus Pejuang

Saat itu, Surakarta memang sedang resah akibat banyak Begal dan Kecu, kaum penjahat yang merugikan rakyat. Di Laweyan, tempat para saudagar batik pribumi bermukim tidak lepas dari rasa takut pada kegiatan kaum penjahat. Sekali waktu, Samanhudi mengumpulkan karibnya sesama pedagang pribumi dan mengusulkan kelompok ronda malam, *Rekso Roemekso*. Bertujuan menciptakan keamanan dari pencurian dan saling memberi pertolongan sesama pedagang batik Laweyan. Di titik awal itu juga para saudagar merasakan diskriminasi dalam berdagang, lalu kelompok ronda itu perlahan diubah Samanhudi menjadi **Serikat Dagang Islam** [SDI] yang bertujuan melindungi pedagang batik pribumi. Pada 11 November 1911, Serikat ini telah resmi menjadi

organisasi dan Samanhudi menjadi ketua pertamanya. Lalu siapa sangka bahwa Serikat ini berkembang luar biasa, berubah nama menjadi **Serikat Islam** [SI], dan menjadi organisasi masa pertama yang memainkan peran teramat penting dalam pergerakan nasional. Lalu, ketika kembali membicarakan awal berdirinya SI, orang pasti akan menyebut nama Samanhudi.

Samanhudi sering dikenal juga dengan nama Wiryowikoro. Akan tetapi, ia memiliki nama kecil Sudarno Nadi, pemberian kedua orang tuanya sejak lahir. Pendidikan formal yang ditempuhnya hanya Sekolah Dasar, itu pun tidak sampai tamat. Sesudahnya, ia belajar agama di Surabaya sambil berdagang batik. Setelah terjun dalam dunia perdagangan, Samanhudi merasa jiwa dagang semakin melekat pada dirinya. Wawasan dalam dunia dagang pun semakin luas, dan ia mulai melihat ada perlakuan berbeda terhadap pedagang pribumi yang beragama Islam. Sekitar tahun 1911 terdapat persaingan yang tidak sehat antara pedagang-pedagang di Hindia Belanda. Pedagang-pedagang pribumi banyak mendapat tekanan dari Pemerintah Belanda. Oleh karena itu, perdagangan bangsa Indonesia tidak dapat berkembang. Melihat keadaan ini, Samanhudi mengubah kelompok rondanya di Laweyan menjadi **Sarekat Dagang Islam** [SDI]. Organisasi itu bertujuan membela kepentingan pedagang-pedagang pribumi. Tirtoadisurjo membantu organisasi ini menjadi legal pada 11 November 1911.

Munculnya SDI mendapat sambutan yang luas. Dalam waktu singkat cabang-cabang SDI berdiri di luar kota Solo. Sesudah itu, SDI ditingkatkan menjadi partai politik. Pada 10 September 1912,

nama SDI diubah menjadi Serikat Islam (SI). Haji Samanhudi tetap duduk sebagai ketua kehormatan sampai tahun 1914. Sesudah itu, SI dipimpin oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, dan tumbuh menjadi partai massa. Sejak tahun 1920 Haji Samanhudi tidak aktif lagi dalam pergerakan. Kesehatannya sering terganggu, tetapi perhatian terhadap pergerakan nasional tidak padam. Lama namanya tidak terdengar.

Di kala kemerdekaan telah di depan mata dan tentara Belanda mengganggu republik Indonesia, ia kembali bergerak. Samanhudi mendirikan **Barisan Pemberontak Indonesia** di Surakarta dan **Gerakan Persatuan Pancasila**. Saat Belanda melancarkan Agresi militer kedua, Samanhudi membentuk laskar yang diberi nama **Gerakan Kesatuan Alap-alap**. Laskar itu ditugasi menyediakan perlengkapan terutama bahan makanan untuk kesatuan-kesatuan tentara yang sedang bertempur di garis depan. Banyak jasa yang diberikan selama berlangsungnya Agresi Militer II Belanda meski ia sudah tua.

Samanhudi meninggal pada usia 88 tahun di Klaten dan tubuhnya dimakamkan di Banaran, Grogol, Sukoharjo. Atas jasanya yang begitu besar dalam pergerakan nasional maka pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tahun 1961.

Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (HOS Cokroaminoto)



lahir: Madiun 16 Agustus 1882 | **meninggal:** Yogyakarta
17 Desember 1934 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan
Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 590 Tahun
1961 | **tanggal penetapan:** 9 November 1961

■ Raja Jawa tanpa Mahkota

Di paruh pertama abad ke 20, semua percaya bahwa ia tokoh besar. Ribuan orang akan berdesak-desakan menyaksikan ia naik podium. Ia jago berorasi, menyebar propaganda, membakar emosi massa. Ia mampu menghipnotis massa dengan suara baritonnya. Ribuan pengikutnya menganggap ia sang *Erukokro* [Ratu Adil] yang akan membebaskan penderitaan pribumi. Akan tetapi, ia menolak anggapan itu. ia merasa bukan Ratu Adil, hanya ia memang pemimpin yang berusaha membebaskan pribumi dari pengisapan kaum kolonial Belanda. Ia lantang bersuara, “*kita diberi makan bukan karena kita dibutuhkan susunya*”. Ia menganggap kolonial Belanda hanya menjadikan kaum pribumi sebagai sapi perahan. Ia lawan penindasan itu dengan menyadarkan ribuan rakyat. Begitu takutnya

hingga orang-orang kolonial menganggapnya sang “Raja Jawa” meski tidak memakai mahkota layaknya sunan atau sultan *vorstenlanden*.

Cokroaminoto yang lahir di desa Bakur sewaktu kecil terkenal nakal dan suka berkelahi. Sering kali ia berpindah-pindah sekolah, namun pada 1902, ia berhasil menamatkan OSVIA [Sekolah Pamongpraja] di Magelang. Setelah bekerja selama tiga tahun sebagai juru tulis di Ngawi, ia pindah ke Surabaya dan bekerja pada perusahaan dagang. Di kota itu, ia memasuki Serikat Dagang Islam (SDI). Atas sarannya, pada 10 September 1912 secara resmi nama SDI diubah menjadi Serikat Islam [SI]. Cokroaminoto diangkat menjadi komisaris SI dan kemudian menjadi ketua pada 1915. Di bawah pimpinannya, SI berkembang dengan pesat dan tumbuh menjadi partai massa sehingga mencemaskan pemerintah Belanda.

Sebagai wakil SI dalam Volksraad, pada 25 Nopember 1918, ia mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Cokroaminoto. Melalui mosi itu Pemerintah Belanda dituntut supaya membentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih dari rakyat dan oleh rakyat. Dituntut pula supaya pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen.

Cokroaminoto mengecam pengambilan tanah untuk dijadikan perkebunan milik orang-orang Eropa. Ia mendesak Sumatera *Landsyndicaat* supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung [tepi Danau Ranau, Sumatera Selatan]. Dituntutnya pula supaya kedudukan dokter-dokter pribumi disamakan dengan dokter-dokter Belanda. Pada 1920, dengan tuduhan menyiapkan pemberontakan untuk menggulingkan Pemerintah Belanda, ia

dimasukkan ke penjara. Selepas bebas, ia diminta lagi untuk duduk dalam Volksraad. Permintaan itu ditolaknya, sebab ia tidak mau lagi bekerjasama dengan Pemerintah Belanda.

Cokroaminoto tidak hanya bergiat dibidang politik, ia banyak pula menulis artikel di pelbagai surat kabar. Tulisan-tulisannya sering dimuat Oetoesan Hindia, Fadjar Asia, dan Bendera Islam. tetapi tak lama ia mengelola Koran Bendera Islam, Cokroaminoto mengembuskan napas pungkasanya pada umur 52 tahun. Jenazahnya segera dimakamkan di pemakaman Pakuncen Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam bidang pergerakan nasional, Cokroaminoto dijadikan Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1961.

Ernest Douwes Dekker [Danudirdja Setiabudhi]



Lahir: Pasuruan 8 Oktober 1879 | **meninggal:** Bandung 28 Agustus 1950 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 590 Tahun 1961 | **tanggal penetapan:** 9 November 1961

■ Ik ben Indonesier, Aku Bangsa Indonesia!

Ia seorang Indo, seorang peranakan Belanda. Akan tetapi, ia mendukung penuh perjuangan kaum bumi putra untuk kemerdekaan. Ia selalu meneriakkan kata merdeka padahal darahnya mengandung darah Belanda, darah penjajah. Itulah kenapa ia dimaki sebagai pengkhianat, si pembuat onar oleh kaum kolonial. Tapi bagi kaum pergerakan, ia adalah pejuang sejati. Dalam tulisannya, ia tanpa lelah selalu menyerukan, “*Indie los van Hollad*”, Indonesia bebas dari Belanda. Dan kepada sesama kaum pergerakan ia selalu menyeru, “*Kameraden, stokt de vuren!*”, nyalakan Api, Kawan-kawan!. Ia tanpa henti selalu mengajak rakyat melawan pemerintah kolonial.

Nama lengkapnya Ernest Eugene Francois Douwes Dekker dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Eduard Douwes Dekker, si Multatuli yang menulis novel terkenal, *Max Havelaar*. Mungkin nama marga Douwes Dekker memang terlahir sebagai pembela kaum pribumi Hindia. Ia anak seorang pengusaha yang mampu menjamin hidupnya. Sejak kecil, Nes—sapaan Douwes Dekker, sekolah HBS di Surabaya. Ia lalu pindah ke Gymnasium Willem III, suatu sekolah elit di Batavia. Selepas lulus, Nes bekerja di perkebunan kopi “Soember Doeren” di Malang Jawa Timur lalu berganti di perkebunan tebu di Kraksaan sebagai laboran. Ia tidak betah bekerja karena selalu konflik dengan petinggi perkebunan, konflik terjadi karena Nes membela kaum buruh pribumi.

Sesudah itu, beberapa tahun lamanya ia mengembara di luar negeri. Sebagai sukarelawan, ia turut dalam Perang Boer melawan Inggris di Afrika Selatan pada 1899. Ia ditawan Inggris dan di penjarakan di Sri Lanka. Setelah bebas, ia kembali ke Hindia [Indonesia], lalu menjadi wartawan di *De Locomotief* dan menjadi staf redaksi *Bataviaasch Nieuwsblad*. Rumahnya menjadi tempat berkumpul kaum pergerakan dan segera mendirikan harian *De Express* yang banyak memuat karangan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia.

Pada tahun 1912, ia ikut mendirikan *Indische Partij* (IP), partai politik pertama yang lahir di Indonesia. Douwes Dekker yakin bahwa penjajahan dapat ditumbangkan dengan adanya aksi bersama antara semua golongan dalam masyarakat. Golongan Indo dianjurkannya

agar bersatu dengan pribumi dan menganggap Hindia [Indonesia] sebagai tanah air mereka.

Kegiatan dalam Komite Bumi putera menyebabkan ia berhadapan dengan pengadilan kolonial dan dibuang ke Belanda pada 1913. Komite itu dibentuk untuk menentang maksud Pemerintah Belanda merayakan peringatan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Selama dibuang, Nes pergi ke Swiss untuk memperdalam ilmunya. Dikala kuliah di Universitas Zurich, Swiss, ia mendaftarkan diri sebagai orang Hindia [Indonesia], suku Jawa.

Setelah lima tahun berada dalam pembuangan, ia kembali ke Hindia [Indonesia] dan melanjutkan perjuangan di bidang pendidikan dengan mendirikan perguruan Kesatria Institut. Di perguruan ini terhadap anak didik ditanamkan rasa kebangsaan. Saat kecamuk perang dunia kedua dan saat Jepang berancang-ancang masuk Hindia, Nes ditangkap lagi karena dituduh pro Jepang. Ia dibuang ke Suriname. Nes baru bisa bebas pada 1946 dan melalui petualangan yang panjang akhirnya bisa tiba di Yogyakarta pada 2 Januari 1947. Di ibu kota, ia disambut hangat pemimpin negara di Gedung Agung. Mereka memeluknya seraya mengucap, “selamat datang Nes”.

Nes segera berganti nama pribumi, Danudirdja Setiabudhi, atas pemberian Soekarno. Ia menjabat menteri negara tanpa portofolio yang hanya bekerja dalam waktu 9 bulan. Selanjutnya berturut-turut ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda, anggota DPA,

pengajar di Akademi Ilmu Politik, dan terakhir sebagai kepala seksi penulisan sejarah (historiografi) di bawah Kementerian Penerangan. Pada *class* kedua, ia dididuk tentara Belanda pada 21 Desember 1948 di rumahnya di Kaliurang. Setelah interogasi, Nes dikirim ke Jakarta untuk ditahan. Nes segera dibebaskan karena kondisi fisiknya yang telah tua. Ia lalu dibawa ke Bandung atas permintaannya dan tinggal di jalan Lembang. Di Bandung, ia kembali beraktivitas di Kesatria Institut. Nes wafat dini hari dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di TMP Cikutra Bandung. Atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia memberi gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia kepada Douwes Dekker pada 1961.

Sisingamangaraja XII



lahir: Bakara 18 Februari 1845 | **meninggal:** Dairi 17 Juni 1907 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 590 Tahun 1961 | **tanggal penetapan:** 9 November 1961

■ Raja Tapanuli Melawan Kompeni

Pantuan Bosar Ompu Pulo Batu atau lebih dikenal dengan nama Sisingamangaraja XII didapuk menjadi raja pada 1867 menggantikan ayahnya yang meninggal akibat penyakit kolera. Di masa pemerintahannya, Pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli. Hal tersebut langsung direspons oleh Sisingamangaraja XII dengan mengumpulkan raja-raja sekitar Tapanuli. Selain itu, para panglima dari daerah Humbang, Toba, Samosir, dan Pakpak juga diajaknya bersatu guna melawan penjajah.

Belanda beberapa kali melobi Sisingamangaraja XII agar diperkenankan masuk ke wilayah Tapanuli. Namun hasilnya nihil, Sisingamangaraja XII mengetahui sebenarnya tujuan Belanda dan membuat situasi semakin memanas. Pada 19 Februari 1878 bentrok terjadi antara dua belah pihak. Pasukan Sisingamangaraja XII beserta rakyat Tapanuli menyerbu pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung. Pertempuran tersebut menewaskan banyak penduduk. Pasukan Sisingamangaraja terdesak dan mundur ke desa Butar. Pihak Belanda tidak tinggal diam, paska kemenangan di Bahal Batu mereka terus merangsek masuk desa mengejar. Pasukan Tapanuli terpaksa terus mundur ke Lobu Siregar, kemudian Tangga Batu, hingga Balige. Di desa terakhir ini Sisingamangaraja kembali menyusun kekuatan, Balige dijadikan basis pasukan. Di tengah pengejaran, Belanda sering kali membakar setiap desa dilampauinya. Hal tersebut dikarenakan rakyat beserta para pemimpin desa melakukan perlawanan. Pengejaran pasukan Belanda sampai ke Balige. Dan pertempuran Dahsyat kembali terjadi di Balige. Dalam pertempuran itu Sisingamangaraja XII terkena tembakan di bagian atas lengan. Lagi-lagi ia dan pasukannya harus mundur karena Belanda berhasil menguasai Balige.

Sisingamangaraja kemudian menerapkan taktik gerilya, berpindah dari Balige ke Bakkara kemudian ke Huta Paung di Dolok Sanggul, lalu Lintong. Kadang kembali lagi ke Bakkara atau ke Lintong. Gerilya pasukan Sisingamangaraja menyulitkan pihak Belanda. Hingga pada 1989 Belanda mengetahui pasukan Sisingamangaraja XII menyingkir ke Lintong untuk kali kedua. Informasi tersebut tidak disia-siakan, Belanda pun segera melancarkan

serangan dadakan dengan alat modern. Mendapat serangan tersebut, pasukan Sisingamangaraja kembali harus menyingkir, mereka lalu bertahan di Dairi.

Paska bentrok di Lintong, hampir selama 21 tahun tidak ada serangan terbuka terhadap pasukan Belanda. Namun, di kurun waktu itu, Sisingamangaraja berusaha menjalin sekutu dengan cara melakukan kunjungan ke berbagai daerah, hingga sampai ke Aceh. Ia juga menyambangi raja-raja kampung (huta) di Tapanuli. Hal tersebut dilakukan supaya para raja tetap memiliki semangat melawan Belanda. Akibatnya, perlawanan oleh raja-raja terhadap Belanda pun kerap terjadi. Pihak Belanda meyakini, bahwa perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja kampung tersebut karena pengaruh Sisingamangaraja XII.

Pihak penjajah Belanda kemudian berupaya melakukan diplomasi dengan menawarkan penobatan Sisingamangaraja sebagai Sultan Batak. Tawaran tersebut ditolak, Pemerintah Hindia Belanda menjadi kesal lalu mengeluarkan perintah untuk menangkap mati atau hidup Sisingamangaraja XII. Dairi dikepung hampir selama tiga tahun oleh pasukan Marsose Belanda di bawah komando Hans Christoffel. Pada 17 Juni 1907, serangan dilakukan hingga menewaskan Sisingamangaraja XII. Keris Gaja Dompok—pusaka Sisingamangaraja—disita dan dibawa ke Batavia, sedang pengikut beserta kerabatnya kemudian ditawan Pemerintah kolonial.

Sam Ratulangi



lahir: Tondano 5 November 1890 | **meninggal:** Jakarta 30 Juni 1949 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 590 Tahun 1961 | **tanggal penetapan:** 9 November 1961

■ Si Cerdas dari Tondano

Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara, tanggal 5 Nopember 1890. Setelah menamatkan *Hoofden School* (Sekolah Raja) di Tondano, ia melanjutkan pelajaran ke Sekolah Teknik di Jakarta. Pada tahun 1915 ia berhasil memperoleh ijazah guru ilmu pasti untuk Sekolah Menengah di negeri Belanda. Empat tahun kemudian, ia meraih gelar doktor Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Swiss. Sam Ratulangi sudah menonjol saat belajar di Eropa, saat di negeri Belanda ia menjadi ketua *Indische Vereniging* kemudian berganti nama menjadi *Perhimpunan Indonesia*, sebuah organisasi pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda, sedangkan waktu di Swiss, ia menjadi ketua organisasi pelajar-pelajar Asia.

Berikut karier Sam Ratulangi sekembalinya dari Eropa. Pertama-tama ia mengajar ilmu pasti di AMS (setingkat Sekolah Menengah Umum) Yogyakarta. Ketika bertugas di Bandung, ia mendirikan Maskapai Asuransi Indonesia. Dari tahun 1924 sampai 1927, ia menjadi Sekretaris Dewan Minahasa di Manado, jabatan tersebut dipergunakannya untuk melakukan usaha yang bermanfaat bagi rakyat, seperti pembukaan daerah baru untuk pertanian, mendirikan yayasan dana belajar, dan lain-lain. Berkat perjuangannya pula, Pemerintah Belanda menghapuskan kerja paksa di Minahasa.

Pada tahun 1927 Ratulangi diangkat menjadi anggota Volksraad. Ia mengajukan tuntutan supaya Pemerintah Belanda menghapuskan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan antara orang-orang Belanda dan pribumi. Kegiatan lain adalah turut mendirikan *Vereniging Indonesische Academici* (Persatuan Kaum Sarjana Indonesia) dan ikut andil dalam penerbitan majalah mingguan *Peninjauan*. Dari tahun 1938 sampai 1942, ia menjadi redaksi mingguan politik *Nationale Commentaren*.

Pada masa pendudukan Jepang Ratulangi diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesudah NKRI terbentuk, ia diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Namun, saat itu Sulawesi sudah diduduki oleh NICA - Belanda. Ia ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Serui, Irian Jaya. Dalam pembuangan ini ia bertemu dengan pejuang muda bernama Silas Papare. Sesudah dibebaskan, Sam Ratulangi kembali ke Jawa. Dalam Agresi Militer II Belanda, ia ditangkap kembali dan meninggal dalam status tawanan pada 30 Juni 1949 di Jakarta. Sempat dimakamkan di Ibu kota,

jasadnya kemudian dipindahkan ke Tondano, tanah kelahirannya. Sam Ratulangi dijadikan Pahlawan Nasional pada tanggal 9 Nopember 1961.

dr. Soetomo



lahir: Nganjuk 30 Juli 1888 | **meninggal:** Surabaya 30 Mei 1938 | **gelar:** pahlawan kemerdekaan Indonesia | **dasar penetapan:** Keppres No. 657 Tahun 1961 | **tanggal penetapan:** 27 Desember 1961

■ Sang Dokter pendiri Boedi Oetomo

Karena pengaruh seniornya, seorang pemuda 20 tahun yang telah 5 tahun studi di STOVIA [*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*] menjadi gusar. Di hari minggu jam 09.00 pagi, ia kumpulkan beberapa pelajar di ruang kelas sekolahnya. Dengan sungguh-sungguh ia jelaskan bahwa pemuda punya peran penting bagi masa depan bangsa pribumi Hindia, lalu dengan serius ia usulkan untuk membentuk sebuah organisasi. Para pelajar yang ikut dalam pertemuan itu khidmat mendengarkan. Setelahnya, terbentuklah Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dan pemuda yang mencetuskannya itu adalah Soetomo.

Calon dokter pribumi yang lahir di desa Ngepeh ini terlahir dengan nama Soebroto. Masa kecilnya berada di Nganjuk. Saat ia sekolah di Bangil, ia mengganti namanya menjadi Soetomo dan berada di bawah asuhan kakek dan neneknya. Kemudian, Wedono Ngepeh R Soewadji, ayah Soetomo, mengirim anaknya menuju Batavia untuk sekolah di STOVIA pada 10 Januari 1903.

Boedi Oetomo yang didirikan Soetomo segera berkembang pesat. Organisasi ini kemudian memiliki tujuh cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Kongres pertama segera digelar di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Kepemimpinan segera dipegang oleh kaum aristokrat Jawa, kaum tua yang berpengalaman. Soetomo untuk sementara serius menyelesaikan pendidikan kedokterannya.

Pada 1911, Soetomo lulus dari STOVIA lalu segera bertugas sebagai dokter di Semarang. Ia segera pindah ke Tuban pada 1912 dan pindah lagi ke Lubuk Pakam [Sumatra Timur]. Ia ditarik lagi ke Jawa dan bertugas di Malang pada 1914. Saat bertugas di Malang, ia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan pada 1916. Ia banyak memperoleh pengalaman dari seringnya berpindah tempat tugas. Antara lain, ia semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Pada 1917, ia menuju ke Blora dan segera menikahi seorang noni Belanda, Everdina. Tidak lama setelahnya, ia bertugas di Baturaja. Hingga pada 1919, ia mendapat beasiswa untuk belajar di universitas Amsterdam Belanda. Tahun 1920, Soetomo berhasil lulus dengan baik dan kembali pulang ke Hindia.

Selain, berurusan dengan dunia penyembuhan yang sangat berarti bagi kaum “kromo” pribumi, Soetomo juga aktif dalam dunia pers pergerakan. Saat di Boedi Oetomo, ia ikut menerbitkan majalah *Goeroe Desa* dan juga surat kabar *Boedi Oetomo* yang terbit di Yogyakarta dan Bandung. Selepas ia kembali dari negeri Belanda, Soetomo juga mendirikan *Indonesische Studie Club* [ISC] di Surabaya pada 27 Juli 1924 dan dua tahun berikutnya segera menerbitkan surat kabar *Soeloeh Indonesia*. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, hingga koperasi. Pada 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia [PBI]. Di bawah pimpinan Soetomo, PBI berkembang pesat. Lalu pada Januari 1934, dibentuk Komisi Boedi Oetomo dengan PBI yang akhirnya membetuk fusi pada pertengahan 1935. Kongres peresmian fusi merupakan kongres terakhir Boedi Oetomo dan segera melahirkan Partai Indonesia Raya [Parindra]. Rapat perdana yang berlangsung pada 24-26 Desember 1935 segera mengangkat Sutomo sebagai ketua. Soetomo bersama Parindra berjuang untuk mencapai Hindia [Indonesia] merdeka.

Soetomo terus menggerakkan Parindra demi cita-cita kemerdekaan hingga tanpa tersadari, tiga tahun setelah membentuk partai politik itu, ia jatuh sakit. Saat itu, Soetomo berada di Surabaya. Dalam usia yang belum senja, Soetomo menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dan dikuburkan di Surabaya dalam usia 49 tahun. Soetomo, seorang dokter Jawa, memiliki jasa besar bagi Hindia [Indonesia]. Hari lahir Boedi Oetomo, organisasi yang didirikan Soetomo, dikenang sebagai hari kebangkitan nasional. Dan selang 23 tahun selepas kepergiannya, presiden Soekarno memberi gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia kepada dokter Soetomo.

Kyai Haji Ahmad Dahlan



Lahir: Yogyakarta 1 Agustus 1868 | *meninggal:* Yogyakarta 23 Februari 1923 | *gelar:* pahlawan kemerdekaan Indonesia | *dasar penetapan:* Keppres No. 657 Tahun 1961 | *tanggal penetapan:* 27 Desember 1961

■ Sang Pembaharu

Awalnya, apa yang dilakukan Ahmad Dahlan mendapat tantangan dari masyarakat. Saat membetulkan arah kiblat di masjid-masjid Yogyakarta, masyarakat menjadi gempar dan marah. Di masjid Gede Yogyakarta ia membuat garis-garis saf menurut yang semestinya. Garis saf itu dihapus orang dan surau miliknya dibongkar, dihancurkan. Kala dakwah di Banyuwangi, ia diancam akan dibunuh, dituduh kyai palsu karena berani mengajarkan pengetahuan umum di sekolah agama. Namun, lama kelamaan, masyarakat menerima perubahan yang dijalankannya. Sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu banyak didirikan. Semua itu adalah hasil pembaharuannya melalui Muhammadiyah.

Ahmad Dahlan bernama kecil Muhammad Darwis. Ia putra keempat dari tujuh bersaudara keluarga K.H. Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Gede Kesultanan Yogyakarta. Ibu Darwis merupakan keturunan H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu ada yang meyakini bahwa Darwis termasuk keturunan kedua belas dari Sunan Gresik [Maulana Malik Ibrahim], salah seorang Walisongo terkemuka yang menyebarkan Islam di Jawa [Timur].

Dalam usia muda, 15 tahun, ia telah pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Darwis pada masa ini mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam di Mekah. Setelah dirasa cukup, ia kembali pulang ke kampung Kauman pada 1888, lalu ia berganti nama Ahmad Dahlan. Ia kembali ke Mekah pada 1903 dan menetap di sana selama dua tahun dan menjadi murid ulama besar Syeh Ahmad Khatib yang menjadi imam di Masjidil Haram. Ia kembali mendalami cita-cita pembaharuan Islam.

Ahmad Dahlan segera kembali lagi ke Yogyakarta dan berusaha memperbaiki keadaan umat Islam yang dirasanya mengalami kemunduran. Untuk memajukan umat harus dilakukan pembaharuan di bidang praktik keagamaan, dan pembaharuan itu harus dimulai dengan cara mengadakan perbaikan di bidang kemasyarakatan. Atas keyakinan ini, pada 18 November 1912, ia mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Dahlan berusaha memajukan pendidikan Islam dan membangun masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan dakwah ditingkatkan, pelajaran agama

diberikan di sekolah-sekolah umum. Sebaliknya, di sekolah-sekolah agama diajarkan juga pengetahuan umum yang sebelumnya dilarang. Kegiatan ini awalnya menimbulkan keresahan kaum Islam konservatif. Mereka terkejut saat Dahlan mengajar pendidikan agama Islam di OSVIA Magelang, sekolah pamong milik Belanda, sesuatu yang tidak lazim kala itu. Bahkan Dahlan juga sering bertemu dengan Romo van Lith. Dahlan tidak ragu masuk gereja dengan pakaian kyai lalu bertemu sang romo.

Muhammadiyah berkembang pesat. Cabangnya telah ada diluar Yogyakarta bahkan hingga ke Ujung Pandang, meski dengan nama berbeda-beda, karena izin Muhammadiyah hanya untuk wilayah Yogyakarta pada 1914. Pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan ini membuat Dahlan mendirikan Aisyiah pada 1918 untuk memajukan kaum perempuan. Di tahun yang sama, Dahlan juga membuka gerakan kepanduan Hisbul Wathan untuk kaum muda.

Barulah pada 2 September 1921, Muhammadiyah mendapat izin untuk membuka cabang diberbagai daerah di Hindia Belanda dengan nama sama, Muhammadiyah. Kegiatan Dahlan semakin padat. Ia terus aktif berdakwah, memberikan pemahaman baru, pembaharuan yang diharapkannya akan mengubah nasib umat, terutama kaum muslimin, di seluruh Nusantara. Dua tahun selepas Muhammadiyah yang didirikannya resmi membuka cabang di daerah-daerah lain di luar Yogyakarta, Ahmad Dahlan meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman Karangajen Yogyakarta.

Atas jasa-jasanya, terutama dalam memajukan umat dan memerhatikan emansipasi kaum perempuan pribumi [Indonesia], pemerintah Indonesia mengangkat Ahmad Dahlan menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada 1961.

Haji Agus Salim



Lahir: Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884| **meninggal:** Jakarta 4 November 1954| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional|**dasar penetapan:** Keppres No. 657 Tahun 1961| **tanggal penetapan:** 27 Desember 1961

■ Sang Pembela Kebenaran

Orang cerdas yang begitu benci kolonialisme ini bernama kecil Masyhudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Terbukti bahwa nantinya sang pembawa nama ini benar-benar selalu membela kebenaran. Kebenaran bagi bangsanya. Salim merupakan anak seorang bangsawan bernama Tuanku Imam Syech Abdullah bin Abdul Aziz dan ibunya bernama Zainatun Nahar. Pendidikan dasarnya ditempuh di *Europeesche Lagere School* [ELS], sekolah khusus anak-anak Eropa di kota kelahirannya. Setelah lulus, Salim merantau ke Batavia dan masuk HBS.

Pada 1903, diakhir tahun pendidikan, semua murid HBS sibuk menanti pengumuman kelulusan, terutama murid-murid

Belanda. Sekolah elit ini memang dikhususkan untuk kaum Belanda dan segelintir pribumi anak priyayi. Bahasa pengantarnya bahasa Belanda, maka wajar jika murid-murid Belanda menjadi yang terdepan di sekolah ini. Akan tetapi, di tahun itu, semua berubah. Semua tercengang saat mengetahui hasil kelulusan. Siapa yang paling tinggi nilainya? siapa yang juara? orang-orang Belanda kaget luar biasa saat tahu bahwa anak bernama Agus Salim menjadi juara umum HBS se-Hindia Belanda. Seorang inlander menjadi yang terbaik mengalahkan kaum kulit putih Belanda. Akan tetapi, diskriminasi terjadi, ia tidak langsung dapat beasiswa untuk sekolah lebih tinggi lagi. Saat pemerintah kolonial memberi beasiswa karena desakan banyak pihak, Agus Salim menolaknya. Ia terlanjur sakit hati. Tumbuhlah sikap melawan pada kolonial Belanda.

Salim konsisten melawan sistem kolonial. Dalam dekade 1920-an, saat ia telah duduk sebagai anggota *volksraad*, ia melawan. Tentu dengan gaya elegan. Satu kali, ia berpidato dalam *volksraad*. Lazimnya pidato dalam dewan, tentu dengan bahasa Belanda. Walaupun begitu, Salim mengagetkan anggota dewan dari kalangan Belanda saat ia dengan sadar memilih pidato dengan bahasa Melayu [Indonesia]. Ia ditegur, tetapi ia dengan cerdas berdalih bahwa tidak ada peraturan resmi yang mengatur ia harus berbahasa Belanda saat pidato. Saat ia mengucapkan kata “ekonomi”, seorang Belanda bernama *Bergmeyer* mengejeknya, “*apa kata ekonomi dalam bahasa Melayu?*” tentu semua tahu bahwa tidak ada padanan katanya dalam Melayu. Akan tetapi, Salim tidak hilang akal. Dengan senyum ia balik bertanya, “*coba tuan sebutkan apa kata ekonomi dalam bahasa Belanda, nanti saya sebutkan Melayu [Indonesia]nya*”. *Bergmeyer* terdiam. Ia mati kutu

karena kelihaiian Salim. Itulah gaya Salim menantang kolonialisme. Bahkan pada 2 Oktober 1945, saat juru warta BBC Richard Straub mewawancarainya, Salim yang saat itu berumur 60 tahun, berujar sangat geram: “*daripada Indonesia diberikan pada Belanda lebih baik saya bakar musnah pulau ini!*”.

Salim memang murid cerdas, ia belajar otodidak hingga mampu menguasai sembilan bahasa asing, bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki dan Jepang. Hal itu memungkinkannya membaca bermacam-macam buku ilmu pengetahuan. Mula-mula Agus Salim bekerja sebagai penerjemah, kemudian sebagai notaris. Dari tahun 1906 sampai 1911, ia bekerja pada konsulat Belanda di Jedah. Kesempatan itu dipakainya untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam, sambil mempelajari seluk beluk diplomasi. Kegiatan politik dimulainya setelah memasuki Serikat Islam [SI] dan diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat hingga mengantarkannya menjadi anggota *Volksraad* [1921-1924]. Pada 1929, Serikat Islam berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Setelah Cokroaminoto meninggal pada tahun 1934, Haji Agus Salim diangkat menjadi ketua PSII. Selain aktif di bidang politik, ia aktif pula di bidang kewartawanan dan memimpin beberapa surat kabar, seperti *Neratja*, *Hindia Baroe*, *Bandera Islam*, *Fadjar Asia*, dan *Mustika*.

Dikala Jepang masuk, Agus Salim duduk sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI]. Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Karena memiliki pengetahuan yang luas dibidang diplomasi.

Pemerintah RI mengangkatnya menjadi Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I 1946 dan Kabinet Syahrir II 1947 dan kemudian Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta 1948-1949. Saat agresi militer Belanda kedua, Salim ikut ditangkap dan diasingkan ke Bangka.

Sesudah pengakuan kedaulatan, Agus Salim tidak duduk lagi dalam pemerintahan. Pada 1953, ia sempat memberi ceramah tentang Islam di *Universitas Cornell dan Princeton* Amerika. Di Walaupun begitu, ia tetap diperlukan oleh pemerintah sehingga di tunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri hingga akhir hayatnya pada 1954. Jenazah Agus Salim dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1961.

Jenderal Gatot Subroto



Lahir: Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907|
meninggal: Jakarta 11 Juni 1962| **gelar:** Pahlawan
Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No.
222 Tahun 1962| *tanggal penetapan:* 18 Juni 1962

■ Dari Sersan hingga Jenderal

Ia menempuh dua kali pendidikan militer di masa yang berbeda. Ia menjadi KNIL di masa Hindia Belanda dan masuk PETA di masa Jepang. Demi militer, ia mencurahkan perhatian sepenuhnya. Ia pun menggagas terbentuknya sekolah militer gabungan seluruh angkatan, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [AKABRI].

Gatot Subroto mula-mula sekolah di *Europeesche Lagere School* [ELS], tetapi dikeluarkan sebab berkelahi dengan seorang anak Belanda. Oleh karena itu, ia masuk ke *Holands Inlandse School* [HIS]. Setelah tamat, ia tidak meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, tetapi bekerja sebagai pegawai. Ternyata hal itu tidak cocok dengan jiwanya, dan pada tahun 1923 ia masuk sekolah militer di Magelang.

Selesai pendidikan militer, Gatot menjadi anggota KNIL dan bertugas selama 5 tahun di Padang Panjang, dengan pangkat Sersan II. Selanjutnya ia dikirim ke Suka bumi untuk mengikuti pendidikan marsose, kesatuan militer dengan tugas-tugas khusus. Selesai pendidikan, ia ditempatkan di Bekasi dan Cikarang [daerah yang kala itu sering dilanda kerusuhan yang bersumber pada tindakan-tindakan para lintah darat]. Di sini, ia sering mendapat teguran dari atasan karena dianggap terlalu memihak kepada rakyat kecil. Sebagian gajinya disumbangkan untuk membantu keluarga orang hukuman yang ada dibawah pengawasannya.

Pada masa Pendudukan Jepang, Gatot mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor. Sesudah itu, ia diangkat menjadi komandan kompi di Sumpyuh, Banyumas, kemudian naik menjadi komandan batalyon. Ia sering menentang orang Jepang yang bertindak kasar terhadap anak buahnya. Tahun 1944, Kompi Gatot Subroto mengadakan latihan penjagaan pantai. Ia melihat bahwa anak buahnya sudah sangat letih. Ia meminta agar pelatih menghentikan latihan, namun tidak digubris. Ia marah dan melepaskan pedang dan atributnya sambil meninggalkan tempat latihan.

Sesudah Indonesia merdeka, Gatot memasuki Tentara Keamanan Rakyat [TKR] yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia dipercaya memegang beberapa jabatan penting. Pada masa Perang Kemerdekaan [1945-1950], ia pernah menjadi Panglima Divisi II, Panglima Corps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Dalam jabatan terakhir itu ia menghadapi peristiwa “Madiun Affair” yang

meletus pada September 1948. Sesudah Pengakuan Kedaulatan, ia diangkat menjadi Panglima Tentara & Teritorium (T&T) IV/ Diponegoro. Pada tahun 1953 Gatot Subroto mengundurkan diri dari dinas militer. Akan tetapi, tiga tahun kemudian ia diaktifkan kembali dan diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Ia ikut menangani pemberontakan PRRI/Permesta yang melanda daerah Sumatra dan Sulawesi Utara. Di masa akhir pengabdianya, ia telah menyandang pangkat Letnan Jenderal.

Di kalangan militer, Gatot Subroto mempunyai perhatian yang besar terhadap perwira muda. Gagasannya untuk menyatukan akademi militer akhirnya terwujud dengan terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang, kota dulu ia mendapat pendidikan militer pertama kali.

Ia meninggal dunia dalam usia 54 tahun dan jenazahnya dimakamkan di desa Mulyoharjo, Ungaran, Semarang. Hanya berselang tujuh hari selepas kematiannya, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada Gatot Subroto.

Sukarjo Wiryopranoto



Lahir: Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, 5 Juni 1903|
meninggal: New York, Amerika Serikat 23 Oktober
1962| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar**
penetapan: Keppres No. 342 Tahun 1962| **tanggal**
penetapan: 29 Oktober 1962

■ Sang Diplomat Ulung

Pahlawan Nasional Sukarjo Wiryopranoto lahir di Kesugihan, Cilacap pada 5 Juni 1903. Selesai lulus sekolah hukum pada tahun 1923, ia lalu bekerja berpindah dari kota satu ke kota lain di pengadilan negeri. Tahun 1929 ia memutuskan berhenti dan mendirikan kantor pengacara “Wisnu” di Malang. Setelah itu kariernya menanjak, Malang adalah pilihan tepat karena ia kemudian menjadi wakil walikota Malang. Selain itu, ia juga diangkat menjadi pengacara di Pengadilan Tinggi Surabaya. Tahun 1931 Sukarjo menjadi anggota *Volksraad*. Bersama dr. Sutomo, ia mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Untuk membina para pemuda, pada 1934 didirikannya perkampungan

kerja. Dalam perkampungan tersebut para pemuda dilatih menjadi ahli kayu, ahli besi, ahli pertanian, dan lain-lain.

Kegiatannya di bidang politik meningkat sejak tahun 1936 setelah ia menjadi anggota Partai Indonesia Raya (Parindra). Sebagai perwakilan partai, ia kerap berkunjung ke daerah-daerah, antara lain ke beberapa kota di Sumatra. Dalam sidang *Volksraad* tahun 1937, ia mengajukan mosi agar orang-orang Indonesia diberikan kesempatan untuk menjadi walikota. Mosi itu didukung oleh sebagian besar anggota *Volksraad*, tetapi ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di samping aktif dalam Parindra, ia aktif pula sebagai sekretaris Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Tanggal 22 Agustus 1940 Sukarjo menyampaikan seruan Gapi yang menuntut agar di Indonesia dibentuk parlemen dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen.

Pada masa pendudukan Jepang, Sukarjo bergerak di jurnalis, memimpin surat kabar *Asia Raya*. Kegiatan kewartawanan tersebut terus dilanjutkan setelah Indonesia merdeka dengan turut membina majalah *Mimbar Indonesia*. Namun, ia lebih aktif menjadi duta-duta Besar Republik Indonesia di beberapa Negara paska kemerdekaan. Ia pernah menduduki jabatan Duta Besar Indonesia Republik Indonesia di Vatikan, Duta Besar Luar Biasa untuk Italia, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Rakyat Cina. Pada tahun 1962 ia diangkat menjadi Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam jabatan itu ia berusaha memengaruhi negara-negara lain agar membantu perjuangan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat dari Belanda.

Sukarjo Wiryopranoto meninggal dunia di New York pada tanggal 23 Oktober 1962. Jenazahnya dibawa ke tanah air dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia dinobatkan menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tanggal 29 Oktober 1962.

Ferdinand Lumbantobing



Lahir: Sibuluan, Sibolga, Sumatera Utara, 19 Februari 1899 | **meninggal:** Jakarta, 7 Oktober 1962 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 361 Tahun 1962 | **tanggal penetapan:** 17 November 1962

■ Pejuang Sibolga

Pada masa pendudukan Jepang, Lumbantobing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa. Dengan perasaan sedih menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Romusa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. Oleh karena itu, ia melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, Tobing dicurigai dan masuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Ia terhindar dari bahaya maut sebab berhasil menyelamatkan nyawa seorang tentara Jepang yang mengalami kecelakaan. Bagaimanapun ia seorang dokter yang harus menyelamatkan nyawa orang, meski ia membenci orang itu.

Ferdinand Lumbantobing telah berada di Bogor sejak sekolah dasar. Pada 1924, ia telah selesai menempuh studi kedokteran

diSTOVIA [Sekolah Dokter] Batavia. selepas itu ia bekerja menjadi dokter di Batavia, lalu pindah ke Tenggarong [Kalimantan Timur], kemudian ke Surabaya sampai tahun 1935. Sesudah itu, ia bertugas di Tapanuli, mula-mula di Padang Sidempuan, kemudian di Sibolga, tanah kelahirannya.

Pada 1943, ia diangkat menjadi ketua Syu Sangi Kai [Dewan perwakilan Daerah] Tapanuli di samping sebagai anggota *Cuo Sangi In*. Pada masa awal Revolusi kemerdekaan, ia merupakan tokoh penting di Tapanuli. Pada Oktober 1945, ia diangkat jadi Residen Tapanuli. Saat itulah ia menghadapi masa-masa sulit ketika daerah Tapanuli dilanda pertentangan bersenjata, antara sesama pasukan RI yang datang dari Sumatera Timur setelah daerah itu jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer I Belanda. Tetapi Tobing berpendirian tegas dan tidak mudah menyerah. Di masa Agresi Militer II Belanda, ia diangkat menjadi Gubernur Militer Tapanuli. Ia memimpin perjuangan gerilya di hutan-hutan, naik gunung turun gunung.

Sesudah pengakuan kedaulatan RI, ia menjadi Gubernur Sumatera Utara. selanjutnya, dalam Kabinet Ali pertama, ia diangkat menjadi Menteri Penerangan. Jabatan menteri lainnya yang pernah dipegangnya ialah Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan terakhir Menteri Negara Urusan Transmigrasi. Ia meninggal dunia di Jakarta dalam usia 63 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Kolang Sibolga. Sebulan setelahnya, pemerintah mengangkatnya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Kiai Haji Zainul Arifin



Lahir: Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, 2 September 1909 | **meninggal:** Jakarta, 2 Maret 1963 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 35 Tahun 1963 | **tanggal penetapan:** 4 Maret 1963

■ Dari Gemeente hingga Ketua DPRGR

Ia saat itu telah menjadi ketua DPR Gotong Royong [DPRGR]. Akan tetapi, suhu politik yang panas harus membuatnya berkorban nyawa. Pada 14 Mei 1962, ia berada dalam saf paling depan bersama presiden saat salat Idul Adha. Saat itulah tiba-tiba seorang yang dianggap bagian gerakan DI/TII menembakkan pistol ke depan. Sebuah percobaan pembunuhan terhadap presiden tengah dilakukan, tetapi peluru justru mengarah pada Zainul. Ia tertembak di bagian bahu dan hampir sepuluh bulan berselang, ia meninggal dunia.

Zainul Arifin adalah anak tunggal keturunan raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan dengan

perempuan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing, Siti Baiyah boru Nasution. Ia menyelesaikan HIS [*Hollands Indische School*] dan *Normal School*, sekolah guru, di Jambi. Ia juga belajar agama di Madrasah dan berlatih pencak silat. Saat usia 16 tahun, ia merantau ke Batavia. Di kota ini, ia bekerja sebagai pegawai *Gemeente* [pegawai Kotapraja]. Ia hanya bertahan lima tahun, setelahnya ia aktif sebagai guru di *Meester Cornelis* [Jatinegara], mendirikan kelompok sandiwara musikal tradisional Betawi Tonil Zainul dan giat pula dalam gerakan pemuda Ansor hingga menjadi pengurus NU [Nahdatul Ulama] hingga datangnya Jepang pada 1942.

Pemerintah Pendudukan Jepang melarang partai-partai politik berdiri. NU tidak luput dari larangan ini. Jepang lalu mengizinkan berdirinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia [Masyumi] sebagai satu-satunya wadah bagi umat Islam. Zainul memasuki organisasi ini dan diangkat sebagai Kepala Bagian Umum. Di masa ini pula ia mengikuti latihan militer selama dua bulan, kemudian diangkat menjadi Panglima Hizbullah, sebuah organisasi semi militer yang anggota-anggotanya terdiri atas pemuda-pemuda Islam.

Selapas Proklamasi Kemerdekaan, ia tetap duduk dalam Pucuk Pimpinan Hizbullah. Laskar ini kemudian digabungkan ke dalam Tentara Nasional Indonesia [TNI]. Setelah penggabungan ini, ia diangkat sebagai sekretaris Pucuk Pimpinan TNI. Selain itu, ia duduk pula sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat [BK KNIP]. Sesudah Pengakuan Kedaulatan, ia diangkat menjadi anggota DPRS [Dewan Perwakilan Rakyat Sementara] dari tahun

1950-1953. Ia juga pernah duduk sebagai Wakil II Perdana Menteri. Selepas pembubaran dewan Konstituante selepas dekrit presiden 5 Juli 1959 dan terbentuk DPRGR [DPR Gotong Royong], Zainul diangkat menjadi Ketuanya.

Ia terus berkiprah dalam lembaga eksekutif ini hingga akhirnya ia tertembak tepat dihari Idul Adha. Zainul tidak mampu bertahan hingga ia mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 53 tahun. Jenazahnya segera dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Pemerintah Indonesia kemudian memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional tepat dua hari selepas kepergiannya.

Tan Malaka



Lahir: Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 | **meninggal:** Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 53 Tahun 1963 | **tanggal penetapan:** 28 Maret 1963

■ Merdeka Seratus Persen

Ia pejuang militan dan radikal yang punya peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga tokoh revolusioner yang legendaris. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Hindia [Indonesia] dan selalu terancam penahanan oleh penguasa Belanda maupun Inggris. Tanpa henti ia perjuangkan kemerdekaan. Dua puluh tahun sebelum Indonesia merdeka, ia telah mengumandangkan sebuah negeri merdeka dalam tulisannya, “*Naar de Republiek Indonesia*”, menuju republik Indonesia [1925] dan dua tahun berikutnya memproklamkan Partai Republik Indonesia [PARI]. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ia telah menyebut-nyebut bahkan berusaha mewujudkan kata “Republik Indonesia”.

Tokoh politik kontroversial dalam sejarah Indonesia modern ini bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia lahir di tengah lingkungan Minangkabau, dari pasangan Rasad Caniago dan Sinah Simabur. Ia masuk sekolah dasar di Suluki pada 1902 lalu melanjutkan ke *Kweekschool* [sekolah guru] di Fort de Kock, dekat Bukittinggi. Oleh seorang pengajar, G.H. Horensma, ia didesak untuk melanjutkan pendidikan di negeri Belanda. Pada tahun 1912 ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolah di *Rijks Kweekschool Haarlem* Belanda.

Di Belanda, ia mengembangkan diri. Ia menonjol dalam ilmu pasti sehingga dipuji para gurunya, yang umumnya mengira orang-orang Hindia Belanda tidak mampu mengerti soal ilmu pasti. Ia juga mengagumi kedisiplinan organisasi militer. Meski ia mendalami pendidikan guru, ia juga mendalami kemiliteran di Akademi Militer Breda. Ia membaca banyak buku kemiliteran. Bersamaan dengan Revolusi Rusia 1917 minatnya terhadap buah pikiran Marx dan Engels makin besar. Ia kerap mengikuti berbagai pembicaraan politik kaum kiri di Amsterdam, juga diskusi terbuka antara Sneevliet dan Suwardi tentang “Kecenderungan Nasionalis dan Sosialis dalam Pergerakan Nasional Hindia” di Amsterdam pada 1919.

Di akhir tahun itu pula, Malaka kembali ke Hindia [Indonesia] dan menjadi guru di perkebunan Deli. Ia tidak bertahan lama karena tidak suka dengan ketimpangan sosial kolonial. Ia lalu menuju Semarang, bergabung dengan tokoh-tokoh kiri radikal, mendirikan sekolah rakyat yang kemudian populer, dan segera bergabung dengan partai komunis, ia kemudian menjadi ketuanya pada 1921.

Ia menjadi tokoh terpenting partai ini sejak kepergian Semaun ke Rusia. Ia mengembangkan cabang Partai ini di daerah dan mengancam pemerintahan kolonial yang menindas para buruh. Ia lalu ditangkap karena terlibat dalam aksi pemogokan para buruh perkebunan pada 1922. Malaka lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk dibuang ke Belanda.

Jadilah ia dua kali mengunjungi Belanda, tetapi untuk yang kedua ini ia tidak lama. Ia kemudian justru pergi ke Moskwa Rusia (1922). Di sana ia berkumpul dengan tokoh komunis internasional. Pada 1924 ia telah menjadi duta Komintern [komunis internasional] Asia Pasifik yang berkedudukan di Kanton China.

Semenjak itu, ia lalu lalang di pelbagai negara di Asia pasifik. Diburu intelijen Belanda hingga Inggris dan harus menyamar menjadi orang lain dengan nama berbeda-beda, dari nama Cina hingga Arab. Pada 1924, ia menulis brosur “menuju republik Indonesia” yang baru bisa dicetak tahun 1925 di Cina. Buku ini dibaca kaum pergerakan di Hindia [Indonesia].

Saat akan meletus pemberontakan komunis 1926, Malaka menolak keputusan rapat PKI di Prambanan. Ia menyatakan gerakan itu masih prematur dan ia terbukti benar. Gerakan revolusi itu gagal total. Hampir berbarengan dengan pemberontakan, ia menulis buku *Massa Actie* sebagai pedoman untuk melancarkan revolusi. Setelah itu, demi pergerakan kemerdekaan, ia mendirikan PARI di Singapura. Malaka terus berjuang dengan berpindah-pindah tempat dari Cina hingga Singapura. Petualangannya yang legendaris itu

akhirnya direkam dalam sebuah novel laris bertajuk *Spionnage-Dienst [Patjar Merah Indonesia]* yang terbit di Medan pada 1938.

Pada 1942, berbarengan dengan kedatangan tentara Jepang, ia menyusup kembali ke tanah air dan tiba di Jakarta. Ia kemudian berada di Bayah Banten, diantara para Romusha, menulis buku *Madilog*, serta menyusun kekuatan bawah tanah. Ia memiliki jaringan dengan pemuda Menteng 31 yang terlibat penjemputan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Malaka juga terlibat pergerakan massa dalam rapat raksasa lapangan Ikada 19 September 1945.

Tan Malaka segera membentuk front Persatuan Perjuangan di Purwakarta pada Januari 1946. Ia menentang perjanjian Linggajati dan Renville. Dalam front ini, Malaka mendesak untuk meraih kemerdekaan seratus persen dari Belanda. Ia berjuang menentang perjanjian Linggajati dan Renville yang merugikan Indonesia. Ia sempat diamankan sebentar oleh pemerintah pada Maret 1946. Setelah itu, Ia menjadi anggota KNI [Komite Nasional Indonesia] dan pada 7 November 1947, ia mendirikan partai Murba [Musyawarah Rakyat Banyak]. Ia ikut bergerilya di masa peristiwa “madiun Affair” hingga pada Februari 1949, ia tewas tertembak di lereng gunung Wilis. Kuburannya tidak pernah diketahui dengan pasti.

Atas perjuangan dan jasa-jasanya yang luar biasa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia di masa presiden Soekarno memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada Tan Malaka pada tahun 1963. Malaka mendapat gelar Pahlawan 24 tahun setelah kepergiannya yang masih misterius.

Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J.



Lahir: Surakarta 25 November 1896 | **meninggal:** Steyl, Belanda 22 Juli 1963 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 152 Tahun 1963 | **tanggal penetapan:** 26 Juli 1963

■ Pendiri Gereja Katolik Indonesia

Meski mendapat pendidikan Barat dan beberapa kali menimba ilmu di Eropa, bukan berarti harus menerapkannya secara *zakelijk*. Malah sebaliknya, Mgr. Albertus Sugiyapranata adalah imam Katolik pertama yang berani menghilangkan sifat kebarat-baratan dalam upacara gereja di Indonesia. Ia pemula perubahan dengan maksud menyerasikan tradisi Barat dan tradisi Timur. Untuk gereja-gereja di Jawa, instrumen barat digantinya dengan gamelan.

Lahir di Solo pada 25 November 1896, Sugiyapranata menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Katolik Solo, kemudian di Muntilan. Sesudah itu, di tahun 1915, ia melanjutkan ke Sekolah Guru. Sempat menjadi guru selama satu tahun, ia kembali

memperdalam ilmu teologinya dengan mengikuti pendidikan imamat, dari sinilah kegiatan di bidang keagamaan dimulai. Tiga tahun kemudian ia dikirim ke negeri Belanda untuk memperdalam pengetahuan di bidang agama Kristen, bahasa latin, bahasa Yunani dan filsafat dan pulang dengan nama baru: Frater Soegijapranata .

Sekembalinya ke tanah air, Soegijapranata , bekerja sebagai guru Ilmu Pasti, bahasa Jawa dan agama di bagian Sekolah Guru pada kolese di Muntilan. Di samping mengajar, kesehariannya diisi pula dengan mengampu media cetak berbahasa Jawa, *Swara Tama*. Melalui surat kabar mingguan tersebut, ia banyak menulis tentang tari Jawa, pakaian adat Jawa, hubungan budaya Barat dan Timur, dan lain lain.

Di tahun 1928 Soegijapranata memperoleh kesempatan sekali lagi untuk mengikuti pelajaran teologi di negeri Belanda. Ia juga mewakili frater-frater Indonesia menghadiri perayaan kepausan di Roma, Italia dan ditasbihkan sebagai imam pada tahun 1931. Dua tahun di negeri orang, ia kembali ke Hindia Belanda dan diangkat menjadi Pastor Pembantu di Bintaran, kemudian menjadi Pastor Paroki. Pada 1938 ia diangkat menjadi penasihat Misi Jesus di pulau Jawa, lalu 1940 naik jabatan menjadi Vikaris Apostolik untuk memangku jabatan keuskupan.

Pada masa pendudukan Jepang, ia menghadapi masa sulit. Berkuasanya orang-orang Nippon ini mengubah kebijakan baru di tanah air, salah satunya mengubah cara pengadaan misa. Penggunaan bahasa Belanda dilarang, baik yang dilafalkan maupun yang ditulis, dan sejumlah bangunan milik Gereja disita. Ia menjadi pembela

orang-orang Kristen dengan cara diplomasi. Kedudukannya sebagai uskup agung membuat pemerintah Jepang masih menghargainya, meskipun begitu usaha pun tidak selalu berhasil.

Soegijapranata kerap mengadakan pertemuan untuk membahas perlunya hierarki Katolik Roma di Indonesia hingga pada tahun 1959 Kardinal Grégoire-Pierre Agagianian mengunjungi Indonesia untuk memeriksa persiapan Gereja. Pada bulan Mei 1960, Konferensi Wakil Gereja Indonesia (KWI) secara resmi mengajukan surat permohonan untuk dibentuknya Gereja Katolik Indonesia. Di wilayah nusantara, kemudian dibentuk enam provinsi gerejawi, yaitu dua di pulau Jawa, satu di Sumatra, satu di Flores, satu di Sulawesi dan Maluku, dan satu di Kalimantan. Soegijapranata sendiri menjadi uskup agung di wilayah Semarang, ia diangkat pada tanggal 3 Januari 1961.

Setelah itu Soegijapranata sering bolak-balik Indonesia Eropa dalam urusan kegerejaan. Dalam Konsili Vatikan II, ia termasuk dalam salah satu dari enam uskup dan uskup agung dari Asia. Sepulangnya ke tanah air kondisi kesehatannya mulai menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Elisabeth Candi. Pada tanggal 30 Mei 1963, ia memutuskan berangkat ke Eropa untuk menghadiri pemilihan Paus Paulus VI. Di sana, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga mengharuskannya menginap di Canisius Hospital Belanda sekitar sebulan. Namun, perawatan ini tidak berhasil, Soegijapranata meninggal pada tanggal 22 Juli 1963 di sebuah susteran di Steyl Belanda karena serangan jantung. Jenazah Soegijapranata diterbangkan ke Indonesia dan dikebumikan di Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Dalam upacara

pemakamannya ia dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 26 Juli 1963. Di tahun 2012, kisah perjalanan uskup ini kemudian diabadikan dalam film berjudul “Soegija” produksi Studio Audio-Visual Puskat Yogyakarta.

Ir. Raden Juanda Kartawijaya



Lahir: Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911|
meninggal: Jakarta, 7 November 1963| **gelar:** Pahlawan
Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No.
244 Tahun 1963| **tanggal penetapan:** 6 November 1963

■ Deklarasi Djuanda

Sebelumnya, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, *Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* [TZMKO 1939]. Pulau-pulau wilayah Nusantara dipisahkan laut sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Lalu pada 13 Desember 1957 dicetuskanlah sebuah deklarasi yang mengubah ordonansi warisan Belanda itu. Sebuah pernyataan pada dunia bahwa laut sekitar, laut di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah RI. Deklarasi itu bernama deklarasi Djuanda.

Pemrakarsa deklarasi itu adalah Djoeanda Kartawidjaja yang saat itu menjabat perdana menteri Indonesia. Djuanda merupakan

anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada *Hollandsch Inlandsch School* [HIS]. Ia menempuh pendidikan mula di HIS dan kemudian pindah ke *Europesche Lagere School* [ELS] dan tamat pada 1924. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan *Hogere Burger School* [HBS] Bandung hingga lulus tahun 1929. Selepas itu, ia segera masuk *Technische Hoogeschool* [THS] di Dago Bandung mengambil jurusan teknik sipil dan lulus pada 1933.

Tawaran menjadi asisten dosen di THS dengan gaji yang lumayan, ditolaknya. Ia memilih untuk menjadi guru pada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Jakarta walaupun dengan gaji yang kecil. Beberapa waktu kemudian, ia diangkat menjadi direktur sekolah tersebut. Di samping itu, ia giat pula dalam organisasi Paguyuban Pasundan. Setelah empat tahun berkecimpung di bidang pendidikan, pada 1937 Djuanda menjadi tenaga ahli di Jawatan Pengairan Jawa Barat. Selain itu, ia duduk pula sebagai anggota Dewan Daerah Batavia.

Pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul pengambil-alihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan objek-objek militer di Gudang Utara Bandung. Selepas itu, Pemerintah RI segera mengangkatnya menjadi Kepala Jawatan Kereta Api seluruh Jawa dan Madura, kemudian menjadi Menteri Perhubungan.

Saat Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, ia ditangkap, tetapi kemudian dapat bebas dan terlibat dalam perundingan KMB, ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi

Indonesia. Selepas itu, saat terbentuk RIS yang menguntungkan Belanda, dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara Pasundan. Akan tetapi, ia menolak duduk dalam pemerintahan negara boneka ciptaan Belanda itu.

Djuanda merupakan tokoh yang paling sering duduk dalam kabinet, yakni sebanyak 17 kali mulai dari Menteri Muda Perhubungan sampai menjadi perdana Menteri. Ia seorang abdi negara yang bekerja tanpa kenal lelah hingga banyak orang menjulukinya, “menteri marathon”. Sebagai pejabat ia selalu berusaha menyehatkan perekonomian negara, dan memajukan pertanian, peternakan dan perikanan, agar hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat banyak.

Pengabdian Djuanda harus berakhir saat usianya menginjak 52 tahun. Ia meninggal karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya yang besar bagi negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1963.

dr. Saharjo S.H.



Lahir: Solo, Jawa Tengah, 26 Juni 1909| **meninggal:** Jakarta, 13 November 1963| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 245 Tahun 1963| **tanggal penetapan:** 29 November 1963

■ Perubah Wajah Peradilan Indonesia

Ia seorang sarjana produk pendidikan kolonial, tapi ia tidak begitu saja menerima semua model barat, terutama soal peradilan. Ia membongkar undang-undang warisan kolonial yang dianggapnya telah usang dan tidak sesuai lagi dengan negara Indonesia. Ia membuat undang-undang baru. Mengganti simbol-simbol peradilan kolonial dengan simbol yang lebih bernuansa asli Indonesia.

Saharjo lahir di Surakarta dan menamatkan Sekolah Dasar di kota kelahirannya. Ia kemudian pindah ke Batavia untuk meneruskan pendidikan hingga AMS. Selepas itu, ia masuk STOVIA [Sekolah Dokter], tetapi tidak menyelesaikannya hingga lulus. Ia memilih bekerja sebagai guru pada Perguruan Rakyat, sebuah perguruan

swasta nasional di Batavia. Dalam kedudukan sebagai guru, ia turut berjuang menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap pendidikan nasional.

Di masa pergerakan, PNI telah pecah menjadi PNI baru dan Partindo. Saharjo terjun ke dunia politik dengan masuk sebagai anggota Partai Indonesia [Partindo]. Ia lalu diangkat sebagai anggota pengurus besar Partindo. Ia kemudian tertarik dengan bidang hukum dan masuk sekolah hukum, Rechtshogeschool di Batavia. Gelar sarjana hukum diperolehnya pada 1941. Sejak itu mulailah kegiatannya di bidang hukum. Sesudah Indonesia merdeka, berkali-kali ia disertai jabatan penting antara lain Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Kerja I dan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Kerja II. Jabatan terakhirnya ialah Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri.

Sebagai seorang sarjana hukum, Saharjo banyak mengeluarkan buah pikiran yang berguna. Hasil-hasil pemikiran itu antara lain, Undang-undang Warga Negara Indonesia Tahun 1947 dan tahun 1948 serta Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1953. Ia berusaha pula menyesuaikan hukum dengan kepribadian Indonesia dan menolak hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa yang sudah merdeka pada tahun 1962.

Tindakan paling vital dilakukan saat ia mengusulkan lambang keadilan yang berbentuk Dewi Justita, satu lambang peradilan dunia barat, diganti dengan lambang pohon beringin. Lambang ini lebih sesuai dengan kepribadian bangsa karena pohon beringin menyimbolkan perlindungan dan kesejahteraan bagi yang memerlukan.

Usulannya diterima oleh Seminar Hukum Nasional pada 1963 dan sejak itu belum pernah diganti lagi.

Masih dalam dunia peradilan, Saharjo juga mengganti istilah penjara menjadi lembaga kemasyarakatan khusus dan mengganti istilah orang hukuman dengan narapidana. Ia berpendapat, penjara bukanlah tempat memberikan penderitaan pada si terhukum, tetapi untuk membimbing dan mendidik mereka agar menjadi orang yang berguna dalam masyarakat.

Saharjo meninggal dunia di Jakarta dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan peradilan Indonesia, pemerintah memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada Saharjo di tahun 1963.

Cut Nyak Dhien



Lahir: Lampadang, Kerajaan Aceh, 1848| **meninggal:** Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 106 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 2 Mei 1964

■ Melawan Kape [kafir] di Tanah Rencong

Langit seperti memberi isyarat bahwa seorang wanita renta harus mengakhiri perjuangan panjangnya di rimba Aceh. Wanita itu harus menyarungkan *rencong*-nya. Butiran uap air yang menggumpal mulai menghujani persembunyiannya di pedalaman rimba. Pang Laot [tangan kanan Nyak Dhien] melangkahakan kakinya dengan bimbang menuju pucuk bukit. Sepasukan Marsose bersenjata lengkap tampak menyemut di belakangnya menuju tempat persembunyian sang panglima wanita itu. Cut Nyak Dien memang masih melakukan serangan terakhir dengan *rencong*-nya, tetapi gagal. Pejuang Aceh itu akhirnya tertangkap. Perjuangannya memang berakhir dramatis, dikhianati anak buahnya sendiri yang kasihan melihat keadaannya.

Walaupun demikian, tentara Belanda sendiri mengakui betapa Cut Nyak Dhien sosok pemimpin perang Aceh yang ditakuti.

Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1850. Ia dilahirkan dalam suasana memburuknya hubungan antara kerajaan Aceh dan Belanda. Situasi itu berpengaruh terhadap dirinya. Ia menikah dalam usia muda dengan Teuku Ibrahim Lamnga. Pada Desember 1875, Lampadang diduduki Belanda. Cut Nyak Dien mengungsi ke tempat lain, berpisah dengan suami dan ayahnya yang terus melanjutkan perjuangan. Ibrahim Lamnga tewas dalam pertempuran di Gle Tarum pada Juni 1878. Cut Nyak Dien bersumpah hanya akan kawin dengan laki-laki yang bersedia membantu untuk menuntut balas kematian suaminya.

Pada 1880 ia menikah untuk kedua kalinya dengan Teuku Umar, kemenakan ayahnya. Teuku Umar adalah seorang pejuang Aceh yang akhirnya juga gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada 11 Pebruari 1899. Sesudah itu, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan di daerah pedalaman Meulaboh. Ia termasuk salah seorang pejuang yang pantang tunduk dan tidak mau berdamai dengan Belanda.

Enam tahun lamanya Cut Nyak Dien bergerilya melawan orang-orang Belanda yang disebutnya *kape* [kafir]. Pasukan Belanda berusaha menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Lama-kelamaan jumlah pasukan makin berkurang. Bahan Makanan sulit diperoleh. Ia semakin tua, mata mulai rabun, dan penyakit mulai menyerang. Anak buahnya merasa kasihan melihat keadaan yang demikian itu. Atas dasar kasihan itu, Pang Laot, seorang panglima perang dan

kepercayaan Cut Nyak Dien, menghubungi pihak Belanda. Sesudah itu, pasukan Belanda datang untuk menangkapnya.

Cut Nyak Dien segera ditawan di Banda Aceh. Lalu ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pembuangan inilah, Cut Nyak Dhien meninggal dan dimakamkan di sana. Atas jasanya dalam perjuangan melawan kolonial Belanda, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1964.

Cut Nyak Meutia



Lahir: Keureutoe, Pirak, Aceh Utara, 1870| **meninggal:** Alue Kurieng, Aceh, 24 Oktober 1910| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 106 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 2 Mei 1964

■ Srikandi Pasai

Ia perempuan yang tegar. Kehilangan dua suami dalam perang Aceh tidak juga menyurutkan perjuangannya. Ia masih saja melawan saat pasukan Marsose, pasukan elit Belanda yang ditakuti, memburunya. Ia tidak sudi berhenti berperang sebelum ajal tiba. Hingga satu ketika, tiga buah peluru menghentikan perlawanannya di rimba Pasai. Pejuang wanita ini gugur tanpa kenal menyerah.

Cut Nyak Meutia lahir di Perlak, Aceh pada 1870, tiga tahun sebelum perang Aceh-Belanda meletus. Suasana perang itu memengaruhi perjalanan hidupnya. Waktu masih kecil, ia dipertunangkan dengan Teuku Syam Syarif, tetapi ia lebih tertarik kepada Teuku Muhammad. Akhirnya, keduanya menikah. Teuku

Muhammad adalah seorang pejuang yang lebih terkenal dengan nama Teuku Cik Tunong.

Sekitar tahun 1900 pejuang-pejuang Aceh sudah banyak yang tewas. Gerakan pasukan Belanda sudah sampai ke daerah pedalaman Aceh. Cut Nyak Meutia bersama suaminya memimpin perjuangan gerilya di daerah Pasai. Berkali-kali pasukan mereka berhasil mencegat patroli pasukan Belanda. Markas Belanda di Idie pernah pula diserang. Melalui pihak keluarga, Belanda berusaha membujuk supaya Meutia menyerahkan diri kepada Pemerintah Belanda. Akan tetapi, bujukan itu tidak berhasil. Ia termasuk pejuang yang pantang tunduk.

Pada bulan Mei 1905 Teuku Cik Tunong ditangkap Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman tembak. Sesuai pesan suaminya, Meutia kemudian kawin dengan Pang Nangru, seorang teman akrab dan kepercayaan Teuku Cik Tunong. Bersama suaminya yang baru itu, ia melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Karena kepungan Belanda semakin ketat, mereka masuk lebih jauh ke rimba Pasai, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindarkan diri agar jangan sampai tertangkap. Pasukan Cut Meutia semakin tertekan mundur, masuk lebih jauh ke pedalaman rimba Pasai.

Pada satu pertempuran di Paya Cicem bulan September tahun 1910, Pang Nangru tewas di tangan pasukan Belanda. Sementara Cut Nyak Meutia sendiri masih dapat meloloskan diri. Kematian Pang Nangru membuat beberapa orang teman Pang Nangru menyerahkan diri pada Belanda, sedangkan Meutia walaupun dibujuk untuk

menyerah namun tetap tidak bersedia. Di pedalaman rimba Pasai, dia hidup berpindah-pindah bersama anaknya, Raja Sabil, yang masih berumur sebelas tahun untuk menghindari pengejaran pasukan Belanda. Akan tetapi, pengejaran pasukan Belanda yang sangat intensif membuatnya tidak bisa menghindar lagi. Rahasia tempat persembunyiannya terbongkar. Dalam suatu pengepungan yang rapi dan ketat, dia berhasil ditemukan.

Pada 24 Oktober 1910, sepasukan Marsose yang bersenjata api lengkap menyergap Cut Meutia. Sang pejuang tidak gentar menghadapi musuh yang mengepungnya itu. Dengan sebilah rencong di tangan, dia tetap melakukan perlawanan. Namun tiga orang tentara Marsose yang dekat dengannya melepaskan tembakan. Ia gugur setelah sebuah peluru mengenai kepala dan dua buah peluru lainnya mengenai dadanya. Atas jasa dan pengorbanannya dalam menentang penjajahan Belanda, Cut Meutia dikukuhkan menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1964.

Raden Ajeng Kartini



Lahir: Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 | **meninggal:** Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 108 Tahun 1964 | **tanggal penetapan:** 2 Mei 1964

■ Jadi Terang Wahai Perempuan Indonesia

R.A. Kartini, nama ini sudah terlalu populer dalam telinga masyarakat Indonesia. Ia kerap dijadikan simbol perjuangan emansipasi perempuan. Keinginan dan cita-cita memajukan perempuan pribumi yang tertuang dalam kumpulan suratnya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, menjadikan spirit tersendiri bagi perjuangan perempuan Indonesia.

Di Jepara tanggal 21 April 1879, Kartini lahir. Sewaktu kecil, ia hanya sempat mengenyam sekolah dasar di *Europese Lagere School* (ELS). Keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tidak diizinkan oleh orangtuanya. Adat kala itu, hal wajar bagi seorang gadis untuk menjalani pingitan setelah menamatkan sekolah

dasar, sampai tiba saatnya menikah. Berbeda dengan kaum pria kebanyakan, kaum wanita tidak bebas bergerak.

Kartini gemar membaca buku, terutama buku-buku tentang kemajuan wanita di luar negeri. Ia juga banyak bergaul dengan orang-orang terpelajar terutama perempuan Eropa. Hal tersebut membuka pikirannya, ia merasa miris melihat keadaan wanita bangsanya yang jauh tertinggal dibandingkan dengan wanita Eropa. Maka, muncullah keinginan Kartini untuk berjuang memajukan wanita pribumi. Kemajuan tersebut bisa dicapai melalui pendidikan.

Ia banyak menulis surat kepada teman-temannya orang Belanda. Melalui surat tersebut, ia mengungkapkan cita-citanya untuk memajukan wanita sebangsanya. Ia juga menginginkan adanya persamaan hak dan kewajiban antara kaum wanita dan kaum pria. Kartini juga berjuang untuk dirinya sebagai langkah nyata dan bukti bahwa perempuan pun mempunyai kemampuan setara dengan pria di bidang pendidikan. Ia berkeinginan memasuki Sekolah Guru di negeri Belanda, agar kelak dapat menjadi seorang pendidik. Tatkala usahanya untuk memperoleh beasiswa direstui Pemerintah Belanda berhasil, sayangnya saat itu juga orangtuanya menentukan bahwa ia harus menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang.

Untungnya sebelum menikah, Kartini sudah berhasil mendirikan semacam sekolah untuk anak gadis di Jepara. Di tempat tersebut para anak perempuan diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan lain-lain tanpa dipungut bayaran. Setelah menikah, model sekolah yang sama juga didirikan di Rembang. Apa

yang dilakukan Kartini dengan sekolah tersebut, kemudian ditiru oleh wanita-wanita di tempat-tempat lain. Di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan kota lain, kemudian bermunculan “Sekolah Kartini”.

Kartini meninggal dalam usia muda pada tanggal 17 September 1904, sewaktu melahirkan putra pertama. Surat-suratnya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Door Duisternis tot Licht -Habis Gelap Terbitlah Terang*. Buah pikiran Kartini yang terdapat dalam buku tersebut memiliki pengaruh besar dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Betapa keras perjuangan Kartini, hari lahirnya yakni 21 April, diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Ia juga pun dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional dengan pada tanggal 2 Mei 1964.

dr. Tjipto Mangoenkoesoemo



Lahir: Ambarawa, Semarang, 1886| **meninggal:** Jakarta, 8 Maret 1943| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 109 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 2 Mei 1964

■ Dokter penentang kolonial Belanda

Ia seorang yang cerdas dan rajin. Gurunya di Stovia menjulukinya “*Een begaafd leerling*”, seorang murid yang berbakat. Bakat itu pula yang mengantarnya jadi terkenal saat mampu meredam wabah pes di Malang 1910. Pemerintah memberinya tanda jasa Ridderkruis [lencana kehormatan Belanda]. Alih-alih bangga dan mengucapkan terima kasih pada pemerintah kolonial, ia justru mengembalikan lencana itu. Ia tidak sudi menerima penghargaan dari pemerintah Belanda yang menjajah pribumi Hindia seperti dirinya.

Tjipto Mangoenkoesoemo lahir di Pecangakan, dekat Ambarawa tahun 1886. Setelah lulus sekolah ELS pada 1899, ia melanjutkan studi di STOVIA [Sekolah Dokter] di Batavia dan lulus

pada 1905. Sejak itu, mulailah ia bertugas sebagai dokter pemerintah di Bajarmasin dan Demak. Waktu bertugas di Demak, ia banyak menulis karangan yang menceritakan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Karangan-karangan itu dimuat dalam harian *De Express*. Akibatnya, ia diberhentikan dari jabatan dokter pemerintah.

Kegiatan politiknya makin meningkat setelah bersama Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat turut mendirikan Indische Partij tahun 1912. Partai itu adalah partai politik pertama yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Akibat kegiatan dalam Komite Bumiputera, ia dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913. Komite itu dibentuk untuk memprotes maksud Pemerintah Belanda merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis.

Belum genap setahun, Tjipto Mangoenkoesoemo sudah kembali ke Hindia [Indonesia] karena serangan penyakit asma. Ia lalu tinggal di kota Solo. Perjuangannya lalu dilanjutkan di dalam Volksraad, ia terus mengkritik Pemerintah Belanda dan membela kepentingan rakyat kecil. Akibatnya, pada 1920, ia diusir dari Solo, tempat ia giat mengembangkan studi klub bernama Kartini Club, selain juga menjalankan praktik swasta sebagai dokter. Ia lalu tinggal di Bandung sebagai tahanan kota, tetapi kegiatan politiknya tidak berhenti. Rumahnya menjadi tempat berkumpul dan berdebat tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Sekali lagi Pemerintah Belanda bertindak. Pada tahun 1927, Tjipto Mangoenkoesoemo dibuang ke Banda Neira. Setelah tiga belas tahun tinggal di Banda Neira, ia dipindahkan ke Ujungpandang dan

dari sana dipindahkan lagi ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena udara Sukabumi tidak cocok untuk penyakit asma, ia dipindahkan lagi ke Batavia. Pada 8 Maret 1943, ia akhirnya tidak sanggup melawan penyakitnya, dr.Tjipto Mangoenkoesoemo meninggal dunia di Batavia dan akhirnya dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa. Atas jasa dan pengorbanannya sebagai pejuang pembela bangsa, pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tahun 1964.

Kiai Haji Fakhruddin



Lahir: Yogyakarta 1890 | *meninggal:* Yogyakarta 28 Februari 1929 | *gelar:* Pahlawan Kemerdekaan Nasional | *dasar penetapan:* Keppres No. 163 Tahun 1964 | *tanggal penetapan:* 26 Juni 1964

■ Pejuang dari Kauman Yogyakarta

Ia tumbuh dalam lingkungan Kauman yang Islami. Ia menjadi pemuda yang punya peran dalam dakwah agama juga politik pergerakan kemerdekaan. Dalam waktu yang semasa, ia masuk dalam tiga organisasi besar, Boedi Oetomo, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam [SI]. Di dua organisasi akhir, ia memberikan sumbangsuhnya yang berharga, ia ikut mengembangkan, baik Muhammadiyah maupun SI. Kehebatannya dalam organisasi ditempa langsung dari kegiatan yang dijalannya. Bakatnya tidak diasah dalam sekolah formal, rata-rata tokoh bangsa melaluinya. Ia adalah lulusan “sekolah pohon sawo”, ia seorang otodidak yang mengembangkan kemampuannya lewat pengalaman.

Ia bernama asli Muhammad Jazuli yang berasal dari keluarga abdi dalem. Ayahnya adalah H. Hasyim yang menjabat sebagai seorang abdi dalem keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Pendidikan dasar yang diterimanya sebagian besar adalah pendidikan keagamaan secara tradisional dari ayahnya yang merupakan pengurus Masjid Keraton Yogyakarta. Di Masjid Gede Kauman itulah ia belajar mengaji di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Ia juga pernah masuk dunia pesantren tatkala dikirim ayahnya belajar di pesantren Wonokromo Bantul. Ia hanya bertahan sebentar dan memutuskan untuk keluar. Gurunya yang paling penting kemudian adalah Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada 1912.

Saat Muhammadiyah berdiri, Jazuli langsung menjadi anggotanya dengan nomor 05 dan berganti nama Fakhruddin. Ia adalah generasi pertama Muhammadiyah. Tapi saat itu ia masih sangat muda hingga belum diberi posisi di dalam *Hoofbestuur* [Pengurus Besar] Muhammadiyah. Di samping ikut Muhammadiyah, ia juga bergabung dengan Boedi Oetomo, tetapi hanya sebentar. Pada 1913, ia ikut tergabung menjadi anggota Serikat Islam cabang Yogyakarta dan menjadi pengurusnya. Sejak saat itulah kegiatan politiknya disalurkan melalui SI. Maka, kemanapun ia pergi berdakwah nama SI dan Muhammadiyah selalu disandingkan. Jasanya dalam pengembangan SI tergolong sangat besar, sebagaimana jasanya dalam pengembangan Muhammadiyah. Berkat jasanya itulah, ia dipercaya duduk dalam *Hoofbestuur* [HB] Muhammadiyah pada 1915, sebagai seorang sekretaris. Empat tahun berselang, ia juga diangkat menjadi

Komisaris CSI. Setahun berselang, ia diangkat sebagai *Penningmeester* [Bendahara] CSI dan jabatan itu ia pegang sampai tahun 1923. Dimasa itu pula, ia menjadi *Vice Voorzitter I* [Wakil Ketua I] yang mengetuai bidang Tabligh di Muhammadiyah. Dalam posisi inilah ia menjadi seorang yang handal dalam pengkaderan.

Tahun 1921, Fakhruddin juga pernah diutus ke Mekkah untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Hindia [Indonesia]. Kala itu jemaah haji dari Hindia sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari pejabat-pejabat Mekkah. Dengan usahanya, berbagai hal yang kurang baik itu dapat diatasi. Sekembalinya dari Mekkah, ia langsung memprakarsai pembentukan Badan Penolong Haji. Fakhruddin juga pernah melakukan demonstrasi bersama Soerjopranoto. Mereka menggerakkan buruh perkebunan tebu untuk menuntut hak-hak, kehormatan, dan upah yang wajar. Karena demonstrasi yang ia lakukan, Fakhruddin dituntut di pengadilan dan dikenai denda 300 Gulden.

Pada 1926, Fakhruddin memutuskan keluar dari SI yang ikut ia besarkan. Ia memilih fokus di Muhammadiyah. Ia masih menjadi ketua Tabligh Muhamaddiyah dan sering kali pergi ke daerah-daerah untuk melantik dan meresmikan berdirinya cabang-cabang Muhammadiyah di daerah-daerah. Beberapa cabang Muhammadiyah yang peresmiannya dihadiri Fakhruddin antara lain: cabang Kepanjen, Malang, Betawi, Semarang, Padang Panjang, Maninjau, Simabur, Sungai Liat di wilayah Sumatra Barat. Di daerah-daerah itu juga, Fakhruddin mengisi pengajian, pengkaderan ataupun memberi penjelasan tentang kebijakan-kebijakan Muhammadiyah. Ia benar-

benar sibuk di Muhammadiyah. Sering kali rumahnya dipakai untuk tempat kursus anggota-anggota Muhammadiyah.

Kesibukannya dalam dakwah membuatnya kurang memerhatikan kesehatan. Menjelang kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1929, Fakhruddin jatuh sakit. Ia meninggal dalam usia yang masih relatif muda, 39 tahun. Jenazahnya segera dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta. Ia lalu diangkat menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada 1964.

Kiai Haji Mas Mansoer



Lahir: Surabaya, 25 Juni 1896 | **meninggal:** Surabaya, 25 April 1946 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 163 tahun 1964 | **tanggal penetapan:** 26 Juni 1964

■ Dari Muhammadiyah hingga Pertempuran Surabaya

Saat Jepang masuk Hindia Belanda, tokoh-tokoh pribumi yang berpengaruh segera dicari. Salah satunya Mas Mansur. Jepang segera membentuk Putera [Pusat Tenaga Rakyat] lalu empat orang tokoh nasional menjadi pemimpinnya. Mas Mansoer menjadi bagian dari kepemimpinan Putera itu yang kemudian terkenal dengan julukan “empat serangkai”. Mansoer segera menarik diri dari Putera karena tidak suka dengan kekejaman Jepang. Ia memilih pulang ke Surabaya hingga ia diminta kembali menjadi bagian dari BPUPKI di Jakarta. Tugasnya mengantar kemerdekaan usai dan ia sekali lagi memilih pulang, lalu terlibat dengan arek-arek Surabaya dalam menggalang perlawanan menghadapi Sekutu.

Mas Mansoer berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo Surabaya. Ayahnya, KH. Mas Achmad Marzoeqi, seorang pionir Islam dan ahli agama yang terkenal di Jawa Timur, dikenal juga sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Ampel, suatu jabatan terhormat pada saat itu. Ayahnya yang berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep Madura kemudian mengirim Mansoer ke Pondok Pesantren Demangan Bangkalan Madura pada 1906, saat itu Mansoer baru berusia sepuluh tahun. Ia hanya bertahan selama hampir dua tahun. Lalu memutuskan menunaikan ibadah haji dan belajar agama di Mekah pada 1908. Setelah lama di Mekah, Mansoer pergi ke Mesir lalu belajar di Universitas Al Azhar Kairo, pusat sastra Arab dan pengkajian Islam Suni. Di Mesir, Mansoer mendapati gerakan pembaharuan Islam dan tumbuhnya nasionalisme sebuah bangsa. Dari Mesir, ia singgah sebentar di Mekah lalu pulang ke tanah air pada 1915.

Setelah kembali, Mansoer mengajar di pesantren Mufidah di Surabaya. Ia juga membentuk majelis diskusi Taswir al-Afkar [Cakrawala Pemikiran] dan menulis artikel di pelbagai surat kabar, termasuk *Pedoman Masyarakat* di Medan dan *Adil* di Surakarta. Pada 1921, ia aktif menjadi anggota Muhammadiyah, lalu juga memasuki organisasi Persatuan Bangsa Indonesia [PBI]. Banyak kegiatan yang telah dilakukannya untuk memajukan Muhammadiyah, termasuk giat berdakwah ke daerah-daerah. Dari jabatan ketua cabang, Mansoer diangkat menjadi Konsul Muhammadiyah Jawa Timur. Pada 1937, ia bahkan terpilih menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah dan ia pindah ke

Yogyakarta. Setahun berselang, Mansoer turut serta melahirkan Partai Islam Indonesia [PII] dan duduk dalam pimpinan pusatnya.

Pada masa pendudukan Jepang, ia masih mengurus Muhammadiyah. Bersama ulama lain, ia juga ikut mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia [Masyumi] pada 7 November 1945. Sebelumnya, saat Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat [Putera] pada 16 April 1943, ia juga dicari dan dijadikan salah satu pemimpinnya. Buat Mas Mansoer yang tidak menyukai pemerintah Jepang, tugas itu tidak menyenangkan. Akan tetapi, demi kepentingan umat Islam, ia menerimanya namun ia segera keluar dari Putera, dan pada tahun 1944, ia kembali ke Surabaya. Namun demikian, ia masih saja diangkat menjadi anggota *Cuo Sangi In* [dewan pertimbangan pemerintah Jepang].

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, Mas Mansoer diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] yang dibentuk pada 29 April 1945 dan bubar sepuluh hari sebelum proklamasi, 7 Agustus 1945. Mansoer segera terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Ia kemudian tidak terlibat dalam panitia kemerdekaan dan lebih memilih kembali pulang ke Surabaya. Sesudah proklamasi, dimana kemudian tentara Sekutu yang dibarengi dengan NICA datang, Mansoer ikut terlibat membantu pemuda-pemuda Surabaya berjuang. Bagaimanapun ia seorang kyai berpengaruh yang mampu menggerakkan massa. Karena itulah, ia kemudian ditangkap tentara NICA dan dimasukkan ke penjara Kalisosok Surabaya. Ia mengetahui betapa heroiknya perjuangan rakyat Surabaya dalam pertempuran 10

November 1945 dari balik jeruji besi penjara. Enam bulan berselang, Mas Mansoer meninggal dunia di dalam penjara dalam usia 49 tahun. Jenazahnya lalu dikebumikan di pemakaman Gipo Surabaya.

Ia memiliki jasa yang begitu besar dalam kegiatan kemasyarakatan dan kemerdekaan Indonesia. Berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1964, Kyai Haji Mas Mansur ditetapkan menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Alimin



Lahir: Solo, 1889| **meninggal:** Jakarta, 24 Juni 1964| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 163 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 26 Juni 1964

■ Sang Pejuang Kemerdekaan

Alimin tokoh tua yang disegani. Pada 1926, selepas keluar penjara ia segera menuju Moskow untuk bergabung dengan Komintern [komunis internasional]. Lalu ia bersama Ho Chi Minh membina kaum muda militan untuk berjuang melawan kolonialisme Prancis di Vietnam. Kala Jepang melakukan agresi ke Cina, Alimin ikut bergabung bersama tentara merah di daerah basis perlawanan di Yanan. Pejuang internasional ini kembali ke nusantara selepas merdeka. Ia lalu terpilih menjadi anggota dewan konstituante.

Pejuang yang bernama lengkap Alimin Prawirodirdjo ini sejak awal telah aktif dalam organisasi Boedi Oetomo, Insulinde, dan juga salah seorang pendiri Serikat Buruh Pelabuhan [Serikat Pegawai

Pelabuhan dan Lautan]. Ia juga menjadi tokoh berpengaruh dalam Serikat Islam. Saat SI pecah, Alimin memilih bergabung dengan SI merah yang berbasis di Semarang.

Pada awal 1926, sebagai pimpinan PKI Alimin pergi ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka dalam rangka menyiapkan pemberontakan. Akan tetapi, sebelum Alimin pulang, pemberontakan sudah meletus 12 November 1926. Alimin dan Musso ditangkap oleh polisi Inggris. Setelahnya, ia pergi ke pusat gerakan komunisme internasional, Moskow, bertemu dengan kawan-kawan seideologi dan kemudian berkelana ke beberapa negara yang sedang bergejolak melawan penjajahan di Asia Tenggara hingga Cina.

Ketika DN Aidit mendirikan kembali PKI secara legal pada awal tahun 1950-an dan kemudian menjadi Ketua Komite Sentralnya, Alimin ikut bergabung dan menjadi tokoh yang dituakan di partai. Ia masih sering didatangi oleh para pengagumnya. Ia sempat ikut ditahan dalam “razia Agustus 1951” oleh pemerintah kabinet Soekiman karena dicurigai ikut menggerakkan pemogokan para buruh, meski kemudian ia dibebaskan setelah kabinet jatuh.

Ia mengisi kursi dewan kontituante sejak 1955. Alimin masuk dalam lembaga yang ditugaskan membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Tugas ini tidak pernah selesai karena presiden segera membubarkan dewan ini pada 5 Juli 1959.

Sejak itu, Alimin fokus dalam partai PKI. Dengan jiwa yang cenderung moderat ditambah dengan usia yang telah lanjut, ia

diberi jabatan Sekretaris Propaganda partai meninggal dalam usia 74 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawanan Kalibata dan menjadi satu-satunya orang golongan Komunis yang dikebumikan di makam pahlawan. Alimin telah memberi kontribusi nyata dalam perjuangan bangsa. Ia tokoh komunis yang juga seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hanya berselang dua hari selepas kematiannya, presiden memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional atas jasa-jasanya kepada negara.

dr. Moewardi



Lahir: Pati, Jawa Tengah, 1907| **meninggal:** Surakarta, Jawa Tengah, 13 September 1948| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 190 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 4 Agustus 1964

■ Dokter Pejuang

Ia memang dokter, tapi jiwa mudanya menggelora saat Belanda datang lagi ke Indonesia. Ia ikut bertempur melawan penjajah. Ia kerahkan orang-orangnya untuk mengamankan lapangan Ikada, saat akan diadakan proklamasi kemerdekaan, meski batal. Ia juga yang mengerahkan orang-orang barisan pelopor untuk menjaga rumah presiden dan wakil presiden di Jakarta. Ia seorang dokter yang punya peran vital dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Muwardi yang lahir di Pati ini hijrah ke Batavia untuk studi kedokteran di STOVIA. Ia memperdalam pengetahuan sebagai spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Sewaktu di STOVIA, ia memasuki organisasi Jong Java. Ia pernah pula menjadi anggota

Indonesia Muda. Organisasi pramuka pun diikuti dan pernah menjadi pimpinan umum Pandu Kebangsaan yang kemudian berganti nama menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia [KBI].

Pada masa pendudukan Jepang, Muwardi menjadi pemimpin Barisan Pelopor daerah Jakarta. Beberapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia diangkat menjadi pemimpin Barisan Pelopor seluruh Jawa. Pada 16 Agustus 1945, anggota Barisan Pelopor dikerahkannya mengawal Lapangan Ikada, sebab menurut rencana di tempat itulah Proklamasi Kemerdekaan akan diucapkan. Sesudah proklamasi diumumkan, Muwardi membentuk Barisan Pelopor Istimewa sebagai pengawal pribadi Presiden Sukarno. Saat Kabinet Presidensiil terbentuk, ia diminta untuk menjadi menteri pertahanan, tetapi ditolaknya sebab ingin terus praktik sebagai dokter.

Permulaan tahun 1946, pusat kegiatan Barisan Pelopor dipindahkan ke Solo. Namanya berganti menjadi Barisan Banteng. Cabang-cabang Barisan Banteng dibentuk di daerah-daerah lain. Khusus untuk daerah Solo didirikan Divisi Laskar Banteng. Bersama anak buahnya, Muwardi turut bertempur melawan musuh. Ketika masih berada di Jakarta, ia ikut dalam pertempuran melawan Inggris di Klender. Di samping itu, tugas sebagai dokter tetap dijalankannya. Bersama dokter-dokter lain, ia mendirikan Sekolah Kedokteran di Jebres, Solo dan kemudian pindah ke Klaten.

Selepas Perjanjian Renville, situasi politik di tanah air menjadi panas. Gesekan antar golongan terjadi. Orang-orang kiri yang merasa tidak puas berusaha membuat sabotase. Kota Solo yang dekat

dengan ibu kota, dijadikan daerah percobaan. Laskar-laskar kiri dan orang-orang yang pro pemerintah saling serang, saling culik dan membunuh. Dalam situasi gawat seperti itu, dr. Muwardi mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner. Sementara itu, praktik sebagai dokter tetap ia jalankan. Peristiwa yang berujung pada “Madiun affair” itu membahayakan nyawa Muwardi dan itu benar-benar terjadi.

Pada 13 September 1948, anggota staf Barisan Banteng melarangnya pergi ke rumah sakit, tetapi ia tidak mengindahkan. Ia datang rumah sakit Jebres untuk melakukan operasi terhadap seorang pasien. Sewaktu menjalankan tugas sebagai dokter itulah, ia diculik oleh sekelompok orang dari golongan kiri dan kemudian dibunuh. Atas jasa-jasanya dalam mendukung kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah menetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tahun 1964.

Wahid Hasyim



Lahir: Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914 | **meninggal:** Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 206 Tahun 1964 | **tanggal penetapan:** 24 Agustus 1964

■ Pembaharu dari NU

Wahid Hasyim merupakan seorang cendekiawan Islam. Ia adalah putra dari Hasyim Asyari pendiri Nadlatul Ulama. Sebagai anak kyai, Wahid Hasyim kecil hidup di lingkungan pesantren Jombang. Ia mengenyam pendidikan di bangku Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng. Setamat dari madrasah beberapa kali masuk *nyantri* di pesantren. Wahid Hasyim tidak pernah belajar di sekolah binaan pemerintah Hindia Belanda, tetapi ia mahir berbahasa Inggris dan Belanda. Kemampuan itu ia pelajari secara otodidak dengan membaca majalah dari luar negeri. Wahid Hasim pernah dikirim ke Mekah pada tahun 1932 sampai 1934. Selain menunaikan ibadah Haji, perjalanan ke tanah suci juga untuk memperdalam ilmu

agama. Beberapa tahun sekembalinya dari Mekah ia memutuskan masuk ke dalam organisasi NU.

Ia membuat “gebrakan” baru dalam dunia pendidikan di lingkungan pesantren dengan memadukan pola pengajaran pesantren (berbasis agama) dan pelajaran ilmu umum. Selain Bahasa Arab, murid para siswa pun dibekali Bahasa Inggris juga Belanda. Wahid Hasyim memasukkan unsur modern karena ia menilai beberapa hal dalam pendidikan pesantren tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Perubahan metode pengajaran diimbangi pula dengan adanya perpustakaan. Pada waktu itu, perpustakaan merupakan suatu kemajuan luar biasa dalam lingkup pesantren. Wahid Hasyim mendambakan munculnya sebuah proses belajar mengajar yang dialogis. Posisi guru ditempatkan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Proses belajar mengajar berorientasi pada murid sehingga potensi yang dimiliki akan terwujud dan ia akan menjadi dirinya sendiri.

Dalam karier politik, Wahid Hasim pernah menjabat sebagai ketua PBNU, Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia juga tercatat sebagai Menteri Agama di tiga periode pemerintahan: Kabinet RIS (Desember 1949-Desember 1950), Kabinet Mohammad Natsir (September 1950- April 1951), dan Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952).

Wahid Hasim memiliki sumbangsih dalam pembentukan dasar Negara Republik Indonesia. Sewaktu menjadi anggota BPUPKI,

ia dan beberapa kawan berhasil merumuskan dasar Negara yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 22 Juni 1945, di salah satu alinea, antara lain tercantum kata-kata “ kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Akan tetapi, rumusan ini diperdebatkan dalam sidang BPUPKI berikutnya. Wongsonegoro, misalnya, menganggap bahwa anak kalimat itu bisa menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa umat Islam menjalankan syariatnya. Akan tetapi, menurut Wahid Hasyim, kalimat tersebut tidak akan berakibat sejauh itu. Ia juga mengingatkan bahwa segala perselisihan yang timbul bisa diselesaikan secara musyawarah.

Pemikiran lain Wahid Hasim juga sempat mewarnai rancangan pertama UUD. Ia pernah mengusulkan agar pada Pasal 4 ayat 2 rancangan UUD disebutkan bahwa yang dapat menjadi Presiden dan wakilnya adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Selain itu, pada Pasal 29, Wahid Hasyim menginginkan rumusan sebagai berikut: “Agama Negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan bagi orang-orang yang beragama lain untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.” Alasannya jika presidennya Islam, perintahnya akan dengan mudah dipatuhi rakyat yang mayoritas muslim. Selain itu, Islam sebagai agama negara mendorong umat Islam berjuang membela negaranya. Dengan alasan itulah akhirnya, gagasan mantan Ketua Masyumi itu diterima.

Wahid Hasim meninggal pada tanggal 19 April 1953, akibat kecelakaan yang terjadi sehari sebelumnya di daerah Cimahi-Bandung. K. H. Ir. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mengenangnya,

“Kiai Wahid adalah seorang tokoh NU dari jenis yang tidak banyak kita temukan, yaitu pemimpin organisatoris, jenis “pekerja” bukan “pembicara”. Kiai Wahid dikenal juga sebagai *man of action* bukan jenis *man of ideas*. Ia juga tidak hanya pandai melontarkan gagasan, tetapi bisa mewujudkannya”

Sri Susuhunan Pakubuwana VI



Lahir: Surakarta, Jawa Tengah, 26 April 1807 | **meninggal:** Ambon, 2 Juni 1849 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 294 Tahun 1964 | **tanggal penetapan:** 17 November 1964

■ Sekutu “dalam selimut” Diponegoro

Nama aslinya adalah Raden Mas Sapardan. Ia dilahirkan pada tanggal 26 April 1807. Sri Susuhunan Pakubuwana VI naik takhta tanggal 15 September 1823, selang sepuluh hari setelah kematian ayahnya. Ia dijuluki pula dengan nama Sinuhun Bangun Tapa, karena kegemarannya melakukan tapa brata.

Kiprahnya dalam melawan penjajahan kolonial yakni dengan mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro secara diam-diam. Pangeran Diponegoro memilih berontak kepada Kesultanan Yogyakarta karena kebijakan kraton sudah dipengaruhi oleh orang-orang Belanda. Karena posisinya sebagai sunan juga terikat perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda, Sunan Pakubuwana berusaha menutupi persekutuannya dengan Pangeran Diponegoro.

Tertulis dalam babad bahwa dikisahkan Pakubuwono VI pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau bertapa di Hutan Krendawahana. Padahal sebenarnya, ia pergi menemui Pangeran Diponegoro secara diam-diam. Pangeran Diponegoro juga pernah menyusup ke dalam keraton Surakarta untuk berunding dengan Pakubuwana VI seputar sikap Mangkunegaran dan Madura. Ketika Pasukan Belanda masuk, mereka pura-pura bertikai dan saling menyerang. Dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Pakubuwana VI menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan, ia juga mengirim pasukan untuk pura-pura membantu Belanda. Pujangga besar Ranggawarsita mengaku semasa muda dirinya pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut.

Perlawanan Pangeran Diponegoro berhasil disudahi Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 28 Maret 1830. Paska penangkapan hubungan Pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Surakarta menjadi renggang dikarenakan Pakubuwana VI menolak penyerahan beberapa wilayah Surakarta kepada Belanda. Selain persoalan tanah tersebut, Belanda juga mencurigai hubungan antara Diponegoro dan Pakubuwana VI sewaktu perang Jawa. Untuk mencari bukti keterlibatan Sultan Surakarta, Belanda menangkap Mas Pajangswara (Juru tulis Istana) untuk dimintai keterangan. Karena tidak mau membuka mulut, Mas Pajangswara disiksa hingga tewas. Pada tanggal 8 Juni 1830, Pakubuwana VI ditangkap dengan alasan bahwa Mas Pajangswara sudah membocorkan semuanya. Ia kemudian dibuang ke Ambon. Kedudukan sultan kemudian dipegang oleh paman Pakubuwana VI, yang bergelar Pakubuwana VII.

Pakubuwana VI meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juni 1849. Menurut laporan resmi pemerintah, ia meninggal karena kecelakaan saat berpesiar di laut. Jasadnya dibawa pulang untuk dimakamkan komplek Makam Raja Mataram di Imogiri pada tahun 1957. Pada saat penggalian makam, ditemukan bukti bahwa tengkorak Pakubuwana VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisis Jend. TNI Pangeran Haryo Jatikusumo (putra Pakubuwana X), lubang tersebut seukuran peluru senapan Baker Riffle. Ditinjau dari letak lubang, Pakubuwana VI jelas bukan mati karena bunuh diri, apalagi kecelakaan saat berpesiar. Sunan Pakubuwana VI ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964.

Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyari



Lahir: Jombang 10 April 1875 | **meninggal:** Jombang 25 Juli 1947 | **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 294 Tahun 1964 | **tanggal penetapan:** 17 November 1964

■ Hadratus Syaikh dari Tebuireng

Ia ulama besar yang disegani kaum Islam, juga seorang pemimpin yang cerdas. Ibunya pernah bermimpi melihat bulan jatuh dari langit ke dalam kandungannya. Bagi orang Jawa, itu adalah tanda, sebuah wahyu bahwa sang bayi kelak akan jadi pemimpin besar. Dalam usia muda, 13 tahun, ia telah tunjukkan bakat kecerdasannya. Ia telah jadi guru pengganti di pesantren, mengajar para santri yang terkadang berumur jauh di atasnya. Sekali waktu, ia singgah di Tebuireng, mendirikan rumah bambu dan menjadi pusat belajar kaum santri. Embrio Pesantren Tebuireng dimulai sejak detik itu, hingga di abad 20, Tebuireng menjadi pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Menjadi sumber ulama dan pemimpin pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Gurunya, Mohammad Cholil, menaruh hormat

[102]

dan balik menimba ilmu darinya hingga orang-orang yang takzim padanya menyebut sang ulama dengan gelar: *Hadratus Syaikh* [Maha Guru].

Mohammad Hasyim Asyari merupakan putra ulama dan dipercaya masih memiliki warisan darah Sunan Giri. Ayahnya, Kyai Ashari, merupakan pemimpin Pesantren Keras di selatan Jombang. Ibunya, Halimah, merupakan putri Kyai Usman, pendiri dan pengasuh pesantren Gedang Jawa Timur juga seorang pemimpin Thariqah ternama pada akhir abad 19. M. Hasyim merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Sejak kecil ia sudah hidup di lingkungan pesantren dan bergaul dengan sesama santri. Mula-mula ia mendapat pendidikan agama dari ayah dan kakeknya, kemudian di pesantren-pesantren lain, seperti Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang, pesantren Demangan Bangkalan Madura yang diasuh oleh Kyai Haji Mohammad Cholil dan akhirnya ke pesantren Siwalan Sidoarjo. Di Pesantren Siwalan, ia belajar pada kyai Jakub yang kemudian mengambilnya sebagai menantu. Pada tahun 1893, ia naik haji untuk kedua kali dan tinggal di Mekah selama tujuh tahun untuk memperdalam pengetahuan agama. Dalam perjalanannya pulang, ia singgah di Johor, Malaysia dan mengajar di sana. Setelah pulang, pada 1899, ia bekerja di pesantren kakeknya, pesantren Gedang.

Di tahun yang sama pula, Hasyim membeli sebidang tanah di Dukuh Tebuireng, 1 kilometer timur desa Keras. Ia membangun pondok bamboo dan segera membuka pesantren sendiri bernama Pesantren Tebuireng. Di masa awal, santrinya hanya berjumlah

8 orang. Tapi Tebu Ireng terus berkembang, menerima berpuluh-puluh murid, dan mengajarkan Al quran dan hadits. Perkembangan pesantren Tebuireng kemudian masuk dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda hingga pada 1913, polisi Belanda pernah mengeledah pesantren Tebuireng.

Pada 31 Januari 1926, Hasyim Ashari mendirikan Nadhlatul Ulama [NU] dan ia segera menjadi rais akbar [ketua] pertama. NU kemudian menjadi organisasi Islam yang besar dan nama sang ulama semakin tenar. Pemerintah kolonial mencoba merangkulnya dengan memberikan anugerah bintang jasa pada 1937, tapi Hasyim menolaknya. Ia terus menentang Belanda, salah satu jalannya, ia pernah membuat fatwa haram naik haji dengan kapal Belanda. Umat Islam Hindia banyak yang mengikutinya, hingga van der Plas, gubernur Jawa Timur kolonial, kebingunan karena banyak jamaah batal naik haji. Tentu pemerintah kolonial rugi besar.

Di masa awal pendudukan Jepang, Hasyim menolak perintah seikerei, membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjara selama 4 bulan. Ia baru keluar pada 18 Agustus 1942. Ia bebas karena banyak kyia protes dan banyak santri yang meminta ditahan bersama Hasyim. Setelah itu, Hasyim kembali ke Tebuireng, kembali ke pesantrennya. Hanya berselang dua tahun, tentara Sekutu dan terutama NICA, datang ke Hindia Belanda. Hasyim segera bergerak untuk menentang kedatangan mereka. Hasyim bersama para ulama menyerukan jihad melawan Sekutu di Surabaya. Hasilnya para santri membentuk laskar perjuangan dan aktif terlibat dalam pertempuran Surabaya, 10 November 1945.

Sebelum itu, Hasyim masih sempat menghadiri kongres umat Islam di Yogyakarta dan merumuskan berdirinya Masyumi. Hasyim yang memiliki kharisma besar diangkat menjadi pemimpin pertamanya.

Saat perundingan Linggajati yang diteken pada November 1946 mengalami kebuntuan, Belanda segera melancarkan aksi militer pertamanya. Bahkan pada 21 Juli 1947, malam hari, tentara Belanda telah menyerbu wilayah Jawa Timur. Pertempuran terus terjadi. Banyak rakyat yang menjadi korban. Ditengah-tengah peperangan ini, saat mendengar tentara Belanda telah menyerbu Singosari Malang, Hasyim Ashari meninggal dunia dalam usia 72 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan pesantren Tebuireng. Atas jasa-jasanya dalam kegiatan keagamaan dan perjuangan bangsa, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1964.

Raden Mas Tumenggung Ario Suryo



Lahir: Magetan, Jawa Timur, 9 Juli 1898| **meninggal:** Bago, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur, 10 September 1948| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 294 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 17 November 1964

■ Sang Gubernur Sejati

Raden Mas Tumenggung Ario Suryo, lahir di Magetan pada 9 Juli 1898. Setelah menyelesaikan studi dari *Hollandsch-Inlandsche School* atau HIS (setingkat Sekolah Dasar), ia melanjutkan sekolah ke *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Magelang, yang tak lain adalah sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai bumiputra. Setelah tamat pada 1918, ia bekerja sebagai pamong praja di Ngawi. Dua tahun kemudian dipindahkan ke Madiun sebagai Mantri *Veldpolitie*. Pada tahun 1922 Ario Suryo mendapat kesempatan menempuh pendidikan polisi di Sukabumi. Setelah menjalani masa kerja sebagai asisten wedana di beberapa tempat, ia kembali mendapat kesempatan belajar, kali ini di *Bestuurs School* di Batavia.

Pengalaman pendidikan Aryo Suryo menunjang karier dalam pemerintahan selama tiga periode. Ia diangkat sebagai wedana dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian menjadi Bupati Magetan pada tahun 1938 hingga berakhirnya masa pemerintahan Belanda. Di era pendudukan Jepang, ia dipercaya memegang jabatan Syucokan (Residen) Bojonegoro. Paska Kemerdekaan Republik Indonesia, Aryo Suryo didapuk menjadi Gubernur Jawa Timur berkedudukan di Surabaya.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Aryo Suryo menghadapi situasi kritis paska pendaratan pasukan Inggris di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1945. Kedatangan pasukan Inggris untuk melucuti tentara Jepang. Akan tetapi, bersamaan pasukan Inggris terdapat *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) bentukan Belanda yang berupaya menguasai kembali wilayah Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan bentrokan hebat pada tanggal 28-30 Oktober 1945 dan Brigadir Jenderal Mallaby terbunuh. Inggris sangat marah. Tanggal 9 Nopember 1945 mereka mengeluarkan ultimatum agar semua orang Indonesia bersenjata api harus menyerahkannya kepada Inggris selambat-lambatnya pukul 18.00 tanggal 9 Nopember 1945. Apabila ultimatum itu tidak dipenuhi, Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara.

Aryo Suryo sebagai perwakilan pemerintah RI di Jawa timur diberi kebebasan untuk melakukan kebijakan apa pun oleh pemerintah pusat di Jakarta. Setelah berunding dengan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pukul 23.00 malam tanggal 9 Nopember 1945, ia berpidato di depan corong radio menolak

ultimatum Inggris. Keesokan harinya, meletus pertempuran dahsyat antara arek-arek Suroboyo melawan tentara Inggris. Peristiwa tersebut dikenal dengan Pertempuran Surabaya, dan tanggal terjadinya bentrok diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Selepas Pertempuran Surabaya, tahun 1947, Aryo Suryo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Takdir merenggut nyawanya tatkala mengadakan perjalanan dinas di desa Bago, Kedunggalar (Ngawi) pada 10 September 1948. Ia dicegat dan dibunuh oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di tahun tersebut kondisi dalam negeri sedang terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dengan PKI berbasis di Madiun yang dikomando Muso dan Amir Syarifuddin. Jenazahn Aryo Suryo ditemukan empat hari kemudian, dan dimakamkan di Magetan.

Letnan Jenderal Urip Sumoharjo



Lahir: Purworejo, Jawa Tengah, 23 Februari 1893 | **meninggal:** Yogyakarta, 17 November 1948| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 314 Tahun 1964| **tanggal penetapan:** 10 Desember 1964

■ Bapak Tentara Indonesia

Ia memang seorang tentara professional. Seorang anggota KNIL dari suku Jawa. seorang yang disegani dalam tubuh tentara Indonesia di masa awal kemerdekaan. Dalam hiruk-pikuk menjelang proklamasi, ia memang absen dari dunia militer dan memilih menepi di lereng Merapi. Akan tetapi, semenjak Indonesia merdeka dan pemerintah terbentuk, namanya diingat dan segera dicari. Pengalamannya dibutuhkan untuk membentuk tentara Indonesia. Bagaimanapun negara yang baru berdiri butuh tentara, seperti ucapnya sendiri *“aneh, suatu negara zonder [tanpa] tentara”*.

Awalnya lelaki asli Purworejo ini tidak ingin menjadi tentara. Sejak remaja ia mungkin hanya ingin jadi pegawai pemerintah. Selepas sekolah dasar di daerah kelahirannya, ia pergi ke Magelang

dan sekolah di OSVIA, sekolah pamong pemerintah Hindia. Akan tetapi, di Magelang, yang juga terkenal dengan kota militer, ia justru berubah pikiran, ingin jadi tentara. Maka Selepas menyelesaikan sekolahnya, ia berangkat ke Batavia dan masuk pendidikan *Islandsche Officier* di Jatinegara selama tiga tahun [1911-1914]. Selepas lulus ia berpangkat letnan dua, mulai menjalani dinas pertamanya sebagai anggota KNIL [tentara Hindia Belanda]. Perhatiannya terhadap kaum pribumi begitu besar. Sering kali ia mengeluarkan protes mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang Indonesia. Ia bertugas di beberapa tempat di Kalimantan dan di Padangpanjang, Sumatra Barat selama beberapa tahun lamanya.

Pada 1938, ia telah berpangkat mayor KNIL dan bertugas di Purworejo, ia bersikap tegas, mengundurkan diri dari dinas militer sebagai protes terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya saat dipindahkan ke Gombong. Setelah PD II meletus, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan mobilisasi. Ia mendaftarkan kembali dan disertai tugas memimpin depo Cimahi. Tahun 1942 semua tentara Belanda ditawan Jepang, termasuk dirinya. Setelah Oerip dibebaskan, Jepang menawarkan jabatan sebagai komandan polisi namun ia menolaknya. Ia lebih memilih menyepi di desa Gentan di lereng gunung Merapi, di utara Yogyakarta.

Akan tetapi, setelah republik Indonesia berdiri, beberapa tokoh tentara bekas KNIL yang berada dalam pemerintahan Indonesia segera mencarinya. Ia dibutuhkan karena pengalamannya yang matang dalam militer. Ia seorang tentara senior yang saat itu berumur 52 tahun. Ia lalu disertai tugas dari pemerintah

untuk segera membentuk tentara Indonesia. Lalu lahirlah Tentara Keamanan Rakyat, ia diangkat sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal. Dua bulan kemudian barulah pemerintah mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. Untuk penyempurnaan lebih lanjut dibentuk Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Oerip duduk sebagai anggota. Di sini buah pikirannya banyak dipakai. Hasil kerja panitia itu disetujui pemerintah, untuk kedua kalinya pada 20 Mei 1946, Letjen Oerip dikukuhkan sebagai Kepala Staf Umum tentara Indonesia. Dengan segala kesulitan yang dihadapi, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo bekerja keras menyempurnakan organisasi tentara Indonesia. Untuk melahirkan militer profesional, ia memrakarsai pembentukan Akademi Militer yang kemudian disetujui pemerintah.

Saat pemerintah Indonesia menerima Persetujuan Renville pada Januari 1948, Oerip Soemohardjo mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf Angkatan Perang, sebab ia tidak setuju dengan politik kompromi dengan Belanda. Akan tetapi, ia masih diangkat sebagai penasihat militer Presiden Soekarno. Lalu, selepas dua bulan peristiwa “Madiun Affair” yang membuat pemerintah dan tentara harus berjuang memadamkan pemberontakan kaum kiri di Madiun, Oerip tiba-tiba terkena serangan jantung. Ia meninggal pada usia 55 tahun dan Jenazahnya segera dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki [Kusumanegara] Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam membentuk tentara Indonesia yang begitu besar dan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1964.

Prof. Dr. Soepomo



Lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903|
meninggal: Jakarta, 12 September 1958| **gelar:** Pahlawan
Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No.
123 Tahun 1965| **tanggal penetapan:** 14 Mei 1965

■ Ahli hukum asal Sukoharjo

Soepomo kecil memasuki *Europeesche Lagere School* (ELS), ia melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Ia juga lulus dari sekolah hukum pada 1923, kemudian bekerja di Pengadilan Negeri Surakarta. Musabab ingin memperdalam ilmu hukumnya, Supomo berangkat ke Belanda dan masuk Universitas Leiden. Ia berhasil memperoleh gelar doktor, lalu kembali ke Hindia Belanda dan bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Supomo sudah tertarik bidang hukum semenjak muda. Pada tahun 1928, selaku anggota *Jong Java*, ia menulis artikel berjudul “Perempuan Indonesia dalam Hukum sebagai sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia”.

Kemudian di tahun 1933, ia menyelidiki masalah hukum adat di Jawa Barat, hasilnya terbit monografi mengenai hukum adat privat Jawa Barat. Ia pun menjadi kontributor tulisan perihal hukum dalam majalah *Indisch Tijdschrift van het Recht*. Jabatan penting yang disandanginya pada periode ini antara lain Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat Indonesia, Ketua Landraad Purworejo, pegawai tinggi pada Departemen van Justitie, dan Guru Besar pada Sekolah Hakim Tinggi.

Dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum dan tata negara, pada masa pendudukan Jepang, Supomo duduk sebagai anggota Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI). Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Presidensiil. Supomo merupakan salah satu Guru Besar di Universitas Gajah Mada (UGM). Karier berikutnya antara lain; menjadi Menteri Kehakiman dan menjadi Rektor Universitas Indonesia pada 1951. Supomo Meninggal dunia di Jakarta pada 12 September 1958, lalu dimakamkan di Solo.

Dr. Kusumah Atmaja S.H.



Lahir: Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 8 September 1898| **meninggal:** Jakarta, 11 Agustus 1952| **gelar:** Pahlawan Kemerdekaan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 124 Tahun 1965| **tanggal penetapan:** 14 Mei 1965

■ Hakim Agung pertama RI

Saat itu usia Republik Indonesia belum genap setahun. Di Yogyakarta, ibu kota negara, suasana genting melanda. Sekelompok orang dari Persatuan Perjuangan menculik perdana menteri di Jakarta dan beberapa menteri kabinet. Keadaan darurat diberlakukan. Pada 3 Juli 1946, pelaku utama datang ke Istana negara membawa tuntutan pembubaran kabinet, tetapi presiden menolak dan segera menangkap orang-orang Persatuan Perjuangan, termasuk tokoh-tokoh intelektualnya. Inilah kudeta pertama di Indonesia yang gagal dan tokoh-tokohnya segera diadili. Tugas berat mengadili ini jatuh pada Kusumah Atmaja. Ia harus mengadili teman-temannya sendiri yang terlibat kudeta. Satu ungkapan terkenal darinya, *"Meskipun*

bumi runtuh dan langit pun jatuh, keadilan harus ditegakkan!”. Ia seorang hakim yang tegas demi hukum tanpa pandang bulu.

Sang pengadil ini bernama lengkap Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja. Ia Ketua Mahkamah Agung RI pertama. Anak priyayi ini mengenyam pendidikan sekolah dasarnya di kota kelahirannya. Selepas menamatkan ELS, ia pergi ke Batavia untuk studi hukum di *Rechtschool* pada 1919. Kemudian ia meneruskan pendidikan di Universitas Leiden dan menyandang gelar doctor in *de Rechtsgeleerdheid* [doktor Ilmu Hukum] pada 1922.

Pulang ke Hindia Belanda, Kusumah Atmadja menjadi hakim di *Raad Van Justitie* [setingkat Pengadilan Tinggi] Batavia. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi *Voor Zitter Landraad* [Ketua Pengadilan Negeri] Indramayu. Setelahnya, ia pernah juga menjadi hakim pengadilan tinggi Padang, ketua pengadilan negeri Semarang, dan hakim pengadilan tinggi Semarang.

Pada masa pendudukan Jepang, Kusumah Atmaja tetap bekerja di bidang pengadilan, dan berusaha sebisa-bisanya untuk membela kepentingan rakyat kecil. Pada 1942, ia menjabat sebagai ketua *Tihoo Hooin* [Pengadilan Negeri] di Semarang. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Pemimpin Kehakiman Jawa Tengah pada 1944. Ia juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada 1945.

Sesudah Indonesia merdeka, ia ditugasi membentuk Mahkamah Agung dan diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia bertugas pula sebagai guru besar Sekolah

Tinggi Kepolisian dan Universitas Gajah Mada. Dua kali ia diangkat menjadi penasihat delegasi Indonesia dalam Perundingan Linggajati dan Konferensi Meja Bundar [KMB]. Saat kekacauan melanda, Belanda pernah membujuknya agar mau bekerjasama. Pada 1947, ia ditawarkan menjadi wali Negara Pasundan dan menjadi Ketua Mahkamah Agung bentukan Belanda. Kedudukan itu jelas tinggi dan uang yang diterima juga pasti tinggi. Akan tetapi, kedua tawaran itu ditolaknya dengan tegas. Ia lebih memilih mendukung Republik Indonesia.

Saat terbentuk RIS [Republik Indonesia Serikat] pada 1949, Kusumah Atmaja tetap memegang jabatan Ketua Mahkamah Agung. Setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan RI, ia juga masih memegang jabatan yang sama. Jabatan penting ini terus dijalankan hingga ia meninggal dalam usia 53 tahun di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya dalam membentuk tatanan hukum dan pengadilan Indonesia, pemerintah memberi anugerah gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1965.

Jenderal Ahmad Yani



Lahir: Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922|
meninggal: Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965|
gelar: Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres No. 111/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 5 Oktober 1965

■ Jenderal dari Purworejo

Ia ikut ambil bagian dalam mengusir pasukan Sekutu dari Magelang yang berhasil didesak ke Ambarawa hingga Semarang. Ia membentuk pasukan Banteng Raiders dengan latihan-latihan khusus, waktu ditugaskan menghancurkan gerombolan DI/TII Jawa Tengah. Salah satu keahlian yang diperolehnya dari pendidikan pada *Command and General Staff College di Fort Leavenworth* (Amerika Serikat) adalah mengenai operasi gabungan. Keahlian ini dipraktikannya untuk pertama kali dalam menumpas Pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra Barat. Operasi yang dikenal dengan nama Operasi 17 Agustus ini dipersiapkan dalam waktu singkat, matang, dan berhasil dengan baik. Setelah itu, ia memegang jabatan-jabatan penting dalam Angkatan Darat, termasuk menjadi KSAD pada 1962.

[117]

Jenderal TNI Anumerta Achmad Yani mengawali pendidikan formal di HIS Bogor yang diselesaikannya pada 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke MULO kelas B dan tamat pada 1938. Selanjutnya, ia masuk AMS bagian B di Jakarta. Sekolah ini dijalannya hanya sampai kelas dua, sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ia kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana ia mengawali karier militernya dengan pangkat Sersan. Setelah tahun 1942, dimasa Jepang, ia mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk tentara Pembela Tanah Air [PETA] di Bogor.

Setelah Tentara Keamanan Rakyat [TKR] terbentuk, ia diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika Agresi Militer Pertama Belanda terjadi, pasukan Achmad Yani yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda di daerah itu. Maka saat Agresi Militer Kedua Belanda terjadi, ia dipercayakan memegang jabatan sebagai Komandan Wehrkreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia diserahi tugas untuk melawan DI/TII. Ia berhasil dengan baik. Setelahnya, ia menjadi Staf Angkatan Darat.

Pada 1955, Achmad Yani disekolahkan pada *Command and General Staff College* di Fort Leaven Worth, Kansas, USA selama sembilan bulan. Pada tahun 1956, ia juga mengikuti pendidikan selama dua bulan pada *Special Warfare Course* di Inggris. Tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatra Barat, Achmad Yani yang masih berpangkat Kolonel diangkat menjadi Komandan

Komando Operasi 17 Agustus untuk memimpin penumpasan pemberontakan PRRI dan berhasil menumpasnya. Hingga pada tahun 1962, ia diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Situasi memanas di tahun 1965. Pada 1 Oktober terjadi aksi klandestin Gerakan 30 September. Sebuah kekisruhan di tubuh Angkatan Darat membawa akibat fatal. Sekelompok tentara gelap mendatangi rumah Achmad Yani, memaksa masuk dan menembak mati Yani di depan kamar tidurnya. Jenazahnya kemudian dibawa ke Lubang Buaya Jakarta Timur. Jenazahnya segera dicari dan kemudian dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Revolusi kepada Achmad Yani yang ditetapkan tepat di hari peringatan angkatan bersenjata RI pada 1965.

Letnan Jenderal Suprpto



Lahir: Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920 |
meninggal: Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober 1965|
gelar: Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres
No. 111/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 5 Oktober
1965

■ Jenderal korban G 30 S

Menjelang Oktober 1965, situasi telah panas. Angkatan Darat didera isu yang serius akibat munculnya isu adanya dewan jenderal yang tidak jelas. Yang diakui oleh para perwira tinggi AD di Jakarta adalah dewan Wanjakti [Dewan Kebijakan Tertinggi], sebuah dewan yang bertugas menilai kenaikan pangkat perwira tinggi AD. Salah satu anggota dewan ini memang Jenderal Suprpto. Akan tetapi, isu dewan militer yang akan kudeta membuat segalanya berakhir tragis. Suprpto diculik dari rumahnya dan dibunuh di Lubang Buaya pada pagi buta Oktober 1965.

Suprpto yang berasal dari Purwokerto semasa muda menempuh pendidikan formal di MULO dan AMS Bagian B di

Yogyakarta yang diselesaikannya pada 1941. Setelahnya, ia memulai pendidikan militernya. Ia memasuki pendidikan militer pada *Koninklijke Militaire* Akademie Bandung. Pendidikan ini tidak bisa diselesaikannya sampai tamat karena pasukan Jepang telah datang di Hindia Belanda pada 1942. Oleh tentara Jepang, ia ditawan dan dipenjarakan, tetapi kemudian ia berhasil melarikan diri. Selepas pelariannya dari penjara, ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, latihan *keibodan* [barisan pembantu polisi], *seinendan* [barisan pemuda], dan *syuisyintai* [barisan pelopor]. Setelah itu, ia bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat.

Saat revolusi kemerdekaan berkecamuk dimana-mana, ia terlibat pelucutan senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara Indonesia. Selama bergabung dengan TKR, ia ikut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Soedirman. Ia menjadi salah satu ajudan Panglima Besar.

Selepas Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial (T&T) IV/ Diponegoro di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Setelah pemberontakan PRRI/Permesta padam, ia diangkat menjadi Deputy Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatra yang bermarkas di Medan. Selama di Medan tugasnya sangat berat sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi.

Saat itu pangkat Suprpto adalah Mayor Jenderal dan akibat aksi klandestin sekelompok tentara yang menyebut diri G 30 S pada 1 Oktober 1965. Atau pada masa itu disebut dengan Gestok, Suprpto harus mengakhiri kiprah dan pengabdianya di Angkatan Darat untuk selamanya. Perwira senior ini terbunuh di Lubang Buaya dalam usia 45 tahun. Jenazahnya kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dalam upacara militer. Pemerintah segera menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi letnan jenderal dan empat hari selepas kematiannya, ia diangkat menjadi Pahlawan Revolusi.

Letnan Jenderal Haryono



Lahir: Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari 1924 |
meninggal: Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965|
gelar: Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres
No. 111/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 5 Oktober
1965

■ Jenderal Pemikir

Ia seorang perwira cerdas, menguasai 3 bahasa asing Belanda, Inggris serta Jerman. Karena kemampuan itu pula, ia pernah dilibatkan dalam perundingan KMB di Den Haag, sebagai sekretaris delegasi militer Indonesia. Perwira ini memang jarang mendapat tugas lapangan, bertempur bersama pasukan. Ia lebih banyak berada dalam lingkungan staf AD. Walaupun begitu, bukan berarti ia tidak punya nyali. Di waktu terakhirnya, saat para penculik datang menyambangi rumahnya, ia sempat melawan. Dengan berani ia berusaha merebut senjata dari tangan “tentara hitam” meski gagal. Ia yang sendirian melawan gerombolan tentara yang lebih muda darinya akhirnya harus bertaruh nyawa. Ia tertembak beberapa kali dan meninggal saat itu juga di rumahnya.

Perwira ini bernama lengkap Mas Tirtodarmo Haryono. Ia keturunan seorang yang terpendang di kota Surabaya karena sanggup menempuh pendidikan di ELS hingga HBS. Pada masa pendudukan Jepang, ia memasuki **Ika Dai Gaku** [Sekolah Kedokteran] di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia berada di Jakarta dan segera menggabungkan diri dengan pemuda-pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Lalu, ia memasuki Tentara Keamanan Rakyat [TKR] dan memperoleh pangkat mayor.

Pada Maret 1946, karena kemampuan dalam penguasaan bahasa asing dan juga pendidikannya yang cukup tinggi, ia diangkat menjadi sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan Wakil Tetap pada Kementerian Pertahanan Urusan Gencatan Senjata dan sering disertakan dalam perundingan-perundingan dengan Belanda dan juga Inggris. Ia kemudian menjadi perwira Angkatan Darat yang lebih banyak bekerja di lingkungan staf daripada sebagai komandan pasukan. Pada akhir 1947, ia menjadi kepala kantor urusan pekerjaan Istimewa di Markas Umum Angkatan Darat. Menjelang Agresi militer Belanda kedua, tepatnya pada akhir Desember 1948, ia memikul tanggung jawab sebagai kepala Bagian pendidikan Angkatan Perang merangkap juru bicara Staf Angkatan Perang. Hingga puncaknya pada KMB, ia menjabat sebagai sekretaris Delegasi Militer Indonesia.

Pada 1950, ia bertugas di Negeri Belanda sebagai Atase Militer RI. Ia kemudian mendapat pangkat letnan kolonel pada 1951, dan tiga tahun kemudian ia telah kembali ke tanah air. Ia lalu diserahi bermacam-macam tugas dan jabatan di lingkungan Staf Angkatan

Darat, antara lain Direktur Intendans. Pada 1957, ia mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando AD di Bandung. Setahun berikutnya ia telah menjadi direktur Corps Intendans Angkatan Darat. Saat itu pangkatnya telah menjadi kolonel. Pada 1964 ia diangkat sebagai Deputy III Menteri Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) dengan pangkat mayor jenderal.

Saat situasi memanas di ibu kota menjelang Oktober 1965, ia menjadi salah satu perwira senior yang menolak rencana pembentukan Angkatan kelima. Di masa-masa ini pula ia dikaitkan dengan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Isu ini belum pernah terbukti, tetapi sayangnya Haryono menjadi korban kekisruhan politik maupun dalam tubuh Angkatan Darat.

Haryono adalah seorang perwira yang tidak menyukai Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan beberapa perwira lain, ia menolak rencana PKI untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri atas buruh dan tani. Oleh karena itu, ia dimusuhi PKI. Dinihari tanggal 1 Oktober 1965 PKI mulai melancarkan pemberontakan yang disebut “Gerakan Tiga Puluh September”. Mayor Jenderal M.T. Haryono mereka culik. Ia mengadakan perlawanan, tetapi tertembak. Mayatnya disembunyikan di Lubang Buaya. Setelah ditemukan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah segera menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi letnan jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi, empat hari selepas ia terbunuh di rumahnya.

Letnan Jenderal Siswondo Parman



Lahir: Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918|
meninggal: Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965|
gelar: Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres
No. 111/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 5 Oktober
1965

■ Perwira Intelijen yang gugur di Lubang Buaya

Ia seorang tentara intelijen yang mumpuni. Ia juga seorang pemikir dan penyusun organisasi militer yang handal. Ia pernah dijuluki “penasihat Agung”. Kemampuan dalam intelijen membuatnya mampu membongkar rahasia gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) Westerling yang akan membunuh tokoh-tokoh militer Indonesia pada 1950. Ia segera memimpin pasukan menuju hotel des Indes dan menangkap tokoh-tokoh gerakan, meski westerling melarikan diri. Sebagai perwira AD, ia menentang keras pembentukan angkatan kelima pada 1965, lalu masuk daftar hitam komplotan G 30 S karena tuduhan dewan Jenderal. Akibatnya ia disingkirkan dalam gerakan brutal di lubang buaya.

Siswondo Parman menghabiskan masa kecilnya di Wonosobo. Awalnya selepas dewasa, ia masuk sekolah kedokteran di GHS [*Geneeskundige Hogesschool*] Batavia. Akan tetapi, sekolah kedokterannya harus terhenti saat Jepang masuk pada 1942. Sebagai pemuda, ia kemudian tertarik dengan dunia militer dan akhirnya terpilih mengikuti pendidikan Kenpei Kasya Butai di negeri Jepang, sebuah pendidikan khusus intelijen.

Selepas kembali ke tanah air, ia segera bekerja di jawatan Kenpetai. Setelah Proklamasi Indonesia, ia masuk ke Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Awal kariernya di militer dimulai dengan mengikuti Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yaitu Tentara RI yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Pada akhir bulan Desember 1945, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara (PT) di Yogyakarta.

Sepanjang Agresi Militer II Belanda, ia turut berjuang dengan melakukan perang gerilya. Pada Desember 1949, ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Salah satu keberhasilannya saat itu adalah membongkar rahasia gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang akan melakukan operasinya di Jakarta di bawah pimpinan Westerling pada 1950, gerakan ini akan membunuh menteri pertahanan HB IX, kepala Staff TB Simatupang, dan Ali Budiardjo. Parman menggagalkan aksi ini dan menangkap pelakunya. Setahun berikutnya, ia dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di *Association Military Company Officer*.

Setelah kembali dari Amerika Serikat, ia menjadi Kepala Staff Umum AD. Lalu menjadi tenaga pengajar di pusat pendidikan AD.

Ia lalu ditugaskan di Kementerian Pertahanan. Pada September 1956, ia diangkat menjadi Kepala Bagian Material Kementerian Pertahanan. Tugasnya dianggap bagus dan ia berpangkat colonel saat itu. Berikutnya ia diangkat menjadi Atase Militer RI di London, Inggris pada 1959. Tiga tahun berikutnya, ia diserahi tugas sebagai Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) hingga pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal pada Agustus 1964.

Ketika menjabat Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) inilah ia tiba-tiba disebut-sebut menjadi bagian dari Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan pengambilan kekuasaan. Tuduhan ini tidak pernah terbukti karena kemudian komplotan G 30 S mengambil tindakan semena-mena terhadap Jenderal Parman. Ia diculik dari rumahnya dan dibawa ke lubang buaya pada dini hari 1 Oktober 1965. Ia kemudian ditembak mati oleh kaum penculik dan jenazahnya dibuang dalam sebuah sumur. Jenazahnya segera dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta dan pemerintah menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal anumerta. Pada hari peringatan angkatan bersenjata tahun 1965, Parman segera diangkat menjadi pahlawan revolusi.

Mayor Jenderal Panjaitan



Lahir: Balige, Sumatera Utara, 19 Juni 1925 | **meninggal:** Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 | **gelar:** Pahlawan Revolusi | **dasar penetapan:** Keppres No. 111/KOTI/1965 | tanggal penetapan: 5 Oktober 1965

■ Mayor Jenderal Korban G 30 S

“Malam 30 September 1965, subuh 1 Oktober kami mendengar suara truk-truk berhenti dan orang-orang mengepung rumah kami. Tanpa ada peringatan, mereka menembak dari segala penjuru, seperti hujan peluru.” Catherine Panjaitan - anak Mayor Jenderal D.I. Panjaitan.

Mayor Donald Izacus Jenderal Panjaitan lahir di Sitorang, Balige, Tapanuli pada 10 Juni 1925. Ia mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA sezamannya. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, ia memasuki pendidikan militer atau *Gyugun* dengan pangkat *shoi* (Letnan Dua) dan ditempatkan di Pekanbaru, Riau. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Pandjaitan bergabung dengan Pemuda Republik Indonesia.

Paska proklamasi kemerdekaan, Panjaitan bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam pasukan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut, pertama kali ia ditugaskan menjadi komandan batalyon, kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi IX/Banteng di Bukittinggi tahun 1948. Karier militernya terus meningkat dengan pengangkatannya menjadi Kepala Staf Umum IV (Supplay) Komandemen Tentara Sumatra. Ketika Pasukan Belanda melakukan Agresi Militer II, ia diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Setelah kedaulatan Indonesia diakui Pemerintah Belanda, Panjaitan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium (T&T) I Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindah tugas ke Palembang menjadi Kepala Staf T & T II/Sriwijaya. Dalam karier militernya tercatat dua kali Panjaitan mendapat pelatihan ke luar negeri. Pertama pada 1956, mengikuti kursus Militer Atase (Milat) di Jerman. Kedua, tahun 1962, ia menimba ilmu di *Associated Command and General Staff College*, Amerika Serikat. Sepulangnya ke tanah air, Panjaitan mendapat jabatan baru menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad).

Pada tahun 1965 terjadi perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat (AD) hingga puncaknya terjadi penculikan terhadap petinggi AD. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan G 30 S. Pada tanggal 1 Oktober dini hari, truk militer mengangkut sepasukan Cakrabirawa berhenti di depan rumah Panjaitan. Setelah menembaki, pasukan tersebut memasuki rumah dan meminta Panjaitan turun, saat itu

ia dan keluarganya berkumpul di lantai atas. Menurut keterangan Riri Panjaitan (salah satu anak Mayor Jenderal D.I. Panjaitan – saat peristiwa G 30 S baru berusia 8 tahun), yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut, Mayjen Panjaitan turun dengan pakaian lengkap *uniformnya* sebagai angkatan darat. Beberapa menit setelah Panjaitan turun, ia ditembak di teras lalu dibawa pergi. Beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan di Lubang Buaya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Karena pengabdianya ia mendapat gelar pahlawan Revolusi.

Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo



Lahir: Kebumen, Jawa Tengah, 23 Agustus 1922 |
meninggal: Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965|
gelar: Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres No. 111/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 5 Oktober 1965

■ Gugur sebagai Pahlawan Revolusi.

Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Agustus 1922. Ia menamatkan sekolah umum di *Algemeene Middelbare School* (AMS). Pada masa pendudukan Jepang mengikuti pelatihan di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi Jakarta, lalu diterima menjadi pegawai negeri di kantor Kabupaten Purworejo namun mengundurkan diri dengan hormat pada tahun 1944. Sesudah proklamasi 1945 ia masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bagian kepolisian, yang kemudian berkembang menjadi Corps Polisi Militer (CPM). Pada Juni 1946 diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto yang ketika itu menjadi Komandan Polisi Tentara (PT). Dari situ ia dipindahtugaskan ke Purworejo untuk menjabat sebagai Kepala

Bagian Organisasi Resimen II Polisi Tentara di Purworejo. Jabatan lain yang pernah ditugaskan padanya dalam kurun 1945 hingga 1950 yakni Kepala Staf CPM Yogyakarta dan Komandan CPM Detasemen III Surakarta.

Empat tahun sesudah Indonesia mendapat kedaulatan penuh, Sutoyo naik pangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. Dua tahun kemudian ia bertugas di London sebagai Asisten Atase Militer Republik Indonesia untuk Inggris. Sekembalinya ke tanah air, ia mendapat Kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung sebelum diangkat menjadi Pejabat Sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat (Irkeh AD). Berkat pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang hukum, pada 1961 ia disertai tugas sebagai Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat (Irkeh/Ojen AD).

Di pertengahan tahun 1960-an, kondisi perpolitikan Indonesia memanas dikarenakan rencana pembentukan angkatan kelima dimana buruh tani bakal dilengkapi dengan senjata. Sutoyo adalah salah satu jenderal yang turut menolak kebijakan tersebut. Hingga terjadi tragedi, tanggal 1 Oktober 1965 sekira pukul 04.00, rumahnya didatangi satu peleton pasukan Cakrabirawa pimpinan Serma Surono. Lalu dua orang pratu memasuki kamarnya dan mengatakan bahwa ia mendapat panggilan presiden. Dengan kawalan, kemudian Sutoyo dibawa pergi. Beberapa hari kemudian ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa bersamaan dengan jenderal Angkatan Darat lain di Lubang Buaya. Peristiwa penculikan jenderal AD tersebut dikenang dengan G 30 S.

Kapten Pierre Tendean



Lahir: Jakarta, 21 Februari 1939 | **meninggal:** Jakarta, 1 Oktober 1965 | **gelar:** Pahlawan Revolusi | **dasar penetapan:** Keppres No. 111/KOTI/1965 | **tanggal penetapan:** 5 Oktober 1965

■ Ajudan Setia

Pada 1962, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia mulai memanas. Operasi penyusupan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Dwi Komando Rakyat [Dwikora] dilakukan oleh tentara Indonesia. Tendean segera mengajukan diri dalam operasi itu. Ia terlebih dulu mendapat pelatihan intelijen. Ia telah siap menyusup ke Malaysia. Dengan wajah blasteran, ganteng, dan mirip bintang film Hollywood Robert Wagner, siapa yang akan menyangka ia seorang intelijen tentara Indonesia. Berulang kali ia menyusup hingga Singapura, mengumpulkan data dan melihat situasi musuh. Kariernya melesat, ia segera menjadi ajudan Nasution. Akan tetapi, hidupnya harus berakhir saat Gerakan 30 September salah menculik dan membunuhnya di Lubang Buaya.

Pierre Andreas Tendean merupakan putra laki-laki satu-satunya dari DR. A.L Tendean yang berasal dari Minahasa dan ibunya seorang berdarah Prancis bernama Cornel ME. Ia yang sejak kecil memang suka dengan dunia militer, masuk Akademi Militer Jurusan Teknik [Atekad] di Bandung pada 1958. Di akademi Militer, Tendean merupakan taruna yang cakap dan berprestasi sehingga ia diangkat menjadi Komandan Batalyon Taruna dan Ketua Senat Korps Taruna. Sebagai kopral Taruna Atekad, ia langsung mendapat praktik lapangan. Ia dilibatkan dalam penumpasan gerakan PRRI di Sumatra pada 1958. Ia tamat akademi militer pada 1962. Lalu dilantik sebagai letnan dua dan menjabat Komandan Peleton Batalyon Zeni Tempur 2/DAM II di Medan.

Semenjak itu, ia memang lebih suka terjun langsung dalam operasi di lapangan. Ia dengan senang hati mengikuti pendidikan intelijen Angkatan Darat di Bogor pada 1963. Lalu segera diselundupkan dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia hingga enam kali. Ia melakukan operasi intelijen hingga ke Singapura untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya demi perang yang akan segera dilancarkan. Ia selalu berhasil dengan baik.

Karena prestasinya itu, pangkatnya naik menjadi letnan satu, dan atas permintaan keluarga yang khawatir jika Tendean harus selalu berada di garis depan pertempuran maka Jenderal A.H. Nasution selaku Menko Hankam menariknya menjadi ajudan pada 15 April 1965. Tendean selalu menemani Nasution ke mana pun ia pergi. Jadilah ia seorang ajudan yang populer di belakang Nasution, terutama di mata kaum perempuan. Setiap kali sang jenderal

memberikan ceramah di kampus-kampus, selalu ada ungkapan di kalangan Mahasiswi, “Telinga kami untuk Pak Nas, tapi mata kami untuk ajudannya”.

Dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok tentara yang tergabung dalam Gerakan 30 September datang ke rumah Nasution untuk menculik sang jenderal. Tendean yang saat itu sedang bertugas, berada di paviliun rumah. Ia segera keluar saat mendengar kegaduhan. Saat itulah ia ditangkap gerombolan penculik. Mereka mengira Tendean adalah Nasution. Tendean segera diikat kedua tangannya dan dibawa dengan truk ke Lubang Buaya. Di basis gerombolan itu, sesungguhnya para penculik telah mengetahui bahwa Tendean bukanlah Nasution, tetapi tetap saja ia tidak dibebaskan. Dengan tegar dan tanpa takut Tendean menghadapi maut. Empat buah peluru menembus tubuhnya dari belakang. Tampaknya ia dieksekusi dari belakang oleh gerombolan G 30 S. Ia dieksekusi paling akhir di antara para jenderal yang diculik. Tubuhnya juga yang paling akhir dimasukkan di sumur Lubang Buaya.

Pierre Andrean Tendean mati muda dalam usia 26 tahun. Jenazahnya segera dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan pangkatnya segera dinaikkan menjadi kapten anumerta. Atas jasa-jasanya kepada negara, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Revolusi di hari jadi tentara 5 Oktober 1965, empat hari selepas kematiannya.

Karel Satsuit Tubun



Lahir: Maluku Tenggara, 14 Oktober 1928 | **meninggal:** Jakarta, 1 Oktober 1965 | **gelar:** Pahlawan Revolusi | **dasar penetapan:** Keppres No. 114/KOTI/1965 | **tanggal penetapan:** 5 Oktober 1965

■ Polisi Patriot

Subuh 1 Oktober 1965, aksi klandestin dilancarkan oleh kelompok “Gerakan 30 September”. Saat itu, Karel Satsuit Tubun sedang bertugas mengawal rumah kediaman Wakil Perdana Leimena yang berdekatan dengan rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Saat gerombolan tidak dikenal mendekat ke rumah Jenderal Nasution, beberapa di antara mereka juga memasuki rumah Leimena. Sebagai seorang pengawal, Tubun berusaha keras melawan gerombolan. Pergulatan terjadi, senjata Satsuit Tubun dirampas dan ia tertembak. Ia mati sebagai patriot yang mengamankan pemimpinnya.

Karel Satsuit Tubun yang berasal dari Tual Maluku Tenggara menempuh pendidikan umum hanya sampai Sekolah Dasar dan tamat tahun 1941. Karena tertarik untuk mengabdikan diri di

bidang Kepolisian, ia mengikuti pendidikan pada Sekolah Polisi Negara di Ambon pada 1951. Ia kemudian dilantik menjadi agen Polisi Tingkat II dan ditugaskan dalam kesatuan Brigade Mobil [Brimob] di Ambon. Dari Ambon ia dipindahkan ke Jakarta dan ditempatkan pada kesatuan Brimob Dinas Kepolisian Negara. Pada tahun 1955 ia dipindahkan ke Sumatra Utara. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke Sulawesi.

Pada waktu terjadi pemberontakan PRRI/Permesta, Satsuit Tubun bertugas di Sumatra Barat selama enam bulan. Sesudah itu dipindahkan ke Dobo, Ia tetap berada di sana pada waktu Pemerintah Indonesia menjalankan politik konfrontasi terhadap Belanda dalam rangka membebaskan wilayah Irian Barat dari penjajahan Belanda. Tubun ikut berjuang dalam konfrontasi itu. Pangkatnya lalu dinaikkan menjadi Brigadir Polisi pada tahun 1963.

Dalam pangkat terakhir ini ia meninggal dunia akibat aksi “Gerakan 30 September” yang dilancarkan di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Hanya berselang 4 hari selepas kematiannya, pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Ajun Inspektur Polisi [AIP] dan memberi gelar Pahlawan Revolusi pada Karel Satsuit Tubun.

Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo



Lahir: Sragen 5 Februari 1923| **meninggal:** Yogyakarta 2 Oktober 1965| **gelar:** Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres No. 118/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 19 Oktober 1965

■ Jenderal anumerta dari Sragen

Aksi klandestin militer di Jakarta tahun 1965 membawa dampak buruk di Yogyakarta. Sore hari, 2 Oktober 1965, Kolonel Katamso baru saja pulang dari Magelang. Ia dipaksa menandatangani surat yang mendukung Dewan Revolusi oleh Mayor Mulyono. Ia tidak langsung setuju, tetapi meminta rapat terlebih dahulu. Malangnya, ia langsung diculik dari rumahnya. Di bawah todongan senjata, Katamso dibawa ke kompleks Batalyon L di desa Kentungan Yogyakarta. Ia dianiaya dan dibunuh, lalu dimasukkan dalam sebuah sumur dan ditutup tanah.

Katamso yang berasal dari kota “bumi Sukowati” ini menempuh pendidikan umum sampai tingkat Sekolah Menengah di kota

kelahirannya. Lalu masa pendudukan Jepang, ia mengikuti pendidikan tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor. Setelahnya, ia diangkat menjadi Shodanco Peta di Solo. Sesudah kemerdekaan Indonesia, ia menyumbang tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dengan masuk TKR. Awalnya ia diangkat sebagai Komandan Kompi di Klaten, kemudian Komandan Kompi Batalyon 28 Divisi IV. Selama agresi Militer Belanda kedua, pasukan yang dipimpinnya sering kali terlibat dalam pertempuran melawan Belanda.

Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia, di Jawa Tengah timbul pemberontakan Batalyon 426. Katamso disertai tugas menumpas pemberontakan tersebut dan berhasil. Saat muncul pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958, ia diangkat menjadi Komandan Batalyon “A” Komando Operasi 17 Agustus dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Kemudian disertai tugas sebagai Kepala Staf Resimen Team Pertempuran (RTP) II Diponegoro dan berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dari situ ia dipindahkan menjadi Kepala Staf Resimen Riau Daratan Komando Daerah Militer (Kodam) III/17 Agustus. Setelah keamanan di Sumatra pulih kembali, ia ditarik ke Jakarta dan bertugas pada Komando Pendidikan dan Latihan (Koplat) merangkap sebagai Komandan Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) di Bandung. Pada tahun 1963 Katamso dipindahkan ke Jawa Tengah memangku jabatan Korem 072 Pamungkas di bawah Kodam VIII Diponegoro, berkedudukan di Yogyakarta. Ia membina Resimen Mahasiswa yang diberi latihan-latihan militer dan juga giat mengembangkan pendidikan.

Katamso akhirnya harus menjadi korban kekisruhan yang terjadi di Angkatan Darat. Semenjak ia diculik dan terbunuh, jenazahnya baru ditemukan pada 21 Oktober 1965. Kemudian, ia dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki [Kusumanegara] Yogyakarta. Sebelum dikebumikan, Presiden segera menaikkan pangkatnya menjadi Brigjend Anumerta dan memberi gelar Pahlawan Revolusi kepada Katamso.

Kolonel Sugiono



Lahir: Gedaran, Gunungkidul, 12 Agustus 1926 |
meninggal: Kentungan, Yogyakarta, 1 Oktober 1965|
gelar: Pahlawan Revolusi| **dasar penetapan:** Keppres
No. 118/KOTI/1965| **tanggal penetapan:** 19 Oktober
1965

■ Pejuang dari Gunung Kidul

Ia seorang perwira yang baik. Pada 1 Oktober 1965, masih dengan seragam tentara, ia baru kembali dari Pekalongan untuk urusan dinas. Ia sempat mampir ke Semarang terlebih dahulu dan merasakan suasana yang aneh. Ia belum mengetahui aksi klandestin Gerakan 30 September di ibu kota. Ia hanya tahu bahwa dibulan-bulan September situasi memang sedang panas, di ibu kota muncul desas-desus adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Sebuah isu yang tidak jelas dan ia hanya perwira di daerah yang tidak tahu dengan urusan perwira tinggi Ibu kota. Ia segera kembali ke Yogyakarta, menuju ke rumah Katamso, lalu ke markas Korem. Itulah saat terakhirnya. Ia kemudian diculik dan terbunuh.

Sugiono Mangunwiyoto putra daerah Gunung Kidul, wilayah yang dianggap tandus dan kering di tenggara Yogyakarta. Ia anak kesebelas dari 14 bersaudara. Ayahnya, Kasan Sumitrorejo seorang petani sekaligus Kepala Desa Gedaran. Awalnya ia bercita-cita menjadi guru hingga selepas sekolah dasar, ia masuk sekolah guru di Wonosari. Selepas lulus ia malah tidak sekalipun mengajar. Kedatangan Jepang ke Hindia Belanda pada 1942, mengubah keinginan Sugiono. Ia tertarik untuk terjun di dunia militer.

Sugiono segera masuk pendidikan PETA [Pembela Tanah Air]. Ia lulus dan diangkat menjadi Budanco [Komandan Peleton] di tanah asalnya, Wonosari. Saat kemerdekaan tercapai, kemudian terbentuk BKR [Badan Keamanan Rakyat], Sugiono ikut bergabung. Awalnya ia bertugas sebagai Komandan Seksi dengan pangkat letnan dua, kemudian pada 1947 diangkat menjadi ajudan Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto. Di masa krisis Agresi Militer II di Yogyakarta, Sugiono turut serta dalam aksi serangan umum yang dilancarkan pada 1 Maret 1949. Serbuan selama 6 jam yang mengubah sejarah dan pandangan kalangan barat terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Semenjak itu kariernya menanjak. Ia berganti-ganti daerah dinas. Pertama, ia masih di Yogyakarta menjadi Perwira Operasi Brigade C, lalu menjadi Komandan Kompi 4 Batalyon 411 Brigade C di Purworejo, diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon 441 di Semarang dengan pangkat kapten, lalu meningkat menjadi komandan Batalyon 441/Banteng Raiders III dengan pangkat Mayor. Selepas itu, ia menjadi Komandan Komando Distrik Militer [Kodim] 0718

di Pati dan terakhir menjadi Kepala Staf Komando Resort Militer [Korem] 072 Komando Daerah Militer [Kodam] VII Diponegoro yang berkedudukan di Yogyakarta dengan pangkat Letnan Kolonel.

Ia menduduki pos barunya itu pada bulan Juni 1965. Beberapa bulan setelah mengemban tugas itu, situasi negara dalam keadaan krisis. Di pusat pemerintahan terjadi perseteruan antara ABRI di bawah komando Angkatan Darat (AD) dengan PKI yang kemudian merambat sampai ke daerah. Bahkan di dalam internal Angkatan Darat sendiri muncul masalah internal, antara perwira muda dengan perwira senior yang ada di Jakarta. Dalam situasi seperti ini, Sugiono masih terlibat aktif dalam membina Resimen Mahasiswa dengan memberikan latihan-latihan militer. Resimen ini terdiri atas organisasi GMNI [Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia] dan PMKRI [Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia].

Saat meletus peristiwa 1 Oktober 1965, Dewan Revolusi segera dibentuk. Di daerah-daerah juga muncul Dewan Revolusi yang rata-rata dijalankan oleh beberapa perwira Angkatan Darat. Di Yogyakarta, pembentukan dewan ini disiarkan melalui RRI dan diketuai Mayor Muyono, Kepala Seksi Teritorial Korem 072/Yogyakarta. Saat itu, Sugiono belum mengetahuinya Karena masih dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta. Akan tetapi, sesampainya di markas Korem, ia segera ditangkap oleh pasukan Dewan Revolusi. Ia dibawa menuju Kentungan Condongcatur, utara Yogyakarta. Dini hari, pukul 02.00, pada 2 Oktober 1965, Sugiono dipukul hingga tewas. Jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Lokasi lubang ini baru ditemukan pemerintah tanggal 21 Oktober 1965. Esoknya, 22

Oktober 1965, jenazah perwira ini kemudian dibawa ke selatan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Pemerintah segera menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Kolonel dan mengangkatnya menjadi Pahlawan Revolusi.

Sutan Syahrir



Lahir: Padang Panjang, Sumatra Barat, 5 Maret 1909|
meninggal: Zürich, Swiss, 9 April 1966| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 76 Tahun 1966| **tanggal penetapan:** 9 April 1966

■ The Smiling Diplomat

Sutan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang berjasa diawal berdirinya negara Indonesia. Namanya tercatat sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan Parleментар Republik Indonesia. Ia merupakan seorang yang piawai berargumen. Salah satu korban mulut Syahir yakni Van Kleffens, diplomat Belanda yang argumennya berhasil dipatahkan Syahrir dalam diplomasi PBB saat Agresi Militer I. Kegagalan Kleffens adalah sesuatu yang memalukan bagi Belanda, karena seorang diplomat ulung berpengalaman di gelanggang internasional mampu dibantah oleh diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Karena keahliannya tersebut, Syahrir dijuluki “*The Smiling Diplomat*”.

Syahrir kecil menempuh pendidikan MULU di medan kemudian lanjut ke AMS Bandung. Meski masih remaja, ia sudah aktif dalam pelbagai organisasi dengan menjadi anggota Patria Squentequ (Untuk Tanah Air dan Bangsa). Ia turut pula mendirikan Jong Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Di tahun 1929, Syahrir berangkat ke Nederland untuk kuliah ilmu hukum. Di negeri Belanda, Syahrir pun giat menjadi aktivis politik Perhimpunan Indonesia. Bersama Mohammad Hatta ia pernah memimpin delegasi Indonesia untuk kongres bangsa-bangsa di Brussel (Belgia). Dari sini ia berkenalan dengan Jawaharlal Nehru. Tahun 1932 Syahrir pulang ke tanah air meski studinya belum selesai. Pada waktu itu, pergerakan nasional sedang mengalami tekanan berat Pemerintah Hindia Belanda setelah Soekarno ditangkap. Ia kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia yang lebih dikenal dengan PNI-Baru. Partai ini dijadikan wadah untuk mendidik kader-kader pemimpin dan menanamkan kesadaran politik kepada rakyat. Karena kegiatan politik tersebut, tahun 1934, ia ditangkap dan Januari 1935 dibuang ke Digul, Irian Jaya, lalu dipindahkan ke Banda Neira, dan akhirnya ke Sukabumi, Jawa Barat.

Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir memimpin gerakan bawah tanah menentang Pemerintah Jepang. Ia mendapat informasi perkembangan dunia internasional melalui radio yang berhasil disembunyikannya dari penyegelan Jepang. Pada 14 Agustus 1945 ia mengetahui Jepang menyerah kepada Sekutu, kemudian mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan.

Pada November 1945, Syahrir diangkat sebagai perdana menteri memimpin kabinet parlementer dan berjuang dengan cara diplomasi agar Indonesia memperoleh pengakuan dari Belanda dan internasional. Usahnya melahirkan Perjanjian Linggarjati pada Maret 1947. Tatkala Belanda melancarkan Agresi Militer I bulan Juli 1947, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Syahrir berjuang agar badan internasional itu memerintahkan Belanda menghentikan agresi militernya. Namun, saat Agresi Militer II, ia ditangkap dan dibawa ke Belanda. Syahrir kembali setelah pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Sekembalinya ke Indonesia ia mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam partai. Partai Rakyat Sosialis (PARAS) didirikannya tanggal 20 November 1945. PARAS lalu bergabung dengan Partai Sosialis yang dipimpin Amir Syarifudin. Tak lama kemudian ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pergerakan Syahrir dalam PSI membuat hubungannya dengan Soekarno renggang sampai-sampai PSI dibubarkan tahun 1960. Bahkan, tahun 1962, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili. Pada 1965 Syahrir menderita terserang stroke, ia diizinkan berobat ke Zurich, Swiss. Sutan Syahrir meninggal di sana pada tanggal 9 April 1966. Jenazahnya dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Laksamana Laut Martadinata



Lahir: Bandung, Jawa Barat, 29 Maret 1921| **meninggal:** Riung Gunung, Jawa Barat, 6 Oktober 1966| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 220 Tahun 1966| *tanggal penetapan:* 7 Oktober 1966

■ Pembentuk Angkatan Laut Indonesia

Setelah Jepang menyerah tidak perdaya, dalam satu kesempatan, ia segera menghimpun para pemuda bekas siswa Pelayaran Tinggi. Merebut beberapa buah kapal Jepang di Jakarta lalu bergerak menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok. Mereka lalu melakukan koordinasi dan membentuk BKR Laut Pusat, lalu jadilah TKR Laut, hingga diubah lagi menjadi TRI Laut. Inilah cikal bakal Angkatan Laut Republik Indonesia dan Martadinata menjadi orang penting dibalik itu semua.

Nama lengkapnya Raden Edy Martadinata yang lahir di Bandung. Ia menempuh pendidikan HIS di Lahat pada 1934, lalu sekolah di MULO Bandung pada 1938, hingga masuk AMS Batavia pada 1941. Sesudah itu, ia meneruskan pelajaran ke Sekolah Pelayaran

[*Zeevaart School*] di Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, bekerja sebagai aspiran dan penerjemah pada Sekolah Pelayaran Tinggi di Semarang. Setelah Indonesia merdeka, dalam masa krusial, ia ikut terlibat langsung, bahkan menjadi penggagas pembentukan BKR-Laut yang kemudian berkembang menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Ia lalu memegang jabatan Kepala Staf Operasi pada Markas Besar ALRI di Yogyakarta, selain sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan Opsir di Sarangan. Selama berlangsung Agresi Militer II Belanda, ia bertugas di Aceh. Sesudah pengakuan kedaulatan, ia diangkat menjadi Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya dan saat Belanda menyerahkan peralatan perangnya kepada Angkatan Perang RI, termasuk Kapal Perang HrMS Morotai, ia menjadi komandan kapal ini yang berubah nama kapal perang RI Hang Tuah. Dimasa inilah ia turut memadamkan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan.

Tahun 1953, belajar di *United States Navy Post Graduate School* Amerika, dan selepas itu diperbantukan pada Departemen Luar Negeri serta dikirim ke Itali untuk mengawasi pembelian 2 kapal korvet [*Almirante Clemente Class*] untuk ALRI, yakni kapal RI Soerapati dan RI Imam Bondjol. Ia juga sempat berkunjung ke Yugoslavia dalam tugas yang sama, mengamati pembuatan kapal perang.

Sementara itu, dalam tubuh Angkatan Laut terjadi pergolakan. Sebagian anggota tidak puas terhadap kebijaksanaan pimpinan. Pergolakan itu memuncak pada 1959 dan menjurus ke arah

timbulnya bentrokan bersenjata. Golongan yang tidak dapat menerima kebijaksanaan pimpinan, menuntut supaya Kepala Staf Angkatan Laut diganti. Melihat keadaan tersebut, pemerintah memberhentikan Laksamana Subiyakto dan mengangkat Kolonel Martadinata, yang dalam pertentangan itu bersikap netral, menjadi Pejabat Kepala Staf ALRI. Setelah menjadi Kepala Staf, ia berusaha sekuat tenaga mendamaikan kembali golongan-golongan yang tadinya berlawanan sehingga ALRI tetap utuh dan bersatu.

Ketika Martadinata menjabat KSAL yang kemudian diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Laut, ALRI memiliki kekuatan yang disegani di kawasan Asia Pasifik, seiring dengan meningkatnya konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan perebutan Irian Barat. Dengan dicanangkannya Trikora, maka ALRI membeli peralatan tempur dari Rusia dengan jumlah yang cukup banyak, antara lain 1 Cruiser [*Sverdlov Class*], 8 Destroyer [*Skory Class*], 8 Frigate [*Riga Class*], 12 Submarine [*Wishkey Class*] dan pelbagai kapal pendukung lain. Jumlah armada kapal Angkatan Laut hampir lebih dari 100 buah. Kala itu, angkatan laut dibawah Martadinata siap berperang melawan Belanda di Irian Barat.

Pada masa pasca gerakan 1 Oktober 1965, Martadinata meletakkan jabatannya sebagai KSAL dan kemudian ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Pakistan. Di masa jabatannya ini, pada 6 Oktober 1966, saat ia membawa rombongan petinggi angkatan laut Pakistan, ia mengalami kecelakaan pesawat helikopter di Riung Gunung, Jawa Barat. Jenazahnya lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Sehari selepas kecelakaan itu, ia diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia.

Dewi Sartika



Lahir: Bandung, 4 Desember 1884| **meninggal:** Tasikmalaya, 11 September 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 252 Tahun 1966| **tanggal penetapan:** 1 Februari 1966

■ Pendiri Sekolah Wanita Pertama di Indonesia

Saat ia berusia sembilan tahun, ia menikmati pendidikan yang diimpikannya. Ia punya cita-cita tinggi, memajukan pendidikan kaum perempuan. Akan tetapi, kebahagiaannya dikala kecil itu sirna saat dinamit meledak di lapangan Tegalega Bandung dalam acara pacuan kuda pada 17 Juli 1893. Ayahnya dituduh menjadi otak pengeboman itu. Sang ayah diasingkan, kekayaannya disita, keluarganya tercerai-berai. Seketika itu ia kehilangan status *menaknya*. Ia menjadi anak pungut dan disia-siakan. Lalu patah arangkah gadis muda itu? Tidak. Perlahan ia bangkit menggelorakan impiannya lagi, memajukan pendidikan kaum wanita pribumi dan ia berhasil. Ia menjadi pionir dalam pendirian sekolah wanita Hindia[Indonesia].

Dewi Sartika merupakan keturunan *menak* [priyayi] Bandung. Kakeknya adalah R.A.A. Wiranatakusumah IV, seorang Bupati Bandung. Ayahnya bernama R. Ranga Somanagara, seorang patih Bandung, atau wakil bupati Bandung, sedang ibunya bernama R.A. Rajapermas. Pada masa awal, ia mendapat kesempatan untuk bersekolah di sekolah Belanda, Sekolah Kelas Satu [*Eerste Klasse School*]. Sejak itu ia punya bakat mengajar. Kala bermain, ia sering mengambil peran layaknya seorang pengajar, sedangkan teman-temannya berperan sebagai murid.

Sekolah Dewi hanya sampai kelas dua saja, saat ayahnya diasingkan ke Ternate. Ia segera dititipkan di rumah pamannya di Cicalengka, Raden Suria Kartahadiningrat. Di sanalah, dewi mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ia memang hanya titipan maka wajar jika tidak diperlakukan seperti anak sendiri oleh pamannya. Walaupun begitu, dewi tetap tegar, ia masih bisa mendapat pendidikan menjahit, juga masih diperbolehkan mendengarkan pengajaran bahasa Belanda anak-anak pamannya. Saat itu dewi memang hanya bisa mendengarkan saja karena ia dilarang mendapatkan pendidikan Bahasa Belanda oleh pamannya.

Setelah lama berada di rumah pamannya, ia segera kembali ke Bandung dan membuka pendidikan bagi kaum perempuan pribumi. Dukungan mengalir kepadanya. Bahkan bupati Bandung saat itu, R.A. Martanegara. Maka pada 16 Januari, ia mendirikan Sekolah Istri yang terdiri dari dua kelas. Untuk belajar dipinjam ruang Kepatihan Bandung. Muridnya mula-mula sekitar 60 orang dan banyak diantaranya berasal dari golongan biasa. Mereka diajarkan

berhitung, membaca, menulis, dan menyulam. Pelajaran agama pun diberikan pula.

Sekolah ini mendapat perhatian masyarakat dan muridnya bertambah banyak. Ruangan Kepatihan Bandung tidak cukup lagi menampung mereka. Oleh karena itu, Sekolah Istri dipindahkan ke tempat lebih luas. Pada tahun 1910 nama sekolah itu diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri dan mata pelajarannya ditambah. Ia berusaha mendidik anak-anak gadis agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga banyak diberikan. Apa yang dilakukannya di Bandung, memberi inspirasi dibukanya cabang sekolah wanita lain di Tasikmalaya tahun 1913, Padangpanjang Minangkabau 1915, Sumedang dan Cianjur tahun 1916, Ciamis tahun 1917, Cicurug tahun 1918, Kuningan 1922, dan Sukabumi tahun 1926. Dalam memajukan Sekolah Keutamaan Istri, Dewi Sartika banyak mendapat bantuan tenaga dan pemikiran dari suaminya, Raden Kanduruan Agah Suriawinata.

Selama berlangsung Perang Dunia I, timbul kesulitan keuangan, tapi tahun 1929 sekolah ini sudah memiliki gedung sendiri dan namanya berganti menjadi Sekolah Raden Dewi. Di masa Jepang, semua sekolah tingkat dasar dijadikan satu macam atau jenis sekolah saja yaitu sekolah rakyat. Sekolah Raden Dewi kemudian menjadi sekolah rakyat gadis nomor 29. Mula-mula ditawarkan jabatan kepala sekolah kepada Dewi Sartika. Tapi Dewi menolak untuk bekerja dengan rencana pelajaran yang ditentukan mengabdikan pada Jepang.

Pada masa Perang Kemerdekaan, dimana Agresi militer I Belanda dilancarkan pada 21 Juli 1947, Dewi Sartika terpaksa menghentikan kegiatan dan mengungsi ke Cineam. Di tengah kecamuk perang itu Dewi Sartika mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan dengan upacara sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu Cineam. Tiga tahun kemudian ia dimakamkan kembali di kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karang Anyar. Mengingat jasa-jasanya dalam membangun pendidikan putri-putri bangsa, maka pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tahun 1966.

Wilhelmus Zakaria Johannes



Lahir: Pulau Rote, 1895| **meninggal:** Den Haag, Belanda, 4 September 1952| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 6/TK/1968| **tanggal penetapan:** 27 Maret 1968

■ Dokter Republiken

Saat perang kemerdekaan berkecamuk, ia memilih untuk menjadi dokter di rumah sakit umum pusat Jakarta. Di sana, ia membantu tentara republik yang menjadi korban perang. Melihat ini, tentara Belanda mencurigainya sebagai mata-mata. Pemerintah Belanda segera membujuknya untuk bekerja sama dengan imbalan uang besar. Akan tetapi, ia menolaknya. Kecintaannya pada republik Indonesia tidak bisa digantikan dengan uang, berapa pun harganya.

Wilhelmus Zakaria Johannes yang berasal dari pulau Rote terkenal cerdas. Dia anak pandai yang mampu mengukir prestasi di sekolah. Ia menamatkan pendidikan dasar lebih cepat dari waktu yang seharusnya karena ia loncat kelas, dari kelas dua ke kelas empat.

Begitu juga saat sekolah di STOVIA Batavia, ia lulus setahun lebih cepat dari waktunya. Selepas pendidikan, ia segera menjadi pengajar di *Nederland Indische Artsen School* [NIAS], Sekolah dokter Hindia Belanda di Surabaya. Ia kemudian dipindahtugaskan menjadi dokter di pelbagai rumah sakit di pulau Sumatra pada 1921 hingga 1930. Ia tercatat pernah bertugas di Bengkulu, Muara Aman, Mana, Kayu Agung dan juga Palembang.

Pada 1939, ia mulai aktif di dunia politik. Wilhelmus diangkat menjadi anggota *Volksraad* [Dewan Rakyat] mewakili masyarakat Karesidenan Timor. Pada masa pendudukan Jepang, ia ikut mendirikan Badan Persiapan Persatuan Kristen [BPPK] yang kemudian berubah menjadi Partai Kristen Indonesia [Parkindo]. Wilhelmus tercatat secara aktif dalam organisasi yang dibentuknya tersebut serta menjadi salah satu dari 28 anggota Badan Pekerja [BP] Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP].

Ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah menderita sakit lumpuh. Setelah sembuh, Wilhelmus bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat [RSUP] Jakarta untuk merawat para pejuang Indonesia yang cidera dalam pertempuran. Selain digunakan untuk perawatan, RSUP Jakarta ketika itu juga digunakan untuk tempat penampungan para pejuang selama berada di Jakarta. Jadilah ia seorang penolong para pejuang sekaligus ikut mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selepas pengakuan kedaulatan, tepatnya pada Maret 1952, ia dipercaya menjadi presiden [rector] Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Sebulan kemudian, April 1952, ia mendapat tugas negara

untuk berangkat ke beberapa Asia Tenggara serta negara Eropa, seperti Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, dan Swiss untuk mendalami perkembangan rontgen serta mempelajari sistem organisasi rumah sakit di negara-negara yang akan ditinjaunya. Rencananya, tugas negara itu akan dilakukannya selama 5 bulan. Ketika Wilhelmus berada di Den Haag, Belanda, ia kemudian meninggal dunia. Jenazahnya lalu diterbangkan pulang ke tanah air dan dimakamkan di Pekuburan Jati Petamburan Jakarta.

Wilhelmus Zakaria Johannes merupakan ahli radiologi pertama di Indonesia. Sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, ia juga menjadi ahli rontgen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran Indonesia. Ia kemudian mendapat gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia pada 1968.

Pangeran Antasari



Lahir: Kayu Tangi, Kesultanan Banjar, 1797| **meninggal:** Bayan Begok, Hindia-Belanda, 11 Oktober 1862| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 06/TK/1968| **tanggal penetapan:** 27 Maret 1968

■ Pejuang dari “Bumi Antasari”

Kondisi politik Kesultanan Banjar memanaskan akibat kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di awal abad 19. Konflik intern perebutan tahta Kesultanan Banjar berubah menjadi perang saudara antara Pangeran Tamjidillah dengan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Tamjidillah mendapat restu Belanda, ia berhasil memenangkan pertarungan, sedangkan Pangeran Hidayatullah yang sempat melakukan perlawanan bersama rakyat segera diasingkan ke Cianjur.

Pada tahun 1859, Pangeran Tamjidillah diangkat menjadi Sultan Kerajaan Banjar oleh Belanda. Paska pembuangan Pangeran Hidayatullah, perjuangan melawan “kompeni” diteruskan kemenakannya, Pangeran Antasari. Semenjak lahir di bumi

Banjarmasin pada 1809, Antasari yang berdarah biru tidak pernah hidup dalam lingkungan istana. Ia dibesarkan di tengah-tengah rakyat sehingga dengan cepat mendapat dukungan rakyat Banjar. Guna menambah kekuatan, Antasari menjalin sekutu dengan kepala-kepala daerah di Hulu Sungai, Marthapura, Barito, Pleihari, kahayan, dan Kapuas. Mereka bersepakat untuk bersama mengusir Belanda dari Kesultanan Banjar. Antasari beserta pendukungnya mengobarkan perang, yang kemudian dikenal dengan Perang Banjar.

Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 18 April 1859 ketika pasukan Pangeran Antasari menyerang tambang batu bara di Pengaron. Pangeran Antasari berhasil mengerahkan tenaga rakyat dan mengobarkan semangat mereka sehingga Belanda menghadapi kesulitan. Belanda mengajukan penawaran, Antasari akan mendapat imbalan setimpal jika ia mau berdamai dan menyerah kepada Belanda. Melalui surat tertanggal 20 Juli 1861 yang dilayangkan kepada Letnan Kolonel Gustave Verspijck di Banjarmasin, Antasari menolak tegas bujukan Belanda. Berikut cuplikan surat tersebut “ *...dengan tegas kami terangkan kepada tuan: Kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka (kemerdekaan)..*”

Bulan Oktober 1862, saat pertempuran sedang berlangsung hebat-hebatnya, wabah cacar melanda daerah Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari tak luput dari serangan penyakit tersebut. Di samping itu, ia juga menderita penyakit paru-paru. Karena semakin parah, ia meninggal dunia pada 11 Oktober 1862 lalu dimakamkan di pedalaman sungai Barito, Kalimantan Tengah.

Sekira 96 tahun setelah meninggalnya Pangeran Antasari, atas keinginan rakyat Banjar dan persetujuan keluarga, pada 11 November 1958 dilakukan pengangkatan kerangka Pangeran Antasari pada 11 November 1958. Kerangka tersebut dimakamkan kembali di Komplek Pemakaman Pahlawan Perang Banjar, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin. Karena perjuangannya, Pemerintah Indonesia memberinya gelar Pahlawan Nasional pada 27 Maret 1968. Namanya diabadikan pada Korem 101/Antasari. Karena perjuangan Pangeran Antasari, Kalimantan Selatan kemudian mendapat julukan “Bumi Antasari”..

Usman Janatin



Lahir: Dukuh Tawangsari, Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 18 Maret 1943 | **meninggal:** 17 Oktober 1968 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 50/TK/1968 | **tanggal penetapan:** 17 Oktober 1968

■ Pejuang Dwikora

8 Maret 1965 pukul 03.00 dini hari, ledakan dahsyat menggelegar dari bagian bawah Hotel Mac Donald. Beton penyangga bangunan luluh lantak dan pecahannya menyebar ke pelbagai penjuru. Para penghuni hotel berlarian kalang kabut, berlari saling jejal menyelamatkan diri. Insiden yang mengakibatkan puluhan warga meninggal dan luka-luka tersebut menyeret tiga nama anggota Korps Komando Operasi (KKO) - kini dikenal sebagai Korp Marinir - salah satunya bernama Janatin.

Usman bin Muhammad Ali alias Janatin lahir dilahirkan di Jatisaba, Purbalingga, tanggal 18 Maret 1943. Setelah tamat dari SMP, terhitung sejak 1 Juni 1962 ia masuk dinas militer Korps Komando

Angkatan Laut (KKO). Karena karakter pembawaannya yang tegas, disiplin, dan cakap, ia kemudian terpilih menjadi salah satu prajurit pengemban tugas “sabotase” dalam operasi Dwikora setelah melalui pemilihan ketat. Dalam operasi inilah ia mendapat tugas mengebom sebuah hotel mewah di pusat kota Singapura. Operasi Dwikora sendiri, dikeluarkan Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 sebagai tindakan tegas Indonesia terhadap tindakan provokatif dari Federasi Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Federasi Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Serawak, dan Sabah (Borneo Utara).

Janatin ditugaskan menyusup ke Singapura dengan menyamar sebagai pedagang dan melakukan sabotase. Ia memakai nama samaran Usman bin Muhammad Ali untuk mengelabui musuh. Bersama dengan dua anggota Korps Komando Operasi lainnya, yakni Tohir dan Gani. Mereka berhasil meledakkan MacDonald House di kawasan *Orchard Road* Singapura pada 10 Maret 1965. Akibat kejadian tersebut pemerintah Singapura segera memperketat penjagaan keluar. Situasi menjadi sulit padahal mereka harus melaporkan hasil kerja ke pangkalan. Akhirnya tiga penyabotase dibagi dua untuk mencari jalan menuju pangkalan; Janatin bersama Tohir, sedangkan Gani sendirian.

Akan tetapi, nasib apes dialami Janatin dan Tohir, setelah berhasil menyusup ke kapal Begama tujuan Bangkok dan merebut sebuah motorboat dari seorang cina, motorboat tersebut tiba-tiba macet di tengah laut. Patroli angkatan laut Singapura mengetahui dan segera menangkap mereka. Dalam vonis pengadilan mereka dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Pelbagai usaha diplomasi

dari Indonesia sudah dilakukan agar Janatin dan Tohir terhindar dari hukuman mati namun tidak membuahkan hasil. Pada Kamis 17 Oktober 1968 sekitar pukul 06.00 pagi, eksekusi gantung terhadap Janatin pun dilakukan. Jenazahnya lalu dipulangkan ke Indonesia, jasad Janatin kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Kopral Harun bin Said [Tohir]



Lahir: Bawean, Gresik, Jawa Timur, 4 April 1947
| **meninggal:** Singapura, 17 Oktober 1968 | **gelar:**
Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 50/
TK/1968 | **tanggal penetapan:** 17 Oktober 1968

■ Pejuang Dwikora

Ia seorang kopral yang pemberani. Sehari sebelum menuju tiang gantungan, kepada ibunya, ia menulis “...*hukuman yang akan diterima oleh Ananda adalah hukuman digantung sampai mati, di sini Ananda harap kepada Ibunda supaya bersabar karena setiap kematian manusia yang menentukan ialah Tuhan Yang Maha Kuasa dan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini tetap akan kembali kepada Illahi...Mohon Ibunda ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Ananda selama ini...Ananda tutup surat ini dengan ucapan terima kasih dan selamat tinggal untuk selama-lamanya, amin...Jangan dibalas lagi*”. Harun menjadi pahlawan Dwikora yang mati muda demi tugas negara.

Ia terlahir dengan nama Tohir, anak ketiga dari pasangan Mandar dan Aswiyani. Keluarganya merupakan keluarga sederhana. Tohir harus menjadi pelayan kapal dagang saat sekolah menengah pertamanya. Karena itu pula, ia mengenal dan hafal daerah daratan Singapura sebab sering kali ia berhari-hari lamanya berada di Pelabuhan Singapura. Karena pengalaman dalam pelayaran itu, setelah dewasa, ia masuk Angkatan Laut Indonesia.

Pada Juni 1964, ia ditugaskan dalam Tim Brahma I di Basis II Operasi A KOTI. Ia bergabung dalam Dwikora dengan pangkat Prajurit KKO II [Prako II]. Sebelumnya, ia mendapat gembelangan selama lima bulan di Riau daratan dan pangkatnya segera naik menjadi Kopral KKO I [Kopko I]. Selesai mendapatkan gembelangan di Riau daratan, ia segera dikirim ke Pulau Sambu hingga beberapa lama dalam kesatuan A KOTI Basis X, tugasnya adalah penyusupan ke Singapura. Ia sendiri telah mengunjungi Singapura beberapa kali, menyamar sebagai pelayan dapur menggunakan kapal dagang yang sering mampir ke Pulau Sambu untuk mengisi bahan bakar. Wajahnya yang mirip Cina sangat menguntungkan dalam penyamaran. Ia juga memiliki kemampuan Bahasa Inggris, Cina, dan Belanda yang lancar hingga sangat membantu dalam kebebasannya bergerak dan bergaul di tengah masyarakat Singapura.

Dalam penyusupan di basis X, Tohir mendapat tugas berat, salah satunya demolision: sabotase objek vital militer atau ekonomi musuh. Tugas berat ini diembannya bersama 3 prajurit KKO lain. Rencana sabotase segera dilaksanakan. 8 Maret 1965 tengah malam buta, saat air laut tenang, Tohir bersama dua rekannya [Usman dan

Gani] masuk Singapura. Tohir segera berganti nama Harun bin Said. Mereka mengamati tempat-tempat penting yang akan dijadikan objek sasaran. Mereka berunding dan sekali lagi melakukan pengamatan detail. Lalu kesepakatan dicapai. Data sabotase telah jelas: Hotel Mac Donald di Orchard Road, sebuah pusat keramaian di kota Singapura. Sasaran ini akan diledakkan. Siang hari mereka bergerak di antara kerumunan orang memasuki hotel, menuju basemen lalu menjelang petang memasang bom seberat 12, 5 kg. Pengatur waktu segera dinyalakan.

Pada 10 Maret 1965, jam telah mendekati waktu subuh, tepat pada jam 03 lebih 7 menit, bom meledak. Di saat orang-orang masih banyak yang terlelap tidur, hotel Mac Donald hancur berantakan. Singapura segera menjadi gempa luar biasa. seluruh aparat keamanan Singapura dikerahkan untuk mencari pelaku dan Harun bersama tiga temannya segera melarikan diri. Mereka mencoba berpisah sementara, tapi Harun memilih bersama Usman. Berdua mereka segera menuju pelabuhan.

Pada 13 Maret 1965, Harun bersama Usman mengambil sebuah motorboat dan segera menuju ke Pulau Sambu, pangkalan utama pasukan basis X. Namun, sebelum sampai ke perbatasan perairan Singapura, motorboat macet di tengah laut. Mereka tidak dapat lagi menghindari dari patroli petugas Singapura. Pada jam 09.00 pagi, mereka tertangkap dan di bawa kembali ke Singapura sebagai tawanan.

Harun segera merasakan pengapnya penjara Singapura selama hampir tujuh bulan. Pada 4 Oktober 1965, sidang Pengadilan

Mahkamah Tinggi [*High Court*] Singapura segera digelar dan Harun segera dikenai tuduhan berat, pembunuhan terencana dalam sebuah aksi sabotase. Harun segera membela diri dengan menyatakan itu sebagai tugas negara dalam keadaan perang dan meminta dirinya diperlakukan seperti tawanan perang [POW/*prisoner of war*]. Hakim segera menolaknya. Dua minggu kemudian, putusan pengadilan dijatuhkan, Harun bersalah dan divonis mati.

Diplomasi segera ditempuh. Banding segera diajukan, tetapi ditolak pada 5 Oktober 1966. Pada 17 Februari 1967, perkara ini dibawa ke *Privy Council* di London, tapi kembali ditolak. Pemerintah Indonesia juga telah mengirim delegasi khusus, dari menlu Adam Malik hingga Brigjen Tjokropanolo, untuk menyelamatkan patriot negara itu. Akan tetapi, Singapura tetap tidak bergeming. Hukuman mati akan dilaksanakan pada 17 Oktober 1968, tepat jam enam pagi.

Di hari kematiannya, Harun bangun jam 5 pagi, segera sholat subuh dan keluar dari penjara. Ia dibiuis, urat nadinya dipotong dan segera dibawa ke tiang gantungan. Tepat jam enam pagi, Harun meninggal dunia dalam usia 21 tahun. Jenazahnya langsung dibawa kembali ke tanah air. Pada 18 Oktober 1968, dengan upacara militer, jenazahnya dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata Jakarta. Pemerintah segera menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi kopral. Tepat di hari kematiannya, pemerintah Indonesia segera memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Tohir alias Harun karena pengabdianya yang begitu besar terhadap negara Indonesia.

Jenderal Basuki Rahmat



Lahir: Tuban, Jawa Timur, 4 November 1921|
meninggal: Jakarta, 8 Januari 1969| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 10/TK/1969|
tanggal penetapan: 9 November 1969

■ Pengantar Supersemar

Bermula dari sidang “kabinet 100 menteri” di Istana negara pada 11 Maret 1966 yang terhenti saat pasukan Kostrad mengepung istana negara. Presiden segera memutuskan untuk pergi ke istana Bogor. Lalu tiga perwira tinggi AD menyusul ke Bogor. Salah satunya, Brigjen Basuki Rahmat, membicarakan situasi negara yang gawat dan segera menyodorkan surat kuasa bagi panglima AD untuk memulihkan keamanan. Presiden setuju dan segera tanda tangan. Surat itu populer dengan nama Supersemar.

Sebelum masuk dunia militer, Basuki Rahmat di masa mudanya menempuh pendidikan Sekolah Guru Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada masa Jepang, barulah ia mengikuti pendidikan Tentara Pembela

Tanah Air [PETA] dan ditempatkan di shodanco Peta di Pacitan. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, ia terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat [BKR] Maospati. Dalam Agresi Militer II Belanda, ia memimpin Batalyon 16 mempertahankan kota Bojonegoro.

Selepas Pengakuan Kedaulatan, antara tahun 1956-1959, ia disertai tugas sebagai Atase Militer RI di Australia. Sekembalinya dari Australia, ia diangkat menjadi Asisten IV Kepala Staf Angkatan Darat dan pada 1962 menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VIII/ Brawijaya berkedudukan di Surabaya hingga Desember 1965.

Dimasa gawat pasca peristiwa 1 Oktober 1965, ia membantu pimpinan Angkatan Darat menumpas gerakan G 30 S, antara lain dengan cara menyadarkan pasukan Kodam VIII/ Brawijaya yang diperalat. Ia dipanggil ke mabes AD dan menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor pada Maret 1966 untuk membahas situasi politik yang semakin panas pasca gerakan G 30 S. Pertemuan ini menghasilkan surat perintah yang berisi perintah Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan-tindakan memulihkan keamanan dan ketertiban negara.

Pada 11 Maret 1966, ia diangkat menjadi salah satu Deputy Khusus Menteri/ Panglima Angkatan Darat. Pada April 1966 Basuki Rakhmat diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, mendapat tugas berat untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat. Tiga tahun berselang, ia meninggal dunia dalam usia 48 tahun dan jenazahnya dimakamkan secara militer di Taman Makam

Pahlawan Kalibata. Sepuluh bulan selepas kematiannya, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan nasional pada jenderal Basuki Rahmat.

Arie Frederik Lasut



Lahir: Kapataran, Lembean Timur, Minahasa, 6 Juli 1918| **meninggal:** Pakem, Sleman, Yogyakarta, 7 Mei 1949| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 12/TK/1969| **tanggal penetapan:** 20 Mei 1969

■ Geolog Nasionalis

Kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pertambangan RI membuatnya banyak mengetahui informasi tentang kekayaan bumi Indonesia. Karena pengetahuannya itu, Belanda sangat mengincar dirinya. Ia dibujuk pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan kerjasama dengan imbalan gaji tinggi dan beragam fasilitas. Akan tetapi, kesetiaannya pada negara tidak goyah. Tawaran Belanda itu ditolakny mentah-mentah. Tentara Belanda marah lalu menculiknya dan menembaknya secara keji di lereng selatan Gunung Merapi Yogyakarta.

Arie Frederik Lasut merupakan ahli pertambangan dan geologis. Ia terlibat dalam perang kemerdekaan Indonesia dan pengembangan sumber daya pertambangan dan geologis pada saat-saat permulaan Republik Indonesia. Lasut merupakan putera tertua dari Darius Lasut dan Ingkan Supit. Ia mulai sekolah di *Hollands Inlandsche School* [HIS] di Tondano, kemudian mendapat kesempatan untuk sekolah guru di *Hollands Inlandsche Kweekschool* [HIK] di Ambon karena keberhasilannya menjadi juara kelas. Pada 1933, Lasut lulus dan segera ke Batavia mengikuti pelajaran di *Algemene Middelbare School* [AMS]. Tahun 1937 Lasut lulus AMS dan memulai sekolah kedokteran di *Geneeskundige Hooge School*. Ia berhenti karena kendala dana dan memutuskan bekerja di *Departement van Ekonomische Zaken* [Departemen Urusan Ekonomi] pada 1938.

Setahun berikutnya, Lasut masuk *Technische Hoogeschool te Bandung* [THS], tetapi lagi-lagi studinya harus terhenti karena kesulitan dana. Ia lalu mendapat beasiswa dari *Dienst van den Mijnbouw* [Jawatan Pertambangan] untuk menjadi asisten geolog. Ia menyelesaikan kursus dan mulai kariernya sebagai geologiawan pada 12 Februari 1940. Saat itu adalah saat bermulanya Perang Dunia II dan serangan-serangan pasukan Jepang yang akhirnya menuju ke Indonesia pada tahun 1942.

Di masa pendudukan pemerintah Jepang, ia kemudian diangkat menjadi asisten pada *Chrisitsu Chosayo* [Jawatan Geologi] yang berkedudukan di Bandung. Pengalaman yang ia dapatkan sewaktu bekerja di lembaga tersebut memberikan manfaat bagi negara ketika proklamasi kemerdekaan berkumandang. Berbekal pengalamannya

itu, ia terpilih menduduki posisi Kepala Jawatan Tambang dan Geologi. Lembaga yang dikepalainya waktu itu harus dipindahkan ke Tasikmalaya, kemudian Magelang, hingga ke Yogyakarta karena terjadi agresi militer Belanda pertama. Di Magelang dan Yogyakarta, ia mendirikan beberapa sekolah, seperti Sekolah Pertambangan Rendah, Sekolah Laboran Geologi, dan Sekolah Pertambangan Geologi Menengah dan Tinggi. Di samping menjabat sebagai Kepala Jawatan Tambang dan Geologi, ia aktif dalam pembentukan organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan (KRIS). Selain berkiprah di KRIS, ia diangkat menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjalankan fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Di hari-hari terakhirnya, A.F. Lasut masih menyibukkan diri dengan melakukan penyelidikan geologi di beberapa tempat. Ia masih menuliskan penelitiannya tentang geologi dan pertambangan dalam Berita Tahunan 1945-1947. Sayangnya, ahli bumi ini meninggal muda karena kebingungan tentara Belanda. Lasut memiliki peran yang besar bagi perkembangan kemerdekaan Republik Indonesia juga bidang Geologi di Indonesia. Atas jasa-jasanya itu, pemerintah Indonesia, memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Arie Frederik Lasut.

Martha Christina Tiahahu



Lahir: Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 | **meninggal:** Laut Banda, Maluku, 2 Januari 1818| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 12/TK/1969| **tanggal penetapan:** 20 Mei 1969

■ Srikandi Maluku

Jika dalam cerita pewayangan *Mahabharata* terdapat Srikandi, di kisah sejarah perjuangan bangsa Indonesia ada Martha Cristina Tiahahu. Mereka sama-sama prajurit perempuan, sama-sama muda, dan sama-sama berani.

Seorang gadis bernama Martha Christina Tiahahu terlahir lahir di Nusa Laut, Maluku, pada 4 Januari 1800. Di usia 17 tahun, ia mengikuti ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu dalam perang Pattimura tahun 1817 melawan kolonial Belanda. Bukan Cuma turut mengangkat senjata, Martha pun memberi-menjadi motivator spirit perjuangan kepada kaum wanita di bumi Maluku supaya ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran

Christina bergabung dengan rakyat Saparua tatkala Thomas Matulesy mengkomando pasukannya merebut benteng Duurstede pada 16 Mei 1817. Semua tentara Belanda yang ada dalam benteng itu, termasuk Residen van den' Berg tewas. Selama tiga bulan benteng tersebut dikuasai pejuang. Perlawanan rakyat Maluku mulai surut saat Kapitan Patimura bersama pemimpin lain, termasuk ayah Christina tertangkap dan dijatuhi hukuman mati di benteng Niuew Victoria pada 16 Desember 1817. Namun, semangat Christina tetap membara, ia bersama pejuang lain tetap gigih melakukan perlawanan secara gerilya.

Christina pun akhirnya tertangkap, bersama pejuang Maluku lain, mereka rencananya akan diangkut ke Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Namun, pemuda Christina membandel, di dalam kapal saat perjalanan ia melakukan aksi mogok makan dan mogok pengobatan hingga jatuh sakit. Martha Christina meninggal di atas Kapal Perang Eversten milik Belanda pada 2 Januari 1818, jasadnya lalu dibuang di laut Banda.

Guna mengenang keberaniannya, Pemerintah Republik Indonesia mengukuhkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 20 Mei 1969. Kemudian pada 2 Januari 2008, ia dibangun sebuah monument di desa kelahirannya, Nusa Laut. Monumen tersebut diresmikan oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu.

Maria Walanda Maramis



Lahir: Kema, Sulawesi Utara, 1 Desember 1872|
meninggal: Maumbi, Sulawesi Utara, 22 April 1924|
gelar: Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres
No. 12/TK/1969| **tanggal penetapan:** 20 Mei 1969

■ Pejuang Perempuan dari Minahasa

Jikalau Jepara melahirkan Kartini, Bandung memunculkan Dewi Sartika, Yogyakarta memiliki Siti Walidah, di Minahasa ada Walanda Maramis. Ia seorang perempuan yang terus berjuang demi pemberdayaan kaum perempuan pribumi.

Bernama lengkap Yosephine Walanda Maramis, ia sudah menjadi yatim piatu semenjak usia 6 tahun. Perempuan kelahiran 1 Desember 1872 dibesarkan oleh pamannya. Pikiran Maramis mulai terbuka semenjak lulus Sekolah Dasar, kala itu ia berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi tidak mendapat izin. Menurut tradisi Minahasa, perempuan tidak diperkenankan menempuh pendidikan tinggi, mereka harus tinggal di rumah sembari menunggu waktu untuk menikah.

[177]

Kondisi tersebut membuat Maramis miris, untunglah lingkungan di sekitarnya banyak orang-orang terpelajar, salah satunya adalah Pendeta Ten Hobe. Bergaul dengan para cendekiawan membuat pikiran Maramis semakin kritis dan ilmu pengetahuannya semakin bertambah. Nasib buruk tak selalu menimpa Maramis, ia malah mendapat pencerahan baru ketika dilamar Yoseph Frederik Calusung Walanda pada tahun 1890. Profesi suaminya yang seorang guru, semakin membuat cita-citanya untuk memajukan kaum perempuan di Minahasa lebih mudah tercapai. Apalagi suaminya mendukung keinginan Maramis, selain itu melalui suami pula jaringannya semakin bertambah.

Maramis berpendapat bahwa perempuan merupakan tiangnya keluarga, di pundak perempuan inilah tergantung masa depan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Maria pun melihat kenyataan yang menyedihkan di masyarakat, dimana anak perempuan beruntung mendapat kesempatan bersekolah dan mempunyai keahlian seperti juru rawat atau bidang, pada akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Melalui tulisan di harian *Tjahaja Siang* di Manado, Maria mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang perempuan.

Pada bulan Juli 1917 Maramis mendirikan organisasi yang diberi nama Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya (PIKAT). Misi PIKAT adalah membangun dan bergerak dalam pemberdayaan perempuan, kegiatan sosial, pendidikan juga budaya berwawasan kebangsaan, Tak butuh waktu lama bagi PIKAT untuk mendapatkan *aplous* dari masyarakat. Melalui kepemimpinan Maramis, organisasi

tersebut terus tumbuh dan berkembang membuka cabang di Minahasa, seperti di Maumbi, Tondano, dan Motoling. Pengaruh PIKAT pun sampai ke telinga perempuan-perempuan Jawa, beberapa rantingnya antara lain muncul di Batavia, Bogor, Bandung, Cimahi, Magelang, juga Surabaya.

Tertanggal 2 Juli 1918, sejarah baru dimulai, organisasi PIKAT meresmikan didirikannya sekolah bernama Huis Houd School PIKAT di Manado. Sekolah tersebut siap menampung gadis lulusan SD untuk diberi pelajaran dan bimbingan mengenai tata cara mengatur rumah tangga dan keterampilan wanita, tanpa memandang berasal golongan atas, menengah, maupun rendah. Meskipun sempat terkendala soal dana sebelum mendapat sumbangan dari Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1920, pada akhirnya PIKAT menjadi berkembang dan terus berkembang hingga sekarang.

Maria Walanda Maramis meninggal dunia pada 22 April 1924. Ia ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 20 Mei 1969. Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangannya, di desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa dibangun monumen diberi nama Monumen Maria Walanda Maramis.

Supeno



Lahir: Pekalongan, Jawa Tengah, 12 Juni 1916 |
meninggal: Ganter, Nganjuk, Jawa Timur, 24 Februari
1949| *gelar:* Pahlawan Nasional| *dasar penetapan* Keppres
No. 39/TK/1970: | **tanggal penetapan:** 13 Juli 1970

■ Sang Menteri yang bergerilya

Kala tentara Belanda menyerbu ibu kota Yogyakarta dalam *doorstoot* kedua 19 Desember 1948, Supeno ikut berjuang bergerilya ke arah timur. Beberapa bulan setelahnya, saat ia berada di sebuah pancuran air di Ganter Nganjuk, tentara Belanda menyergapnya. Supeno dan rombongannya sedang mandi. Tentara Belanda segera menginterogasinya. “Sapa Kowe?” gertak Belanda. “Penduduk sini,” jawab Soepeno tanpa takut. Belanda tidak percaya karena Supeno tidak seperti orang desa. Ia terus didesak bicara, tapi ia tetap bungkam. Segera seorang serdadu Belanda menempelkan ujung pistolnya dipelipisnya. Ia tetap tidak mau bicara. Sikapnya teguh, sama sekali tidak ada rasa takut. Dan “Dor!” pistol menyalak. Supeno terbunuh oleh pasukan Belanda.

Supeno saat itu masih menjabat sebagai menteri Pembangunan dan Pemuda. Ia merupakan anak seorang pegawai stasiun kereta api Tegal. Setelah lulus dari AMS di Semarang, ia melanjutkan studi di THS [*Technische Hogeschool*] Bandung. Hanya dua tahun, ia menuntut ilmu teknik kemudian ia pindah ke *Recht Hogeschool* [Sekolah Tinggi Hukum] di Batavia. Dari sanalah, ia ikut pergerakan pemuda. Ia tinggal di asrama Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia [PPPI] di jalan Cikini Raya 71. Di sana, ia jadi ketua asrama.

Karier politiknya berawal saat bergabung dalam kelompok Amir Syarifuddin. Ia terlibat dalam kabinet Amir Syarifuddin II [3 Juli 1947-19 Januari 1948] yang tidak bertahan lama selepas perundingan Renville. Pasca jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan karena perbedaan politik dengan Amir Syarifuddin, Supeno memisahkan diri. Ia lalu bergabung dengan kabinet yang dipimpin oleh Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta dan menjadi menteri Pembangunan dan Pemuda. Supeno duduk dalam kabinet Hatta karena kesadaran politiknya yang mandiri dan menyokong program kabinet untuk pelaksanaan persetujuan Renville, rasionalisasi, serta pembangunan negara.

Akan tetapi, keamanan negara terancam di akhir tahun 1948. Perundingan-perundingan yang diadakan oleh kedua belah pihak [Indonesia-Belanda] dan diawasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] mengalami kegagalan. Belanda menyerang dan menduduki Yogyakarta. Beberapa orang pimpinan negara tertangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Supeno saat itu mengikuti jalan militer Indonesia untuk gerilya,

melakukan perang semesta hingga akhirnya terbunuh oleh Belanda di Nganjuk.

Supeno adalah pejuang yang gigih dalam mempertahankan republik Indonesia. Ia tokoh sipil yang berani mengambil sikap tegas ikut berperang melawan Belanda meski penuh risiko. Ia tidak punya pengalaman militer, tetapi tetap ikut bergerilya. Setahun selepas kematiannya, 24 Februari 1950, makam Supeno segera dipindahkan dari Nganjuk ke taman makam pahlawan Semaki Yogyakarta. Atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, presiden Soeharto memberikan gelar Pahlawan Nasional, 21 tahun selepas kepergian Supeno.

Sultan Ageng Tirtayasa



Lahir: Banten, 1631 | **meninggal:** Banten, 1683 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 45/TK/1970 | **tanggal penetapan:** 1 Agustus 1970

■ Pejuang dari keraton Banten

Paska naik tahta menjadi Sultan Banten pada 1651, Sultan Ageng Tirtayasa mengeluarkan sejumlah kebijakan. Di antaranya: memajukan perdagangan Banten, meluaskan daerah kekuasaan, dan mengusir Belanda dari Batavia. Tidak butuh waktu lama, Banten pun menjadi kota pelabuhan dagang penting di Selat Malaka.

Naiknya nama Banten sebagai pelabuhan penting dirasa merugikan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) karena kongsi dagang bentukan Belanda tersebut ingin menguasai perdagangan di tanah jajahan. Ditambah lagi sikap terang-terangan Kasultanan Banten yang menolak kedudukan VOC di Batavia membuat Belanda semakin berang. Lantas VOC memblokade Banten, setiap

pedagang dari Cina dan Arab yang menuju Banten dipaksa mendarat ke Batavia.

Kasultanan Banten tak gentar, namun Sultan Ageng Tirtayasa juga tidak mampu berbuat banyak. Kekuatan besar VOC memaksa Banten harus bertahan. Dampak blokade tersebut terasa setelah tiga tahun hingga membuat Banten terpaksa melakukan kompromi. Dibuatlah perjanjian antara Kasultanan Banten dan VOC, isinya menyatakan bahwa hak-hak Belanda diakui dan perdagangan Banten dibatasi oleh Belanda. Karena perjanjian tersebut hanya menguntungkan VOC, selang beberapa bulan, Banten kembali mendeklarasikan diri sebagai pelabuhan terbuka. Kali ini Sultan Ageng sudah mempersiapkan semuanya. Ia mengadakan perubahan di bidang ekonomi. Kesejahteraan rakyat ditingkatkan melalui pencetakan sawah-sawah baru. Saluran irigasi dibuat sekaligus berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Sultan Ageng Tirtayasa juga menginginkan Banten menjadi kerajaan Islam terbesar. Ia memanggil kawan lamanya dari Makassar, yakni ulama Syekh Yusuf Tajul Khalwati pada tahun 1664. Ulama tersebut diangkat sebagai mufti kerajaan yang bertugas merampungkan segala urusan keagamaan dan juga menjadi penasihat sultan dalam bidang pemerintahan. Kemauan Syekh Yusuf untuk mengabdikan kepada Kasultanan Banten juga disebabkan karena ia tidak sepaham dengan Sultan Gowa dari tanah kelahirannya. Ia bahkan turut bahu-membahu melakukan gerilya tatkala Kasutanan Banten digempur Belanda.

Akan tetapi, kekondusifan Banten dari blokade tidak menjamin perpecahan di kalangan dalam istana. Dua putra Sultan Ageng yakni Pangeran Gusti (Sultan Haji) dan Pangeran Purbaya saling bertikai berebut tahta. Pangeran Gusti merasa sang ayah memihak adiknya, Purbaya. Konflik di antara kedua anaknya menyebabkan Sultan Ageng kerap pergi ke dusun Tirtayasa, Kabupaten Serang. Di sana ia juga membangun persinggahan. Karena nama dusun inilah, orang lantas lebih mengenalnya dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa.

Konflik internal tersebut dimanfaatkan oleh Belanda dengan menggaet Pangeran Gusti menjadi sekutu. Belanda juga memanas-manasi Pangeran Gusti sehingga ia menyangka kelak Pangeran Purbaya lah yang bakal diangkat menjadi sultan. Akhirnya Pangeran Gusti bersekongkol dengan Belanda untuk meng kudeta ayah handanya. Pada Maret 1682 bentrok ayah dan anak dibantu pasukan Belanda terjadi. Pangeran Gusti berhasil menggulingkan ayahnya dan mengangkat diri sebagai Sultan Haji.

Sultan Ageng Tirtayasa berhasil melarikan diri, namun tertangkap pada tahun berikutnya. Ia lalu dipenjarakan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1683. Setelah wafatnya sultan, beberapa pembesar dan rakyat Banten meminta agar jenazah Sultan Ageng Tirtayasa dapat dibawa kembali ke Banten. Pihak Belanda mengizinkan, lantas jenazahnya dimakamkan di sebelah utara Masjid Agung Banten.

Wage Rudolf Supratman



Lahir: Jatinegara, Batavia, 9 Maret 1903 | **meninggal:** Surabaya, Jawa Timur, 17 Agustus 1938 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 16/TK/1971 | **tanggal penetapan:** 20 Mei 1971

■ SI KOMPONIS NASIONALIS

Nama W.R. Supratman kerap kali muncul dalam mata pelajaran Pancasila di Sekolah Dasar. Ya, ia dikenal karena pengarang lagu kebangsaan Republik Indonesia berjudul *Indonesia Raya*. Supratman memang seniman musik, beberapa kali menciptakan lagu bertema kebangsaan antara lain *Ibu Kita Kartini*, *Bendera Kita*, *Pandu Indonesia*, *Bangunlah Hai Kawan*, *Di Timur Matahari*, *Matahari Terbit*, dan lain-lain.

Sewaktu kanak-kanak Supratman sekolah di Sekolah Dasar Budi Utomo Purworejo. Lalu pindah ke Makassar dan meneruskan di *Europeese Lagere School* (ELS). Selanjutnya ia masuk ke *Normaal School* dan menjadi guru di Sekolah Angka Dua pada usia 20 tahun.

Tentang musik, ia pelajari dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, mulanya bermain biola kemudian cara mengubah lagu. Bahkan dua saudara tidak sedarah ini kemudian mendirikan kelompok jazz yang dinamakan *Black White Jazz*.

Tahun 1924 Supratman bertemu dengan HJFM Snevliet tokoh sosialis pendiri ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*). Melalui orang ini ketertarikannya di panggung politik bermula. Lalu ia pun meluncur ke Batavia, dan mulai aktif baik di dunia pers maupun pergerakan kebangsaan. Aktivitasnya itu mendorong dirinya sebagai komponis untuk menciptakan lagu yang mampu membangkitkan semangat. Lagu perdananya berjudul *Dari Barat Sampai ke Timur*.

Tatkala menetap di Batavia, suatu hari Supratman membaca sebuah artikel dalam majalah *Timbul*. Penulis artikel tersebut menantang ahli-ahli musik untuk menciptakan lagu kebangsaan. Soepratman merasa tertantang, lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924 saat berada di Bandung, lahirlah lagu fenomenal *Indonesia Raya*, yang dikemudian hari dijadikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Kali pertama *Indonesia Raya* dinyanyikan di depan umum yakni pada malam 28 Oktober 1928 di Batavia saat berlangsung Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Dengan cepat lagu tersebut menjadi terkenal di kalangan pergerakan. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu *Indonesia Raya* selalu dinyanyikan.

Lagu *Indonesia Raya* saat itu menggambarkan keinginan-kehendak untuk merdeka, karenanya Supratman diburu polisi

Hindia Belanda. Namun ia tidak diam, dalam perburuan, Supratman pun mencipta lagu guna menggugah jiwa nasionalisme rakyat. Lagu terakhirnya berjudul “Matahari Terbit” disiarkan pada awal Agustus 1938 di NIROM Jalan Embong Malang, Surabaya. Pada saat itu juga Supratman ditangkap lalu dijemput ke penjara Kalisosok, Surabaya. Di bulan yang sama ia meninggal dunia karena sakit. Selain mencipta lagu, Supratman pernah menulis roman “Perawan Desa” yang menceritakan ketidaksukaannya terhadap penjajahan kolonial Belanda.

Nyai Ahmad Dahlan



Lahir: Yogyakarta, 1872| **meninggal:** Yogyakarta, 31 Mei 1946| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 42/TK/1971| **tanggal penetapan:** 22 September 1971

■ Pejuang Aisyiyah

*Wahai Warga Aisyiyah Sejati. Sadarlah Akan Kewajiban Suci.
Membina Harkat Kaum Wanita. Menjadi Tiang Utama Negara.
Ditapak Kakimu Terbentang Surga. Ditanganmu-Lah Nasib Bangsa.
Mari Beramal Dan Berderma Bakti. Membangun Negara. Mencipta
Masyarakat Islam Sejati. Penuh Karunia. Berkibarlah panji matari.
Menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita. Dalam
menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu illahi. Dasar
kebahagiaan sejati. “Mars Aisyiyah”*

Jika Ahmad Dahlan berhasil mendirikan Muhammadiyah, istrinya bernama Siti Walidah merintis organisasi perempuan berbasis Islam modern, Aisiyiah. Meskipun tidak lepas dari induknya, yakni Muhammadiyah, tetapi Aisiyiah mampu berkembang besar menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar se-Indonesia.

Pendiri Aisiyiah bernama kecil Siti Walidah. Ia lahir dan besar di kampung Kauman Yogyakarta. Lingkungan Siti Walidah merupakan lingkungan Islami, ayahnya adalah pemuka Agama Islam dan Penghulu resmi Keraton, Kyai Haji Fadhil. Sejak kecil Siti Walidah telah mendapat pendidikan agama. Karena alasan adat yang ketat, setiap anak perempuan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta harus kena *pingit*, tinggal di rumah hingga datang saatnya untuk menikah. Siti Walidah tidak pernah mengenyam pendidikan umum kecuali pendidikan agama yang didapat dari ayahnya.

Meskipun pernah merasakan sekolah umum, Nyai Ahmad Dahlan mempunyai pandangan luas. Hal itu disebabkan karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, juga tokoh bangsa yang juga merupakan teman seperjuangan suaminya. Sebagai istri dari seorang pemuka agama berpikiran revolusioner, kerap kecaman dan tentangan, Siti Walidah belajar mengerti maksud tujuan sang suami, ia tetap mendukung gagasan dan ide suaminya dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya.

Mulanya, Siti Walidah hanya berperan sebagai istri yang menyokong secara moral Ahmad Dahlan. Namun, sejak tahun 1914, ia mulai terlibat langsung dalam kegiatan Muhammadiyah dengan ikut merintis kelompok pengajian wanita Sopo Tresna.

Pengajian tersebut mengkaji tentang ilmu agama, Siti Walidah juga menjadi salah satu pembicaranya. Lama-kelamaan pengajian tersebut menunai sukses dan anggota semakin banyak. Nyai Ahmad Dahlan lantas berpikiran untuk mengembangkan Sopo Tresno menjadi sebuah organisasi kewanitaan berbasis Agama Islam. Tepat di malam peringatan Isra' Mi'raj, pada tanggal 22 April 1917, berdirilah sebuah organisasi Islam bagi kaum perempuan bernama Aisyiyah, dan dipilih sebagai ketua adalah Siti Bariyah. Lima tahun setelah didirikan, pada tahun 1923 Aisyiyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Tahun 1927 Aisyiyah berubah menjadi Majelis Aisyiyah. Tahun 2005 dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang organisasi Aisyiyah ditingkatkan statusnya menjadi organisasi berotonomi khusus. Selain Aisyiyah, Siti Walida juga mendirikan Siswa Praja Wanita pada tahun 1919, organisasi tersebut kemudian berkembang dan berganti nama menjadi Nasyiatul Aisyiyah.

Siti Walidah meninggal dunia usia 74 tahun pada tanggal 31 Mei 1946. Pada 22 September 1971, sebagai penghormatan karena usahanya dalam menyebarluaskan Agama Islam dan mendidik perempuan, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.

Kiai Haji Zainal Mustafa



Lahir: Bageur, Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya, 1899|
meninggal: Jakarta, 28 Maret 1944| **gelar:** Pahlawan Nasional|
dasar penetapan: Keppres No. 64/TK/1972|
tanggal penetapan: 6 November 1972

■ Penentang Jepang dari Singaparna

Saat Jepang datang, ia menentang *seikeirei* [memberi hormat dengan menundukkan kepala ke arah matahari terbit]. Perbuatan musyrik yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mendewakan matahari. Pengerahan Romusa [pekerja paksa] juga ditentangnya. Ia membentuk pasukan tempur dari pesantren Sukamanah dan melancarkan perlawanan bersenjata terhadap tentara Jepang. Murid-murid pesantrennya disuruh berpuasa untuk mempertebal iman serta berlatih keras Pencak Silat. Sesuai rencana, perlawanan dimulai pada 25 Februari 1944. Sehari sebelum itu, datang utusan Jepang dari Tasikmalaya meminta berunding. Utusan itu segera disandera dan ia segera menyampaikan ultimatum supaya tanggal 25 Februari 1944, Jepang memerdekakan pulau Jawa. Jepang tidak terima dan

[192]

perang akhirnya berkobar. Sang ulama penyeru perang ini melihat fasisme Jepang lebih berbahaya dari imperialisme Belanda.

Zaenal Mustofa bernama asli Umri atau Hudaemi. Ia lahir dari keluarga petani berkecukupan, pasangan Nawapi dan Ratmah. Ia memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Lalu melanjutkan pendidikan ke pesantren Gunung Pari. Ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga dan di Pesantren Sukamiskin Bandung. Selama hampir 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lain. Oleh karena itu, ia mahir bahasa Arab dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Pada 1927, ia pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji dan kembalinya ke kampung halaman mengubah namanya menjadi Zaenal Mustofa.

Zaenal Mustofa kemudian mendirikan sebuah pesantren dengan nama Pesantren Sukamanah. Melalui pesantren itu ia ingin memajukan masyarakat Islam dan menyebarkan agama Islam. Ia sering mengadakan ceramah agama ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya. Maka sebutan kiai akhirnya melekat dengan namanya. Ia tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik, patriotik, dan berpandangan jauh ke depan. Pada 1933, ia masuk Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil NU Tasikmalaya. Namanya semakin dikenal dan setiap berceramah, ia selalu menanamkan semangat kebangsaan dan menentang penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda menjadi curiga dan menuduhnya menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah. Pada 17 November 1941 ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara Tasikmalaya dan di pindah

ke Sukamiskin Bandung. Awal tahun 1942, ia dibebaskan. Akan tetapi, pada Februari 1942, ia kembali ditangkap dengan tuduhan sama dengan sebelumnya dan segera masuk penjara Ciamis.

Sang kyai baru bebas setelah Belanda menyerah pada fasisme Jepang. Di masa Jepang inilah kebencian Mustofa semakin besar terhadap penjajahan. Ia merasa Jepang justru lebih kejam dari Belanda. Ia selalu menentang kebijakan pemerintah Jepang. Ia menentang seikerei pertama kali saat semua alim ulama Singaparna berkumpul di alun-alun dan melakukannya. Ia juga dengan gigih menentang penggunaan tenaga secara paksa untuk Jepang [Romusa].

Mustofa segera mengadakan perlawanan. Menyiapkan santrinya menjadi laskar pejuang dengan senjata seadanya dan bekal ilmu bela diri pencak silat yang diberikannya di pesantren. Mustofa segera bergerak. Rencananya, laskar singaparna ini akan menculik para petinggi Jepang, melakukan sabotase, dan membebaskan tawanan Jepang. Akan tetapi, rencana ini bocor dan Jepang mengirim utusan ke pesantren. Utusan ini justru tertawaan lalu keesokan harinya muncul opsir Jepang yang membuat keributan. Perkelahian terjadi, tiga opsir tewas dan satu orang melarikan diri. Mustofa segera memberi ultimatum kepada pemerintah Jepang untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung hari itu juga, 25 Februari 1944.

Pemerintah Jepang menjawabnya dengan mengirim pasukan yang besar ke pesantren Sukamanah. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari dan pesantren Sukamanah diduduki tentara Jepang. Mustofa tertangkap dan pesantrennya segera ditutup paksa oleh militer Jepang. Sang ulama yang tertangkap segera dibawa Jepang ke

Jakarta. Pada 25 Oktober 1944, Kyai Haji Zaenal Mustofa dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi dan jenazahnya dikubur di pemakaman Belanda Ancol.

Atas jasa-jasanya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Kyai Haji Zaenal Mustofa pada 1972. Setahun berselang, kuburannya di Ancol kemudian dipindahkan ke makam Sukamanah Singaparna Tasikmalaya.

Sultan Hasanuddin



Lahir: Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631|
meninggal: Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1670|
gelar: Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres
No. 87/TK/1973| **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ “Ayam Jago” dari Timur

Kerajaan Gowa memiliki pengaruh besar bagi daerah sekitarnya karena menguasai jalur-jalur perdagangan di bagian wilayah timur nusantara. Sultan Hasanuddin merupakan penerus generasi ke-16 kerajaan tersebut. Ia mewarisi tahta ayahnya sejak tahun 1653. Pada era pemerintahan Sultan Hasanuddin, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah di Gowa. Untuk mencapai ambisinya, VOC mengirim pasukan militer di bawah komando pimpinan Laksamana Cornelis Speelman pada 1666. Mendengar gelagat tidak menyenangkan, Sultan Hasanuddin segera membentuk pasukan dan mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia timur untuk bersatu melawan VOC.

[196]

Peperangan segera terjadi, mulanya pasukan Hasanuddin berhasil memukul mundur tentara musuh hingga VOC mengirim bala bantuan lebih besar. Kondisi menjadi berbalik, Belanda yang mengerahkan angkatan perang yang besar di bawah pimpinan Cornelis Speelman berhasil merebut beberapa benteng pertahanan Gowa dan memaksa Sultan Hassanudin melakukan perundingan di Bungaya pada 18 November 1667.

Akan tetapi, Perjanjian Bungaya terlalu menguntungkan pihak Belanda, Hasanuddin sebagai penguasa Gowa merasa dirinya terlalu tertekan akibat perjanjian tersebut. Pada bulan April 1668, ia bersama sekutu yang mendukungnya kembali berontak dan menyerang pos-pos Belanda di Gowa. Pertempuran sengit yang terjadi di beberapa tempat memaksa pihak Belanda kembali meminta tambahan pasukan dari Batavia. Meski Hasanuddin bersama rakyat Gowa melakukan perlawanan gigih, akhirnya ia terpaksa mengakui keunggulan Belanda saat benteng Sombaopu jatuh ke tangan musuh pada 24 Juni 1668. pertahanan terkuat dan terakhir kerajaan Gowa, yakni benteng Sombaopu, jatuh ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya benteng tersebut kekuatan Hasanuddin semakin lemah, lima hari kemudian ia mengundurkan diri dari takhta kerajaan. Namun, Hasanuddin tetap tidak mau bekerja sama dengan Belanda hingga ia meninggal dunia pada 12 Juni 1670.

Pertempuran di Gowa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dari pihak VOC. Perlawanan dan keberanian Sultan Hasanuddin memimpin rakyat memberi *point* tersendiri bagi Belanda, sampai-sampai orang Belanda menjulukinya “Ayam Jantan

dari Timur”. Guna mengenang jasanya, pahlawan Makassar tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 6 November 1973.

Kapitan Pattimura



Lahir: Hualoy, Seram Selatan, Maluku, 8 Juni 1783|
meninggal: Ambon, Maluku, 16 Desember 1817| **gelar:**
Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 87/
TK/1973| **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ Melawan Kompeni di Saparua

Kekuasaan VOC yang lalim di Maluku telah membuat rakyat pribumi marah. Sementara residen van den Berg yang kejam membuat rakyat menuntut balas. Benteng Duurstede menjadi saksi betapa gigihnya perjuangan rakyat melawan Kompeni. Satu pagi, 14 Mei 1817, para pemuda dan pemimpin perjuangan berkumpul di Saparua. Terompet kerang dibunyikan tiga kali lalu mereka berembug. Waktu telah tiba untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Subuh 16 Mei 1817, semua pejuang telah berkumpul kembali dan mengangkat Matulessi sebagai pemimpin perjuangan. Mereka bergerak menyerbu benteng, bertempur melawan tentara VOC dan menangkap residen van den Berg. Dalam satu kesempatan, Matulessi segera menyeret residen ke sebuah tiang, menyiapkan 12 prajurit

[199]

bersenjata api, lalu mengangkat pedang memberi aba-aba dan hari itu juga sang residen dieksekusi mati. Benteng Duurstede akhirnya dikuasai pejuang Saparua dibawah Thomas Matulesesi.

Matulesesi merupakan turunan bangsawan dari Nusa Ina. Ayahnya bernama Antoni Mattulesy keturunan Kasimiliali Pattimura Mattulesy, seorang pangeran dari raja Sahulau yang berkuasa atas sebuah negeri di Seram Selatan. Versi lain bertutur bahwa ia bernama asli Ahmad Lussy, atau sering dipanggil Mat Lussy dalam bahasa orang-orang Maluku. ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau, yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Sultan ini dikenal dengan sebutan Kasimillah, lalu orang-orang Maluku menyebutnya Kasimiliali.

Matulesesi mengalami masa pergantian pemerintahan dari tangan VOC [Belanda] ke tangan [EIC] Inggris pada 1798, tepat saat kongsi dagang Belanda itu mengalami kebangkrutan. Pada masa pemerintahan Inggris, ia masuk dinas militer dan memperoleh pangkat sersan. Tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Penduduk Maluku kembali mengalami penderitaan. Mereka dipaksa bekerja rodi, harus membayar pajak tanah [*landrente*] dan menyerahkan hasil rempah-rempah kepada Pemerintah Belanda. Rakyat Saparua mengalami tekanan dan penderitaan bertubi-tubi hingga akhirnya melakukan perlawanan.

Puncak perlawanan adalah perebutan benteng Duurstede, sebuah benteng warisan Portugis, yang dijadikan pusat politik Belanda di Saparua. Dalam penyerbuan itu, Matulesesi diangkat menjadi panglima perang, pemimpin perjuangan dan menggunakan

nama Pattimura. Orang-orang Belanda segera menjuluki sang panglima ini dengan sebutan Kapitan. Namanya lalu terkenal sebagai Kapitan Pattimura.

Jatuhnya benteng Duurstede di tangan rakyat Saparua mengakibatkan kedudukan VOC di Ambon dan Batavia goncang. Mereka segera mengirim pasukan yang besar untuk merebut benteng kembali. Ekspedisi segera dikirim di bawah pimpinan mayor Beetjes dengan serdadu sebanyak 350 orang. Pada bulan Juni 1817, mereka telah berada di Saparua dan segera merebut benteng. Akan tetapi, ekspedisi ini dapat dengan mudah dihancurkan pasukan Pattimura. Jadilah Pattimura dan rakyat Saparua menguasai benteng selama berbulan-bulan tanpa terkalahkan.

Akhirnya Belanda mengirimkan pasukan yang lebih besar dengan persenjataan yang lebih lengkap. Pada November 1817, Gubernur van Middelkoop mengirimkan armada yang berjumlah 1500 orang dipimpin langsung Komisari Jendral A. A Buyskers. Strategi yang dilakukan oleh Buyskers adalah menguasai pulau-pulau di sekitar Saparua, dan selanjutnya menguasai daerah kekuasaan Pattimura. Strategi tersebut ternyata cukup berhasil, Pattimura beserta pasukannya terdesak dan harus mengundurkan diri keluar benteng. Akhirnya serdadu Belanda berhasil menguasai kembali benteng Duurstede.

Sesudah itu, Belanda melancarkan operasi besar-besaran untuk memadamkan perlawanan Pattimura. Karena kekuatan yang tidak seimbang, lama kelamaan perlawanan menjadi berkurang. Pattimura akhirnya tertangkap di wilayah Siri Sori. Ia segera dibawa ke Ambon.

Belanda membujuknya untuk bekerja sama, tetapi bujukan itu ditolak. Pengadilan kolonial Belanda menjatuhkan hukuman gantung kepada Pattimura. Sehari sebelum hukuman itu dijalankan, Belanda masih membujuk, tetapi ia tetap menolak. Pada hari Selasa 16 Desember 1817 hukuman gantung dilaksanakan di depan benteng Victoria Ambon. Jenazah Pattimura dimasukkan dalam kurungan besi lalu dibawa ke pojok timur kota Ambon. Maksud Belanda adalah agar rakyat melihat Pattimura dan takut untuk melawan Belanda. Akan tetapi, faktanya, kematian Pattimura tetap tidak menyurutkan perang perlawanan melawan Belanda di Saparua Maluku. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan melawan Belanda di wilayah Maluku, Pattimura mendapat gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia pada 1973.

Pangeran Diponegoro



Lahir: Yogyakarta, 11 November 1785| **meninggal:** Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Januari 1855| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 87/TK/1973| **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ Sang Erucokro Tanah Jawa

Perang di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya berlangsung selama lima tahun dari 1825 hingga 1830. Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan biaya tidak sedikit dalam perang tersebut, sampai-sampai simpanan kas mereka terkuras. Perang itu kemudian dikenal dengan Perang Jawa, dikomandoi seorang pemimpin cerdas bernama Diponegoro.

Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari selir Raden Ayu Mengkarawati (putri Bupati dari Pacitan). Sedari kecil ia diasuh oleh neneknya di Tegalrejo. Nama kecilnya Raden Mas Ontowiryo lahir tanggal 11 Nopember 1785. Sebenarnya, saat Ontowiryo dewasa ia bakal diangkat menjadi raja oleh ayah handanya,

namun dengan bijak menolak karena menyadari bahwa ibunya bukan seorang permaisuri. Diponegoro tetap menjadi pangeran dan menduduki jabatan dewan penasihat Keraton Yogyakarta.

Pada tahun 1820-an campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam persoalan Kerajaan Yogyakarta makin menjadi. Peraturan tata tertib yang dibuat Pemerintah Belanda sangat merendahkan raja-raja Jawa, para bangsawan diadu domba sehingga dalam istana terdapat golongan yang pro dan yang anti Belanda. Kedua golongan itu saling curiga mencurigai. Sementara itu, tanah-tanah kerajaan banyak yang diambil untuk perkebunan-perkebunan milik pengusaha Belanda. Karenanya, Diponegoro yang tidak menyukai turut campur Belanda dalam lingkup keraton, memilih meninggalkan istana lalu menetap di Tegalrejo.

Hubungan semakin memanas antara Diponegoro dengan Pemerintah Hindia Belanda saat pemerintah kolonial tersebut berencana membangun jalan untuk meluncurkan sarana transportasi dan militer di Yogyakarta. Pembangunan bakal menggusur banyak lahan, termasuk tanah milik keluarga besar Diponegoro di Tegalrejo, di sana terdapat makam leluhur Diponegoro di tanah tersebut. Guna mencari solusi Residen Belanda, A.H. Smisaert mengundang Diponegoro untuk menemuinya, tetapi undangan itu ditolak. Konflik memuncak saat dilakukannya pematokan tanah. Diponegoro memerintahkan orang-orangnya mencabut patok-patok tersebut. Perilaku Diponegoro membuat Belanda geram, bahkan Diponegoro dituduh menyiapkan pemberontakan. Pada tanggal 20 Juni 1825, pasukan bermeriam didatangkan ke Tegalrejo.

Diponegoro terpaksa mengungsi karena ia belum mempersiapkan diri. Setelah meninggalkan kediamannya, Diponegoro segera menghimpun kekuatan. Ia mendapat banyak dukungan dari beberapa bangsawan dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang kecewa dengan keraton maupun Belanda. Salah satunya yakni bangsawan Sentot Prawirodirjo—seorang panglima muda yang tangguh di medan tempur. Untuk menghadapi tentara Belanda yang dikenal memiliki senjata-senjata modern, Diponegoro beserta pengikutnya menggunakan strategi gerilya, berpencair, berpindah tempat lalu menyerang selagi musuh lengah.

Strategi tersebut berhasil merepotkan tentara Belanda dan menjadi semakin repot karena Diponegoro mendapat dukungan rakyat. Awalnya pertempuran banyak terjadi di daerah barat kraton Yogyakarta seperti Kulonprogo, Bagelen, dan Lowano (perbatasan Purworejo-Magelang). Perlawanan berpindah ke daerah lain, yakni Gunungkidul, Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitar Semarang.

Belanda kewalahan menghadapi gerilya Diponegoro beserta pengikutnya. Hingga akhirnya “kompeni” menemukan ide jitu dengan menerapkan strategi Benteng Stelsel. Pelan tapi pasti, caranya yakni dengan membangun benteng-benteng pertahanan dibangun dan terus dijaga seusaia tentara Belanda berhasil menguasai daerah yang ditinggalkan Diponegoro. Kelamaan pasukan Diponegoro menjadi terjepit, wilayah gerilyanya jadi menyempit. Banyak pengikut yang kemudian menyerahkan diri termasuk Sentot Prawirodirjo. Kondisi tersebut membuat Diponegoro menerima tawaran berunding dari Jenderal De Kock yang dilaksanakan di Magelang pada 25 Maret

1830. Karena tidak ada titik temu di pertemuan tersebut, Diponegoro beserta sisa balanya pun disergap. Diponegoro kemudian dibuang ke Sulawesi dan meninggal di sana pada 8 Januari 1855.

Tuanku Imam Bonjol



Lahir: Bonjol, Pasaman, Sumatra Barat, Indonesia 1772
| **meninggal:** Lotak, Minahasa, 8 November 1864 |
dasar penetapan: Keppres No. 87/TK/1973 | **tanggal
penetapan:** 6 November 1973

■ Ulama Penentang Adat dan Belanda

Mulanya, di Minangkabau, Sumatra Barat terjadi selisih paham antara kaum adat dan kaum padri atau ulama. Kerenggangan tersebut muncul karena golongan padri menentang pelbagai kegiatan yang kerap dilakukan kaum adat. Kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai agama, seperti sabung ayam, madat, minuman keras, dan lain-lain. Konflik membesar hingga dua golongan saudara tersebut saling serang pada 1815. Kaum adat terdesak dan memilih lari. Enam tahun kaum adat terusir dari tanah asalnya, guna merebut kembali mereka kemudian meminta bantuan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dan pada April 1821 golongan adat *plus* pasukan Belanda *versus* kaum padri kembali bentrok.

Dalam fase ini muncul nama Tuanku Imam Bonjol yang merupakan pimpinan tinggi dalam Perang Padri periode 1821-1837. Gelar Tuanku adalah sebuah jabatan yang diberikan kepada guru-guru atau pemangku agama di Sumatra Barat. Nama asli Imam Bonjol adalah Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin. Dia adalah pemimpin yang paling terkenal dalam gerakan padri, Tuanku Imam Bonjol menentang pendudukan Belanda di Sumatra Barat dan sekitarnya.

Karena sama-sama kuat, Belanda, kaum adat serta padre sepakat melakukan gencatan senjata yang ditandai dengan maklumat “Perjanjian Masang” pada tahun 1824. Paska perjanjian ini orang padri dan adat kembali, tetapi Belanda malah melanggar perjanjian dengan menyerang Negeri Pandai Sikat. Sejak 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan kaum Paderi dengan pimpinan Tuanku Imam Bonjol dengan wilayah pusat di Bonjol melawan Pemerintah Hindia Belanda.

Perang berkecamuk, pada bulan September 1832 Bonjol diduduki Belanda, tetapi tiga bulan kemudian direbut kembali oleh orang-orang Paderi. Lagi-lagi pasukan Belanda menyerang Bonjol dari tiga jurusan, tetapi gagal. Pertempuran pasukan Imam Bonjol dengan Belanda berlangsung sengit sampai-sampai pihak Belanda membuat *blockade* dari kumpulan pasukan. Berikut laporan G. Teitler yang berjudul *Akhir Perang Padri: Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837*.

Belanda menyerang benteng kaum Paderi di Bonjol dengan tentara yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda,

tetapi sebagian besar pasukan terdiri atas pelbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda adalah Mayor Jendral Cochius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Kapten MacLean, Letnan Satu Van der Tak, Pembantu Letnan Satu Steinmetz, dan seterusnya. Adapun nama *Inlandsche* (pribumi) seperti Kapitein Noto Prawiro, Indlandsche Luitenant Prawiro di Logo, Karto Wongso Wiro Redjo, Prawiro Sentiko, Prawiro Brotto, dan Merto Poero.

Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, Sumenapsche hulptroepen hieronder begrepen (pasukan pembantu Sumenap alias Madura). Ketika dimulai serangan terhadap benteng Bonjol, orang-orang Bugis berada di bagian depan menyerang pertahanan Padri.

Begitu kuatnya pertahanan Imam Bonjol sampai Belanda harus mengerahkan banyak bala pasukan. Pada 1834 wilayah Bonjol dikepung dan diisolasi dari pelbagai arah. Kedudukan Imam Bonjol bertambah sulit, tetapi ia masih mampu bertahan hingga sekira tiga tahun. Tanggal 16 Agustus 1837, Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tiba di tempat tersebut, ia langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotan dekat Manado. Di tempat terakhir itu, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia tepatnya tanggal 8 November 1864 dan dimakamkan di sana. Di Jakarta, namanya diabadikan di poros utama Menteng, yang menghubungkan Jl. Diponegoro dengan Bundaran HI.

Teungku Cik di Tiro



Lahir: Pidie, 1836 | **meninggal:** Aneuk Galong, Aceh Besar, Januari 1891 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 87/TK/1973 | **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ Semangat Jihad Sang Ulama

Nama kecil Teuku Cik Di Tiro adalah Muhammad Saman. Ia lahir pada tahun 1836 di Cumbok Lamlo, daerah Tiro, Pidie. Sejak kecil ia sudah biasa hidup di lingkungan pesantren dan bergaul dengan para santri. Beranjak dewasa, ia belajar ilmu agama pada beberapa ulama terkenal di Aceh. Ia juga sempat menunaikan ibadah Haji dan memperdalam pengetahuan tentang perjuangan para pemimpin-pemimpin Islam terdahulu di Mekah.

Semenjak Cik Di Tiro kecil hingga dewasa hubungan Belanda – Aceh sudah tidak rukun. Kerap kali Tiro melihat para santri bergerilya di malam hari, terkadang Tiro pun ikut serta. Puncaknya, pada tahun 1873 Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan ekspedisi ke Aceh untuk menempatkan Kesultanan Aceh di bawah kekuasaan Belanda. Namun rakyat Aceh bukanlah pecundang, pasukan

[210]

pertama Belanda langsung dipukul mundur bahkan panglimanya, Mayor Jenderal JHR Kohler tewas. Sudah menjadi adat pemerintah Belanda, mereka tidak menerima kekalahan kemudian mengirimkan bala pasukan dalam jumlah yang lebih besar. Dalam ekspedisi kedua Belanda, pejuang Aceh terdesak dan daerah Aceh Besar jatuh ke tangan “kompeni”. Istana juga dikuasai Belanda, Sultan Aceh berhasil menyingkir, tetapi ia meninggal dalam pengungsian karena serangan kolera. Kedudukan sultan digantikan oleh putranya yang masih kecil. Sultan baru dan seluruh keluarga istana lalu mengungsi ke pedalaman Keumala Dalam.

Jatuhnya istana dan meninggalnya sultan membuat semangat para hulubalang Aceh melemah. Tatkala Cik Di Tiro kembali dari Mekah, ia memutar otak dan membuat rencana bagaimana agar semangat rakyat Aceh bisa kembali. Secara diam-diam ia mengunjungi beberapa pemimpin-pemimpin laskar perang, salah satunya Panglima Polim. Bujukan Cik Di Tiro berhasil membuat Panglima Polim bersedia kembali terjun dalam pertempuran. Kemudian mengundang Syekh Pante Hulu untuk membantunya. Menggunakan syair, syekh memompa semangat rakyat Aceh yang sempat hilang. Syekh Syekh Pante Hulu memang mampu membacakan dan mendalami syair karangannya sendiri yang berjudul “Hikayat Perang Sabil”. Isinya, anjuran agar rakyat berperang melawan kaum kafir. Orang yang tewas dalam perang itu akan diterima Tuhan di surga.

Setelah semangat pejuang kembali pulih, persiapan perang pun dibuat. Dalam kondisi tersebut para tokoh Aceh berkumpul kemudian sepakat membentuk angkatan perang sabil. Dan Teuku

Cik Di Tiro ditunjuk sebagai pimpinan dengan persetujuan sultan Aceh. Didirikan benteng-benteng pertahanan di Merue, senjata-senjata dikumpulkan, dan diangkat pula orang-orang yang mengepalai laskar.

Perjuangan dimulai. Rakyat Aceh memiliki *double spirit* melawan Pemerintah Hindia Belanda. Pertama adalah semangat kebangsaan -persatuan rakyat Aceh- sebagai bangsa/daerah yang anti penjajahan. Kedua, semangat jihad. Rakyat Aceh adalah pemeluk Islam yang kuat, sampai-sampai wilayah Aceh mendapat sebutan 'negeri serambi mekah'. Peperangan Belanda merupakan wujud perjuangan melawan orang-orang kafir.

Mei 1881, Cik Di Tiro beserta pasukannya menggempur markas Pemerintah Hindia Belanda dan berhasil merebut benteng Belanda di Indrapuri. Peperangan berlangsung lama, pada 1885 pasukan sabil mencatat kemenangan di benteng Aneuk Galang. Tidak berapa lama, benteng Lambaro yang hanya berjarak 8 km dari Banda Aceh juga berhasil dikuasai. Belanda terdesak dan bertahan di Banda Aceh.

Untuk membunuh Ci Di Tiro Belanda menggunakan cara non etis. Pemerintah Hindia Belanda berhasil membujuk putra panglima polim berada di pihak Belanda dengan iming-iming bakal diangkat menjadi Kepala Sagi. Lalu ia menyuruh seorang wanita memasukkan racun ke dalam makanan dan diberikannya kepada Cik di Tiro. Akibatnya Cik di Tiro jatuh sakit dan meninggal dunia di benteng Ancuk Galang pada bulan Januari 1891.

Teuku Umar



Lahir: Meulaboh, 1854| **meninggal:** Meulaboh, 11 Februari 1899| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 87/TK/1973| **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ Patriot Aceh

Teuku Umar merupakan salah satu pemimpin dalam Perang Aceh. Lahir di Meulaboh pada 1854. Umar melibatkan diri dalam Perang Aceh pada 1873 sebagai ketua pejuang dari kampung Meulaboh di usia 19 tahun. Sejak kecil Umar dikenal bengal dan gemar berkelahi. Ia tak pernah mendapat pendidikan teratur dan terbiasa hidup bebas. Karena sikap jalanannya, terkadang ia membuat keputusan yang tidak dimengerti oleh para pemimpin lain. Akan tetapi, perjuangannya jelas: melawan *kape* [kafir] Belanda di bumi Aceh.

Teuku Umar sudah memiliki dua istri sebelum menikah dengan janda Cut Nyak Dien pada tahun 1880, salah satunya yakni

Nyak Malighai, putri dari Panglima Sagi XXV Mukim. Karena menikah dengan kepala sagi, Umar mendapat gelar Teuku. Namun, dalam perjuangan melawan bangsa *kafe* (istilah kafir yang ditujukan orang Aceh pada Belanda), Teuku Umar ditemani Cut Nyak Dien. Keduanya berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda.

Pada 1883, Umar bersama anak buahnya berdamai dengan Belanda. Setahun setelah bergabungnya Umar, sebuah kapal dagang Inggris, Nissero, terdampar di pantai Teunom. Raja Teunom menyita isi kapal dan menawan semua awaknya. Pemerintah Inggris mendesak Belanda berusaha membebaskan awak kapal tersebut. Belanda kemudian mengirimkan Teuku Umar beserta anak buahnya ke Teunom dengan disertai 32 orang tentara Belanda. Alih-alih membebaskan awak kapal, di tengah jalan, semua tentara Belanda dibunuh dan senjatanya diambil. Umar kembali bergabung dengan pejuang Aceh.

Lagi-lagi Teuku Umar bersama anak buahnya menyatakan diri untuk membantu Belanda pada 1893. Pemerintah Hindia Belanda kembali percaya, Gubernur Van Teijn juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Atas keterlibatan tersebut, pada 1 Januari 1894, Teuku Umar sempat dianugerahi gelar Johan Pahlawan dan diizinkan untuk membentuk legiun beranggotakan 250 orang bersenjata lengkap. Bersama pasukannya, Teuku Umar pernah menundukkan pos-pos pertahanan Aceh, namun hal tersebut dilakukannya untuk bersandiwara agar ia bisa mendapat peran

yang lebih besar dalam militer Belanda. Taktik tersebut berhasil, sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang Pangleot sebagai tangan kanannya dikabulkan oleh Gubernur Deykerhorf.

Pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dollar. Ia bergabung kembali dengan pejuang Aceh. Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa mereka telah ditipu, kemudian mengerahkan kekuatan besar untuk menangkap Umar. Perintah yang dikeluarkan adalah tangkap Teuku Umar hidup atau mati. Pada 11 Februari 1899 terjadi bentrok hebat antara Umar dan anak buahnya beserta pasukan Belanda di Meulaboh. Dalam pertempuran tersebut, Teuku Umar gugur dan dimakamkan di desa Mugo, daerah pedalaman Meulaboh.

Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Teuku Umar dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Nama Teuku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI AL dinamakan KRI Teuku Umar (385). Selain itu, Universitas Teuku Umar di Meulaboh diberi nama berdasarkan namanya.

Wahidin Sudirohusodo



Lahir: Mlati, Sleman, Yogyakarta, 7 Januari 1852|
meninggal: Yogyakarta, 26 Mei 1917 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 88/TK/1973|
tanggal penetapan: 6 November 1973

■ Dokter Jawa Berjiwa Sosial

Semasa kecil, pelopor pergerakan Kebangsaan Indonesia dan pendiri Budi Utomo ini mengenyam pendidikan Ongko Loro (Sekolah Desa) di dusun Mlati, Sleman. Wahidin kemudian pindah ke Yogyakarta melanjutkan studi ke *Europeesche Lagere School* yang merupakan sekolah dasar “elite” di Hindia Belanda. Ia bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut atas rekomendasi saudara iparnya Frits Kohle, seorang Belanda yang bekerja sebagai administrator pabrik gula di Wonolopo, Sragen, Surakarta. Rampung pendidikan ia masuk ke Tweede Europese Lagere School di Yogyakarta. Pada tahun 1864 Wahidin ke Batavia untuk melanjutkan belajarnya masuk STOVIA (Sekolah Dokter Jawa), kemudian menjadi asisten pengajar di sekolah tersebut. Dalam aktivitasnya di Batavia, Wahidin

dan beberapa kawan membentuk *studiefonds* atau beasiswa bagi anak-anak pandai dari kalangan tidak mampu.

Tamat STOVIA, Wahidin Sudirohusodo berhasil menjadi seorang dokter. Ia kerap bergaul juga membantu pribumi rendahan. Dari situ, Wahidin mengetahui penderitaan rakyat yang tertindas akibat penjajahan bangsa Belanda. Bagi Wahidin, persoalan tersebut muncul dikarenakan keterbelakangan rakyat. Oleh karena itu, salah satu cara membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat wajib cerdas. Guna merealisasikan keinginannya, ia menyambangi beberapa tokoh masyarakat di Jawa sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi membentuk ‘dana pelajar’, dana tersebut akan dipakai untuk membantu pemuda-pemuda pribumi yang cerdas, tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Sayangnya ajakan Wahidin kurang mendapat sambutan.

Wahidin tidak menyerah, ia kembali ke Batavia dan menemui beberapa pelajar STOVIA. Bersama para pelajar tersebut salah satunya Sutomo, ia membicarakan gagasan tentang nasib bangsa. Gayung bersambut baik, Wadihin kemudian menganjurkan supaya para pelajar membentuk sebuah organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan guna meninggikan martabat bangsa. Alhasil pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh Sutomo beserta kawan-kawannya karena pengaruh dari Dokter Wahidin Sudirihusodo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Hindia Belanda sehingga tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Selain dikenal sebagai dokter dan organisatoris, Wahidin juga meniti karier di bidang jurnalis. Pada tahun 1900 ia pernah bergabung dalam redaksi surat kabar *Retno Doemilah* yang artinya “penerangan”. Melalui media ia bermaksud memberitahukan kepada rakyat mengenai arti pentingnya arti pengajaran. Selain itu, Wahidin juga tercatat sebagai pimpinan redaksi majalah *Goere Desa*, sebuah majalah milik Budi Utomo. Berbeda dengan *Retno Doemilah*, melalui majalah *Goere Desa*, Wahidin menyuarakan pentingnya kesehatan rasional sebagai lawan terhadap kepercayaan pada dukun dan tahayul di masa itu.

Oto Iskandar di Nata



Lahir: Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 1897| **meninggal:** Mauk, Tangerang, Banten, 20 Desember 1945| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 88/TK/1973| **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ San Jalak Harupat

Minggu, 21 Desember 1952 di Taman Bahagia, daerah Lembang, Bandung diadakan pemakaman tanpa jenazah. Sebagai pengganti, sudah disiapkan “syarat jenazah” yakni sebuah peti berisi pasir dan air laut yang diambil dari kawasan Mauk, Tangerang. Upacara tersebut diperuntukkan untuk mendiang Oto Iskandar di Nata. Sang Jalak Harupat “terbang” tak kembali setelah tragedi 19 Desember 1945.

Lahir di Bojongsoan, Dayeuhkolot, Bandung, 31 Maret 1897. Oto Iskandar di Nata menempuh pendidikan dasarnya di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) Bandung, kemudian melanjutkan di *Kweekschool Onderbouw* -Sekolah Guru Bagian Pertama- Bandung,

lalu meneruskan ke *Hogere Kweekschool* -Sekolah Guru Atas- di Purworejo, Jawa Tengah.

Setelah selesai sekolah, Oto menjadi guru HIS di Banjarnegara pada bulan Juli 1920. Pada tahun berikutnya, dipindahkan ke Bandung dan mengajar di HIS *Volksonderwijs* (Perguruan Rakyat). Pada Agustus 1924 Oto dipindahkan lagi ke HIS Pekalongan, Jawa Tengah. Agustus 1928 dipindahkan ke Batavia dan ditempatkan di HIS Muhammadiyah.

Sejak tahun 1932, Oto berhenti menjadi guru, karena lebih tertarik dengan kegiatan sosial-politik. Ia masuk menjadi anggota Paguyuban Pasundan pada 1928 dan kariernya melejit. Dalam Kongres PP pada Desember 1929 di Bandung Oto terpilih menjadi ketua pengurus besar organisasi tersebut. Paguyuban Pasundan pada masa Oto tidak hanya dianggap sebagai organisasi lokal Sunda, namun gerakannya terasa di lingkungan nasional. PP aktif dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonésia (PPPKI) serta Gabungan Politik Indonésia (GAPI). Tahun 1930 diangkat menjadi anggota Volksraad mewakili Paguyuban Pasundan, namun karena sikap keras dan non kooperatifnya, keanggotaannya kemudian dicopot. Ia mendapat julukan “Jalak Harupat” musabab mulutnya yang ceplas-ceplos berani menentang pemerintah.

Di masa pendudukan Jepang, ia memimpin harian *Cahaya* di Bandung. Setelah proklamasi kemerdekaan, termasuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam kabinet pertama RI yang dibentuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditunjuk sebagai menteri negara. Saat menduduki jabatan

sebagai menteri, mempersiapkan terbentuknya BKR dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Karena beberapa kelompok tidak puas dengan kinerjanya, pada 19 Desember 1945 ia diculik oleh segerombolan pemuda yang mengaku dari Laskar Hitam. Hingga sekarang jenazahnya tidak pernah ditemukan. Namun karena ada saksi yang pernah melihat mayatnya di pantai Mauk Banten, kemudian syarat jenazah diambil dari pantai tersebut, untuk dimakamkan di Bandung.

Robert Wolter Monginsidi



Lahir: Manado, Sulawesi Utara, 14 Februari 1925|
meninggal: Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan, 5
September 1949| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar**
penetapan: Keppres No. 88/TK/1973| **tanggal**
penetapan: 6 November 1973

■ Setia hingga akhir dalam keyakinan

Monginsidi tak bergeming, ia tetap tegar pada detik-detik pelaksanaan hukuman tembak tertanggal 5 September 1949. Meski banyak orang menyarankan agar Monginsidi meminta pengampunan kepada Pemerintah Belanda, tetapi pemuda Manado ini menolaknya. Sebelum ajal menjemput, Mongonsidi sempat menulis sebuah kalimat terakhir “setia hingga terakhir dalam keyakinan”.

Robert Wolter Monginsidi lahir di Manado pada 14 Februari 1925. Ia pernah bersekolah di HIS dan MULO. Ketika pendudukan Jepang, ia belajar bahasa Jepang dan lulus dengan sangat memuaskan. Karena prestasi tersebut, Monginsidi diangkat sebagai guru kursus bahasa Jepang di Minahasa, selanjutnya dipindah ke Luwuk, Sulawesi Tengah.

[222]

Tatkala Jepang menyerah kepada sekutu, Monginsidi berangkat ke Ujung Pandang untuk bergabung dengan para pejuang kemerdekaan. Tanggal 27 Oktober 1945 seluruh kekuatan pemuda pejuang di Ujung Pandang dipusatkan untuk mengadakan serangan umum dan merebut tempat-tempat yang strategis yang telah diduduki tentara Belanda. Ia beserta beberapa pemuda lain bertugas menyerbu Hotel Empres dan membuat barikade di jalan-jalan. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Australia ikut campur dengan menyerbu markas pemuda. Banyak dari mereka gugur, Monginsidi tertangkap, namun ia kemudian dibebaskan.

Pada 17 Juli 1946 diadakan konferensi di Polongbangkeng. Dalam konferensi tersebut, dibentuk suatu induk organisasi kelaskaran LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi). Monginsidi terpilih sebagai Sekjen. Tanggal 3 Nopember 1946 terjadi pertempuran di dekat kota Barombang. Monginsidi terluka dan terpaksa berdiam diri untuk sementara. Perlawanan-perlawanan para laskar pemuda Sulawesi Selatan yang semakin menjadi paska terbentuknya LAPRIS, memaksa Belanda meningkatkan operasi-operasi militer dan mendatangkan pasukan khusus di bawah komando Kapten Raymond Westerling pada Desember 1946. Kemudian, tanggal 21 Januari 1947, terjadi pertempuran di Kassikassi. Mongondisi berhasil ditangkap pada tanggal 28 Februari 1947 saat berada SMP Nasional Makassar.

Kira-kira satu setengah tahun hidup dalam penjara, tidak mengendorkan semangat juang Monginsidi. Semua kawan-kawannya berusaha keras untuk membebaskannya dari penjara.

Dengan bersenjatakan granat yang diselundupkan melalui makanan, Monginsidi bersama Abdullah Hadade, HM Yoseph, dan Lewang Daeng Matari dapat meloloskan diri pada malam 17 Oktober 1948 melalui cerobong asap dapur. Akan tetapi, baru selang 10 hari Monginsidi kembali tertangkap. Tanggal 28 Oktober 1948, selagi Monginsidi berada di Klapperkan lorong 22A No.3 kampung Mricayya-Ujung Pandang, ia disergap oleh pasukan Belanda. Kemudian Monginsidi dimasukkan dalam penjara Polisi Militer Belanda dengan penjagaan ketat dan dipindahkan ke penjara Kis. Tanggal 26 Maret 1949 ia diajukan ke pengadilan kolonial Belanda dan dijatuhi hukuman mati pada 5 September 1949.

Robert Wolter Monginsidi dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada 6 November, 1973. Dia juga mendapatkan penghargaan tertinggi Negara Indonesia, Bintang Mahaputra (Adipradana), pada 10 November 1973. Ayahnya, Petrus, yang berusia 80 tahun pada saat itu, menerima penghargaan tersebut. Bandara Wolter Monginsidi di Kendari, Sulawesi Tenggara dinamakan sebagai penghargaan kepada Monginsidi, seperti kapal Angkatan Darat Indonesia, KRI Wolter Monginsidi dan Yonif 720/Wolter Monginsidi.

Prof. Mohammad Yamin S.H.



Lahir: Talawi, Sawahlunto, Sumatra Barat, 24 Agustus 1903| **meninggal:** Jakarta, 17 Oktober 1962| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 88/TK/1973| **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ Cendekia Sawahlunto

Ia sarjana hukum, aktivis, sastrawan, penulis, tokoh politik, juga seorang negarawan. Namanya Mohammad Yamin, lahir di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 23 Agustus. Yamin mendapatkan pendidikan pertamanya di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaei. Setelah tamat, ia berniat melanjutkan pendidikan ke Leiden, namun tidak jadi dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di *Recht Hogeschool* (RHS), Sekolah Tinggi Hukum Hindia Belanda yang kemudian menjadi Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. Yamin berhasil memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Sarjana Hukum) pada tahun 1932.

Sewaktu muda, Mohammad Yamin giat dan menonjol dalam pergerakan politik, antara lain: ketua Jong Sumatranen Bond (1926-1928), ketua Indonesia Muda (1928), dan turut mencetuskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Dalam kegiatan kepartaian, ia seorang tokoh Partindo (1932-1938), Gerindo dan kemudian Perpindo. Ia termasuk dalam anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat Hindia Belanda) 1938-1942.

Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Mohammad Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Ia adalah salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah bekas Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan, Mohammad Yamin kerap dilantik untuk mengisi jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Ia dipercaya sebagai penasihat delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar (1949), Menteri Kehakiman (1951), Menteri Penerangan, ketua Dewan Perancang Nasional (Depemas), anggota DPR-RIS yang kemudian menjadi DPR-RI (sejak 1950), anggota DPR-RI dan Badan Konstituante hasil pemilihan umum 1955, anggota DPR-GR dan MPRS setelah Dekrit Presiden 1959, penasihat Lembaga

Pembinaan Hukum Nasional, anggota Dewan Pertahanan Nasional, anggota Staf Pembantu Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Seluruh Indonesia, anggota Panitia Pembina Jiwa Revolusi, dan ketua Dewan Pengawas LKBN Antara (1961-1962).

Sebagai penulis, buku karyanya banyak yang mengandung unsur sejarah dan kenegaraan. Beberapa karya tersebut antara lain: *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar* (1960; 3 jilid), *Ketatanegaraan Majapahit* (7 jilid), *Sang Merah Putih 6000 tahun; Tanah Air* (kumpulan puisi, 1922), *Ken Arok dan Ken Dedes* (drama, 1934), *Tan Malaka* (1945), *Sapta Dharma* (1950), *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (1951), *Kebudayaan Asia Afrika* (1955), *Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi* (1956). Selain menulis sendiri, ia sempat menerjemahkan karya Rabindranath Tagore dan Shakespeare.

Mohammad Yamin meninggal dunia di Jakarta pada 17 Oktober 1962 dan dikebumikan di Talawi, Kabupaten Sawahlunto, Sumatra Barat. Mendapat anugerah Bintang Mahaputera Republik Indonesia dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 6 November 1973.

Yos Sudarso



Lahir: Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925 |
meninggal: Laut Aru, 15 Januari 1962 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 88/TK/1973 |
tanggal penetapan: 6 November 1973

■ Komandan Macan Tutul

15 Januari 1962 - Tengah malam. Meskipun sudah mengetahui angkatan laut milik Belanda jauh lebih mutakhir, Deputy Operasi Yos Sudarso tetap mengeluarkan perintah tempur. Sudah bisa ditebak, ia beserta semua awak kapal Macan Tutul gugur di Laut Aru. Rupanya Yos Sudarso memang sengaja cari mati, tetapi pengorbanan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dua armada lain.

Mulanya lelaki pribumi asal Salatiga, Jawa Tengah ini mencoba profesi sebagai guru dengan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Guru di Muntilan rampung lulus SD. Namun, proses belajar di Muntilan tidak selesai dikarenakan Jepang keburu mendarat di

Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, Yos Sudarso mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang, kemudian pendidikan opsir pada Giyu Usamu Butai. Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamkan, ia memasuki BKR-Laut yang kemudian berkembang menjadi Angkatan Laut RI (ALRI). Pada waktu itu Angkatan Laut belum memiliki Armada. Kapal-kapal yang ada sangat sedikit dan umumnya kapal-kapal kayu peninggalan Jepang. Ia berhasil menggunakan sebuah perahu bermesin tempel dan turut dalam Operasi Lintas Laut ke Kepulauan Maluku.

Sesudah Pengakuan Kedaulatan, Yos Sudarso diangkat menjadi Komandan kapal, mula-mula RI Gajah Mada, kemudian RI Rajawali, RI Alu, dan akhirnya RI Pattimura. Beberapa kali ia terjun dalam operasi militer guna memadamkan pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah. Di tahun 1959 terjadi pergolakan dalam tubuh Angkatan Laut dan sebagian anggota tidak menyetujui kebijakan yang diambil oleh pimpinan Angkatan Laut. Bersama Letnan Kolonel Ali Sadikin, Yos Sudarso menuntut supaya Kepala Staf Angkatan Laut diganti. Usaha mereka berhasil, kemudian pemerintah mengangkat Kolonel R.E. Martadinata menjadi Kepala Staf sedangkan Yos Sudarso diangkat menjadi Deputy Operasi.

Bulan Desember 1961 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Trikora dalam usaha membebaskan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dari cengkeraman penjajahan Belanda. Sebagai Deputy Operasi, Yos Sudarso memikul tugas yang berat. Pada tanggal 15 Januari 1962, tengah malam, ia mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni di Laut Aru dengan membawa tiga kapal jenis

MTB. Patroli ini diketahui Belanda yang segera mengerahkan sebuah destroyer. Yos Sudarso mengetahui bahwa kapal milik angkatan laut Belanda jauh lebih mutakhir, namun dengan tegas ia tetap mengeluarkan perintah bertempur. Rupanya ia sudah memikirkan strategi penyelamatan, karena tidak mungkin mengalahkan kapal perang Belanda. Yos Sudarso menjadikan Kapal Macan Tutul yang ditumpanginya sebagai umpan supaya kapal lain mampu menyelamatkan diri. Alhasil, Kapal Macan Tutul tenggelam dan Yos Sudarso yang berada di atas kapal tersebut turut gugur.

Prof. Dr. Suharso



Lahir: Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, 13 Mei 1912 |
meninggal: Solo, Jawa Tengah, 27 Februari 1971 | **gelar:**
Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 88/
TK/1973 | **tanggal penetapan:** 6 November 1973

■ Pahlawan dari Boyolali

Putra Boyolali, Prof. Dr. Suharso lahir pada 13 Mei 1912. Setelah menyelesaikan pendidikan *Algemeene Middelbare School* (AMS) -setingkat Sekolah Menengah Umum- Bagian B di Yogyakarta, ia melanjutkan *Nederlandsch Indische Artsen School* di Surabaya. Pada tahun 1939 ia lulus sebagai Indisch Arts dan bekerja sebagai asisten di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surabaya. Dalam masa kerjanya, ia bertengkar dengan seorang suster bangsa Belanda, Suharso dipindah tugaskan ke Sambas (Kalimantan Barat). Tatkala Jepang memasuki Kalimantan, Suharso masuk daftar buronan. Mengetahui hal tersebut, ia langsung berangkat ke Jawa dan bekerja di Rumah Sakit Jebres, Solo. Meski terus diburu *Kenpeitai*, Suharso selamat hingga Jepang menyerah pada Sekutu.

Suharso menyumbangkan tenaga juga *skill* dalam perang kemerdekaan dengan organisasi Palang Merah. Sebagai dokter perang, ia kerap mendapati pasien yang cidera berat, seperti kehilangan kaki atau tangan dan menjadi cacat. Melihat keadaan tersebut, Suharso merasa iba. Baginya pasien yang kehilangan salah satu anggota tubuh tersebut tidak boleh kehilangan harga diri dan wajib ditolong. Luka mereka dikarenakan menjalankan bela negara. Untuk membantu para korban perang tersebut Suharso mengadakan percobaan pembuatan tangan dan kaki tiruan. Pada tahun 1950 ia berangkat ke Inggris untuk mendalami ilmu *prothese*. Sekembalinya ke tanah air, Suharso mendirikan Pusat Rehabilitasi (*Rehabilitation Center*) di Solo. Dalam Pusat Rehabilitasi itu dirawat orang-orang yang menderita cacat jasmani. Usaha kemanusiaan tersebut mendapat respond dari pemerintah dan masyarakat sehingga banyak datang bantuan.

Pada tanggal 27 Februari 1971 Prof. Dr. Suharso meninggal dunia dan dimakamkan di Kelurahan Seboto, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Karena jiwa kemanusiaannya tersebut pemerintah Indonesia memberinya gelar Pahlawan Nasional pada 6 November 1973.

Marsekal Muda Abdulrachman Saleh



Lahir: Jakarta, 1 Juli 1909| **meninggal:** Maguwoharjo, Sleman, 29 Juli 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 71/TK/1974| **tanggal penetapan:** 9 November 1974

■ Dokter yang Suka Mengudara

Karena sikap disiplinnya, Marsekal Muda Abdulrachman Saleh mendapat julukan “si “karbol”. Salah satu perintis penerbangan Indonesia ini lahir di Jakarta pada 1 Juli 1909 dan meninggal saat “tragedi Dakota” di desa Ngoto, Bantul, Yogyakarta. Ia mendapat gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

Selain mahir di bidang penerbangan, Si Karbol pun ahli di bidang kedokteran. Ia tercatat sebagai alumni *Geneeskundige Hooge School* (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta. Karena sumbangsihnya di bidang kedokteran dengan turut mengembangkan faal, Abdulrachman Saleh diangkat menjadi Bapak Ilmu Faal Indonesia oleh Universitas Indonesia pada tahun 1958. Selain

itu, sebelum aktif di angkatan udara, ia giat berorganisasi dengan menjadi anggota Indonesia Muda, Jong Java, dan Kepanduan Bangsa Indonesia (KEI). Ia pun turut bergabung di *Vereniging voor Oosterse Radio Omroep* (VORO) dan mendirikan Siaran Radio Indonesia Merdeka yang memancarkan berita tentang Indonesia ke luar negeri.

Paska kemerdekaan 1945, Abdulrachman Saleh memutuskan bergabung dengan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Ia diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun (1946). Dalam kapasitas sebagai komandan pangkalan, ia sempat mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio Udara di Malang.

Pada bulan Juli 1947, ia bersama Komodor Muda Adisucipto disertai tujuh penumpang lain mendapat tugas terbang ke India menggunakan pesawat Dakota VT CLA untuk mengambil sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Internasional. Namun naas, sekembalinya ke tanah air pada 29 Juli 1948, belum sempat melakukan pendaratan, pesawat yang ditumpanginya mendapat gempuran dari P-40 Kittyhawk, pesawat pemburu milik Belanda. Dakota VT CLA oleng dan jatuh terbakar di desa Ngoto, Bantul. Abdulrachman Saleh adalah korban meninggal dalam kejadian itu selain Adisucipto, Abdulrachman Saleh, AN Constantine, R Hazelhurst, Adisumarmo Wiryokusumo, Bhida Ram, Nyonya Constantine, Zainal Arifin, dan yang berhasil selamat hanyalah F.A. Gani.

Abdulrachman dimakamkan di Pemakaman Umum Kuncen dan pada tanggal 14 Juli 2000, jasadnya dipindahkan desa Ngoto, Bantul bersama teman seperjuangannya, Adisucipto. Untuk

mengennangnya, nama Abdulrachman Saleh diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI-AU dan Bandar Udara di Malang. Selain itu, namanya juga diukir tetap dalam piala bergilir Kompetisi Kedokteran dan Biologi Umum (*Medical and General Biology Competition*)- Piala Bergilir Abdulrachman Saleh.

Marsekal Muda Agustinus Adisucipto



Lahir: Salatiga, Jawa Tengah, 3 Juli 1916| **meninggal:** Bantul, Yogyakarta, 29 Juli 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 71/TK/1974| **tanggal penetapan:** 9 November 1974

■ Marsekal Muda Indonesia

Tanggal 29 bulan Juli 1947, di langit desa Ngoto Bantul, tampak pesawat Dakota VT CLA akan mendarat di Bandara Maguwo Yogyakarta. Pesawat yang kembali dari India tersebut mengangkut obat-obatan sumbangan dari Palang Merah Internasional. Tiba-tiba dari arah lain muncul dua pesawat pemburu P-40 Kittyhawk milik Belanda disertai tembakan penyerangan. Tak selang lama, Dakota pun jatuh menabrak pohon lalu terbakar, Marsekal Muda Agustinus Adisucipto gugur.

Agustinus Adisutjipto lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 3 Juli 1916. Pemegang *brevet* dari Sekolah Penerbang *Militaire Luchtvaart* di Kalijati Jawa Barat ini merupakan salah satu pahlawan

nasional Indonesia. Ia juga dikenang sebagai Bapak Penerbangan Indonesia. Kariernya bermula dari Skuadron Pengintai Udara. Di era kemerdekaan 1945, ia masuk Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan menjadi Kepala Staf di bawah Suryadi Suryadarma. Pada tanggal 15 November 1945, ia mendirikan Sekolah Penerbang di Yogyakarta, tepatnya di Lapangan Udara Maguwo.

Adisutjipto sempat “mengudara” menjadi sopir bus di Salatiga pada masa pendudukan Jepang, saat itu tidak satu pun orang Indonesia yang diperbolehkan menerbangkan pesawat. Hingga pada awal September 1945, ia mendapat panggilan dari Suryadi Suryadarma yang diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membentuk AURI. Adisutjipto berhasil menerbangkan pesawat Nishikoren dari Cibereum ke Maguwo, pada 10 Oktober 1945. Peristiwa ini tercatat sebagai penerbangan pertama oleh awak Indonesia di wilayah Republik setelah merdeka.

Bersama Suryadi Suryadarma, Adisucipto ikut merintis pembentukan AURI dan diangkat Kepala Staf AURI. Kala itu, AURI dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia juga peralatan. AURI tidak memiliki pesawat terbang yang mumpuni, kalau pun ada sudah rongsokan. Teknisi-teknisi Indonesia berusaha memperbaiki pesawat tersebut dan tanggal 27 Oktober 1945, Adisutjipto kembali mencatat sejarah dengan berhasil menerbangkan sebuah pesawat Cureng bertanda merah putih. Penerbangan ini adalah penerbangan berbendera merah putih pertama di tanah air.

Tatkala Belanda melancarkan Agresi Militer pertamanya pada tanggal 21 Juni 1947, dunia internasional bersimpati—mendukung

Indonesia dan berupaya memberikan bantuan. Pada bulan Juli 1947, pesawat Dakota VT CLA menerobos blokade udara keamanan udara Belanda dan terbang menuju India guna merespons bantuan dari Palang Merah Internasional. Pesawat tersebut membawa Sembilan penumpang: Adisutjipto, Abdulrachman Saleh, AN Constantine (pilot), R Hazelhurst (ko-pilot), Adisumarmo Wiryokusumo (engineer), Bhida Ram, Nyonya Constantine, Zainal Arifin (wakil dagang Republik Indonesia), dan F.A. Gani. Pada tanggal 29 Juli 1948 kembali berhasil memasuki kembali ke wilayah udara Indonesia dengan mengangkut obat-obatan sumbangan Palang Merah Internasional. Sampai di wilayah Ngoto Bantul, pesawat Dakota ditembak oleh pesawat pemburu Belanda P-40 Kittyhawk hingga jatuh. Pesawat tersebut terbakar, semua penumpangnya tewas kecuali F.A. Gani.

Adisutjipto meninggal dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kuncen. Pada tanggal 14 Juli 2000, jasadnya dipindahkan ke desa Ngoto, Bantul. Untuk mengenang perjuangannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional tanggal 9 November 1974. Bandara Maguwo pun diganti nama menjadi Bandara Adisucipto. Selain itu, tempat jatuhnya pesawat Dakota VT CLA dibangun sebuah monumen.

Teuku Nyak Arief



Lahir: Ulëë Lheue, Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pada tanggal 17 Juli 1899| **meninggal:** Takengon, 4 Mei 1946| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 71/TK/1974| **tanggal penetapan:** 9 November 1974

■ Hulubalang Berhati Mulia

Lahir 17 Juli 1899 di Ulee Lheue, Banda Aceh. Sewaktu muda Teuku Nyak Arief menempuh pendidikan OSVIA (Sekolah Pamongpraja) sampai lulus pada 1915 di Serang, Jawa Barat. Selain berpendidikan, Teuku Nyak Arief gemar dalam berorganisasi. Pada tahun 1919 ia diangkat menjadi Ketua Nationale Indische Partij (NIP) cabang Banda Aceh. Selain itu, ia juga membantu kegiatan Muhammadiyah dan Taman Siswa. Tahun 1920 ia diangkat menjadi Panglima Sagi 26 Mukim.

Karena posisi pentingnya di Aceh Belanda memasukkannya dalam anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada 1927. Melalui Dewan Rakyat Teuku Nyak Arief mengkritik berbagai kebijaksanaan

pemerintah Belanda yang merugikan rakyat. Bersama beberapa kawan, ia mendirikan Fraksi Nasional dalam *Volksraad* yang dibentuk pada tahun 1931 dan dipimpin oleh Husni Thamrin. Satu periode berkecimpung dalam Dewan Rakyat, ia kemudian memfokuskan menjadi pemimpin Sagi 26 Mukim.

Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi Ketua Aceh Syu Sangikai (Dewan Rakyat Daerah Aceh). Ia juga dipilih sebagai anggota Sumatra Cuo Sangi In (Dewan Rakyat Sumatra). Akan tetapi, ia tidak begitu saja mengikuti keinginan Jepang. Pada saat Aceh bergejolak, terjadi perlawanan terhadap Jepang, secara diam-diam ia mengoordinasi gerakan bawah tanah menentang Jepang. Akibatnya, ia ditangkap *Kenpeitei* (Polisi Militer Jepang) meski kemudian dibebaskan.

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, Teuku Nyak Arief menjadi Residen Aceh. Di masa ini, pasukan Jepang masih berada di wilayah Aceh – mereka menunggu dilucuti oleh Sekutu. Namun saat Sekutu mendarat, Teuku Nyak Arief menolak masuknya pasukan Sekutu ke negeri rencong. Dengan tegas ia memberi jaminan pada pihak Sekutu bahwa pemerintah Aceh sanggup melucuti pasukan Jepang.

Sayangnya, dalam pemerintah daerah Aceh terjadi konflik sesama rakyat Aceh yang saling ingin mendapat kekuasaan paska kemerdekaan. Pertama adalah golongan ulama dengan sokongan kekuatan Tentara Perlawanan Rakyat (TPR) dan laskar Mujahiddin. Kekedua, golongan hulubalang dengan *backup* Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Tahun 1946 merupakan masa peralihan serba berat. Revolusi masih berjalan terus. Gejala persaingan antara kaum Hulubalang dan kaum Ulama kembali memanas. Laskar Mujahiddin yang di bawah pengaruh kaum agama mempunyai ambisi akan menggantikan residen Nyak Arif. Untuk menghindari pertumpahan darah, Teuku Nyak Arif rela membiarkan kedudukannya digantikan Hasan al Mujahid dari golongan ulama. Meski sebenarnya TKR mampu melawan namun Nyak Arif membiarkan dirinya ditawan dan dibawa ke Takengon. Ditempat ini Teuku Cut Nyak Arif meninggal karena sakit pada 26 April 1946. Sebelum meninggal Teuku Cut Nyak Arif sempat dijenguk keluarganya, ia berpesan “Jangan menaruh dendam, karena kepentingan rakyat harus diletakkan di atas segala-galanya.”

Nyi Ageng Serang



Lahir: Serang, Purwodadi, Jawa Tengah, 1752|
meninggal: Yogyakarta, 1828| **gelar:** Pahlawan Nasional|
dasar penetapan: Keppres No. 84/TK/1974| **tanggal
penetapan:** 13 Desember 1974

■ Pemimpin pasukan Siluman

Nyi Ageng Serang merupakan nama populer dari Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi, seorang putri dari Bupati Serang, Panembahan Natapraja. Wilayah Serang merupakan daerah di bawah pemerintahan Kasultanan Mataram Surakarta. Tatkala terjadi konflik antara Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwana II, Natapraja ikut dalam barisan pasukan Pangeran Mangkubumi. Kemudian setelah Perjanjian Giyanti diteken pada tahun 1755, kemudian Pangeran Mangkubumi mendirikan Kasultanan Yogyakarta, Natapraja turut membawa Nyi Ageng Serang ke Yogyakarta.

Konflik intern Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1825 yang kemudian mengakibatkan meletusnya Perang Jawa selama lima

tahun, menyeret Nyi Ageng Serang turut serta. Ia memihak Pangeran Diponegoro dan menentang keraton yang sudah dipengaruhi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Nyi Ageng Serang diangkat menjadi salah satu panglima perang, ia juga menjadi penasihat Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang sudah sepuh saat Perang Jawa terjadi, berumur 73 tahun. Akan tetapi, ia memiliki pasukan khusus dikenal dengan nama Pasukan Siluman. Seperti siluman, prajurit Nyi Ageng Serang kerap melakukan serangan secepat kilat kemudian menghilang tanpa jejak.

Atas anjuran Nyi Ageng Seranglah, pasukan Diponegoro memakai daun lumbu dalam pertempuran supaya tidak mudah diketahui musuh. Pada 1828, ia meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di atas bukit di Dusun Beku, Pagerarjo, Kalibawang, Kulonprogo. Pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional pada 13 Desember 1974. Di Wates, Yogyakarta bagian Barat, terdapat sungai yang dinamai Sungai Serang, terdapat juga patung Nyi Ageng Serang sedang menaiki kuda dengan membawa tombak di simpang lima kota Wates.

Hajjah Rangkayo Rasuna Said



Lahir: Maninjau, Agam, Sumatra Barat, 14 September 1910| **meninggal:** Jakarta, 2 November 1965| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 84/TK/1974| **tanggal penetapan:** 13 Desember 1974

■ Wanita Pendidik sekaligus Pejuang

Ia seorang wanita pendidik sekaligus pejuang. Ia lantang mengkritik pemerintah kolonial. Di usia muda, 23 tahun, ia ditangkap dan mendekam dalam Penjara khusus perempuan di Semarang. Ia masuk bui karena pidatonya yang sangat berapi-api menentang kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda. Satu kali, pemerintah colonial mencoba membujuknya dengan mengirimkan utusan, Daniel Van Der Muelen, memintanya *“usahakan berbuat sesuatu yang baik, jangan kembali ke jalan politik”*. Akan tetapi, bujukan itu tidak berhasil menggoyahkan hatinya untuk berhenti dari pergerakan nasionalis.

Rasuna Said setelah menamatkan Sekolah Dasar di kotanya lalu melanjutkan belajar di pesantren Ar-Rasyidiyah sebagai satu-satunya

[244]

santri perempuan. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah School Putri di Padang Panjang. Meski masih berstatus pelajar, ia sudah dipercaya untuk mengajar kelas di bawahnya. Ketika gempa melanda kota Padang panjang, tahun 1926, gedung Madrasah Diniyah Putri rusak berat dan terpaksa ditutup, ia pindah ke Sekolah Thawalib yang diselesaikannya dalam waktu 2 tahun. Di sanalah, ia menjadi murid Abdul Karim Amrullah, ayah HAMKA yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir.

Awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan beraktivitas di Serikat Rakyat sebagai Sekretaris cabang. Serikat Rakyat kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Ia juga dipercaya menjadi anggota pengurus besar “Persatuan Muslimin Indonesia” (PMI) atau Permi. Ia keras menentang Belanda dan menuduh Belanda memeras keringat rakyat, merampas kekayaan bangsa untuk kekayaan mereka sendiri tanpa memikirkan kesengsaraan rakyat. Akibatnya, penguasa Belanda meningkatkan pengawasan pada pejuang wanita ini. Pada 1932, dengan alasan mengganggu ketenteraman umum, ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara Bulu di Semarang selama 13 bulan.

Selepas bebas, ia bergabung dengan *Islamic College*, salah satu akademi Islam yang didirikan para reformis Islam di Padang. Ia dipercaya memimpin majalah sekolah yang bernama *Raya*. Karena ruang gerak yang dibatasi Belanda, ia memutuskan pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita Perguruan Putri dan memimpin sebuah mingguan bernama *Menara Putri* yang

terkenal dengan semboyan, “Ini dadaku, mana dadamu”. Mingguan ini khusus membahas seputar pentingnya peran wanita, kesetaraan antara pria wanita dan keislaman.

Pada masa pendudukan Jepang, ia kembali ke Padang dan mendirikan organisasi pemuda Sumatra Barat dengan nama Pemuda Nippon Raya yang bertujuan membina bibit-bibit pejuang kemerdekaan. Mereka aktif memperjuangkan dibentuknya barisan Pembela Tanah Air (peta). Sesudah kemerdekaan, menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatra yang mewakili daerah Sumatra Barat. Kemudian berturut-turut menjadi anggota KNIP, DPR-RIS, dan DPRS. Pada 1959, ia diangkat menjadi anggota DPA sampai akhir hayat beliau pada 1965. Rasuna Said dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan bangsa, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional pada 1974.

Abdul Halim Perdanakusuma



Lahir: Sampang, 18 November 1922| **meninggal:** Malaysia, 14 Desember 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 63/TK/1975| **tanggal penetapan:** 9 Agustus 1975

■ Patriot Penerbang

Saat pecah Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan milisi, ia lalu memasuki Sekolah Angkatan Laut di Surabaya. Kala Jepang datang, ia dibawa Belanda ke Inggris mengikuti pendidikan navigasi di *Royal Canadian Air Force*. Ia punya catatan prestasi di Eropa: menerbangkan 44 misi terbang, termasuk menerbangkan Avro Lancaster dalam pemboman tentara NAZI di Jerman. Ia lalu kembali ke tanah air, bergabung dengan TKR bagian Penerbangan yang nantinya menjadi AURI, dan melawan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia.

Sebelum bergabung dengan pendidikan militer, Halim menempuh pendidikan dasar [HIS] dan sekolah menengah pertama

[MULO] di tempat asalnya. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja [OSVIA] di Magelang dan hanya ditempuhnya sampai tingkat II. Setelah itu, ia masuk pendidikan militer dari angkatan laut di Surabaya hingga menjadi penerbang di Inggris.

Pada 1947, saat telah berada di tanah air, Abdul Halim bertugas di Sumatera untuk membina Angkatan Udara di sana. Pada waktu itu organisasi AURI di Sumatera dapat dikatakan belum lagi berdiri. Beberapa lapangan udara sudah dapat dibuka, tetapi hubungan antara lapangan yang satu dengan yang lain tidak ada. Masing-masing berdiri sendiri dan berada di bawah kekuasaan divisi-divisi Angkatan Darat. Untuk keperluan membina organisasi AURI, ia Abdul Halim diangkat sebagai salah satu wakil AURI dalam Komandemen Tentara Sumatera. Selain itu, ia diangkat pula sebagai Wakil II Kepala Staf Angkatan Udara. Abdul halim berusaha membuka hubungan dengan luar negeri untuk mencari senjata dan bantuan lain yang perlu bagi perjuangan. Pekerjaan itu cukup berbahaya sebab harus menembus blokade udara Belanda.

Pada 14 Desember 1947, ia melaksanakan misi penting. Ia terbang dengan pesawat Avro Anson RI-003 menuju Thailand mengangkut senjata. Pesawat terbang itu akhirnya dipenuhi dengan senjata karabin, sten gun, pistol, dan bom tangan. Ia lalu kembali ke Indonesia. Tetapi saat terbang di sekitaran Labuhan Bilik Besar, Pantai Lumut, Malaysia, udara sangat buruk menyebabkan sayap pesawat patah dan kemudian meledak. Abdul Halim gugur dalam usia muda, 25 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Perak Malaysia, hingga pada 10 Nopember 1975 kerangka jenazahnya dipindahkan ke tanah air

dan dimakamkan di TMP Nasional Kalibata. Atas jasa-jasanya dalam perang kemerdekaan, pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Marsekal Muda Anumerta dan memberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1975.

Marsekal Madya Iswahyudi



Lahir: Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918| **meninggal:** Malaysia, 14 Desember 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 63/TK/1975| **tanggal penetapan:** 9 Agustus 1975

■ Penerbang dari Surabaya

Duo pengudara asal Jawa Timur, Iswahyudi dan Halim Perdana Kusuma terbang menuju Thailand guna melakukan transaksi jual beli senjata api. Naas, pesawat jenis Anderson yang mereka tumpangi ditemukan hancur di hutan Malaysia. Halim Perdanakusuma ditemukan meninggal di lokasi, sedangkan Iswahyudi lenyap, jasadnya pun tidak pernah terdeteksi hingga sekarang.

Marsda Anumerta Iswahyudi adalah salah satu angkatan perintis Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Pada awal tahun 1947, arek Surabaya kelahiran 15 Juli 1918 ini diangkat sebagai Komandan Lanud Maospati di Madiun, dibantu oleh Nurtanio dan Wiweko Soepono. Beberapa bulan kemudian ia

dipindahtugaskan ke Lanud Udara Gadut di Bukittinggi Sumatra Barat, di sana jabatannya tetap sebagai menjadi komandan.

Semasa perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda, dari Sumatra Barat, Iswahyudi bersama Halim Perdanakusuma membeli perlengkapan senjata di Thailand pada tahun 1947. Dengan pesawat terbang jenis Anderson mereka berangkat. Rampung transaksi pesawat yang mengangkut pelbagai senjata api (di antaranya karabin, stun gun, pistol, dan bom tangan) pun terbang berencana kembali ke Sumatra. Namun, pesawat itu tidak pernah sampai ke tanah air karena terjatuh di hutan dekat kota Lumut, Perak, Malaysia. Tentang penyebab jatuhnya pesawat yang ditumpangi dua marsekal muda tersebut belum diketahui secara pasti, ada sumber yang mengatakan akibat cuaca buruk, namun juga ada yang beranggapan tertembak pesawat musuh.

Saat tim penyelamat turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran, hanya jasad Halim Perdanakusuma yang ditemukan, sedangkan Iswahyudi tidak pernah dijumpai hingga sekarang. Selain itu senjata-senjata yang harusnya ada di sekitar bangkai pesawat juga lenyap. Secara simbolis, Iswahyudi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena keberaniannya, pada 10 November 1960, pemerintah Indonesia mengabadikan nama Iswahyudi dengan mengganti nama Lanud Maospati menjadi Bandara Iswahyudi, Madiun. Ia juga mendapat gelar pahlawan nasional pada 9 Agustus 1975.

I Gusti Ngurah Rai



Lahir: Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda, 30 Januari 1917| **meninggal:** Marga, Tabanan, Bali, Indonesia, 20 November 1946| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 63/TK/1975| **tanggal penetapan:** 9 Agustus 1975

■ Puputan Margarana

Menjelang pagi 18 November 1946, Ngurah Rai memimpin Ciung Wanara, pasukan militan yang diberi nama legenda prabu Sunda Galuh. Ia berharap pasukannya akan segagah dan seberani penguasa Galuh yang legendaris itu, termasuk dirinya sendiri. Mereka menyerang Tabanan dan satu detasemen polisi Belanda sanggup dilumpuhkan. Tentara Belanda yang ada di Bali gempar dan kalap. Lalu mereka mengerahkan kekuatan dari seluruh Bali dan Lombok bahkan seluruh Sunda Kecil, menghantam kedudukan Ngurah Rai dan pasukannya di Margarana. Pesawat-pesawat pemburu dari Makassar ikut mengejar Ciung Wanara. Dalam pertempuran sengit, pasukan Ngurah Rai melawan sampai titik darah penghabisan. Ngurah Rai segera memutuskan perang puputan, perang habis-

habisan. Akhirnya 96 laskar Ciung Wanara gugur termasuk Ngurah Rai dan tentara Belanda kehilangan 400 serdadunya.

I Gusti Ngurah Rai merupakan putra kedua I Gusti Ngurah Palung dan Ni Desah Ayu Kompi. Ayahnya merupakan seorang *manca* [camat]. Dari namanya, ia berasal dari kasta Kesatria. Ada yang menghubungkan ia sebagai keturunan kesatria Majapahit, Aria Sentong, anggota Marga Aria Kadari yang datang ke Bali pada 1343. Ia di masa kecil masuk sekolah HIS Denpasar lalu melanjutkan ke MULO di Malang. Ia lalu kembali ke Bali dan bergabung dengan sekolah kader militer, Prayodha Bali, Gianyar. Sejak kecil ia memang ingin menjadi tentara. Pada 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan militer di *Corps Opleiding Voor Reserve Officieren* [CORO] Magelang dan kemudian masuk pendidikan Artileri di Malang.

Pada Jepang, Ngurah Rai memang sempat menjadi intel Sekutu di Bali dan Lombok. Akan tetapi, selepas Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kemudian BKR terbentuk dan berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat [TKR], Ngurah Rai segera bergabung dengan TKR dan menjadi komandan TKR Sunda Kecil. Sebagai komandan, ia merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR pusat yang bermarkas di Gondokusuman Yogyakarta. Sampainya di ibu kota, Ngurah Rai dilantik menjadi komandan resimen Sunda Kecil berangkat letnan kolonel.

Pada Maret 1946, ia kembali ke Bali dengan rombongan ALRI yang tergabung dalam Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Waktu itu Bali telah dikuasai Belanda, mendaratkan pasukannya

bulan Februari 1946. TKR Sunda Kecil terpecah-pecah menjadi kesatuan kecil dan tersebar di tempat-tempat yang berjauhan tanpa ada kesatuan komando. Selama beberapa bulan, ia terpaksa bekerja keras menyatukan kembali kekuatan lalu menyusun rencana untuk melawan Belanda.

Ia memang kesulitan menyusun TKR Sunda Kecil di Bali. Akan tetapi, ia tidak pantang menyerah. Berkali-kali, ia berkeliling untuk menyatukan pemuda, berjuang melawan tentara Belanda yang masuk Bali. Hasilnya, ia kemudian membentuk pasukan militan yang diberinya nama Ciung Wanara dan segera meluncurkan serangan ke objek vital Belanda. Sasaran utamanya adalah wilayah Tabanan. Pada 20 November 1946, dengan kekuatan besar, tentara Belanda meluncurkan serangan balik terhadap tentara Ngurah Rai yang bertahan di desa Margarana. Desa ini menjadi pertahanan terakhir Ngurah Rai dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan karena terbelah jurang yang dalam.

Walaupun begitu, pasukan Ngurah Rai tidak lari, mereka justru menghadapi tentara Belanda yang lebih banyak dengan jantan. Pasukan Ciung Wanara terdesak dan Ngurah Rai segera meneriakkan “Puputan!”. Mereka bertempur habis-habisan hingga Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur di desa Margarana. Jenazah Ngurah Rai dimakamkan di desa Margarana, di tempat ia bertempur. Ngurah Rai gugur dalam usia muda, 29 tahun. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan melawan Belanda, pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi brigadir jenderal anumerta dan pada 1975 mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Supriyadi



Lahir: Trenggalek, Jawa Timur, 13 April 1923|
meninggal: misteri??| **gelar:** Pahlawan Nasional|
dasar penetapan: Keppres No. 63/TK/1975| **tanggal**
penetapan: 9 Agustus 1975

■ Pahlawan PETA Blitar

Nama Supriyadi diumumkan dan dilantik sebagai Menteri Pertahanan Indonesia Pertama pada tanggal 2 September 1945. Namun, ia tidak pernah muncul ke publik, beberapa hari kemudian jabatan tersebut diserahkan kepada Jenderal Sudirman. Dimanakah Supriyadi saat itu? Hingga kini kontroversi akhir hayat Supriyadi masih menjadi misteri. Beberapa sumber menuliskan bahwa ia masih hidup paska kemerdekaan, namun ada juga yang mengabarkan bahwa Supriyadi telah meninggal dibunuh tentara Jepang.

Lelaki klimis belah tepi ini lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 13 April 1923. Saat muda, ia mengikuti pendidikan Pembela Tanah Air (PETA) bentukan Jepang dan diangkat menjadi *Shodanco* di

[255]

Blitar. Ia mendapat bertugas mengawasi para romusha membangun benteng-benteng pertahanan di pantai selatan dan Tuban. Dalam tugas tersebut, para anggota PETA kerap menyaksikan penderitaan rakyat, bahkan tidak jarang mereka menemui kerabat sendiri dalam gerombolan romusha. Banyak pekerja yang mati karena sakit juga kekurangan makanan. Melihat kondisi tersebut Supriyadi dan beberapa perwira sepakat merencanakan pemberontakan terhadap Jepang.

Pada awal tahun 1944 Supriyadi cs mulai melakukan rapat-rapat rahasia. Gelagat mereka diketahui tentara Jepang yang kemudian menggagalkan rencana latihan bersama anggota PETA di Tuban pada 5 Februari 1945. Usai gagalnya latihan bersama tersebut, kegiatan pasukan PETA Blitar selalu diawasi. Namun Supriyadi bersama beberapa pimpinan PETA lain (*Shodanco* Muradi; *Shodanco* Suparjono; *Bundanco* Halir Manguedidjaja dan *Bundanco* Sunanto) berhasil menggelar rapat rahasia terakhir di Kamar Halir Mangkoedidjaja pada 13 Februari 1945. Hasil rapat adalah dilakukan pemberontakan esok harinya. Sebelumnya Supriyadi juga sempat berdiskusi dengan Soekarno yang tengah berkunjung ke rumah orang tuanya, kala itu Soekarno memegang jabatan sebagai pemimpin PUTERA.

Dini hari pukul 03.00 pada 14 Februari 1945 rencana Supriyadi dimulai, senjata peluru dibagikan, dan barisan-barisan dipersiapkan. Serangan dibuka dengan mortir berat (*hakugekiho*) diarahkan ke Hotel Sakura, tempat perwira-perwira Jepang tinggal. Jaringan hubungan telepon diputus. Kantor Kenpetai Jepang di

Blitar diserbu pun segala jurusan. Selanjutnya pasukan PETA Blitar berhasil mengibarkan bendera merah putih di lapangan PETA Blitar (kini menjadi TMP Kota Blitar). Pasukan PETA bergerak membinasakan semua orang Jepang di Blitar, membebaskan para tahanan, lalu menyebar ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Karena koordinasi yang kurang rapi, beberapa pimpinan salah menentukan sasaran.

Pasukan PETA berhasil diperdayai Jepang melalui sebuah perjanjian di Ngancar pada tanggal 19 Februari 1945. Isi dari perjanjian tersebut antara lain; Pemerintah Jepang akan mempercepat kemerdekaan Indonesia, tidak akan melucuti persenjataan kesatuan tentara PETA Blitar, dan membebaskan tuntutan hukum bagi gerakan pemberontakan PETA Blitar. Akan tetapi, sekembalinya dari Hutan Ngancar, sekitar 67 anggota PETA ditangkap dan dibawa ke pengadilan Jakarta untuk menerima hukuman. Enam orang pimpinan, yakni Shodanco Muradi, Cudanco Ismangil, Shodanco Suparjon, Bundanco Halir Mangkudidjaja, Bundanco Sunanto, dan Bundanco Sudarmo dihukum mati. Dalam persidangan tidak tercatat nama Supriyadi, dan sampai kini kabar tentang kondisi Supriyadi saat itu tidak diketahui.

Sultan Agung Hanyokrokusumo



Lahir: Kotagede, Kesultanan Mataram, 1593 | **meninggal:** Karta (Plered, Bantul), Kesultanan Mataram, 1645 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 106/TK/1975 | **tanggal penetapan:** 3 November 1975

■ Dua kali Menggempur Batavia [VOC]

Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja Kerajaan Mataram periode 1613-1645. Ia memiliki agenda besar yakni mempersatukan seluruh Pulau Jawa di bawah panji Kerajaan Mataram. Saat ia memerintah, saingan kerajaan lokal terbesar adalah Surabaya dan Banten, sedangkan dari luar adalah *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).

Surabaya berhasil dikalahkan dan menjadi bagian dari wilayah Mataram pada tahun 1625. Kekuasaan Mataram kini meluas yakni seluruh Jawa Timur hingga Madura, seluruh Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, dan daerah Sukadana di Pulau Kalimantan. Paska penaklukan Surabaya, ia berniat menggempur wilayah Banten. Akan

tetapi, karena VOC sudah terlebih dahulu menduduki Batavia sejak 1619, mau tidak mau Sultan Agung harus menyingkirkan orang-orang Belanda tersebut terlebih dahulu. Posisi Batavia berada di tengah-tengah wilayah kekuasaan Kerajaan Banten dan Mataram.

Bulan April 1628, Kyai Rangga bupati Tegal dikirim sebagai duta ke Batavia guna menyampaikan tawaran damai bersyarat dari Mataram. Karena tawaran tersebut ditolak, Sultan Agung memutuskan menyatakan perang terhadap VOC. Maka, pada 27 Agustus 1628 pasukan Mataram dipimpin Bupati Kendal Tumenggung Bahureksa tiba di perbatasan Batavia. Disusul pasukan kedua pada bulan Oktober yang dikomando Pangeran Mandurareja. Total pasukan Mataram saat itu mencapai ribuan orang. Perang besar terjadi di benteng Holandia. Pasukan Mataram kalah karena kurang perbekalan, akibat kekalahan tersebut Tumenggung Bahureksa dihukum penggal.

Serangan pertama gagal tak menyurutkan niat Sultan Agung untuk kembali menggempur Batavia. Untuk kali kedua Mataram mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Ukur yang berangkat pada bulan Mei 1629. Ditambah pasukan bawahan Adipati Juminah yang berangkat bulan Juni. Total semua prajurit sekitar 14.000-an orang. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun pihak VOC tidak kalah cerdik, mereka berhasil membakar gudang pangan pasukan Mataram. Serangan kedua Mataram kembali tidak menuai hasil. Akan tetapi, bentrokan prajurit Mataram dan VOC di Batavia mengakibatkan sebagian wilayah Batavia poranda.

Sekembalinya pasukan Mataram meninggalkan kekotoran di Sungai Ciliwung yang menimbulkan wabah penyakit kolera. Gubernur jenderal VOC yaitu J.P. Coen meninggal akibat wabah tersebut. Dua kali serangan gagal tak berbuah hasil tersebut membuat Sultan Agung kapok, ia kemudian berkonsentrasi untuk membangun Kerajaan Mataram. Paska serangan ke Batavia, selama Sultan Agung memerintah Mataram, VOC memilih diam dan menjejakkan kuasa di bumi Mataram.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami masa keemasan di bidang kebudayaan, kesenian, dan kesusasteraan maju dengan pesat. Banyak unsur-unsur kebudayaan lama yang disesuaikan dengan agama Islam di antaranya: Perayaan Garebeg disesuaikan dengan hari-hari raya Islam (Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi Muhammad saw), Sekaten disesuaikan dengan hari Maulid Nabi Muhammad saw, tahun Saka yang digunakan disesuaikan dengan Tahun Hijriah atau Tahun Islam. Tahun 1645 Sultan Agung Hanyakrakusuma mangkat dan dimakamkan di Imogiri. Sesuai wasiatnya, kekuasaan tahta Mataram kemudian dipegang oleh putranya yang bernama Mas Sayidin dengan gelar Amangkurat I. Karena kiprahnya di masa hidupnya, sebagai pejuang juga budayawan, Sultan Agung ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 3 November 1975.

Untung Suropati



Lahir: Bali, 1660 | **meninggal:** Bangil, Jawa Timur, 5 Desember 1706 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 106/TK/1975 | **tanggal penetapan:** 3 November 1975

■ dari Budak menjadi Pejuang Sejati

Siapaakah Untung Suropati? Mulanya ia adalah seorang budak perwira VOC, kemudian perwira tersebut menjualnya kepada pembesar Batavia bernama Edelaar Moor. Semenjak mempekerjakan budak tersebut, tuan Moor bertambah kaya dan kedudukannya semakin meningkat. Oleh karena itu si budak diberinya nama Untung. Akan tetapi, setelah dewasa Untung jatuh cinta kepada putri tuannya bernama Suzzana, begitu juga sebaliknya. Hubungan sejioli tersebut akhirnya diketahui Edelaar Moor. Sang Tuan murka lalu menjebloskan Untung ke penjara.

Untung berhasil melarikan diri bersama bersama tahanan lain, memimpin budak-budak melakukan perlawanan terhadap

Belanda. Kemudian komplotan ini dikenal sebagai tukang rampok jalanan. Karena meresahkan pembesar-pembesar kaya Batavia, VOC berusaha menangkap Untung namun selalu gagal. Hingga akhirnya Untung bersama anak buahnya ditawari menjadi serdadu bayaran. Tawaran tersebut diterima, Untung lalu mendapat pangkat Letnan dalam militer VOC.

Akan tetapi peran Untung dalam dinas militer tidak lama, ia berseteru dengan Pembantu Letnan-nya, bernama Kefler saat penangkapan Pangeran Purbaya. Paska insiden tersebut, Untung keluar dari militer VOC lalu berkelana hingga ke timur pulau Jawa bersama pengikutnya. Saat melewati Cirebon, Untung sempat bertarung dengan Raden Surapati anak angkat Sultan Cirebon. Keributan akhirnya diselesaikan di pengadilan. Surapati dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Untung sendiri memperoleh kehormatan untuk memakai nama Surapati. Namanya kemudian menjadi Untung Surapati.

Pengembaraan Untung sampai di Kraton Kartasura. Saat Kapten Francois Tack (perwira senior VOC) tiba di Kartasura bulan Februari 1686, Untung mendapat perlindungan dari Amangkurat II, tapi tidak secara terang-terangan. Pertempuran pun meletus di halaman keraton, sekitar 75 orang Belanda tewas termasuk Kapten Tack. Untung kemudian bergerak ke timur, ia berhasil menundukkan bupati Pasuruan. Di Bangil, Untung Surapati kemudian mengangkat diri menjadi bupati Pasuruan bergelar Tumenggung Wiranegara. Sepeninggal Amangkurat II tahun 1703, terjadi perebutan takhta Kartasura antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger. Kedudukan

raja berhasil direnggut oleh Pangeran Puger dengan dukungan VOC. Pada 1705 Amangkurat III diusir dari Kartasura, ia bersama pengikut setianya kemudian berlindung ke Pasuruan.

Persekutuan Amangkurat dan Untung Suropati memaksa VOC membentuk pasukan gabungan yang terdiri atas prajurit VOC, Kartasura, Madura, dan Surabaya. Pimpinan pasukan diserahkan kepada Mayor Goovert Knole. Ekspedisi penggempuran Pasuruan dilaksanakan pada 1706. Untung Suropati tewas dalam pertempuran di Benteng Bangil pada 5 Desember. Untuk menghormati jasa-jasa Untung Suropati, berdasarkan Surat keputusan Presiden RI No. 106/TK/1975, Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.

Tengku Amir Hamzah



Lahir: Tanjung Pura, Langkat, Sumatra Timur, 28 Februari 1911 | **meninggal:** Kuala Begumit, 20 Maret 1946 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 106/TK/1975 | **tanggal penetapan:** 3 November 1975

■ Raja Penyair dari Lahat

Ia penyair, seorang penulis, juga politikus. Sajak-sajaknya bernapaskan islami dan berjiwa Ketuhanan. Lahir pada Selasa, 28 Februari 1911 di Kampung Pekubuan Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, Tengku Amir Hamzah merupakan keturunan bangsawan lokal. Masa pendidikannya ia habiskan di sekolah barat, dari *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), MULO, *Algemene Middelbare School* (AMS) hingga *Rech Hoge School*. Cukup lama ia merantau ke Batavia, Jawa Tengah, dan kembali lagi ke Batavia. Amir Hamzah gemar membaca dan mempelajari buku-buku sejarah dan kesusasteraan Melayu Lama karenanya karyanya dipengaruhi oleh hikayat, syair-syair, kebudayaan dan kesusasteraan Melayu.

Selain menekuni dunia sastra, Amir Hamzah juga aktif di pergerakan kebangsaan. Dia pernah menjadi Ketua Indonesia Muda cabang Solo pada 1930, juga kerap bergaul dengan kaum pergerakan, dan mengajar di sebuah Perguruan Nasional. Amir sering mengkritik kebijakan-kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1937 ia diutus pulang oleh Sultan Langkat. Supaya Amir Hamzah melunak, ia dikawinkan dengan putri sulung Sultan Langkat, sekaligus dinobatkan sebagai pangeran bergelar Tengku Pangeran Indra Pura.

Paska kemerdekaan, Gubernur Sumatra Mr. Teuku Mohammad Hasan menetapkan Amir Hamzah sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Langkat. Ia pun mendukung sepenuhnya Pemerintahan RI daerah Langkat. Namun saat terjadi revolusi sosial pada Maret 1946, Amir Hamzah ditangkap oleh golongan komunis, dan dibuang ke Kebun lada, lalu dipindahkan ke Kuala Begumit. Ia meninggal pada tanggal 20 Maret 1946.

Sebagai seorang penyair karya Amir Hamzah bisa dikategorikan seorang maestro. Bahkan HB Yasin pun memberikan gelar “Raja Penyair” kepadanya. Karya-karyanya pernah dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku, yang paling terkenal yakni *Nyanyi Sunyi* dan *Buah Rindu*. Ia diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI Nomor 106/ tahun 1975, tanggal 3 November 1975

Sultan Thaha Syaifuddin



Lahir: Jambi, 1816| **meninggal:** Betung, 26 April 1904|
dasar penetapan: Keppres No. 79/TK/1977| **tanggal**
penetapan: 24 Oktober 1977

■ Sultan Jambi penentang Kompeni

Thaha Syaifuddin naik tahta menjadi sultan pada tahun 1855. Paska kenaikannya, ia membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh para pendahulunya. Bagi Thaha Syaifuddin, perjanjian-perjanjian tersebut hanya merugikan kesultanan Jambi. Salah satu perjanjian yang nyata merugikan yakni tentang kedudukan Jambi yang disepakati pada 1833. Menurut perjanjian, Jambi adalah milik Belanda dan dipinjamkan kepada Sultan Jambi. Tindakan Syaifuddin membuat Pemerintah Hindia Belanda geram, mereka mengancam akan menyerang jika sultan tidak mau bekerja sama.

Belanda mengirim Residen Palembang untuk berunding dengan Sultan Thaha. Perundingan itu gagal. Sesudah itu, Belanda

menyampaikan ultimatum agar Sultan Thaha menyerahkan diri. Karena Sultan Thaha menolak ultimatum, pada 25 September 1858 Belanda mengirim pasukan ke Muara Kumpeh yang terdiri atas tiga puluh buah kapal perang, dipimpin oleh Mayor van Rangen. Pertempuran pun tidak dapat dihindari. Thaha Syaifuddin beserta pasukan *plus* dukungan rakyat berhasil menenggelamkan sebuah kapal Belanda. Mereka juga menggempur benteng milik Belanda di Jambi. Perlawanan tersebut memaksa Belanda mendatangkan bala bantuan pasukan tentara yang berkududukan di Aceh. Sultan beserta pasukannya terpaksa keluar dari keraton dan ke Muara Tembesi. Di tempat tersebut mereka membangun pertahanan.

Guna meraih hati rakyat Jambi, Belanda mengangkat salah seorang putra sultan yang masih berusia tiga tahun menjadi Pangeran Ratu atau Putera Mahkota. Untuk mendampingi putera mahkota, diangkat dua orang wali. Namun, usaha tersebut tidak berhasil, rakyat tetap memilih berjuang bersama Sultan, memilih Thaha Syaifuddin.

Perlawanan Sultan Thaha berlangsung lama hingga puluhan tahun. Sultan Thaha membeli senjata dari pedagang-pedagang Inggris melalui Kuala Tungkal, Siak, dan Indragiri. Pada 1885, mereka kembali menyerang benteng Belanda di dalam kota Jambi dan menghancurkan pos militer Belanda di Muara Sabak. Mendapat serangan keras, Belanda meningkatkan operasi militer dengan mendatangkan pasukan dalam jumlah besar yang dipasok dari *basecamp* Magelang. Sultan Thaha terpaksa meninggalkan Muara Tembesi dan pindah ke tempat lain.

Pada tanggal 31 Juli 1901, terjadi pertempuran sengit di Surolangun. Sultan dan sisa pasukan mundur ke pedalaman di Sungai Aro. Belanda terus mengejar dan pada tahun 1904 Belanda mengetahui kedudukan sultan Sungai Aro. Belanda segera menyerang. Beberapa pengikut Sultan Thaha tertangkap, sultan sendiri berhasil lolos. Namun, pada tanggal 26 April 1904 tersiar kabar Sultan Thaha Syaifuddin meninggal dunia di Muara Tebo. Praktis perlawanan pun perlahan berakhir.

Sultan Mahmud Badaruddin II



Lahir: Palembang, 1767| **meninggal:** Ternate, 26 September 1852| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 63/TK/1984| **tanggal penetapan:** 29 Oktober 1984

■ Melawan Inggris dan Belanda

Sultan Mahmud Badaruddin II memerintah Kasultananan Palembang selama dua periode, yakni pada 1803-1813 dan 1818-1821. Ia lahir di Palembang tahun 1767 dan dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Palembang tahun 1803. Kala itu terjadi perebutan kekuasaan atas Palembang antara Inggris dan Belanda. Melalui pertempuran di Sungai Aur pada 14 September 1811, Inggris berhasil mengusir Belanda dari bumi *Wong Kito*. Akan tetapi, Badaruddin tidak mau mengakui kekuasaan Inggris atas Palembang karena Palembang hanya akan menjadi “boneka” Inggris. Penolakan tersebut membuat Inggris mengerahkan kekuatan militer dan pada Maret 1812 Palembang berhasil diduduki. Sultan Badaruddin terpaksa menyingkir ke Muara Rawas.

Guna mengisi jabatan, sultan Inggris kemudian mengangkat adik Badaruddin II, Husin Diauddin sultan Palembang. Namun, kondisi internasional pasca konvensi London 1814 memaksa Inggris menyerahkan kembali Palembang kepada Pemerintah Hindia Belanda. Imbasnya, Husin Diauddin yang dianggap sekutu Britania di bawa ke Batavia dan dibuang ke Cianjur. Badaruddin II kembali menjadi Sultan Palembang pada 1818. Meski Belanda turut andil dalam kembalinya Badaruddin II, namun sultan juga tidak mengakui kekuasaan Belanda di Palembang. Puncaknya, pecah Perang Menteng pada 12 Juni 1819. Pertempuran berlangsung hingga esok hari, pihak Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Muntinghe kewalahan lalu mundur kembali ke Batavia.

Pasukan Belanda di bawah komando Wolterbeek dengan kekuatan dua kali lipat kembali ke Palembang. Adu meriam terjadi di tepi Sungai Musi pada 21 Oktober 1819. Sultan Badaruddin II sudah mempersiapkan adanya serangan balik dari pihak Belanda sehingga membuat benteng-benteng pertahanan. Untuk ketiga kalinya Belanda harus pergi dari *Kukang*. Pasukan Wolterbeek kembali ke Batavia pada 30 Oktober 1819.

Belanda tidak bosan dengan kekalahan. Tahun 1821 Belanda mendatangkan pasukan lebih besar yang dikawal langsung oleh Mayor Jenderal Marcus de Knock. Bentrok kembali terjadi, kali ini Belanda berhasil menduduki Benteng Kembar dan Plaju yang mengakibatkan jalan menuju Palembang terbuka. De Knock mengultimatum Badaruddin supaya menyerahkan diri, tapi tidak diindahkan Sultan. Belanda kemudian melancarkan serangan besar-

besaran dan pada tanggal 1 Juli 1821 berhasil menduduki kraton. Sultan Badaruddin II ditawan, lalu diungsikan ke Ternate sampai wafat pada tanggal 26 September 1852.

Soekarno



Lahir: Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901| **meninggal:** Jakarta, 21 Juni 1970| **gelar:** pahlawan proklamator, pahlawan nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 81/TK/1986, Keppres No. 83/TK/2012 | **tanggal penetapan:** 23 Oktober 1986, 7 November 2012

■ Indonesia Menggugat!

Di masa mudanya, ia “singa podium” yang garang dan tidak kenal takut terhadap pemerintah kolonial. Ia produk kolonial, tapi benci kolonialisme. Di tanah Hindia [Indonesia] berulang kali ia serukan persatuan kaum pergerakan pribumi. Ia menulis *Naar Het Bruine Front* [Menuju Pembentukan Front Sawo Matang]. Ia optimis kaum pribumi yang disebutnya kaum Sawo Matang akan bersatu. Karena sangat garang, banyak orang khawatir. Tjipto Mangunkusumo yang terbuang di Bandanaira menulis surat kepadanya, setahun berselang sahabatnya Muhammad Hatta menulis surat yang sama. Mereka khawatir ia akan ditangkap Belanda. Ia tetap tidak bergeming dan hasilnya ia benar-benar ditangkap Belanda, disidang dan masuk penjara.

[272]

Akan tetapi, dimasa inilah ia dengan begitu gagahnya menggugat: “*tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa, tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanya diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!*”. Ia seorang yang tidak pernah surut melawan kolonialisme hingga akhir hayatnya.

Soekarno lahir pada hari Kamis Pon dengan nama Koesno Sosrodihardjo dari pasangan Ida Ayu Rai Srimben [Singaraja Bali] dengan Raden Soekemi Sosrodihardjo [Probolinggo Jawa Timur]. Dua minggu sebelum Koesno lahir, gunung Kelud meletus dahsyat. Mitos Jawa mengabarkan bahwa gunung meletus menjadi tanda hadirnya pemimpin besar. Seperti legenda lahirnya prabu Airlangga yang disertai letusan gunung Kampud [nama kuno gunung Kelud] di abad 10 Masehi, juga catatan Mpu Prapanca dalam *Nagarakrtagama* yang menyebut letusan gunung yang sama saat Hayam Wuruk lahir di kedaton Majapahit tahun 1334.

Awalnya Soekarno kecil diasuh kakeknya, Raden Hardjokromo, di Tulung Agung dan bersekolah di *Inlandische School*, sekolah rendah untuk pribumi lalu sekolah di *Eerste Inlandse School*, ayahnya menjadi kepala sekolah. Pada Juni 1911, ia dipindahkan ke *Europeesche Lagere School* [ELS] Mojokerto dan ditempatkan di kelas III. Selepas lulus, tepatnya pada Juni 1916, ia masuk HBS [*Hogere Burger School*] Surabaya dan indekost di rumah HOS Tjokroaminoto di Gang Peneleh VII no 29/31. Sejak itu, ia mulai mengenal pergerakan Indonesia. Ia sering ikut berdiskusi dengan tokoh-tokoh SI, ikut

rapat-rapat SI, ikut menulis di koran SI *Oetoesan Hindia*, dan ikut tergabung dalam perkumpulan Tri Koro Dharmo [TKD]. Pada Juni 1921, ia lulus HBS dan berselang sebulan kemudian ia sudah masuk sekolah angkatan kedua THS Bandung di Dago. Hanya berselang beberapa bulan ia memutuskan berhenti karena harus kembali ke Surabaya untuk membantu keluarga Tjokroaminoto, saat pemimpin SI itu ditahan pemerintah Belanda. Setahun kemudian, ia telah kembali ke Bandung dan meneruskan pendidikannya.

Di Bandung, kegiatan politik Soekarno semakin pesat. Ia mendirikan Algemene Studie Club pada 1925 di Bandung dengan majalahnya *Soeloeh Indonesia Moeda*. Pada 1927, setahun selepas jadi insinyur, ia ikut mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, setahun kemudian namanya diganti menjadi Partai Nasional Indonesia [PNI] dan ia akhirnya menjadi ketuanya. Kegiatan politiknya dalam ranah pergerakan, menjadi radikal, membawa konsekuensi yang pahit. Pada 1929, ia ditangkap Pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta, dibawa ke Bandung untuk diadili dan dijatuhi hukuman 4 tahun [sejak 1930] di penjara Sukamiskin. Di masa pengadilan inilah Soekarno menulis pledoi terkenalanya setebal 170 halaman yang bertajuk *Indonesia Menggugat*.

Pada 1931, atas tekanan publik, Gubernur Jenderal de Graeff, membebaskan Soekarno. Ia segera masuk Partindo [Partai Indonesia] dan segera menjadi ketuanya. Ia aktif kembali dalam dunia pergerakan dan pada 1933, ia ditangkap kembali oleh pemerintah kolonial. Kali ini ia dihukum buang ke Ende Flores. Di pulau itu, ia banyak menghabiskan waktu untuk menulis dan mementaskan 12 naskah

drama. Serta seperti kisah Budha Gautama dibawah pohon Bodhi, Soekarno juga banyak merenung di bawah pohon Sukun bercabang lima. Di bawah *Artocarpus communis* [nama latin Sukun] itulah, ia mendapat pencerahan tentang konsep Pancasila. Akibat Malaria, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu pada 1937. Di kota ini, ia segera bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan lokal. Ia lalu menjadi ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah cabang Bengkulu.

Sejak Soekarno membaca novel *The Great Pacific War* gubahan Charles Hector Bywater, ia percaya bahwa perang Pasifik akan terjadi. Nyatanya Jepang masuk Hindia Belanda pada 1942 dan ia segera dicari Jepang. Soekarno menjadi tokoh yang tidak bisa disangkal kemampuannya dan ia masih menjadi tokoh terkenal di Jawa. maka segera Soekarno dibebaskan dan dikawal oleh Kenpetei [polisi militer Jepang] dari Sumatra menuju Jakarta. Pada 1943, ia diangkat menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat [Putera] dan lembaga ini pada 1944 dirombak menjadi Djawa Hookokai [Kebangkitan Rakyat Jawa], Soekarno tetap ketua. Ia kemudian juga menjadi ketua T'juo Sangi In [Badan Penasihat Pemerintah tentara Jepang di Jawa].

Pada 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI dimana Soekarno duduk menjadi salah satu anggotanya. Dalam sebuah sidang, 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidatonya tentang dasar negara, Pancasila. Lembaga ini dibubarkan dan diganti dengan PPKI pada 7 Agustus 1945, Soekarno menjadi ketuanya. Tiga hari kemudian, ia diundang ke Dalat [Saigon] untuk bertemu marsekal Terauchi membicarakan kemerdekaan. Selepas kembali ke tanah air, Soekarno

bersama Hatta diculik pemuda ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno di halaman rumahnya.

Sehari kemudian, PPKI segera bersidang dan mengangkat Soekarno menjadi presiden RI didampingi Hatta yang menjadi wakilnya. Sejak itu, ia menjadi pemimpin Indonesia, sejak ibu kota berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, dari sistem pemerintahan presidensial hingga parlementer, atau hingga bentuk negara dari kesatuan hingga federal [RIS] selepas KMB.

Sejak tahun 1955, kondisi Indonesia telah mulai stabil. Soekarno tetap menjadi presiden yang disegani. Ia membuat gerakan non Blok serta pemrakarsai konferensi Asia Afrika di Bandung. Ia juga segera menerapkan sistem politik Demokrasi Terpimpin sejak tahun 1959. Ia segera mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan fungsi UUD 1945 serta membubarkan dewan konstituante.

Semenjak peristiwa 1 Oktober 1965, Soekarno telah kehilangan kendali politik. Angkatan darat telah memimpin kendali keamanan dan juga politik negara. Semenjak keluarnya surat perintah 11 Maret 1966, Soekarno secara de facto tidak lagi sebagai pemimpin negara. Pada 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan demikian secara resmi, ia tidak lagi menjabat presiden RI. Tiga tahun berselang, pada jam tujuh pagi, dalam usia 69 tahun, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Jawa Timur

untuk dimakamkan di Blitar. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan bangsa dan proklamasi kemerdekaan, pemerintah memberikan dua gelar kepada Soekarno. Pertama, gelar Pahlawan Proklamator pada 1986. Kedua, gelar Pahlawan Nasional pada 2012.

Drs. Mohammad Hatta



lahir: Bukittinggi 12 Agustus 1902 | **meninggal:** Jakarta 14 Maret 1980 | **gelar:** Pahlawan Proklamator, Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 81/TK/1986, Keppres No. 84/TK/2012 | **tanggal penetapan:** 23 Oktober 1986, 7 November 2012

■ Indonesia Merdeka!

Pemerintah kolonial Belanda mungkin menyesal memberi izin Hatta ke Belanda. Ia begitu kalem, santun, dan murah senyum. Awalnya ia dikirim hanya untuk belajar ekonomi di sekolah dagang *Nederland Handelshogeschool Rotterdam*. Akan tetapi, ia kemudian mulai radikal saat masuk dan bahkan memimpin *Indonesische Vereeniging*. Puncaknya saat ia mengucap pledoinya yang berani bertajuk *Indonesia Merdeka*, “*Cepat atau lambat setiap rakyat yang ditindas akan merebut kembali kebebasannya, itulah hukum besi sejarah dunia*”. Pria santun ini berubah jadi radikal saat memperjuangkan kemerdekaan kaum pribumi Hindia [Indonesia].

Mohammad Hatta lahir dengan nama kecil Mohammad Chatter yang kemudian dipanggil dengan nama kesayangan Khatta,

[278]

lama-kelamaan nama itu berubah jadi Hatta. Jadilah ia bernama Mohammad Hatta. Ayahnya, Mohammad Djamil, merupakan anggota keluarga ulama terkemuka di Minangkabau yang meninggal saat Hatta berusia delapan bulan. Ibunya, Siti Saleha, datang dari keluarga pedagang yang terpandang. Hatta seorang yang tekun belajar. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu *Fort de Kock* dan melanjutkan studinya ke *Europeesche Lagere School* [ELS] di Padang pada 1913 hingga 1916. Saat usia 13 tahun, sebenarnya ia telah lulus ujian masuk HBS di Batavia, namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya ia melanjutkan studi ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* [MULO] di Padang. Baru pada 1919, ia pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang "*Prins Hendrik*". Ia menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik pada 1921. Di tahun itu juga, Hatta segera berlayar ke Rotterdam untuk melanjutkan studi ekonomi dan meraih gelar Doktorandus pada 1932.

Dalam bidang pergerakan, semenjak di Padang, Hatta telah bergabung dengan Jong Sumatranen Bond. Sejak di Batavia, ia telah menulis artikel yang kritis. Saat di Belanda, ia segera bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, masih menulis kritis di koran *Suara Hindia*, hingga berurusan dengan pengadilan di Belanda pada 1927. Selepas enam bulan ditahan, dalam sebuah sidang di Den Haag, ia mengucapkan pidato yang terkenal, *Indonesia Vrij*, Indonesia Merdeka. Ia menuntut Belanda membebaskan Hindia Belanda [Indonesia] dari kolonialisme negeri Belanda. Pada 1932, ia kembali ke tanah air dan segera menjadi pemimpin PNI baru pada 1933 hingga 1934. Tidak lama kemudian, Hatta dibuang ke Boven Digul

pada 1935 hingga 1936, lalu dipindah ke Bandanaera hingga 1942. Terhitung 6 tahun lebih Hatta berada di pengasingan luar Jawa

Semenjak kedatangan bala fasis Jepang, Hatta telah bebas dan segera menjadi orang penting karena dilibatkan dalam Putera sebagai salah satu pimpinan, ia juga menjadi bagian penting dari BPUPKI hingga PPKI. Dalam situasi genting detik-detik proklamasi, ia ikut diculik pemuda di Rengasdengklok. Lalu ikut menandatangani dan mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanpa Hatta, Proklamasi tidak akan lengkap. Ia lalu diangkat menjadi wakil presiden pertama Indonesia.

Hatta kemudian menjadi ketua delegasi RI ke KMB di Belanda tahun 1949 dan menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Ratu Juliana. Ia kemudian menjadi perdana menteri merangkap menteri luar negeri saat Indonesia berbentuk RIS pada 1950. Sejak Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, ia sekali lagi terpilih menjadi wakil presiden dan menjadi dwitunggal dengan Soekarno. Enam tahun kemudian, ia memilih mengundurkan diri sebagai wakil presiden RI. Mohammad Hatta masih dianggap sebagai bapak bangsa meski tidak lagi menjabat jabatan publik hingga ia meninggal dunia di Jakarta dalam usia 77 tahun dan dimakamkan di Tanah Kusir. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan juga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pemerintah memberikan dua gelar dalam waktu terpisah. Pertama, gelar Pahlawan Proklamator yang diberikan oleh presiden Soeharto pada 1986. Kedua, gelar Pahlawan Nasional yang diberikan oleh presiden SBY pada 2012.

Suroso R.P



Lahir: Sidoarjo 3 November 1893 | **meninggal:** 16 Mei 1981 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 81/TK/1986 | **tanggal penetapan:** 23 Oktober 1986

■ Radennya Rakyat Kecil

Raden Panji Soeroso lahir pada 3 November 1893. Bocah asal Sidoarjo, Jawa Timur tersebut sudah giat berorganisasi saat masih sekolah. Mula-mula ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu bergabung dengan Serikat Islam malah berhasil menduduki posisi ketua SI cabang Probolinggo. Ia pernah mendirikan toko serba murah untuk membantu rakyat kecil memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soeroso bekerja sebagai pegawai pemerintah selama dua tahun setelah menamatkan *Kweekschool* di tahun 1916.

Soeroso kerap memperjuangkan nasib buruh agar mendapat perlakuan yang layak dari majikan. Pernah pada tahun 1921, dipimpinnya aksi pemogokan buruh pabrik gula di Mojokerto.

[281]

Sebagai anggota *Volksraad* yang dijabatnya sejak tahun 1924, ia menentang keras pelaksanaan pajak tanah di Sumatra Barat. Selain itu, saat ia diangkat sebagai Ketua Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri pada 1929, melalui organisasi tersebut, Soeroso berjuang meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

Pada masa pendudukan Jepang, Soeroso menjabat Ketua Pusat Tenaga Rakyat (Putera) daerah Malang. Kemudian pada tahun 1945, ia menjadi Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Paska kemerdekaan Soeroso memulai kariernya sebagai Residen Kedu dan berlanjut menduduki jabatan menteri beberapa kali. Yakni; Menteri Perburuhan, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Sosial, juga Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Soeroso dikenal memiliki gagasan-gagasan baru untuk kepentingan rakyat. Sebagai Menteri Sosial, ia memperjuangkan agar pegawai negeri dapat membeli rumah dinas dengan cara mencicil. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, ia memelopori pendirian koperasi pegawai di tiap-tiap kantor mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Gerakan koperasi ini terus berkembang dan akhirnya berdiri Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN). Pada waktu menjadi Menteri Perburuhan, ia membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Pekerja (P4) yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan. Tak hanya itu, Soeroso juga mempunyai andil besar dalam menyusun Rencana Undang-Undang (RUD) Pokok tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Pemerintahan Desa. Usaha ini dilakukannya tatkala menjabat sebagai Ketua Panitia Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada tahun 1962.

Radin Inten II



lahir: Lampung 1834 | **meninggal:** Lampung 5 Oktober 1856 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 81/TK/1986 | **tanggal penetapan:** 23 Oktober 1986

■ Raja Negara Ratu

Pahlawan Nasional ini lahir di Lampung pada 1834. Di usia enam belas tahun ia dinobatkan sebagai penguasa Lampung atau Negara Ratu. Pada masa itu, sebagian daerah Lampung sudah dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1851 pasukan Belanda berusaha menaklukkan Negara Ratu, tetapi gagal. Sesudah itu, Belanda mengadakan perjanjian dengan Radin Inten II. Isi perjanjian adalah Belanda mengakui kedaulatan Negara Ratu, sebaliknya, Radin Inten mengakui kekuasaan Belanda di daerah-daerah yang sudah mereka duduki. Masa tenang paska perjanjian dimanfaatkan Belanda untuk mengumpulkan kekuatan dan membujuk penguasa daerah lain agar berpihak pada Belanda. Hal tersebut diketahui Radin Inten II, ia

kemudian meningkatkan pertahanan dengan membangun Benteng di lereng Gunung Rajabasa.

Patroli militer Belanda diserang secara tiba-tiba oleh pasukan Radin Inten. Bulan Agustus 1856, Belanda berbalik melancarkan serangan besar-besaran. Mereka berhasil menduduki benteng Bendulu, kemudian merebut benteng-benteng pertahanan lain antara lain benteng Ketimbang, benteng Galah Tanah, dan benteng Pematang Sentok. Jatuhnya benteng mengakibatkan kekuatan pasukan Radin Inten II berkurang, apalagi beberapa pembantu utamanya tertangkap dan tewas dalam pertempuran.

Semakin lama kekuatannya semakin berkurang. Beberapa pembantu utamanya tertangkap atau gugur dalam pertempuran. Akan tetapi, Raden Inten II tidak mau menyerah, ia tetap menjadi ancaman bagi Belanda dengan melakukan gerilya bersama sisa pengikutnya. Karena kesulitan menemukan Radin Inten, Belanda membuat rencana dengan Radin Ngerapat. Dengan dalih merundingkan bantuan yang akan diberikannya, Radin Ngerapat mengajak Radin Inten bertemu di suatu tempat. Pertemuan tersebut diadakan malam hari tanggal 5 Oktober 1858. Sementara itu, pasukan Belanda sudah disiapkan di sekeliling tempat pertemuan.

Tatkala Raden Inten II bersama pasukannya mendatangi lokasi yang dijanjikan, secara tiba-tiba tentara Belanda melakukan penyerangan. Meski melakukan perlawanan, Radin Inten II tewas ditempat. Meninggalnya Radin Inten II menandai berakhirnya perjuangan rakyat Lampung dalam memerangi Pemerintah Belanda. Pada tahun 1986, Raden Inten II dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I



Lahir: Kartasura 7 April 1725 | **meninggal:** Surakarta 28 Desember 1795 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 48/TK/1988 | **tanggal penetapan:** 17 Agustus 1988

■ Tiji Tibeh

Ia seorang pangeran pemberani. Memimpin perang dalam usia muda. Saat usianya 19 tahun ia telah diangkat menjadi senopati perang bergelar Pangeran Prangwedana. ia lalu dijuluki “Pangeran Sambernyawa”, karena menyebar maut bagi musuh. Kehebatannya dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, tapi juga disegani lawannya. Gubernur Jawa, Baron van Hohendorff, menyanjungnya, “Pangeran yang satu ini sudah sejak muda terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman”. Ia membangun pasukan yang solid dengan motto, *tiji tibeh* [mati siji, mati kabeh, mukti siji,

mukti kabeh]. Ia menjaga kebersamaan dengan semboyan itu, jika gugur satu, gugur semua dan jika sejahtera satu, sejahtera semua.

Pangeran dari Mataram ini bernama asli Raden Mas Said. Ia putra Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura dengan R.A Wulan. Ketika Said masih berusia dua tahun, ayahnya ditangkap karena melawan kekuasaan Amangkurat IV [Paku Buwono I] yang dilindungi VOC dan dibuang ke Sri Lanka. Saat itu, kekuasaan Mataram memang telah berada dalam kendali VOC. Mungkin karena itulah, Said membenci mati-matian kepada VOC.

Perlawanannya dimulai saat terjadi pemberontakan laskar Tionghoa di ibu kota Mataram, Kartasura, pada 30 Juni 1742 dipimpin Raden Mas Garendi [Sunan Kuning]. Saat itu Said baru berumur 19 tahun dan segera bergabung dengan pemberontak untuk menuntut keadilan rakyat [baik pribumi maupun Tionghoa] yang ditindas Kumpeni Belanda [VOC]. Said membangun pertahanan di Randulawang, utara Surakarta dan diangkat sebagai panglima perang.

Gerakan perlawanan ini semakin besar saat Pangeran Mangkubumi bergabung dengan Said yang bergerilya melawan VOC di pedalaman Yogyakarta. Saat usianya 22 tahun ia lalu bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Mereka terus berjuang melawan VOC yang telah menguasai Mataram. Tapi kebersamaan kedua pangeran itu terhenti saat Mangkubumi memisahkan diri. Jadilah Said berperang sendirian melawan Mataram dan VOC.

Said telah berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan VOC. Selama tahun 1741-1742, ia memimpin laskar Tionghoa melawan VOC. Kemudian bersama dengan Pangeran Mangkubumi selama sembilan tahun melawan Mataram dan Belanda pada 1743-1752. Tiga tahun berselang, Said menentang perjanjian Giyanti yang membelah Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Pada 1756, ia bertempur melawan dua detasemen VOC dengan komandan Kapten Van der Pol di hutan Sitakepyak Rembang. Besarnya pasukan musuh tercatat “bagaikan semut yang berjalan beriringan tiada putus”. Meski pasukan Said jauh lebih kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Said hanya kehilangan 3 prajurit tewas dan 29 menderita luka. Di pihak lawan sekitar 600 prajurit tewas. Bahkan Said berhasil menebas kepala kapten Van der Pol dengan tangan kirinya. Selanjutnya pasukannya menyerbu benteng Vredeburg dan menyerang Keraton Yogyakarta. Penguasa Yogyakarta di bawah kendali VOC gagal menangkap Said. VOC yang tidak berhasil membujuk Said ke meja perundingan, menjanjikan hadiah 1.000 real bagi semua yang dapat membunuhnya.

Tidak seorang pun yang berhasil menjamah Said. Akan tetapi, kemudian sunan Paku Buwono III berhasil mengajaknya berunding. Said bersedia berunding dengan Sunan, dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Said menemui Sunan di Keraton Surakarta dengan dikawal 120 prajuritnya. Sejak itu genjatan senjata tercapai melalui perjanjian Salatiga 17 Maret 1757. Said kemudian diangkat sebagai Adipati Miji [penguasa mandiri]. Ia lalu bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati AryaMangkunagara I. ia memerintah praja Mangkunegara yang meliputi wilayah Kedaung, Matesih,

Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang utara hingga Kedu. Akhirnya VOC juga harus mengakui kekuasaan Mangkunegara I dan harus menjunjungnya sebagai raja ketiga di Jawa Tengah, setelah Sunan di Surakarta dan Sultan di Yogyakarta. Atas kepemimpinannya dalam mengobarkan perlawanan melawan VOC selama 16 tahun, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati AryaMangkunagara I ditahun 1988.

Sri Sultan Hamengkubuwana IX



Lahir: Yogyakarta 12 April 1912 | **meninggal:** Washington DC 2 Oktober 1988 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 53/TK/1990 | **tanggal penetapan:** 30 Juli 1990

■ Raja Jawa Berjiwa Nasional

”Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa”. Kalimat tersebut dilontarkan Sri Sultan Hamengkubuwana IX saat penobatannya menjadi raja Kesultanan Yogyakarta pada 18 Maret 1940. Ia adalah raja berpikiran modern namun tetap menjunjung tinggi adat. Terlahir dengan nama Dorojatun pada 21 April 1912, semenjak kecil putra keraton tersebut diharuskan mondok (*in de kost*) di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah *Neutrale Hollands Javaansche Jongen School* (NHJJS). Selama pemondokan, status keluarga bangsawan tidak berlaku, juga tidak didampingi abdi dalem. Sultan Hamengku Buwono XVIII (ayah Dorojatun)

menginstruksikan supaya anaknya dididik layaknya rakyat biasa. Tujuannya agar suatu saat mereka dapat tumbuh sebagai pribadi yang sederhana serta penuh kedisiplinan. Mereka pun diajarkan untuk bersikap mandiri karena selama menjalani hidup di pemondokan mereka tidak diikuti pembantu (abdi dalem).

Dorojatun kecil masuk *Frobel School* (semacam taman kanak-kanak). Pada saat memasuki usia 6 tahun, ia bersekolah di *Eerste Europese Lagere School B*, selanjutnya pindah ke sekolah *Neutrale Europese Lagere School*. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia kemudian melanjutkan studinya ke *Hogere Burgerschool* (HBS) di Semarang dan Bandung. Belum sempat merampungkan studi, Dorojatun bersama kakaknya kemudian dipindahkan ke Belanda. Dalam perjalanan menuju Belanda, mereka didampingi oleh keluarga Hoffland (seorang administrator pabrik gula Gesika, Yogyakarta). Di sana, ia menyelesaikan Gymnasium di Harlem dan kemudian meneruskan di Rijksuniversiteit di kota Leiden dan mengambil Jurusan Indologi. Salah satu mata kuliah yang menjadi kegemarannya adalah Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*). Sewaktu masih berstatus sebagai mahasiswa, ia menaruh perhatian terhadap perkembangan politik dan ekonomi negara. Ketika menimba ilmu di negeri kincir angin tersebut, Dorojatun kerap mengikuti diskusi di klub universitas yang dipimpin oleh guru besar bernama Profesor Schrieke. Pada tahun 1939, Dorojatun kembali ke Yogyakarta, setahun kemudian ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar Hamengku Buwono IX.

Sebagai raja Kasultanan Yogyakarta, HB IX selalu mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Meski besar dan mendapat pendidikan di lingkungan, jiwa nasionalisnya tetap tertanam kuat. Selang dua hari sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim ucapan selamat kepada Presiden Soekarno melalui telegram. Lalu pada tanggal 5 September 1945, bersama Paku Alam VIII, ia mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia dibuktikannya dengan tindakan nyata. Selama Perang Kemerdekaan (1945-1949) ia aktif membantu perjuangan melawan Belanda. Saat Agresi Militer Belanda II, Belanda menduduki wilayah Yogyakarta, HB IX melindungi prajurit-prajurit TNI di dalam keraton. Kala itu pasukan Belanda tidak berani memasuki keraton, mereka hanya mengancam akan menduduki keraton. HB IX menyediakan kota Yogyakarta sebagai ibu kota RI pada masa Revolusi Fisik, di samping memberikan sumbangan dana bagi keberlangsungan pemerintah. HB IX juga disinyalir sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto.

Selain masyhur sebagai raja Kesultanan Yogyakarta, HB IX juga merupakan seorang negarawan. Dalam Pemerintahan Republik Indonesia, beberapa kali Sultan menduduki jabatan penting, antara lain Menteri Pertahanan (1952-1953), Wakil Perdana Menteri (1950-1951), Ketua Badan Pengawas Keuangan (1964-1966), Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan (1966-1967), dan Wakil Presiden Republik Indonesia (1973-1978).

Sri Sultan Hamengku Buwono IX jatuh sakit di masa tuanya. Ia meninggal dunia ketika memeriksakan kesehatannya di Washington D.C, Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988. Jenazahnya dibawa pulang ke tanah air kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-raja di Imogiri Yogyakarta.

Sultan Iskandar Muda



Lahir: Banda Aceh 1593/1590 | **meninggal:** Banda Aceh 27 September 1636 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 77/TK/1993 | **tanggal penetapan:** 14 September 1993

■ Pembawa Kejayaan Negeri Aceh

Selain dikenal dengan nama Serambi Mekah, Aceh juga memiliki sebutan Negeri Rencong. Rupanya pada abad ke-16, rencong dipakai sebagai lambang kehormatan. Senjata tradisional rakyat Aceh ini wajib dikenakan pegawai Kerajaan Aceh saat menjalankan perintah raja, juga menyambut tamu asing. Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607-1636. Pada masa itu Aceh memiliki reputasi nasional sebagai pusat perdagangan, pembelajaran tentang Islam, dan ilmu pengetahuan. Saat itu, Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam terbesar kelima di dunia setelah kerajaan Islam Maroko, Isfahan, Persia, dan Agra.

Sultan Iskandar Muda menjalin hubungan baik dengan beberapa kerajaan di Eropa, di antaranya Inggris, Prancis, Belanda, dan Skotlandia. Mengenai hubungan dengan Inggris terdapat bukti. Pemerintah Inggris masih menyimpan surat dari Sultan Iskandar Muda berangka tahun 1585. Cuplikan surat tersebut berbunyi: *I am the mighty ruler of the Regions below the wind, who holds sway over the land of Aceh and over the land of Sumatra and over all the lands tributary to Aceh, which stretch from the sunrise to the sunset* - Hambalah sang penguasa perkasa Negeri-negeri di bawah angin, yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatra dan atas seluruh wilayah yang tunduk kepada Aceh, yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam. Surat tersebut merupakan balasan yang ditujukan kepada Ratu Elizabeth I. Sebelumnya, ratu Inggris mengirim utusan bernama Sir James Lancaster ke Aceh. Karena hubungan baik ini Inggris kemudian diizinkan berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Hubungan mesra berlanjut hingga masa Raja James I, bahkan Aceh pernah mendapat kado sebuah meriam dari Inggris. *Canon* tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama Meriam Raja James.

Berkebalikan dengan Inggris, hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Portugis tidak pernah akur. Kerap kali keduanya terlibat pertempuran. Pada 1616, Sultan Iskandar Muda merancang ekspedisi laut guna merebut kembali Kedah yang dicaplok Portugis. Sebelumnya, pada 1540-1586, daerah di semenanjung melayu ini merupakan bagian Aceh. Dua tahun kemudian Kedah mampu

direnggut, malah wilayah Perak dan Pahang juga mampu ditaklukan. Saat itu wilayah kuasa Sultan Iskandar Muda meliputi hampir seluruh Sumatra dan Malaka. Akan tetapi, tidak semua, kota La Posa masih diduduki Portugis. Zona kecil di Malaka ini didirikan oleh Admiral Alfonso d'Albuquerque sekitar 1511.

Laskar Aceh berusaha menaklukkan benteng Portugis di La Pamosa. Akan tetapi, selalu mengalami kesulitan dikarenakan Portugis dibantu Sultan Djohor. Pada akhirnya benteng dapat ditembus. Sultan Johor ditangkap bersama beberapa orang keluarga dekatnya. Saat akan membawa tawanan perang ke Aceh, Portugis kembali mengadakan dengan kekuatan yang lebih besar. Akibatnya armada Aceh kalang kabut, mereka terpaksa mundur ke beberapa bagian pesisir, muara (Bintan), Kampar, Riau, juga Bengkalis. Gencatan senjata pernah dilakukan atas permintaan Gubernur Portugis. Lalu kedua pihak saling berembug di atas kapal perang Portugis. Namun karena tidak terjadi titik temu, terjadilah perkelahian di kapal, laksamana utusan Aceh beserta perwiranya tewas.

Pada 1615, Sultan Iskandar Muda kembali mengatur strategi baru untuk menaklukkan negeri Malaka. Semua kekuatan armada perang bersiap berlayar menuju Semenanjung Malaka. Gempuran perdana diarahkan ke Johor. Negeri itu keok, putra mahkota tertangkap, tapi Sultan Johor berhasil melarikan diri ke Tambilahan. Kabarnya selama dalam pelarian Sultan Johor sakit dan meninggal. Takluknya Johor membuat kedudukan Portugis di semenanjung Malaka melemah dan Aceh kemudian bisa mengalahkan negeri Pahang, Kedah, dan Perak.

Kerajaan Aceh mulai redup paska mangkatnya Sultan Iskandar Muda pada 1636. Karena timbul pemberontakan hingga beberapa daerah kekuasaannya pun lepas. Hampir 30 tahun Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Kerajaan Aceh Darussalam ke masa keemasan. Karena peranan besar Aceh di masa dulu tersebut, kemudian Pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada 14 September 1993.

I Gusti Ketut Jelantik



Lahir: tidak diketahui | **meninggal:** Kintamani 1849 |
gelar: Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres
No. 77/TK/1993 | **tanggal penetapan:** 15 September
1993

■ Perang Jagaraga

Perjuangannya berawal dari hak hukum Tawan yang menyatakan bahwa kapal manapun bila terdampar di perairan Bali maka menjadi milik kerajaan Bali. Saat itu, kapal dagang Belanda terdampar di daerah Jembrana hingga disita kerajaan Buleleng. Belanda menuntut penghapusan hukum tawan karang serta meminta kerajaan Buleleng mengakui kekuasaan Belanda. Tuntutan ini bagi patih Buleleng, Ketut Jelantik, sangat meremehkan. Ia bersumpah selama hidupnya tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan Belanda. Ia memilih berperang dibandingkan mengakui Belanda.

I Gusti Ketut Jelantik diangkat sebagai Patih Agung Kerajaan Buleleng pada 1828. Sebagai Patih Agung, ia membina kerjasama

dengan kerajaan-kerajaan lain di Bali. Berkaitan dengan itu, ia juga dipaksa berhadapan dengan pihak Belanda yang ingin menguasai Bali, termasuk Buleleng.

Perang akhirnya tidak dapat dihindari. Tentara Belanda menyerbu Buleleng dan pada 28 Juni 1846, pusat kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Patih Jelantik bersama raja Buleleng telah mengambil keputusan untuk mengundurkan pasukannya ke Buleleng Timur memasuki desa Jagaraga serta menetapkan Jagaraga sebagai benteng konsolidasi kekuatan dan sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Jelantik menyadari bahwa, konsolidasi persenjataan pasukannya tidak seimbang dengan kekuatan persenjataan Belanda sehingga akan sia-sia melanjutkan pertempurannya saat itu. Untuk menghindari hal inilah akhirnya Patih Jelantik memerintahkan kepada sisa-sisa laskar dan rakyat yang masih setia terhadapnya untuk mengundurkan diri ke desa Jagaraga

Pembangunan benteng di Jagaraga dilakukan dengan cepat. Untuk mengantisipasi penyerbuan Belanda di Jagaraga, pasukan disiagakan. Pembangunan benteng itu menyebabkan Gubernur Jenderal Belanda mengerahkan kekuatan besar-besaran di bawah pimpinan Jenderal van der Wijk sekaligus menuntut agar Patih Jelantik menyerahkan diri. Menjelang akhir tahun 1846 di Jagaraga telah berkumpul laskar 7.000-8.000 orang lengkap dengan persenjataannya.

Pada bulan Juni 1848, Belanda kembali mengirim pasukannya untuk membongkar benteng-benteng Jagaraga dan menangkap I ketut Jelantik. Perang Jagaraga pertama terjadi. Kekuatan pertahanan

dan kegigihan para prajurit Buleleng membuat Belanda tidak mampu merebut Benteng Jagaraga. Serangan itu pun gagal. Bahkan, pihak Belanda kehilangan 14 perwira dan 242 prajuritnya.

Masih pada tahun 1848, pertempuran kedua kembali meletus. Untuk kedua kalinya, tentara Belanda yang dipimpin Jenderal van der Wijk juga tidak mampu menahan gempuran Patih Ketut Jelantik. Tentara Belanda pun mundur ke arah pantai. Kemenangan Buleleng itu disusul dengan peperangan ketiga pada 31 Maret 1849. Tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Michels melancarkan tembakan meriam di atas kapal. Pertempuran sengit berkobar di Jagaraga selama dua hari. Prajurit Bali mempertahankan Jagaraga sekuat tenaga. Karena Belanda sudah mengetahui kekuatan Benteng Jagaraga maka pada 16 April 1849, Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda.

I Gusti Ketut Jelantik pun harus mundur ke Pegunungan Batur Kintamani. Selanjutnya, Ketut Jelantik pergi ke Karangasem mencari bantuan. Ternyata istana Karangasem juga sudah diduduki Belanda. Ketut Jelantik akhirnya bertahan di perbukitan Bale Pundak, sementara Belanda terus memburunya. Ia tetap bertarung hingga tetes darah penghabisan. Akhirnya Jelantik gugur dalam pertempuran pada akhir April 1849. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan melawan colonial Belanda, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional pada patih Buleleng ini tahun 1993.

Frans Kaisiepo



Lahir: Biak 10 Oktober 1921 | *meninggal:* Jayapura 10 April 1979 | *gelar:* Pahlawan Nasional | *dasar penetapan:* Keppres No. 77/TK/1993 | *tanggal penetapan:* 14 September 1993

■ Diplomat Papua

Frans kaisiepo menjadi tokoh utama penentang Belanda di tanah Papua. Saat terjadi perundingan di Sulawesi Selatan, ia datang dan menentang penyatuan papua dengan NIT bentukan Belanda. Dengan berani, ia ganti istilah Papua dengan kata IRIAN, singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Sejak itu, ia bersama rakyat Biak terus mengadakan perlawanan menentang Belanda di Irian hingga akhirnya menyatu dengan Republik Indonesia.

Jiwa kebangsaan Frans Kaisiepo tumbuh sejak ia berkenalan dengan Sugoro Atmoprasojo, mantan guru Taman Siswa yang diasingkan ke Digul, Papua. Sejak saat itulah ia berjuang keras untuk menggabungkan Papua [Irian Barat] ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[300]

Pada Juli 1946, Frans menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka [PIM] di Biak. Frans terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Dalam konferensi tersebut, ia menentang niat Belanda untuk memasukan Irian ke dalam negara indonesia timur [NIT].

Saat konferensi Meja Bundar [KMB] antara Belanda dan RI di Den Haag, Frans menolak diangkat sebagai anggota Delegasi Belanda. Akibatnya ia dihukum dan diasingkan ke daerah terpencil. KMB menghasilkan keputusan pengakuan kedaulatan terhadap Negara Republik Indonesia. Namun Belanda bersikeras bahwa Irian termasuk ke dalam Wilayah kerajaan belanda. Sikap ini akhirnya menimbulkan konfrontasi antar Indonesia dengan Belanda.

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora sebagai upaya membebaskan Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan operasi militer. Frans Kaisiepo turut aktif membantu angkatan Perang RI untuk mendarat di Irian Barat. Ketika Trikora berakhir, perjuangan dilanjutkan melalui jalur diplomasi. Pada 1 Mei 1963, secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Frans Kaisiepo diangkat menjadi gubernur Irian Barat dan bertugas untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pada 14 Juli hingga 4 Agustus 1969, Pepera berlangsung dan menghasilkan suara bulat bahwa Irian Barat menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Sejak itu, ia masih menjabat gubernur Irian hingga tahun 1973. Enam tahun kemudian Frans Kaisiepo meninggal dunia. Ia

dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan melawan Belanda dalam diplomasi serta perjuangan membebaskan Irian dari penjajahan Belanda serta usahanya dalam penyatuan Irian ke dalam pangkuan RI, Frans Kaisepo diberi anugerah gelar Pahlawan Nasional pada 1993.

Silas Papare



Lahir: Serui 18 Desember 1918 | **meninggal:** Serui 7 Maret 1973 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 77/TK/1993 | **tanggal penetapan:** 14 September 1993

■ Pejuang Papua untuk Indonesia

Silas Papare merupakan seorang nasionalis sejati yang memperjuangkan penyatuan Irian Barat (Papua) ke bergabung dalam wilayah Indonesia. Ia lahir di Serui, Papua pada 18 Desember 1918 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935. Tatkala Irian Barat dikuasai Belanda, Silas pantang menyerah berjuang demi tanah kelahirannya. Berulang kali ia keluar masuk bui, Silas Papare tak pernah jera sebelum Irian Barat menjadi bagian dari NKRI.

Bulan Desember 1945, Silas bersama beberapa kawan berhasil mengajak pemuda-pemuda Irian yang tergabung dalam Batalyon Papua untuk bergerak melawan Belanda. Rencananya mereka akan

melakukan pemberontakan. Sayangnya, rencana tersebut bocor ke pihak Belanda. Silas Papare ditangkap lalu dipenjarakan di Jaya Pura. Penangkapan tidak membuat semangat Silas kendor. Ia menunggu dibebaskan dan menyusun kembali rencana pembangkangan. Setelah bebas, ia pun menyusun strategi untuk memberontak. Akan tetapi, lagi-lagi Belanda mengetahui rencana tersebut. Belanda tak mau ambil risiko, Silas segera disidak lalu dijebloskan ke bui di Serui. Di sini Papare berkenalan dengan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi yang diasingkan Belanda.

Perkenalannya dengan Sam Ratulangi membuatnya semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat ia akhirnya mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) pada 1946. Akibatnya Silas kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun, ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta. Pada bulan Oktober 1949, Papare membentuk Badan Perjuangan Irian yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sekaligus menyatukannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat Indonesia memulai Operasi Trikora guna membebaskan Irian Barat, Silas membentuk Kompi Irian di Mabes Angkatan Darat pada Desember 1962. Namun, perang tidak pernah terjadi karena Belanda bersedia menyelesaikan masalah Irian dengan jalan perundingan. Pada 15 Agustus 1962, diadakan Persetujuan New York, Silas Papare turut dilibatkan terlibat sebagai anggota delegasi Republik Indonesia.

Silas meninggal di Serui, Papua, 7 Maret 1973 di usia 54 tahun. Guna mengenang jasa besarnya, nama Silas Papare di abadikan sebagai salah satu kapal selam perang, yakni KRI Silas Papare. Ia juga mendapat gelar pahlawan nasional pada 14 September 1993.

Marthen Indey



Lahir: Doromena 14 Maret 1912 | **meninggal:** Doromena 17 Juli 1986 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 77/TK/1993 | **tanggal penetapan:** 14 September 1993

■ Dari Polisi hingga Wakil Delegasi

Siapa bilang menjadi pegawai pemerintah harus diam-menunduk mengikuti perintah atasan. Seorang dari Negeri Cendrawasih bernama Mathen Indey membuktikannya. Sebagai anggota Polisi Hindia Belanda ia malah mengompori beberapa kawannya untuk menangkap atasannya. Meski gagal dan mendapat hukuman, ia tetap berusaha secara *underground* maupun terang-terangan, melalui perjuangan senjata ataupun otak. Dia bisa!

Marthen Indey lahir pada 14 Maret 1912 di Doromena, Jayapura, Irian Jaya. Pendidikan yang ditempuhnya antara lain; *Europeesche Lagere School* (ELS), Sekolah Pelayaran, Sekolah Polisi (Sukabumi, Jawa Barat). Kemudian ia masuk anggota kepolisian

Hindia Belanda. Pada tahun 1941 ia bertugas di Digul untuk mengawasi pejuang-pejuang Indonesia dibuang di tempat tersebut. Dari situlah, ia berkenalan dengan beberapa tahanan politik, antara lain Sugoro Atmoprasojo, bekas guru Taman Siswa.

Ternyata, pengenalan dengan Sugoro menyadarkan Mathen tentang nasionalisme. Ia bahkan merencanakan membelot bersama sekitar 30 orang kawannya dan menangkap aparat pemerintah Hindia Belanda. Namun, niat Marthen cs gagal karena diketahui atasannya, ia pun dipindah tugaskan ke sebuah tempat terpencil di hulu sungai Digul.

Tatkala Jepang menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda di Irian Barat 1942, Marthen ikut dibawa ke Australia sebagai pelarian Hindia Belanda. Tahun 1944, ia kembali ke tanah kelahirannya bersama pasukan Sekutu saat pecah Perang Dunia II. Marthen di pihak Belanda ikut bertempur menghadapi Jepang di Irian. Pemerintah Belanda kemudian mengangkatnya sebagai pelatih dalam Batalyon Papua. Turut serta dalam pasukan Belanda membuat ia diangkat jadi Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris. Meski mendapat posisi nyaman, jiwa nasionalis Mathen tidak pernah padam, ia bergerak *underground*, secara diam-diam berkomunikasi dengan para mantan tahanan politik kolonial Digul—para eks tapol tersebut banyak yang bekerja sebagai guru di kota Kampung Harapan. Ia pun berusaha menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh Maluku pro Indonesia saat mendapat cuti di Ambon pada bulan Januari 1946.

Marthen memutuskan untuk berjuang terbuka pada bulan Oktober 1946 melalui jalur politik. Ia bergabung dalam anggota

Komite Indonesia Merdeka (KIM), lalu berganti nama menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM), malahan Marthen kemudian menjadi ketua. Melalui PIM, ia berhasil membujuk 12 kepala suku di Papua untuk bersama menyampaikan protes kepada Pemerintah Belanda. Tuntutannya adalah memisahkan Irian Barat untuk bergabung dengan Indonesia. Karena gerakannya tersebut, Martin terpaksa masuk bui selama tiga tahun.

Pada Januari 1962, waktu itu Jakarta mengadakan ekspedisi pembebasan Papua melalui Tri Komando Rakyat (Trikor). Marthen tak ingin ketinggalan, ia menyusun kekuatan gerilya dan membantu beberapa anggota RPKAD yang didaratkan di Irian Barat. Ia juga ia menyampaikan Piagam Kota baru kepada Presiden Soekarno. Piagam tersebut berisi penegasan tekad rakyat Irian Barat untuk tetap setia kepada NKRI. Pada bulan Desember 1962, Marthen bersama E.Y. Bonai diberangkatkan ke New York sebagai anggota delegasi Indonesia mewakili Irian Barat untuk menyampaikan tuntutan kepada PBB agar sesegera mungkin masa Irian Barat segera dimasukkan ke dalam wilayah RI.

Sesudah Irian Barat resmi menjadi wilayah RI, Marthen diangkat menjadi anggota MPRS (Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara) mewakili Irian Jaya, terhitung dari tahun 1963 hingga 1968. Ia juga mengampu jabatan sebagai kontrolir berpangkat mayor tituler dibawah Residen Jayapura. Marthen Indey meninggal dunia pada 17 Juli 1986 pada usia 74 tahun.

Nuku Muhammad Amiruddin



Lahir: Soasiu 1738| **meninggal:** Tidore 14 November 1805| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 71/TK/1995| **tanggal penetapan:** 7 Agustus 1995

■ Pejuang Tidore

Muhamad Amiruddin alias Nuku merupakan putra Sultan Jamaluddin, raja Kerajaan Tidore. Konflik bermula tahun 1779, tatkala Sultan Jamaluddin ditangkap lalu dibuang ke Batavia karena tidak mengikuti perintah Belanda. Pemerintah kolonial pun kemudian mengangkat Kaicil Gay Jira, dan digantikan oleh Putranya Patra Alam sebagai raja Tidore. Pengangkatan tersebut ditentang oleh Nuku dan adiknya, Kamaluddin. Pasalnya berdasarkan adat yang berlaku, pengangkatan raja baru haruslah berdasarkan garis keturunan. Namun, tak lama berselang konflik berubah antara Sultan Nuku melawan Kamaluddin, karena pihak Belanda memilih mengangkat Kamaluddin sebagai Sultan Ternate setelah Patra Alam

ditentang. Sultan Nuku lalu menyingkir dan membangun armada kora-kora di Seputar Seram dan Irian Jaya. Seram Timur dipilih menjadi pusat pertahanan.

Pada tahun 1787, Belanda dengan kekuatan besar berhasil menguasai basis pertahanan Sultan Nuku di Seram Timur. Ia mundur dan kembali membangun kekuatan bari di Pulau Gorong. Sultan Nuku kemudian menjalin hubungan timbal balik dengan Inggris, agar mendapat pasokan senjata api. Delapan tahun kemudian, dengan persiapan matang, Sultan Nuku berbalik melancarkan serangan terhadap Belanda di Benteng Ternate. Serangan tersebut mampu mendesak pasukan Belanda hingga akhirnya menyerah, membuat Belanda kalang kabut dan akhirnya menyerah.

Tatkala Sultan Nuku berhasil merebut kembali Kasultanan Tidore, Sultan Kamaludin melarikan diri ke Ternate. Sultan Nuku kemudian mengangkat diri menjadi Sultan Tidore pada bulan Januari 1805. Setelah peristiwa tersebut, Kesultanan Tidore berada dalam masa damai. Sultan Nuku peninggal tanggal 14 November 1805. Atas perjuangannya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 7 Agustus 1995.

Tuanku Tambusai



Lahir: Tambusai 5 November 1784 | **meninggal:** Negeri Sembilan 12 November 1882 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 71/TK/1995 | **tanggal penetapan:** 7 Agustus 1995

■ de Padrische Tijger van Rokan

“Jangan kau campuri urusan dalam negeri manusia lain”, sekira begitu jawaban Tuanku Tambusai tatkala Letkol Elout menawarkan perdamaian di Padang Matinggo, Rao pada 1832. Mendengar kata tersebut, Elout membalas dengan mengatakan bahwa di mana ada Belanda di sana ia membuat kuburan. Dan lantang Tuanku Tambusai menimpal “Jika begitu sediakan bedil!”

Itulah sosok Tuanku Tambusai yang bersikap keras terhadap Belanda. Ia merupakan salah satu pimpinan Perang Padri yang disegani Pemerintah Hindia Belanda. Serangan-serangan pasukan di bawah arahan Tuan Tambusai kerap kali membuat tentara Belanda kewalahan. Karena perangai beringasnya, sampai-sampai orang kulit

putih memberi julukan padanya; *de Padrische Tijger van Rokan* atau Harimau Padri dari Rokan.

Tokoh Padri ini terlahir di Dalu-dalu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada 5 November 1784. Nama ciliknya Muhammad Saleh, ia adalah putra seorang pejabat tinggi agama di Kerajaan Tambusai. Ia kerap mendapat pelajaran ilmu agama dan tata negara dari ayahnya. Tuanku Tambusai juga belajar beladiri, menggunakan senjata, juga cara menunggang kuda. Selain itu, dimasa mudanya, Tuanku Tambusai kerap menimba ilmu dengan mengunjungi beberapa ulama di daerah Sumatra Barat, antara lain wilayah Rao dan Bonjol. Ia pun sempat berkenalan dengan pimpinan utama perang Padri, Tuanku Imam Bonjol.

Merasa ilmu agamanya sudah mapan, Tuanku Tambusai mulai melakukan dakwah Islam ke pelbagai daerah Sumatra. Ia pernah mencoba mengislamkan Toba (sekarang Sumatra Utara) yang kondang dikenal sebagai daerah paling rawan kala itu, sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan pelbegu. Tatkala di sana ia mendapat tentangan-tentangan hingga nyawanya terancam karena penduduk Toba menilai kedatangan Islam hanya akan merombak adat nenek moyang orang Batak. Toba bergejolak dan menjadi tidak aman, Tuanku Tambusai kemudian memutuskan kembali ke Rao (sekarang Sumatra Barat). Di sana ia menyiarkan agama Islam bersama Tuanku Rao ke berbagai pelosok seperti Airbangis dan Padanglawas. Tuanku Tambusai kemudian mendirikan pesantren di kampung asalnya,

Dalu-dalu. Gelar Tuanku pun disandanginya karena tingkat keilmuannya yang tinggi dalam bidang agama.

Tuanku Tambusai ikut terjun dalam Perang Padri melawan bangsa kolonial Belanda. Ia bergabung dengan Tuanku Rao dan mendirikan benteng pertahanan di Rao, bagian utara Sumatra Barat. Akan tetapi, benteng tersebut jatuh ke tangan Belanda pada September 1832, dan pasukan padri berpindah ke Tapanuli Selatan. Tuanku Tambusai mengoordinasi pasukan padri setelah Tuanku Rao gugur dalam pertempuran di Airbangis. Kemudian untuk memperkuat diri, pasukan arahan Tuanku Tambusai mulai mendirikan serangkaian benteng di Dalu-dalu pada tahun 1834.

Dalam Perang Padri, pasukan arahan Tuanku Tambusai menjadi pemecah pasukan Belanda yang menyerang pertahanan utama di Bonjol, pada tahun 1835 pasukannya mengepung tentara Belanda di Rao dan Lubuk Sikaping sehingga memutus hubungan pasukan Belanda antara satu tempat dan tempat lain. Ia pun menyerang pos-pos militer Belanda di Tapanuli Selatan dan mampu memecah kekuatan Belanda yang mengepung Bonjol. Akan tetapi, karena pasukan Belanda terlampau banyak, Bonjol pun jatuh menyerah pada Agustus 1837.

Walau Bonjol jatuh, Tuanku Tambusai tetap melanjutkan perlawanan. Pada awal tahun 1838 pasukan Belanda menyerang Dalu-dalu dari Pasir Pengarayan dan Tapanuli Selatan. Serangan gagal total karena Tuanku Tambusai sudah mendirikan benteng berlapis-lapis. Beberapa bulan Mei, dengan pasukan yang lebih

banyak Belanda kembali merangsek ke Dalu-dalu dan berhasil merebut beberapa benteng. Perlawanan Tuanku Tambusai baru berakhir pada 28 Desember 1838 setelah benteng utama Dalu-dalu jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri ke Malaysia dan meninggal di Negeri Sembilan pada usia tua.

Syech Yusuf Tajul Khalwati



Lahir: Gowa-Tallo 3 Juli 1626 | **meninggal:** Cape Town 23 Mei 1699| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 71/TK/1995| **tanggal penetapan:** 7 Agustus 1995

■ Syech ternama di Negeri “Rantau”

Langit Tallo memunculkan cahaya benderang menyinari pada 13 Juli 1626 M bertepatan 8 Syawal 1036 H. Masyarakat Gowa gempar melihat fenomena dari negeri tetangganya tersebut. Mereka pun berangkat ke Tallo untuk mencari tahu. Namun, orang Tallo tak mengerti, rakyat Tallo hanyalah tahu pada waktu itu di negerinya telah lahir seorang anak bernama Yusuf. Kisah ini terdapat dalam lontara *Riwayakna Tuanta Salamaka ri Gowa* (RTSG). Asal-usul ulama kondang Sulawesi Selatan ini belum bisa dipastikan kebenarannya karena bersumber dari cerita legenda. Konon ayahnya bernama Abdullah adalah orang suci, Ibunya bernama Aminah. Sekira empat puluh hari setelah kelahiran Yusuf,

Aminah dipersunting Raja Gowa setelah diceraikan suaminya. Ibu dan anak ini kemudian dibawa ke istana.

Di usia 18 tahun Yusuf meninggalkan negerinya menuju Mekah dengan menumpang kapal niaga Melayu. Karena kapal tersebut singgah ke Banten, ia berencana tinggal sementara untuk belajar lebih tentang agama. Kala itu sedang berkonfrontasi dengan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Karenanya, Yusuf turut aktif dalam perjuangan melawan bangsa asing. Kurang lebih, lima tahun ia menetap di Banten, kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mekah, di tanah suci ini, selama lima belas tahun ia semakin mendalami ilmu agamanya.

Di usia 38 tahun, Syekh Yusuf kembali ke negeri asalnya dan telah menjadi seorang ulama besar. Namun karena kecewa dengan Kasultanan Gowa, pada 1664 Syekh Yusuf meninggalkan Gowa menuju Banten. Kedekatannya dengan Kasultanan Banten di masa lalu, membuat Syeh Yusuf dipercaya oleh Sultan Ageng untuk menjadi penasihat kasultanan. Kedudukan tinggi Syeh Yusuf tersebut berimbas pada hubungan positif antara Banten dan Sulawesi Selatan. Orang-orang Makasar dan Bugis kerap mendatangnya untuk berguru, tak jarang orang-orang ini dikemudian hari menjadi kader-kader dan komandan pasukan yang anti penjajahan.

Hubungan Banten dengan “kompeni” semakin memburuk setelah Sultan Banten mengeluarkan kebijakan untuk memajukan perdagangan Banten. Dalam waktu singkat Banten menjelma menjadi kota pelabuhan penting di Selat Malaka, apalagi dengan terang-terangan Kasultanan Banten menolak pendudukan Belanda di

Batavia. Namun, kondisi intern Kesultanan sendiri terjadi perpecahan antara kedua putra Sultan Ageng Tirtayasa yakni Pangeran Gusti dan Pangeran Purbaya. Pertikaian perihal perebutan tahta tersebut meluas menjadi; Pangeran Gusti melawan Sultan Ageng Tirtayasa.

Konflik di internal tersebut dimanfaatkan oleh Belanda dengan menggaet Pangeran Gusti menjadi sekutu. kesultanan Banten diketahui oleh Belanda. Kondisi ini dimanfaatkan dengan mendekati Pangeran Gusti. Belanda juga memanas-manasi Pangeran Haji, sehingga ia menyangka kelak Pengeran Purbaya lah yang bakal diangkat menjadi sultan. Akhirnya Pangeran Gusti bersekongkol dengan Belanda untuk mengkudeta ayahhandanya. Pada Maret 1682 bentrok ayah dan anak dibantu pasukan Belanda terjadi. Pangeran Gusti berhasil menggulingkan ayahnya dan mengangkat diri sebagai Sultan Haji. Meski berhasil melarikan diri, pada tahun berikutnya Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap.

Sebagai penasihat kasultanan, Syekh Yusuf tetap melakukan perlawanan. Ia memimpin sekitar 5.000 pasukan termasuk 1.000-an orang dari Makassar. Pasukan yang dipimpinnya bergerilya hingga ke Karang dekat Tasikmalaya. Pada 1683, Syekh Yusuf ditangkap Belanda di Sukapura. Namun, ia pun tertangkap dan dibuang ke Srilanka pada September 1684.

Di Srilanka, Syeh Yusuf mengajarkan agama Islam hingga menjadi tokoh berpengaruh di sana. Bahkan jemaah haji asal Hindia Timur saat kembali dari Mekah kerap singgah ke Srilanka beberapa bulan untuk berguru atau sekadar meminta berkah. Hubungan tersebut dimanfaatkan Syeh Yusuf mengirimkan surat kepada

beberapa penguasa nusantara antara lain; Sultan Banten, Sultan Makasar, Pangeran Mangkubumi, dan Kerajaan Gowa.

Belanda mengetahui tindakan Syeh Yusuf dan berniat menghukum mati. Hukuma urung dilakukan dan diubah menjadi pembuangan seumur hidup setelah mendapat potes dari Raja Alangkir dari India dan Raka Makasar Abdul Jalil. Pada tanggal 7 Juli 1693 di usia 68 tahun Syekh Yusuf dibuang ke Capetown-Afrika Selatan. Ia disambut baik oleh Gubernur Simon Van Stel dan dihormatinya sebagai buangan politik sebagaimana orang buangan politik sebelumnya. Di tempat pembuangan, Syeh Yusuf mengajarkan agama Islam ke penduduk hingga ia wafat pada 23 Mei 1699. Sepeninggalnya, ia dikenal dan dikenang sebagai penyebar agama Islam pertama di Afrika Selatan juga Srilanka.

Siti Hartinah



Lahir: Jaten 23 Agustus 1923| **meninggal:** Jakarta 28 April 1996| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 60/TK/1996| **tanggal penetapan:** 30 Juli 1996

■ Ibu Negara Terlama Berjiwa Sosial

Selama dua puluh sembilan tahun ia menyandang jabatan Ibu Negara. Dalam jabatan tersebut ia kerap kali menyibukkan diri dalam pelbagai kegiatan sosial dan budaya. Seakan tak mengenal lelah mendampingi Presiden Soeharto, perempuan yang kerap disapa Ibu Tien ini aktif memperkenalkan budaya Indonesia kepada tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Ia mendapat gelar Pahlawan Nasional pada 30 Juli 1996.

Nama lengkapnya Siti Hartinah, istri presiden ke-2 Republik Indonesia ini lahir di Karanganyar Surakarta pada 23 Agustus 1923. Semasa muda, Ibu Tien menempuh pendidikan *Hollands Inlandsche School* Solo. Baru setahun di Solo, dia terpaksa harus kembali ke

desanya dikarenakan terserang penyakit cacar. Ia pun menyusul kedua orangtuanya ke Kerjo. Di tempat baru ini, setelah sembuh, Tien kembali melanjutkan studi di sekolah Ongko Loro yang ada di desa tersebut. Sebenarnya setelah tamat dari sekolah Ongko Loro, Hartinah ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena dia ingin menjadi seorang dokter. Ia kemudian bekerja dilembaga kebudayaan di Surakarta. Pada masa pendudukan Jepang, ia memasuki organisasi wanita Fujinkai. Paska kemerdekaan Indonesia, ia aktif dalam Laskar Putri Indonesia Solo dan organisasi Palang Merah Indonesia.

Letnan Kolonel Soeharto melamarnya pada tahun 1947. Sesudah Perang Kemerdekaan (1945-1949) berakhir, karier militer Soeharto meningkat hingga mendapat pangkat jenderal. Pada tahun 1967, Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Ibu Tien pun menyesuaikan diri dengan kedudukan suaminya. Dalam posisi sebagai ibu Negara tersebut, Siti Hartinah mengabdikan dirinya pada negara dengan melakukan pelbagai kegiatan. Ia pemrakarsai pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia aktif pula membina kepemudaan dan kepramukaan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan anak terlantar, dan kesejahteraan penyandang cacat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ia pemrakarsa pendirian beberapa rumah sakit, seperti Rumah Sakit Anak dan Bersalin, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan Rumah Sakit Kanker Dharmais. Selain itu, ia juga memimpin berbagai yayasan sosial, antara lain Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Untuk

menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat, ia memprakarsai pendirian Perpustakaan Nasional.

Selama 47 tahun mendampingi suaminya, tepat pada hari Minggu, 28 April 1996, di RS Gatot Subroto, Jakarta, Siti Hartinah mengembuskan napas terakhirnya karena serangan jantung. Jenazahnya dimakamkan di Astana Giri Bangun, Jawa Tengah, pada tanggal 29 April 1996.

Adam Malik



Lahir: Pematangsiantar 22 Juli 1917 | **meninggal:** Bandung 5 September 1984 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 107/TK/1998 | **tanggal penetapan:** 6 November 1998

■ Diplomat Mumpuni

Ia seorang jurnalis dan diplomat yang ulung. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal yang tinggi, tapi ia seorang otodidak yang pintar. Karena kemampuannya dalam diplomasi, ia pernah menjadi ketua sidang majelis umum PBB ke-26 di New York, ia satu-satunya orang Indonesia yang pernah menduduki posisi itu. Di luar kehebatannya itu, ia adalah sosok yang ikut berjasa mengantarkan kemerdekaan Indonesia.

Diplomat dan jurnalis ini bernama lengkap Adam Malik Batubara, anak ketiga dari sepuluh bersaudara pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya seorang pedagang kaya di Pematangsiantar. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya

di *Hollandsch Inlandsche School* [HIS] Pematangsiantar. Ia lalu melanjutkan Sekolah Agama Parabek di Bukit tinggi namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung. Sang ayah menyuruhnya menjaga toko 'Murah', di seberang bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca pelbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.

Ketika usianya baru sekitar 17 tahun, ia pernah ditahan polisi Belanda di Sipirok pada 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Kala itu, Adam Malik telah menjadi ketua Partindo di Pematangsiantar dan ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Batavia.

Pada 1937, di usia 20 tahun, Adam Malik bersama teman-temannya memelopori berdirinya kantor berita Antara di Batavia. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke pelbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Sekian tahun berada di Batavia, ia segera menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia [Gerindo] dan pada 1945, ia menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Menjelang 17 Agustus 1945, ia ikut terlibat penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia juga menggerakkan rakyat untuk berkumpul di lapangan Ikada saat akan dilaksanakan pertemuan raksasa. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik

sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat [1945-1947] yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memegang jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.

Sejak 1959, ia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Tahun 1962, ia menjadi Ketua Delegasi RI untuk perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat di Washington D.C. yang kemudian menghasilkan persetujuan pendahuluan tentang Irian Barat. Pada 1963, ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja sekaligus Wakil panglima Operasi ke-1 KOTOE (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi). Pada 1964, ia menjadi ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan PBB.

Di masa awal Orde baru, ia menjabat Waperdam III, Menteri Luar Negeri ad interim dan akhirnya menjadi Menlu dalam Kabinet Ampera 1 pada 1966. Ia terus menjadi menteri luar negeri dalam rentan waktu lama. Pada 1971, ia mendapat kehormatan untuk menjadi Ketua Sidang Umum ke-26 PBB. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978, ia terpilih menjadi Wakil Presiden

Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia sering mengatakan “*semua bisa diatur*”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, Adam Malik akhirnya meninggal dalam usia 67 tahun karena kanker hati. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan bangsa, pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Nasional pada 1998.

Tjilik Riwut



Lahir: Kasongan 2 Februari 1918 | **meninggal:** Banjarmasin 17 Agustus 1987 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 108/TK/1998 | **tanggal penetapan:** 6 November 1998

■ Pembangun kota Palangkaraya

Saat proklamasi dibacakan dan tersebar, Tjilik Riwut, seorang pemuda yang berasal dari Kalimantan Tengah bergegas menuju kampung halaman. Ia ingin rakyat Kalimantan Tengah mendukung proklamasi Indonesia. Segera bersama kawan-kawannya, Tjilik Riwut mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Kotawaringin.

Riwut mengenyam pendidikan dasar di kota kelahirannya. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Perawat di Purwakarta dan Bandung. Pada 1938 Tjilik Riwut bersama dengan para pemuda dari daerah asalnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Pakat Dayak. Pakat Dayak menerbitkan sebuah majalah

yang bernama *Suara Rakyat* dengan Tjilik Riwut selaku pemimpin redaksinya.

Selepas proklamasi kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia, Ia sempat masuk menjadi anggota KNIP. Ia menjadi salah satu wakil dari Dayak, tetapi tidak lama, ia kembali ke kota kelahirannya dan mendirikan kelompok pasukan bersenjata yang terlibat dalam serangkaian perang gerilya. Tjilik Riwut segera terlibat dalam pertempuran. Ia juga melakukan pertemuan dengan para kepala suku Dayak sambil memimpin sejumlah pertempuran melawan Belanda. Hasil pertemuan dengan para kepala Suku Dayak itu adalah Sumpah Setia Masyarakat Suku Dayak terhadap Negara RI.

Ia segera datang ke Yogyakarta dan mengabarkan kabar ini ke hadapan presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta, 17 Desember 1946. Kemudian Tjilik Riwut ikut terlibat dalam aksi penerjunan pasukan RI di Kalimantan. Ia menjadi penunjuk jalan ketika Angkatan Udara RI melakukan operasi penerjunan pasukan ke Kalimantan pada 17 Oktober 1947. Berkat kerjasama itu, para prajurit AURI berhasil memasuki kawasan Kotawaringin. Penerjunan pasukan itu merupakan penerjunan pertama yang dilakukan AURI. Saat itu Tjilik Riwut diberi pangkat Mayor.

Tjilik Riwut kemudian diangkat menjadi Wedana Sampit setelah perang mempertahankan kemerdekaan berakhir. Kiprahnya dalam pemerintahan daerah terus beranjak naik. Ia diberi amanah untuk menjadi Bupati Kotawaringin selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah. Ketika menjabat sebagai gubernur, ia meningkatkan

kesejahteraan dan kemajuan pendidikan masyarakat Kalimantan Tengah. Ia juga berjasa membangun Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Ia juga pernah tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Karena jasanya di lingkungan AURI dan merintis perjuangan di Kalimantan Tengah, Angkatan Udara RI memberinya anugerah berupa pangkat Laksamana (marsekal) Pertama kehormatan.

Tjilik Riwut mengembuskan napas terakhirnya tepat pada perayaan HUT RI ke-42. Ia dimakamkan di makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atas jasanya kepada negara, Tjilik Riwut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 6 November 1998

La Maddukkelleng



Lahir: Wajo 1700| **meninggal:** Wajo 1765| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 109/TK/1998| **tanggal penetapan:** 6 November 1998

■ Pejuang Wajo

Setelah sepuluh tahun La Maddukkelleng merantau datanglah utusan dari Wajo menghadapnya. Saat itu ia telah jadi sultan di negeri Pasir dan begitu merajai laut selat Makasar hingga VOC menjulukinya bajak laut. Sang utusan membawa surat yang mengajaknya kembali karena Wajo dalam ancaman. Ia lalu bertekad kembali ke Wajo memenuhi panggilan tanah leluhurnya. Membebaskan tanah airnya dari penindasan dan menghajar Kumpeni yang semakin merajalela.

La Maddukkelleng yang memang seorang bangsawan Wajo ini segera mengumpulkan kekuatan persenjataan dan armada yang kuat. Pasukannya menggunakan perahu jenis bintang yang cepat dan lincah bergerak. Ia melengkapi perahunya dengan meriam-meriam

baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan La Maddukkelleng dibagi atas dua kelompok, yaitu pasukan laut [marinir] dan pasukan darat. Pasukan istimewanya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan Johor-Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, Makassar serta Bugis-Pagatan.

Armada La Maddukkelleng segera bersiap dan berangkat menuju Makassar melalui Mandar. Dalam perjalanan ini, dua kali armadanya diserang armada Belanda pada 8 dan 12 Maret 1734. Akan tetapi, Armada Belanda yang terdiri atas enam buah perahu perang dapat dipukul mundur oleh pasukan Maddukkelleng yang berpengalaman. Saat armada Maddukkelleng berlayar antara pulau Lae-lae, pasukan Belanda yang berada dalam Benteng pulau itu juga tiba-tiba menembaknya dengan meriam-meriam. Armada La Maddukkelleng membalas tembakan meriam itu dengan gencar. Berita kedatangan Maddukkelleng segera membuat gempar VOC. Gubernur Makassar, Johan Santijn segera mengirim pasukan yang banyak menuju pulau Lae-lae. Tetapi naas, hampir seluruh pasukan Kompeni ini dihancurkan oleh pasukan Maddukkelleng.

Akhirnya pejuang wajo itu berhasil mencapai pelabuhan Gowa. Ia segera disambut sahabat seperjuangannya. Setelah armada VOC tidak berdaya menghadapi armada La Maddukkelleng, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di Ujung Palette. Ia kemudian menuju ke Peneki untuk memangku jabatan Arung yang diwariskan ayahnya. Ia lalu bergelar Arung Matowa Wajo XXXIV,

pemimpin Wajo ke 34. Pengangkatannya di Paria berlangsung pada hari Selasa 8 November 1736. Dalam pemerintahannya yang panjang ia tercatat berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang dan mampu melawan dominasi Kompeni [VOC] serta berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo. Ia lalu dijuluki “Petta Pamaradekangi Wajona To Wajoe”, orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya.

Setelah memimpin Wajo selama hampir 29 tahun, La Maddukkelleng akhirnya tutup usia dalam umur 65 tahun. Ia dimakamkan di tanah leluhurnya di mana ia berkuasa, Wajo. Atas jasa-jasanya yang begitu hebat dalam melawan penjajahan Belanda [VOC], pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional pada 1998.

Sultan Syarif Kasim II



Lahir: Riau 1 Desember 1893 | **meninggal:** Riau 23 April 1968 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 109/TK/1998 | **tanggal penetapan:** 6 November 1998

■ Raja Biak Berikrar Setia pada Republik

Sultan Syarif Kasim II dilahirkan di Siak pada tanggal 1 Desember 1893. Ia naik tahta pada usia 16 tahun setelah ayahnya wafat pada 1908. Namun, penobatannya dilaksanakan pada 13 Maret 1915 karena ia belum cukup umur dan tengah menempuh pendidikan di Batavia. Setelah dinobatkan menjadi raja, ia dianugerahi gelar Sultan Assyaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syaifuddin. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II, Siak menjadi ancaman bagi Pemerintah Hindia Belanda. Secara terang-terangan ia menentang kolonialisme Belanda. Bahkan dengan berani ia menolak kedudukan Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di kepulauan Nusantara, termasuk Siak.

Rakyat Siak pun menjadi maju karena Sultan Syarif Kasim menyadari pentingnya pendidikan sebagai tonggak bagi perubahan suatu bangsa. Ia berusaha mencoba mencerdaskan rakyatnya dengan mendirikan sekolah-sekolah di Siak dan memberikan beasiswa bagi putra-putri Siak yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di Medan dan Batavia.

Karena pemikiran yang modern tersebut Sultan Syarif Kasim II mendukung kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Untuk mendukung pemerintahan yang baru lahir, Kesultanan Siak menyumbang uang sebanyak 13 juta gulden untuk pemerintah republik. Ia pun memiliki andil membujuk raja-raja Sumatra Timur lainnya untuk turut memihak republik. Segera, guna menunjukkan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II bertolak ke Yogyakarta. Ia menemui Soekarno selaku Presiden RI dan mengutarakan ikrar bergabung ke Republik Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II meninggal dunia di Riau pada 1 Desember 1893. Karena jasanya dan sikap mendukung pemerintah saat kemerdekaan ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 6 November 1998.

H. Ilyas Yakoub



Lahir: Pesisir Selatan Sumatra Barat 1903| **meninggal:** Pesisir Selatan Sumatra Barat 2 Agustus 1958| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 74/TK/1999| **tanggal penetapan:** 13 Agustus 1999

■ Ulama dari Bayang

Lewat majalah dan partai politik bentukannya, ia melontarkan kritik-kritik terhadap sepak terjang pemerintah kolonial Belanda. Sikapnya itu membuat Belanda marah lalu membuang dia ke Boven Digul. Kesan mengerikan yang lekat dengan Digul rupanya tidak membuat para pejuang jera apalagi sampai kehilangan semangat juangnya. Salah satunya ialah Ilyas Yakoub.

Ilyas Yakoub merupakan putra ketiga seorang pedagang kain, Haji Ya'kub dan hidup di lingkungan ulama. Masa kecilnya belajar ilmu agama dengan kakeknya Syekh Abdurrahman. Masa itu Bayang [tanah kelahirannya] masih merupakan sentral pendidikan Islam. Secara formal, ia mendapat pendidikan di *Gouvernements Inlandsche*

School. Setelahnya, ia bekerja sebagai juru tulis selama dua tahun [1917 – 1919] di perusahaan tambang batu bara Ombilin Sawahlunto Sijunjung. Ia keluar dari perusahaan itu sebagai protes terhadap pimpinan perusahaan asing yang semena-mena terhadap buruh pribumi. Ia lalu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji serta memperdalam ilmu agamanya. Tahun 1923, ia punya kesempatan ke Mesir. Di sana ia memasuki sebuah universitas mulanya sebagai mahasiswa pendengar. Di Mesir ini pula ia berkenalan dengan dunia organisasi dan dunia pers pergerakan.

Pada 1929, Ilyas Yakoub segera kembali ke tanah air. Ia menemui sahabatnya di Jawa yang ikut dalam arus pergerakan, para tokoh PNI dan PSI. Setahun setelahnya, saat kembali ke Sumatra, ia segera terjun dalam bidang jurnalisme dan politik. Ia menerbitkan *Medan Rakyat* dan mendirikan organisasi PERMI [Persatuan Muslimin Indonesia] dengan asas Islam dan kebangsaan. Ia sangat non kooperatif dengan kolonial Belanda, tetapi sangat kooperatif dengan organisasi lain seperti Partindo.

Segara pemerintah menganggap kegiatan Ilyas Yakoub radikal dan menangkapnya serta membuangnya ke luar Sumatra hingga sepuluh tahun. Pergantian pemerintahan dari Belanda ke Jepang tidak juga membuat ia bebas. Ia tetap menjadi orang buangan dari Kupang hingga Singapura. Ia baru bebas pada 1946, ia langsung bergabung dengan kaum republik terlibat dalam gerilya menggempur Belanda dalam agresi kedua. Ia juga berperan dalam pembentukan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi. Ia mendapat tugas menghimpun kekuatan politik [seluruh partai]

di Sumatra untuk melawan Belanda. Di masa itu juga, ia menjabat ketua DPR Sumatra Tengah kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPRD wakil Masyumi dan merangkap sebagai penasihat Gubernur Sumatra Tengah bidang politik dan agama.

Ia pernah diusulkan menjadi Gubernur Sumatra Tengah, tetapi tegas menolak. Mungkin ia merasa waktunya telah selesai. Ilyas Yakoub menutup mata selamanya pada usia 55 tahun. Jenazahnya dimakamkan di desa Kapencong, antara kampung kelahirannya Asamkumbang dan kampung isterinya Koto Berapak. Atas jasanya pada negara, Ilyas Yakoub diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1999.

Prof. Dr. Hazairin



Lahir: Bukittinggi 28 November 1906| **meninggal:** Jakarta 11 Desember 1975| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 74/TK/1999| **tanggal penetapan:** 13 Agustus 1999

■ “De Rejang”, Doktor Hukum Adat

kurang lebih dalam tempo tiga bulan, Hazairin berhasil merampungkan disertasi berjudul “De Rejang” di sekolah tinggi hukum *Recht Hoge School* Batavia. Ia berhak menyandang gelar doktor dalam bidang Hukum Adat. Lelaki kelahiran Bukittinggi 28 November 1906 ini kemudian dikenal sebagai pakar hukum adat. Dengan bekal tersebut, ia kemudian aktif dalam pemerintahan dan menduduki beberapa posisi penting. Jabatan-jabatan tersebut antara lain: Kepala Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (1938-1945), Penasihat Hukum untuk Jepang pada (1942 – 1945), asisten Residen Tapanuli, Residen Bengkulu (1946), Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman, dan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroarnijojo (1953-1955).

Hazairin dibesarkan dalam nuansa keluarga Islami. Ayahnya seorang guru, dan kakeknya dikenal orang sebagai ulama. Dari ayah dan datuknya tersebut ia mendapati dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab. Hazairin kecil mengawali pendidikannya di Bengkulu dengan masuk *Hollands Inlandsche School* (HIS). Setamat dari HIS pada 1920, ia melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Padang, tamat tahun 1924. Kemudian Hazairin masuk *Algemene Middelbare School* (AMS) di Bandung dan berhasil lulus di tahun 1927. Selanjutnya, atas inisiatifnya sendiri, Hazairin merantau ke Batavia untuk melanjutkan Studi *Rercht Hooge School* atau Sekolah Tinggi Hukum dengan mengambil jurusan Hukum Adat. Saat itu Jurusan Hukum Adat merupakan favorit dan diminati banyak orang. Sejumlah nama besar tokoh bangsa, antara lain; Muhammad Yamin, M. Djojodiguno, Kasman Singodimedjo, dan Mohammad Roem tercatat sebagai alumni jurusan tersebut.

Pada kurun waktu tahun 1950-an, Hazairin tidak aktif lagi dalam pemerintahan. Waktunya dihabiskan untuk mengabdikan pada pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan sosial. Hazairin dikukuhkan menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 9 Desember 1950. Selain itu, ia juga tercatat sebagai guru besar di Universitas Islam Jakarta dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pada tahun 1950-an, ia mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta.

Prof. Dr. Hazairin meninggal di Jakarta pada 11 Desember 1975 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengukuhkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Abdul Kadir Raden Temenggung Setia Pahlawan



Lahir: Sintang 1771| **meninggal:** Tanjung Suka Dua 1875| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 114/TK/1999| **tanggal penetapan:** 13 November 1999

■ Pejuang tangguh dari Melawi

Meski usianya telah mencapai 104 tahun, ia tetap tokoh pejuang yang mampu menghimpun serta menggerakkan rakyat untuk melawan Belanda. Ia selalu lantang memberi seruan pengobar semangat pada rakyat Melawi, *“Selama masih berada di bawah telapak kaki penjajah, tidak akan pernah bahagia dan hidup makmur.”* Tentara Belanda di Kalimantan Barat dibuat kewalahan oleh strateginya.

Pejuang itu bernama Abdul Kadir anak seorang hulubalang atau pemimpin pasukan kerajaan Sintang bernama Oerip dan ibunya bernama Siti Safriyah. Ia sudah mengabdikan sebagai pegawai kerajaan Sintang saat usianya masih sangat muda. Ia seorang yang mumpuni. Ia berhasil menjalankan tugas dari Raja Sintang untuk mengamankan

kerajaan dari gangguan pengacau dan perampok. Ia lalu diangkat menjadi pembantu ayahnya yang saat itu menjabat Kepala Pemerintahan kawasan Melawi. Selepas ayahnya wafat pada 1845, ia diangkat kepala pemerintahan Melawi meneruskan kedudukan ayahnya. Karena jabatannya itu Abdul Kadir mendapatkan gelar Raden Tumenggung.

Abdul Kadir menjadi pemimpin yang baik. Ia berhasil mempersatukan suku-suku Dayak dengan Melayu serta dapat mengembangkan ekonomi Melawi. Oleh karena itulah, pemerintah kolonial Belanda ingin menguasai Melawi. Karena Melawi adalah bagian dari kerajaan Sintang yang tunduk pada Belanda, maka Abdul Kadir Raden Tumenggung terpaksa menjalankan siasat ganda, yaitu sebagai pejabat pemerintah Melawi ia tetap setia pada Raja Sintang yang berarti pula tunduk pada pemerintahan Belanda yang telah menguasai kerajaan Sintang. Akan tetapi, diam-diam ia juga menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda.

Pada 1868, Belanda memberi hadiah uang dan gelar Setia Pahlawan kepada Abdul Kadir Raden Tumenggung agar sikapnya melunak dan mau bekerjasama dengan Belanda. Akan tetapi, ia tidak mengubah sikap dan pendiriannya. Ia tetap melakukan persiapan untuk melawan pemerintahan Belanda. Di daerah Melawi sering terjadi gangguan keamanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh pengikut Abdul Kadir Raden Tumenggung. Belanda segera melancarkan operasi militer ke daerah Melawi. Pertempuran tidak bisa dihindari antara pasukan Belanda melawan pengikut Abdul Kadir Raden Tumenggung. Dalam menghadapi Belanda, Abdul

Kadir tidak memimpin pertempuran secara langsung, melainkan ia hanya mengatur strategi perlawanan. Sebagai kepala pemerintahan Melawi, ia bisa memperoleh berbagai informasi tentang rencana-rencana operasi militer pemerintah Belanda. Berkat informasi itulah, para pemimpin perlawanan dapat mengacaukan operasi militer Belanda.

Kurang lebih selama 7 tahun [1868 sampai 1875], peran gandanya berhasil, hingga pada akhirnya Belanda berhasil menangkap Abdul Kadir. Ia kemudian dimasukkan ke penjara benteng Saka Dua di Nanga Pinoh. Tiga minggu kemudian, ia meninggal dunia. Jasadnya kemudian dikebumikan di Natai Mungguk Liang, daerah Melawi.

Perjuangan Abdul Kadir dalam melawan penjajah Belanda menjadi contoh bagi perlawanan rakyat selanjutnya. Atas jasanya dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, 124 tahun selepas kematiannya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada Abdul Kadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan.

Fatmawati



Lahir: Bengkulu 5 Februari 1923| **meninggal:** Kuala Lumpur 14 Mei 1980| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 118/TK/2000| **tanggal penetapan:** 4 November 2000

■ Sang Penjahit Bendera Pusaka

Di hari bersejarah itu, semua menunggu dengan tidak sabar. 17 Agustus 1945, pemuda dan tokoh bangsa telah berkumpul di Pegangsaan Timur. Tiang bendera telah dipersiapkan. Fatmawati bergegas mengambil selemba bendera yang telah ia siapkan. Bendera itu dijahitnya sendiri setelah sebelumnya menerima kain dari salah seorang pemuda. Ia kembali menuju tiang bendera. Tidak lama kemudian lagu Indonesia Raya berkumandang meski tanpa alunan musik. Semua yang hadir larut dalam perasaan haru. Air mata Fatmawati seketika mengalir penuh kebanggaan tatkala pandangannya tertuju ke langit menyaksikan bendera merah putih yang dijahitnya berkibar. Ia tidak menyangka hasil karyanya menjadi kenangan bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Fatmawati bernama asli Fatimah, anak pasangan Hassan Din dan Siti Chadijah. Ayahnya tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Ia menempuh pendidikan dasarnya di HIS [*Hollandsch Inlandsche School*] dan kemudian melanjutkan ke sekolah kejuruan yang dikelola oleh sebuah organisasi Katolik. Minat berorganisasi telah ada sejak Fatmawati duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu ia sudah aktif berorganisasi sebagai anggota pengurus Nasyiatul Aisyiah, sebuah organisasi yang bernaung di bawah Muhammadiyah.

Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno. Pernikahan ini dilangsungkan di Jakarta dalam situasi yang memprihatinkan dan kondisi yang serba tidak menentu. Untuk mendampingi sang suami, Fatmawati pun meninggalkan kampung halamannya dan selanjutnya menjalani hidup barunya di Jakarta.

Ia ikut menanggung pahit getirnya menjadi istri Soekarno. Kekalahan Jepang di setiap pertempuran mulai terdengar sekitar pertengahan Agustus 1945. Puncaknya ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada 14 Agustus. Bung Karno dan Bung Hatta yang kala itu dituding sebagai kolaborator Jepang membuat Fatmawati menghadapi masalah yang sangat pelik. Sebagai seorang nasionalis sejati, Fatmawati yakin suaminya tidak mungkin mengkhianati perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi ia pernah menyaksikan saat Soekarno mengajaknya untuk mengikuti sidang *Dokuritu Zyumbi Tyoosakai* [Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat. Pada kesempatan itu, ia melihat betapa bersemangatnya Bung Karno saat menguraikan satu persatu sila-sila dari konsep Pancasila.

Pada 16 Agustus 1945, dini hari Fatmawati juga mendampingi Soekarno saat dibawa ke Rengasdengklok oleh pemuda. Tengah malam baru ia bersama-sama tokoh bangsa yang ada di rengasdengklok kembali ke Jakarta. Fatmawati yang telah menjahit bendera merah putih juga ikut serta dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan rumah kediamannya. Fatmawati beruntung menjadi salah satu pelaku sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Saat situasi Jakarta tidak aman, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Fatmawati juga dengan setia menemani sang suami saat meninggalkan kediaman mereka di Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk hijrah ke Yogyakarta. Fatmawati tinggal di istana Yogyakarta saat terjadi class kedua dan para tokoh negara dibuang ke luar Jawa.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Fatmawati menemani presiden kembali lagi ke Jakarta, menempati istana negara dan menjadi *first lady* negara Indonesia. Ia ikut melakukan kunjungan ke beberapa negara tetangga dalam rangka kunjungan kenegaraan. Setelah tidak lagi menjadi ibu negara saat bercerai dengan Soekarno, ia memilih keluar dari istana negara dan memilih tinggal di sebuah paviliun jalan Sriwijaya, berdekatan dengan Masjid Baitul Rachim. Fatmawati mengembuskan napas terakhirnya pada 14 Mei 1980 di General Hospital Kuala Lumpur usai menunaikan ibadah Umroh di Mekah. Jenazahnya segera diterbangkan ke Jakarta dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet, Jakarta. Atas jasa-jasanya pada negara, terutama peran pentingnya dalam menjahit bendera merah putih saat proklamasi, Fatmawati diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2000.

Ranggong Daeng Romo



Lahir: Sulawesi Selatan 1915| **meninggal:** Langgese 27 Februari 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 109/TK/2001| **tanggal penetapan:** 3 November 2001

■ Pemimpin Laskar Pemuda se-Sulawesi Selatan

Di Polongbangkeng Laskar Pemuda se-Sulawesi Selatan berkumpul. Mereka berembuk, berdiskusi guna menyatukan satu visi-misi, dan terbentuklah Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Ranggong Daeng Romo secara aklamasi didapuk menjadi pimpinan.

Ranggong Daeng Romo dilahirkan di kampung Bone-Bone, Polongbangkeng, Sulawesi Selatan pada tahun 1915. Setelah menempuh pendidikan di *Hollandsch Inlandsch School* dan Taman Siswa di Makassar. Saat pendudukan Jepang, Ranggong Daeng memasuki barisan pemuda Seinendan, tak lama kemudian ia diangkat menjadi pemimpin Seinendan di Bontokandatto. Setelah itu, ia bekerja sebagai pegawai sebuah perusahaan pembelian padi

milik pemerintah militer Jepang. Pada waktu itu pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang mengharuskan penduduk pribumi menyerahkan hasil panennya kepada tentara Jepang. Karena merasa tak tega, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya tersebut.

Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia didengungkan pada 17 Agustus 1945, telah direncanakan pembentukan pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Namun sayang, sebelum pemerintahan itu terbentuk, tentara Jepang telah terlebih dahulu dilucuti oleh pasukan Australia pada akhir September 1945. Kedatangan pasukan dari negeri kangguru tersebut juga dibarengi dengan aparat pemerintah Belanda yang bernama NICA (*Nederlandsch Indosche Civiel Adminitration*). NICA membawa misi kembali menguasai wilayah Indonesia.

Saat itu banyak laskar-laskar pemuda Sulawesi Selatan terbentuk. Salah satunya adalah Gerakan Muda Bajeng (GMB), yang didirikan di Palekko Polongbangkeng pada pertengahan Oktober 1945, Ranggong Daeng Romo didapuk memegang pimpinan di bidang kemiliteran. Kemudian ia sering terlibat dalam sejumlah pertempuran melawan pasukan Belanda. Seperti pada Februari 1946, Ranggong memimpin serangan terhadap kedudukan Belanda di Pappa Takalar dan Bonto Cender. GMB kemudian berganti nama menjadi Laskar Lipan Bajeng, kali ini Ranggong Daeng Romo dipilih sebagai pemimpin tertinggi.

Pengorganisasian laskar pemuda Sulawesi Selatan cukup rapih. Pada 17 Juli 1946 para pimpinan laskar berkumpul di Polongbangkeng

untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh Pajonga Daeng Ngalie. Hasil pertemuan tersebut mencetuskan ide pembentukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Ranggong Daeng Romo kembali dipercaya memimpin laskar gabungan organisasi-organisasi perjuangan se-Sulawesi Selatan tersebut.

Terbentuknya LAPRIS memaksa Belanda meningkatkan operasi-operasi militer dan mendatangkan pasukan khusus di bawah komando Kapten Raymond Westerling pada Desember 1946. Pasukan khusus ini dikenal kejam dan tak segan membunuh rakyat. Secara diam-diam, untuk membantu perjuangan para pemuda Makassar, beberapa kesatuan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Mereka lalu mengadakan pertemuan bertempat di Pacekke untuk membentuk sebuah divisi pasukan baru yang dinamakan Divisi Hasanudin pada awal bulan Januari 1947. Agar pertemuan tersebut berjalan sukses, Ranggong Daeng Romo memancing pasukan Belanda untuk bertempur pasukan Belanda di tempat lain.

Bentrok semakin kerap terjadi antara LAPRIS versus tentara Belanda di selatan Makassar. Pada 23 Januari 1947 meletus pertempuran di Batua. Dalam peristiwa tersebut, banyak tokoh Lapris yang terbunuh atau tertangkap. Saat markas besar LAPRIS di Langgese diketahui Belanda, Ranggong Daeng merencanakan memindahkan markas ke tempat lain yang lebih aman untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa. Akan tetapi, pada 27 Februari 1947, Ranggong Daeng Romo bersama pasukannya dikepung. Ia akhirnya tewas dalam pertempuran dan dikebumikan di Bangkala.

Brigadir Jenderal Hasan Basry



Lahir: Kandangan 17 Juni 1923 | **meninggal:** Jakarta 15 Juli 1984 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 110/TK/2001 | **tanggal penetapan:** 3 November 2001

■ Bapak Gerilya Kalimantan

Pada 30 Oktober 1945, selepas dua bulan proklamasi, Hasan Basry menyusup pulang ke Kalimantan Selatan menumpang kapal Bintang Tulen yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Tujuannya satu, menyebarkan berita proklamasi. Saat tiba di Banjarmasin, ia segera menemui teman-temannya dan menyebarkan pamflet serta poster kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi akhirnya berkumandang di Kalimantan

Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di *Hollands Inlandsche School* (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di *Kweekschool* Islam Pondok Modern di

Ponorogo, Jawa Timur. Setelah proklamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang.

Ia lalu kembali ke Kalimantan dan memimpin Lasykar Syaifullah di Haruyan yang berdiri 5 Mei 1946. Pada 24 September 1946, saat acara pasar malam amal banyak tokoh Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itulah, Hassan Basry mengoordinasi kembali anggota yang tersisa dengan membentuk laskar Benteng Indonesia.

Pada tanggal 15 November 1946, beberapa perwira ALRI Divisi IV Mojokerto menghubungi Hassan Basry untuk membentuk satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI ini. Ia menempatkan markasnya di Haruyan dan berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.

Akibat perjanjian Linggarjati [25 Maret 1947], Kalimantan menjadi milik kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian ini, ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville [17 Januari 1948]. Ia menolak memindahkan pasukannya ke wilayah RI, yakni Jawa. Ia bahkan semakin berani dengan memproklamasikan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia pada 17 Mei 1949.

Perjuangannya berhasil, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, yang berarti mengakui Kalimantan sebagai bagian dari RI. Kesatuan tentara yang dipimpinnya dileburkan ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat. Ia lalu ditunjuk sebagai panglimanya dengan pangkat Letkol. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al Azhar pada 1951 hingga 1953 dan meneruskan ke University Cairo tahun 1953 hingga 1955.

Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1956, Hassan Basry dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21/Komandan Territorial VI Kalsel. Pada tahun 1959, ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer X Lambung Mangkurat. Pada tahun 1961 hingga 1963, ia menjabat Deputy Wilayah Komando antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Saat peringatan Proklamasi Kalimantan, ia lalu diangkat menjadi Bapak Gerilya Kalimantan yang ditetapkan pada 20 Mei 1962. Ia kemudian pindah ke Jakarta dan berturut-turut menjadi anggota MPRS [1960 – 1966] dan anggota DPR [1978 – 1982].

Dua tahun selepas masa tugasnya di DPR berakhir, Hassan Basry meninggal di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Ia lalu dibawa ke Kalimantan dan dimakamkan di Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan secara militer. Atas jasa-jasanya, pemerintah memberi gelar Pahlawan nasional pada Bapak Gerilya Kalimantan ini pada 2001.

Gusti Pangeran Harya Jatikusumo



Lahir: Surakarta 1 Juli 1917| **meninggal:** Jakarta 4 Juli 1992| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 73/TK/2002| **tanggal penetapan:** 6 November 2002

■ Pejuang dari Kraton Solo

Ia tumbuh dalam bayang-bayang epos Pangeran Diponegoro yang heroik. Ia juga terlatih naik kuda dan bisa pencak silat. Dunia militer selalu menyertai angan-angannya. Akan tetapi, selepas dewasa dan sang ayah, Paku Buwono X, memintanya masuk Akademi Militer Breda di Negeri Belanda, ia tegas menolak. Mengapa? Karena setiap perwira yang lulus dari sana, harus mengangkat sumpah setia pada Sri Ratu dan konstitusi Negeri Belanda. Padahal Belanda adalah musuh kaum pribumi seperti dirinya.

Goesti Pangeran Harjo Djatikusumo bernama kecil Subandono yang lahir di kedaton Surakarta. Mula-mula ia belajar di *Europesche Lagere School* [ELS] Solo pada 1921 hingga 1931. Lalu melanjutkan

pendidikan ke sekolah lanjutan *Hogere Burger School* di Bandung. Lima tahun berikutnya ia studi di *Instituut Technologie Delf* Belanda hingga 1939. Selama pecah perang dunia kedua, ia kembali pulang ke tanah air dan melanjutkan studi di THS Bandung hingga tahun 1941.

Dunia militer kembali muncul dalam benaknya saat ia memutuskan masuk *Corps Opleiding voor Reserve Officieren* (CORO) di Bandung. Ia menempuh pendidikan selama kurang dari delapan bulan, meski demikian ia berhasil meraih pangkat Kopral. Saat Jepang telah masuk, ia mengikuti pendidikan PETA di Solo. Setahun kemudian, ia bergabung di Bo'ei Giyugun Kanbu Renseitai, pendidikan calon perwira PETA di Bogor.

Setelah itu ia kembali ke Surakarta dan menjadi Komandan Batalyon BKR di Surakarta. Sejak 1 November 1945 sampai 1 Juni 1945, ia menjabat Panglima Divisi IV Tentara Republik Indonesia (TRI), bermarkas di Salatiga. Wilayah pertahanannya meliputi Keresidenan Pekalongan, Semarang, dan Pati. Pada Juni 1946 terjadi reorganisasi di jajaran tentara. Ia ditunjuk menjadi Panglima Divisi V. Wilayah teritorialnya meliputi Bojonegoro, Pati, dan Muncung. Divisi V disebut juga dengan Divisi Ronggolawe. Saat Agresi militer belanda tahun 1948 berkecamuk, ia telah menjadi kepala staf angkatan darat (KSAD) yang pertama. Sejak 1 Juli 1950 hingga 1 November 1952, ia telah menjadi perwira tinggi di Kementerian Pertahanan. Jabatannya Kepala Biro Perancang Operasi merangkap Kepala Biro Pendidikan Pusat.

Sejak 1 November 1952 sampai 13 Februari 1955, ia menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat [SSKAD] di Bandung. Lalu pindah menjadi Direktur Zeni Angkatan Darat (29 Februari 1955-24 Juni 1958) dan segera terlibat dalam penumpasan PRRI/Permesta. Dalam konfrontasi dengan Malaysia, ia menjadi penasihat presiden dalam urusan konfrontasi. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, ia dikirim ke Maroko untuk menjadi duta besar kemudian ke Prancis. Kemudian di masa Orde Baru, ia menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan orang dekat presiden Soeharto dalam wadah Tim Penasihat Presiden mengenai Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila [Tim P-7]. Ia meninggal di Jakarta dalam usia 75 tahun dan dimakamkan di Wonogiri Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya dalam bidang militer dan perjuangan bangsa, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada 2002.

Andi Jemma



Lahir: Palopo 15 Januari 1901 | **meninggal:** Makassar
23 Februari 1965 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar**
penetapan: Keppres No. 73/TK/2002 | **tanggal**
penetapan: 6 November 2002

■ Datu yang cinta Republik Indonesia

Ia seorang raja yang nasionalis. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia segera mengeluarkan pernyataan bahwa kerajaan Luwu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada September 1945, Ia memprakarsai pertemuan raja-raja Sulawesi Selatan di Watampone untuk mendukung Indonesia. Belanda yang datang kembali ke Luwu begitu marah terhadapnya. Dia adalah Andi Jemma.

Andi Djemma merupakan anak pemimpin kerajaan Luwu yang telah dikuasai Belanda sejak 1906. Sebagai calon datu [raja], ia mempelajari segala hal tentang pemerintahan dan tradisi kerajaan dari sang ibu serta pejabat-pejabat tinggi istana. Pada tahun 1919, ia memegang jabatan setingkat wedana di Kolaka. Amanah itu

diembannya hingga tahun 1923. Setelah itu ia kembali ke kota kelahirannya—Palopo—dan dipersiapkan untuk menjadi datu.

Pada tahun 1935, saat ibunya meninggal dunia, golongan pro-Belanda berusaha menghalang-halangi pengangkatan Andi Djemma sebagai datu Kerajaan Luwu. Namun, karena dukungan dari rakyat Luwu, usaha itu pun berhasil digagalkan. Andi Djemma akhirnya diangkat menjadi datu. Selama menjadi raja, organisasi kebangsaan dan agama seperti Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Muhammadiyah diberi banyak ruang di Kerajaan Luwu.

Sejak ia mendukung kemerdekaan RI, ia juga merestui pembentukan badan-badan perjuangan di Luwu. Badan-badan tersebut antara lain Pemuda Nasional Indonesia (PNI) dan Pemuda Republik Indonesia. Sementara itu, pada November 1945, pasukan Australia yang mewakili tentara Sekutu tiba di Palopo. Kedatangan mereka bermaksud untuk melucuti tentara Jepang. Pada mulanya hubungan antara pasukan Australia dan Andi Djemma berjalan tanpa masalah. Namun, belakangan masalah baru muncul saat pihak Australia atas desakan Belanda melarang pengibaran bendera Merah Putih.

Andi Djemma mengeluarkan ultimatum untuk mengusir tentara Belanda dalam waktu 2 kali 24 jam. Belanda tidak mengindahkan ultimatum dan terjadilah pertempuran dalam kota pada 23 Januari 1946. Akhirnya Belanda dapat menguasai kota Palopo setelah mendatangkan jumlah pasukan yang jauh lebih besar.

Andi Djemma segera meninggalkan kota Palopo menuju

Sulawesi Tenggara lalu membangun pusat pemerintahan di sebuah desa bernama Latou atau Benteng Batuputih. Tempat ini cukup strategis dan sulit untuk dijangkau musuh. Di benteng ini, dibentuklah sekelompok pasukan yang diberi nama Pembela Keamanan Rakyat (PKR) Luwu pada Maret 1946 dan beranggotakan semua unsur perlawanan bersenjata.

Keberadaan Andi Djemma akhirnya diketahui Belanda. Pada Mei 1946, Belanda mencoba merebut Batu putih melalui jalan laut namun usaha itu mengalami kegagalan. Akan tetapi, di luar dugaan pasukan PKR, Belanda berhasil memasuki benteng Batu putih dari arah belakang melalui jalan yang sulit ditempuh. Andi Djemma segera ditahan di Palopo lalu dipindah ke Selayar. Ia pun harus menjalani pengasingan di Ternate, setelah hukuman dijatuhkan pada 3 Juli 1948.

Selepas Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Andi Djemma dibebaskan. Ia lalu ke Makassar pada Maret 1950. Presiden Soekarno pun memercayakan Pemerintahan Swapraja Luwu kepadanya. Pada 23 Februari 1965, dalam usia 64 tahun, Andi Jemma menutup mata untuk selama-lamanya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Penaikang dengan upacara militer. 37 tahun setelah kematiannya, pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pong Tiku



Lahir: Toraja 1846| **meninggal:** Tana Toraja 10 Juli 1907|
gelar: Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres
No. 73/TK/2002| **tanggal penetapan:** 6 November 2002

■ Pemimpin Adat Memilih Mati Bermartabat

Pada tahun 1905, Belanda melakukan ekspedisi militer untuk menguasai wilayah-wilayah Sulawesi Selatan. Bangsa kolonial tersebut berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan, antara lain Bone, Gowa, dan Datu Luwu. Merasa hebat, komandan militer Belanda di Palopo lalu mengirim surat kepada Pong Tiku. Isi surat tersebut yakni meminta agar Pong Tiku melaporkan diri dan menyerahkan semua senjatanya kepada Belanda.

Pemimpin Panggala tersebut menolak, ia memilih bertempur untuk mempertahankan kedaulatan rakyatnya. Pecahlah pertempuran Belanda *versus* Pong Tiku. Tertanggal 12 Mei 1906, serangan perdana Belanda dilancarkan ke Panggala, namun serangan

itu gagal. Mencoba kembali di bulan berikutnya, kegagalan kembali didapat Belanda ketika melakukan penyerangan terhadap benteng pertahanan Buntuasu.

Dua kegagalan tersebut membuat Belanda menambah jumlah pasukan dan persenjataannya kemudian merengsek masuk sekaligus melakukan blokade di wilayah Panggalan. Pong Tiku beserta bala-balanya memanfaatkan kondisi alam di daerah untuk menahan pasukan Belanda. Batu-batu berukuran besar digelindingkan bila pasukan berusaha memanjat bukit-bukit karang menuju benteng. Akan tetapi, Belanda yang berbekal peralatan perang jauh lebih lengkap dan modern menyebabkan peperangan tak seimbang. Gempuran meriam secara bertubi-tubi merusak bangunan benteng sehingga Pong Tiku pun terpaksa mengosongkan beberapa benteng. Akan tetapi, benteng Buntubatu yang merupakan benteng utama sekaligus markas Pong Tiku belum berhasil dikuasai Belanda sampai bulan Oktober 1906.

Belanda kemudian menawarkan perdamaian kepada Pong Tiku. Akan tetapi, tawaran itu ditolaknya dan ia hanya bersedia mengadakan gencatan senjata. Hal itu bertujuan agar ia dapat menghadiri upacara pemakaman jenazah orangtuanya secara adat. Pada saat masa gencatan senjata, Pong Tiku pun meninggalkan benteng Buntubatu. Kesempatan itu langsung digunakan pihak Belanda untuk memasuki benteng tersebut.

Rampung menghadiri pemakaman jenazah orang tuanya, Pong Tiku kemudian menuju benteng Alla. Di sana telah berkumpul para pejuang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Benteng Alla pun

diserang Belanda pada tanggal 12 Maret 1907. Akibat serangan itu puluhan pejuang gugur dan ditawan. Namun, Pong Tiku berhasil menyelamatkan diri. Belanda melakukan pengejaran hingga akhirnya ia berhasil ditangkap di Lilikan pada awal bulan Juli 1907. Setelah berhasil ditangkap, ia kemudian dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya mengakui kekuasaan Belanda. Pong Tiku pun ditembak mati Belanda di tepi Sungai Sa'dan karena ia menolak tanda tangan.

Begitu heroik kisah perjuangan Pong Tiku, pejuang dari Tana Toraja yang rela mati ketimbang mengakui kekuasaan Belanda. Sebagai pemimpin adat ia memilih meninggal bermartabat. Atas perjuangannya, putra Toraja kelahiran 1846 tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tanggal 6 November 2002

Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri



Lahir: 31 Mei 1899| **meninggal:** 27 November 1971|
gelar: Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres
No. 73/TK/2002| **tanggal penetapan:** 6 November 2002

■ Wartawan, politikus, dan pendidik Indonesia

Perjuangan tak sekadar dilakukan di medan tempur namun bisa melalui segala bidang. Mulai dari pemerintahan, partai politik, dunia usaha, hingga pendidikan. Keyakinan ini dipegang teguh oleh Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri. Rampung masa kerjanya sebagai menteri, ia membaktikan diri dalam dunia pendidikan. Melalui pendidikan generasi muda, ia berkeinginan membangun masa depan bangsa agar menjadi lebih maju untuk mewujudkan kesejahteraan.

Iwa Kusumasumantri lahir di Ciamis, 31 Mei 1899 dan meninggal dunia tanggal 27 November 1971. Setamat dari OSVIA (*Opleiding School voor Indische Ambtenaren*) di Bandung, ia merantau

ke Jakarta untuk melanjutkan studi bidang hukum di *Recht School*. Lulus pada tahun 1921, setahun kemudian ia bertolak ke Nederland untuk mendalami ilmunya di Universitas Leiden. Di negeri induk Hindia Belanda Iwa bergabung dengan organisasi mahasiswa Indonesia, *Indische Vereniging*. Ia menjadi anggota berpengaruh dalam organisasi tersebut. Atas usulannya pula *Indische Vereniging* kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI), Iwa didapuk menjadi ketuanya dengan masa jabatan satu tahun (1923-1924). Kesuksesan Iwa dalam PI dirasa wajar, sebab semenjak pelajar ia memang dikenal aktif berorganisasi. Ia pun pernah menjadi anggota Tri Koro Darmo, sebuah organisasi pemuda Jawa, cikal bakal Jong Java. Setahun menggalang PI, ia berhasil menegaskan bahwa PI berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui persatuan seluruh bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. PI semasanya menegaskan diri sebagai organisasi nonkooperasi, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.

Setelah 5 tahun bermukim di negeri kincir angin, pada tahun 1927 Iwa kembali ke tanah air. Ia mempraktikkan keterampilan hukumnya dengan membuka kantor pengacara di Bandung, Jakarta, dan Medan. Ia juga menerbitkan surat kabar *Matahari Indonesia*, untuk membela nasib rakyat atau buruh kecil melalui media. Iwa merasa perlu melakukan pembelaan buruh karena kerap kali mendapat perlakuan tidak manusiawi. Karena kepeduliannya terhadap nasib burh, Iwa kemudian diangkat menjadi Penasihat Persatuan Montir dan Pekerja Bengkel (Persatuan Motoris Indonesia). Pada Juli 1929, Iwa ditangkap karena tulisan-tulisannya dalam *Matahari Indonesia* dianggap terlalu tajam mengkritisi Pemerintah Hindia Belanda. Hampir setahun ia

tinggal mendekam di penjara Medan, lalu dipindahkan ke Batavia untuk diasingkan ke Bandaneira. Akhir Februari 1941, Iwa diangkut dari Bandaneira menuju bui di Makassar.

Setelah kemerdekaan, Iwa mendapat kepercayaan sebagai Menteri Sosial dalam kabinet presidential pertama. Jabatan tersebut hanya dipegangnya selama tiga bulan karena sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem parlementer pada November 1945. Iwa kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka yang menentang politik pemerintah yang bersedia berunding dengan Belanda. Pada 3 Juli 1946, beberapa tokoh Persatuan Perjuangan memaksa Presiden Soekarno untuk menandatangani konsep yang mereka buat tentang perubahan pemerintahan. Tindakan tersebut dianggap sebagai usaha merebut kekuasaan. Iwa pun ditangkap dan dipenjarakan bersama beberapa tokoh Persatuan Perjuangan lainnya seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Chaerul Saleh dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka baru dibebaskan pada Agustus 1948.

Setelah menjalani hukuman, pasca pengakuan kedaulatan RI, Iwa kembali dipercaya duduk dalam jajaran pemerintah sebagai anggota DPR pada periode RIS. Iwa diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Ali Sastromidjojo hingga tahun 1959. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, ia mulai berkecimpung dalam dunia pendidikan hingga menjadi Rektor Universitas Pajajaran, Bandung. Ketika menjalani profesinya sebagai seorang akademisi, Iwa terbilang produktif dalam menulis buku, antara lain; *Revolusi Hukum di Indonesia*, *Sejarah Revolusi Indonesia* (3 jilid), dan

Pokok-pokok Ilmu Politik. Karena masih produktif, pada tahun 1961 jabatan sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pun dipercayakan padanya. Ia juga merangkap sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Iwa Kusumasumantri dalam usia 72 tahun.

Nani Wartabone



Lahir: 30 Januari 1907| **meninggal:** Gorontalo 3 Januari 1986| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2003| **tanggal penetapan:** 6 November 2003

■ Sang Pejuang Sejati

"Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dan penjajahan bangsa mana pun juga." ~Nani Wartabone~

Ayahnya merupakan seorang aparat pemerintah Hindia belanda, sedangkan ibunya keturunan bangsawan. Kehidupan dan latar belakang kedua orangtuanya yang tergolong wah itu memudahkan Nani Wartabone mengenyam pendidikan. Saat ibunya sakit keras dan dibawa berobat ke Surabaya, Nani turut mendampingi dan bersekolah di sana. Di kota pahlawan tersebut ia juga aktif bergaul

[365]

dan kerap mengikuti pertemuan. Hasilnya, ia mulai pun mendirikan dan menjadi sekretaris *Jong Gorontalo* di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua PNI Cabang Gorontalo.

Semangat nasionalisme terus ada dalam diri Nani Wartabone setelah ia kembali ke Gorontalo. Pada tahun 1942, ia memimpin pemuda untuk pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Belanda sebelum tentara Jepang tiba. Ia memproklamirkan Gorontalo merdeka di bawah negara Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Setahun berikutnya, ia ditangkap dan diadili, atas tuduhan-tuduhan menyiapkan pemberontakan. Nani kemudian dibuang ke Manado. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, ia dibebaskan. Jepang menyerahkan pemerintahan Gorontalo kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo, ia merekrut sekitar 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan. Mereka dibekali senjata hasil rampasan dari Jepang.

Akan tetapi, setelah *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA) memasuki Gorontalo dengan membonceng sekutu, pemerintahan sipil dari Belanda tersebut menganggap Nani sebagai ancaman. Nani kemudian diundang oleh NICA untuk berunding pada 30 November 1945 di sebuah kapal perang Sekutu di pelabuhan Gorontalo. Di kapal tersebut, ia lalu ditawan dan dibawa ke Manado. Tanggal 2 Februari 1950, ia kembali menginjakkan kakinya di Gorontalo. Saat bentuk pemerintahan Indonesia menjadi serikat, ia menolak Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurutnya, RIS hanyalah pemerintahan boneka dari pemerintah Belanda. Ia

kemudian kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950. Tujuan rapat tersebut tidak lain untuk menolak RIS dan bergabung dengan NKRI.

Pada periode ini hingga tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya kepala pemerintahan di Gorontalo, menjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Namun, kemudian ia melepas semua jabatan pemerintah dan memilih tinggal di desanya, Suwawa. Di sini ia kembali berladang dan memelihara ternak lainnya.

Pada Maret 1957, Gorontalo ikut bergejolak setelah Letkol Ventje Sumual memproklamkan pemerintahan PRRI/PERMESTA di Manado. Karena pemberontakan tersebut, Nani Wartabone “turun gunung” dan kembali memimpin rakyat untuk merebut kembali kekuasaan PRRI/PERMESTA di Gorontalo. Namun, karena kalah jumlah dan persenjataan, ia bersama bala pasukannya terpaksa masuk ke hutan dan melakukan gerilya. Dalam perlawanan gerilya tersebut, pasukan Nani dikenal dengan nama Pasukan Rimba. Kondisi berbalik pada tahun 1958, dengan datang bantuan pasukan tentara dari Batalyon 512 Brawijaya dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin. Akhirnya, Gorontalo berhasil dibebaskan dari pemberontakan PRRI/PERMESTA pada pertengahan Juni 1958.

Paska pemberontakan PRRI/PERMESTA, Nani sempat diangkat menjadi Residen Sulawesi Utara, tetapi kemudian ia memilih menjadi rakyat biasa di Suwawa hingga meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1986.

Maskoen Soemadiredja



Lahir: Bandung 25 Mei 1907 | **meninggal:** Jakarta 4 Januari 1986 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 89/TK/2004 | **tanggal penetapan:** 5 November 2004

■ Penyebar Nasionalisme Indonesia di Australia

Boven Digul, Papua. Sebuah kamp yang dibuat terburu-buru oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menampung tawanan Pemberontakan PKI tahun 1926. Selanjutnya Digul digunakan sebagai tempat pembuangan sekitar 1.308 aktivis pejuang kemerdekaan. Lokasi Digul terkenal seram dan mengerikan untuk para tahanan politik waktu itu, karena kondisi alamnya yang masih liar sehingga tidak sedikit para tahanan yang jatuh sakit dan meninggal di bui Bumi Papua tersebut. Salah seorang yang pernah merasakan “keangkeran” Digul adalah Maskoen Soemardiredja.

Maskoen lahir dari pasangan Raden Umar Soemadiredja dan Nyi Raden Umi pada tanggal 4 Januari 1907 di Bandung. Ia

memulai langkah perjuangan dengan bergabung pada sebuah partai politik bentukan Soekarno yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). Selama di PNI, Maskoen dipercaya sebagai komisaris serta sekretaris II PNI cabang Bandung.

Kegigihannya mengobarkan semangat nasionalisme melalui aksi membuat gerak-geriknya diawasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada akhirnya karena dianggap meresahkan, ia dipenjarakan pada 1929 di sel Banceu, Bandung bersama Suekarno, Gatot Mangkoepraja, dan Suhada. Ia sempat menghirup udara bebas namun hanya beberapa bulan sampai akhirnya harus menjalani hukuman kurungan kembali di tahun 1930. Kali ini ia bersama Ir. Soekarno, Gatot Mangkoepraja dan Soepridinata dikirim ke penjara Soekamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kemudian mereka diangkut ke Boven Digul, Papua.

Pada tahun 1942 saat Jepang menguasai Irian Barat, Maskoen ikut dilarikan ke Australia. Di negeri Kanguru tersebut, ia kembali mengobarkan semangat nasionalisme dengan membentuk organisasi Serikat Indonesia Baru. Pada bulan Februari 1946 ia menolak dipulangkan ke tanah air karena pemerintah Hindia Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Baru pada tahun 1949, Maskoen mau kembali ke tanah air karena Indonesia sudah resmi diakui kedaulatannya. Pemulangan orang-orang Indonesia di Australia atas prakarsa pemerintah Australia, Maskoen pun menjadi korlap.

Setelah kembali ke tanah air, ia beberapa kali memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Ia pensiun saat menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Di masa

tuanya ia sakit dan meninggal pada tanggal 4 Januari 1986. Maskoen kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemerintah Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Tahun 2004.

Andi Mappanyukki



Lahir: Jongaya Makasar 1885 | **meninggal:** Jongaya Makassar 18 April 1967 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 89/TK/2004 | **tanggal penetapan:** 5 November 2004

■ Raja Bone yang Setia dengan Republik Indonesia

Dia dengan tegas menentang Belanda. Ia berujar tegas, *“Aku tidak buta dengan mentega dan mulutku tidak dapat ditutup dengan roti, dan tidak bisa menjadi licin dengan susu”*. Kata-kata itu menyindir Belanda yang berusaha membujuknya untuk tunduk pada Belanda. Ia tetap tegas menolak Belanda meski harus diturunkan dari tahta dan diasingkan dari kerajaannya.

Andi Mappanyukki merupakan putra Makkulau Daeng Serang Karaengta Lembang Parang Sultan Husain Tu Ilang ri Bundu’na, Raja Gowa ke-34. Ibunya bernama Cella We’tenripadang Arung Alita, putri tertua dari La Parenrengi Paduka Sri Sultan Ahmad, raja Bone. Ia telah dilantik menjadi Datu Lolo ri Suppa [penguasa Suppa] pada 2 Juli 1903 saat usianya baru 18 tahun.

[371]

Sejak berusia 20 tahun, ia telah mengangkat senjata berperang melawan kolonial Belanda. Perang yang dilakukan di masa muda itu tatkala mempertahankan pos pertahanan kerajaan Gowa di daerah Gunung Sari. Saat itu memang telah terjadi perang Gowa-Belanda pada tahun 1906. Perang ini berakhir dengan tertawannya La Mappanyukki dan diasingkan ke Selayar selama tahun 1907 hingga 1909. Karena itulah, ia juga terkenal dengan sebutan Datu Silaja.

Pada 12 April 1931, atas usulan dewan adat, La Mappanyukki dilantik menjadi Mangkau [raja] Bone ke-32. Dalam khutbah shalat Jumat namanya disebut Sultan Ibrahim, sehingga ia bernama lengkap Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. Ia mendapatkan warisan kerajaan dari garis ibunya yang memang keturunan raja Bone.

Pendiriannya tetap sama. Ia tidak senang dengan Belanda. Bahkan saat Jepang telah meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali ke Sulawesi, pendirian pemimpin Bone ini tetap sama. Saat proklamasi berkumandang di Jakarta, segera La Mappanyukki dengan tegas menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Belanda berusaha membujuknya untuk berubah sikap, tetapi tidak berhasil.

Karena menolak bersekutu dengan Belanda, maka ia diturunkan secara paksa dari takhtanya sebagai raja Bone oleh tentara Belanda, kemudian diasingkan bersama keluarganya selama 3,5 tahun di Rantepao, Tana Toraja. Ia baru dibebaskan sejak Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan kembali ke Bone. Pada tahun 1957, La Mappanyukki menjadi pemimpin Kabupaten Bone. Setelah sampai masa jabatan dan pensiun, maka kembalilah ia ke Jongaya.

Di tempat kelahirannya itulah ia meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Ia tidak dikebumikan di pemakaman raja-raja Gowa atau Bone, tetapi oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia, ia dimakamkan di Taman makam Pahlawan Panaikang Makassar dengan upacara kenegaraan. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional pada Andi Mapanyukki pada 2004.

Raja Ali Haji



Lahir: Selangor 1808| *meninggal:* Kepulauan Riau 1873|
gelar: Pahlawan Nasional| *dasar penetapan:* Keppres No.
89/TK/2004| *tanggal penetapan:* 5 November 2004

■ Dari Dia, Lahir Bahasa Indonesia

Saat menyebut sastra klasik era Pujangga Lama, orang pasti akan teringat sebuah gurindam masyur, *Gurindam Dua Belas*. Dialah penciptanya. Tetapi ada yang lebih berkesan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berkat Buku karyanya bertajuk *Kitab Pengetahuan Bahasa*, lahirlah bahasa nasional Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928.

Dialah R.A.H., singkatan nama dari Raja Ali Haji. Ia sastrawan dan ulama besar Bugis Melayu putra Raja Ahmad bergelar Engku Haji Tua. Ibunya bernama Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor. Ayahnya merupakan

orang pertama yang mengajari pendidikan dasar. Ia juga mendapatkan pendidikan dari lingkungan istana Kesultanan Riau-Lingga di Pulau Penyengat. Ia termasuk orang pertama yang mendapat pendidikan bidang agama, bahasa, dan sastra secara luas. Pada 1822, ia bersama ayahnya pergi ke Batavia dan berselang enam tahun berikutnya, mereka pergi ke Mekkah untuk menunaikan haji serta belajar bahasa Arab dan ilmu agama.

Dalam bidang pemerintahan, ia sudah dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang tergolong penting pada usia 20 tahun. Hingga usianya 32 tahun, ia bersama sepupunya, Raja Ali bin Raja Ja'far, dipercaya memerintah di daerah Lingga, mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang masih sangat muda. Dalam bidang yang digemarinya, sastra, Raja Ali Haji telah banyak menghasilkan karya. Ia tidak pernah meninggalkan ciri khasnya, yaitu mengakar pada tradisi kesusastraan Islam dan Melayu, juga kesungguhannya dalam menyajikan sejarah masa lalu.

Di usianya yang genap 65 tahun, Raja Ali Haji meninggal di Pulau Penyengat, Riau. Makamnya berada di komplek pemakaman Engku Putri Raja Hamidah. Persisnya, terletak di luar bangunan utama Makam Engku Putri. Karya Gurindam Dua Belas diabadikan di sepanjang dinding bangunan makamnya hingga setiap orang yang datang dapat membaca serta mencatat karya maha agung itu.

Atas jasa Raja Ali Haji dalam bidang kesusastraan Indonesia, pemerintah Indonesia melalui presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi gelar Pahlawan Nasional kepadanya, yang diumumkan tepat di hari peringatan hari pahlawan 10 November.

Kiai Haji Ahmad Rifai



Lahir: Kendal 13 November 1785/1786 | **meninggal:** Manado 11 Desember 1858 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 89/TK/2004 | **tanggal penetapan:** 5 November 2004

■ Ulama Kalisosok

pemerintah kolonial Belanda tiba-tiba merasa was-was dengan sosoknya. Rifai dengan berani menyebut Belanda sebagai kafir dan siapa yang menjadi pengikut Belanda hukumnya juga kafir. Pandangan ini seolah menjadi fatwa yang tersebar luas di Kalisasak. Belanda lalu mengutuknya “setan Kalisasak” dan orang-orang pribumi yang membenci menyebutnya “kiai sesat”. Akan tetapi, sang kiai telah memantapkan hatinya, ia tidak tersesat, hanya sangat benci dengan kolonial Belanda yang dianggapnya zalim. Ia menentang dengan jalan dakwah, memberi pencerahan pada kaum pribumi. Gerakan “*tarajumah*” Rifai semakin besar dan kolonial Belanda semakin gusar. Ia segera ditahan, dikucilkan, dan dibuang hingga jauh, tapi Rifai tidak pernah berhenti menentang Belanda.

[377]

Ahmad Rifa'i merupakan seorang ulama dari Tempuran Kendal. Ayahnya seorang penghulu di Kendal yang bernama Muhammad Marhum bin Abi Sujak Wijaya dan ibunya bernama Siti Rohmah. Ia telah menjadi yatim sejak usia enam tahun. Lalu diasuh oleh kakak perempuannya yang menjadi istri K.H. Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pesantren Kaliwungu. Sejak itu, ia nyantri di Kaliwungu. Ia belajar dengan tekun dan menjadi santri berbakat. Bahkan ia telah pula ikut berdakwah dalam tablig keliling.

Sejak itu, ia mulai memperkenalkan gerakan *tarajumah*. Sebuah gerakan perlawanan yang menekankan aspek keagamaan dan budaya lokal. Ia membuka kesadaran masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai kehidupan dan perjuangan. Sering kali ia menyinggung pemerintah colonial yang dikatakannya zalim lalu menyebutnya kafir. Ia semakin radikal dalam jalan yang dianggapnya benar. Akhirnya ia mendapat ancaman keras dari pemerintah. Ia dilarang berdakwah, hingga akhirnya ditangkap dan dipenjara.

Ia tidak menyerah untuk terus berjuang. Akan tetapi kali itu, ia menyingkir sementara. Selepas penjara pada 1826, gerakan Diponegara sedang berkobar, ia memutuskan pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan juga belajar agama. Ia tinggal di Mekah selama delapan tahun dan berguru dengan para ulama di sana. Selepas itu ia pergi ke Mesir selama 12 tahun untuk berguru pada penulis kitab Fathul Qarib, Syekh al Barowi dan Syekh Ibrahim al Bajuri.

Hampir 20 tahun ia berada di luar tanah airnya hingga ia memutuskan kembali ke Kendal dan memutuskan untuk meneruskan perjuangannya. Pertama kali, ia mengajar di pesantren Kaliwungu. Ia

menanamkan syariat Islam yang benar dan utuh serta menanamkan sikap anti colonial. Sang kiai kembali radikal dan akibatnya ia ditangkap kembali, diajukan dipengadilan dan dihukum buang ke Batang. Pada 1838, ia telah berada di Kalisasak. Di sana kemudian ia justru semakin berkembang. Ia membangun pesantren sendiri. Murid-muridnya berasal dari desa-desa sekitar. Ia menekankan Islam murni yang harus terbebas dari tradisi musyrik dan menekankan lagi bahwa Belanda adalah kafir dan orang-orang yang berada dalam pengaruhnya juga kafir. Di Kalisosok juga, ia menjadi penulis kitab yang produktif. Ia telah menulis puluhan kitab untuk para murid dan pengikutnya.

Lagi-lagi Belanda tidak suka dengan kegiatan Rifai di Kalisosok bahkan pejabat pribumi [yang dianggap Rifai juga kafir] menginginkan sang kiai dihukum. Pada 6 Mei 1859 secara resmi Rifai dipanggil Residen Pekalongan Franciscus Netscher untuk pemeriksaan dan dihukum buang ke luar Jawa, ke Ambon. Sejak itu ia tidak lagi diperbolehkan pulang dan menunggu keberangkatan ke Ambon via pelabuhan Semarang. Tiga belas hari berikutnya, ia sudah meninggalkan jemaah beserta para keluarganya menuju Ambon Maluku. Kepada keluarga juga para murid, ia selalu berpesan untuk tidak tunduk pada kolonial Belanda.

Setelah di Ambon, Ahmad Rifai bersama 46 ulama, termasuk Kiai Modjo dipindahkan ke kampung Jawa Tondano. Saat itu usianya telah tua dan ia tinggal menanti panggilan dari sang Robb dengan tenang. Di kampung Jawa Tondano itulah, Ahmad Rifai benar-benar mengembuskan napas terakhirnya dalam usia sepuh, 86

tahun. Jenazahnya dimakamkan dikomplek makam di sebuah bukit yang terletak kurang lebih 1 km dari kampung Jawa Tondano. Atas perjuangannya yang tanpa lelah menentang kolonial Belanda maka pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional pada kiai haji Ahmad Rifai pada 2004.

Gatot Mangkupraja



Lahir: Sumedang 25 Desember 1898 | **meninggal:** Bandung 4 Oktober 1968 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 89/TK/2004 | **tanggal penetapan:** 5 November 2004

■ Tokoh Pengusul PETA

Saat itu akhir bulan Desember 1929, ia bersama-sama dengan pemimpin PNI lainnya ditangkap polisi Belanda. Ia segera dibawa ke Bandung dan tinggal di penjara Banceuy. Ia masuk sel nomor tujuh sedang teman-temannya tersebar di sel yang berdekatan dengan dirinya. Penjara memang menyakitkan, disaat teman-temannya tertekan, ia lalu ceritakan dunia pewayangan, tentang tokoh-tokoh kesatria yang berjuang melawan musuh-musuhnya dengan gagah berani. Ia mencoba membangkitkan semangat kawan-kawannya lewat epos heroik wayang. Di masa Jepang, ia menulis surat pada Gunseikan [Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Hindia] untuk membentuk tentara pribumi terlatih. Hasilnya, selepas itu lahirlah PETA.

Gatot Mangkoepraja merupakan anak dari dr. Saleh Mangkoepraja, seorang dokter pertama dari Sumedang, Karier politik Gatot diawali saat ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI) yang berbasis di Belanda. Pada 4 Juli 1927 saat Partai Nasional Indonesia [PNI] resmi didirikan di Bandung, Gatot bergabung.

Pada 24 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda menganggap para tokoh PNI berbahaya dan mengeluarkan perintah untuk menangkap mereka. Akan tetapi, Gatot yang menemani Soekarno baru berhasil ditangkap di Yogyakarta 5 hari kemudian, yaitu pada 29 Desember 1929. Setelah penangkapan tersebut, Gatot dan beberapa orang lainnya, termasuk Ir. Soekarno, dimasukkan ke rumah tahanan Banceuy yang ada di Bandung. Mereka diadili dipengadilan dan Gatot dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.

Selepas dari penjara, Gatot bergabung dengan Partindo, tetapi setelah pemimpinnya [Soekarno] ditangkap kembali oleh pemerintah, Gatot akhirnya memilih bergabung dengan PNI Baru yang dipimpin oleh Syahrir dan Hatta. Pada saat pendudukan Jepang, Gatot sempat disertai tanggung jawab untuk memimpin gerakan 3A [Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia]. Akan tetapi, akhirnya Gatot dijebloskan ke penjara karena dianggap tidak kooperatif.

Pada tahun 1947, setelah sebelumnya sempat menjadi tahanan perang oleh tentara Inggris, Gatot mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota DPP PNI Yogyakarta. Kemudian, pada 1948, Gatot sempat menjabat sebagai Sekjen PNI. Jabatan sebagai Ketua Badan Koordinasi Gabungan Perjuangan Rakyat Indonesia di Jawa dan

Madura juga pernah dipercayakan padanya dari tahun 1948 hingga 1949. Setelah itu ia menjadi anggota DPR RI hasil pemilu 1955 dan anggota DPP PNI. Setelah peristiwa Gestapu tahun 1965, Gatot Mangkoepradja menyatakan dirinya masuk ke Partai IPKI [Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia]. Partai yang dibentuk sejak 20 Mei 1954 yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh militer Indonesia. Pada 4 Oktober 1968 Gatot Mangkoepraja meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum Sirnaraga Bandung. Atas jasa-jasanya, Gatot Mangkuepraja mendapat gelar pahlawan nasional pada 2004.

Ismail Marzuki



Lahir: Kwitang 11 Mei 1914 | **meninggal:** Tanah Abang 25 Mei 1958 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 89/TK/2004 | **tanggal penetapan:** 5 November 2004

■ Lagu dan perjuangan bangsa Indonesia

Ia seorang seniman besar. Pencipta lagu yang begitu cinta dengan kemerdekaan Indonesia. Ia memang tidak berjuang dengan mengangkat senjata, tapi dengan lagu ciptaannya. Saat revolusi fisik berkecamuk, ia ciptakan lagu *Selendang Sutra* untuk membangkitkan semangat juang dan lagu *Sepasang Mata Bola* untuk menggambarkan sebuah harapan dari rakyat untuk kemerdekaan. Kala kemerdekaan telah teraih, ia membubungkan lagi rasa cinta tanah air lewat gubahannya, *Indonesia Pusaka*. Setiap perayaan Proklamasi kemerdekaan, selain lagu *Indonesia Raya*, tidak sedikit yang akan mengingat syair lagunya, “Indonesia tanah air beta, Pusaka abadi nan jaya...”.

Komponis Betawi yang sering dipanggil Bang Ma'ing ini memang pencipta lagu dan musikus serba bisa. Ia menempuh pendidikan di HIS Idenburg Menteng, kemudian melanjutkan sekolah ke MULO di Jalan Menjangan Jakarta. Sebagai anak Betawi, ia juga memperoleh pendidikan Islam di Madrasah *Unwanul Wustha*.

Karier musiknya diawali sebagai anggota grup musik Lief Java pimpinan Hugo Dumas, sebuah orkes terkenal di zaman Belanda, yang pernah sempat melawat ke Malaya. Di masa-masa awal ini ia mencipta lagu *O Sarinah* yang menggambarkan kondisi kehidupan bangsa yang tertindas. Melalui lagu itu, ia memprotes kolonialisme Belanda. Pada 1934, ia ikut dalam siaran NIROM (*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschappij*). Dua tahun berikutnya, ia memimpin Orkes Studio Jakarta dan juga membentuk Orkes Studio Bandung hingga tahun 1937.

Pada masa pendudukan Jepang, Ismail aktif dalam orkes radio Jepang. Tembang-tembang ciptaannya seperti *Rayuan Pulau Kelapa*, *Sampul Surat*, dan *Karangan Bunga dari Selatan* lahir di zaman ini. Sementara di masa revolusi kemerdekaan, ia banyak mengubah lagu-lagu perjuangan untuk kaum pejuang kemerdekaan. Lagu-lagu perjuangan yang masyhur antara lain *Sepasang Mata Bola* (1946), *Melati di Tapal Batas* (1947), *Bandung Selatan di Waktu Malam* (1948), *Selamat Datang Pahlawan Muda* (1949).

Lagu-lagunya menggugah semangat perjuangan. Sekian tahun setelahnya masih didengarkan banyak orang. Kemerdekaan Indonesia harus diakui tidak lengkap tanpa lagu-lagu perjuangan gubahannya. Ia memberi nuansa tersendiri terhadap kemerdekaan

dengan syair-syair lagu-lagunya yang tajam menyentuh perasaan. Dengan kreativitasnya yang tinggi, selama rentang 27 tahun menjadi komponis, ia telah menciptakan lebih dari 200 lagu.

Setelah empat belas tahun menyaksikan kemerdekaan Indonesia, Ismail meninggal dunia di usia 44 tahun akibat penyakit TBC yang dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Karet Bivak Jakarta. 46 tahun setelah kepergiannya, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk jasa-jasanya dalam mendukung kemerdekaan Indonesia lewat lagu-lagu perjuangannya.

Kiras Bangun [Garamata]



Lahir: Karo 1852| **meninggal:** 22 Oktober 1942| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 82/TK/2005| **tanggal penetapan:** 7 November 2005

■ Si Mata Merah

Kiras Bangun menggalang kekuatan lintas agama di Sumatra Utara dan Aceh untuk menentang penjajahan Belanda. Ia tanpa henti terus berjuang. Mengumpulkan pasukan dalam jumlah banyak yang terkenal dengan julukan Pasukan Urung, pasukan kampung. Ia memang membentuk pasukan dari kampung-kampung di Tanah Karo. Ia kumpulkan para pejuang lalu membuat sumpah, “Kami bersumpah atas kata sepakat, bersumpah bersatu melawan Belanda, kalau mereka datang menjajah Tanah Karo...”. Seumur hidupnya ia terus melawan Belanda.

Kiras Bangun lahir dan dibesarkan dalam adat karo yang kental. Semasa muda ia berada di Binjai untuk belajar bahasa Melayu serta

aksara Karo. Dimasa muda itu pula ia telah menjadi pejuang. Ia sering melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat yang ingin dirampas oleh penjajahan kolonial Belanda yang menjajah bangsanya. Kiras juga gemar berkunjung dari satu kampung ke kampung lain dalam rangkaian silaturahmi kekeluargaan untuk terwujudnya ikatan kekerabatan warga Merga Silima serta terpeliharanya norma-norma adat budaya Karo dengan baik. Itulah kenapa ia sering menjadi juru damai perang antar desa. Dimasa muda ini pula, ia terkenal dengan julukan Garamata, yang berarti bermata merah.

Pada 1870, Belanda yang telah menduduki Sumatra Timur [Langkat] dan sekitar Binjai, ingin membuka perkebunan hingga ke Tanah Karo. Untuk itu Belanda berusaha menghubungi Kiras Bangun agar diperbolehkan masuk ke Tanah Karo guna membuka usaha perkebunan. Belanda telah menyediakan uang demi melancarkan permohonannya. Namun keinginan Belanda untuk memasuki Tanah Karo tetap ditolak. Keputusan ini diambil setelah dilakukan musyawarah dengan raja-raja Tokoh Karo yang lainnya.

Belanda tidak mengindahkan penolakan ini. Pada 1902, akhirnya pihak Belanda berhasil memasuki Tanah Karo dengan mengirim Guillaume bersama sejumlah serdadu Belanda sebagai pengawalnya. Melihat ini, Garamata memberikan peringatan pada pihak Belanda untuk segera meninggalkan Tanah Karo. Akan tetapi, Guillaume tidak mau beranjak. Situasi di Tanah Karo semakin memanas semenjak Guillaume dan sejumlah pengawalnya bersenjata lengkap menduduki Kabanjahe. Garamata

dan pengikutnya berupaya untuk menghimpun segenap kekuatan. Pertemuan Urung [kampung] segera diadakan dan memutuskan untuk mengusir Guillaume, setelah 3 bulan bermukim di Kabanjahe. Peristiwa pengusiran inilah yang menjadi puncak permusuhan dengan Belanda.

Perang besar segera meletus, Belanda menyiapkan banyak pasukan dan Garamata juga menghimpun pasukan Urung. Pasukannya beberapa kali terlibat pertempuran dengan tentara Belanda di Tanah Karo. Pada 1904, Garamata dan pasukannya mengadakan perang terbuka menghadapi Belanda di desa Lingga, Batu Karang, Negeri dan Liren. Di tahun 1905, ia pergi ke Aceh untuk bergabung dengan Pejuang Aceh melakukan gerilya dan sabotase. Ia terus menggempur Belanda dengan taktik “serang dan lari”. Belanda tidak juga sanggup meredam Garamata. Hingga pada 1919, Belanda menawarkan perdamaian. Garamata menyetujuinya tanpa curiga. Saat ia datang menemui tentara Belanda, ia justru ditangkap dan segera dihukum buang ke Cipinang. Lama setelah pembuangannya, saat Jepang masuk Hindia Belanda, Garamata mengembuskan napas terakhirnya pada usia cukup tua, 90 tahun. Di akhir hidupnya, ia memang masih belum bisa melihat kebebasan dari penjajahan Belanda, tetapi semangatnya yang kuat, “Namo bisa jadi aras, Aras bisa jadi namo” *Hari ini Bisa Saja Kita Kalah, Tapi Besok Kita Pasti Menang*, terbukti benar. Saat itu Belanda memang belum keluar dari Karo, tetapi semenjak kemerdekaan, hanya berselang 3 tahun selepas kematiannya, Belanda benar-benar telah henggang. Bangsa Indonesia akhirnya bisa memang melawan Belanda.

Jenazah Kiras Bangun dimakamkan di Desa Batu karang, Payung. Atas jasa-jasanya yang tanpa henti melawan penjajahan Belanda di Tanah Karo, pemerintah mengangkat Kiras Bangun, sang mata merah, sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2005.

Bagindo Azizchan



Lahir: Padang 30 September 1910| **meninggal:** Padang 19 Juli 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 82/TK/2005| **tanggal penetapan:** 7 November 2005

■ Pemimpin Muda dari Padang

Ia seorang pemimpin yang berani. Dalam usia 36 tahun, ia telah jadi wali kota Padang. Sebagai pemimpin, ia memegang teguh prinsip, bertekad tetap menegakkan pemerintahan RI di wilayahnya meski penuh risiko. Ia pernah berujar, "...kalau mayat saya sudah membujur, barulah Padang akan saya tinggalkan!", sepotong kalimat yang menegaskan kegigihannya sebagai pemimpin daerah Padang.

Bagindo Azizchan merupakan putra pasangan Bagindo Montok dan Djamilah. Ia anak keempat dari enam bersaudara dan menamatkan pendidikan dasarnya di HIS pada 1926. Azizchan kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO di Surabaya. Tahun 1929 setelah tamat dari MULO ia melanjutkan ke AMS di

Batavia. Kemudian di kota yang sama ia menempuh studi hukum di *Recht Hoge School* [Sekolah Tinggi Hukum] meski ia tidak menyelesaikan dan hanya bertahan di tingkat dua, karena masalah keterbatasan keuangan. Tahun 1933, Azizchan mendirikan kantor pengacara kemudian bergabung dalam Jong Islameten Bond [Ikatan Pemuda Islam]. Tahun 1935, ia membentuk lembaga *Folks Unicer Siseit* [(Lembaga Pendidikan)] dan menjadi guru.

Di masa awal kemerdekaan, ia telah berada di Padang dan terpilih menjadi Walikota Padang pada 15 Agustus 1946. Memangku jabatan sebagai seorang pemerintah daerah bukanlah hal yang mudah pada waktu itu. Pertempuran dengan tentara Belanda yang membonceng Sekutu, masih terus berlangsung. Ia berusaha sekuat tenaga memperjuangkan keberadaan pemerintah sipil di kota Padang. Ia berkunjung ke Markas Besar Sekutu dan mengadakan perundingan setelah sehari sebelumnya resmi dilantik sebagai walikota. Hasil perundingannya dengan pihak sekutu membuahkan dua butir kesepakatan: *pertama*, setuju melakukan kerjasama seratus persen untuk menanggulangi masalah keamanan di Padang yang semakin rawan. *Kedua*, membicarakan langkah-langkah teknis lalu lintas kereta api dan pos.

Setelah melakukan perundingan, ia mengadakan perayaan HUT Kemerdekaan RI secara tertutup di kantornya. Sang walikota kemudian juga menerbitkan surat kabar *Cahaya* dengan tujuan untuk mengimbangi kampanye yang dilakukan tentara Belanda. Ia juga berusaha keras membebaskan pejuang yang ditahan oleh Sekutu.

Pada 1949, dalam suatu perjalanan menuju Arang Parahu, mobil yang ditumpangnya dihentikan oleh seorang pejuang, dan memberi peringatan pada Bagindo Azizchan agar tidak masuk kota karena ada ancaman tentara Belanda. Akan tetapi, ia tidak bergeming, ia tetap melanjutkan perjalanan. Sang walikota telah terkena jebakan Belanda. Ia memang diminta datang untuk menenteramkan situasi pasca insiden antara tentara Belanda dengan sejumlah pejuang. Jebakan ini berhasil. Saat walikota datang, ia segera dihadang oleh tentara Belanda dan terbunuh. Hasil visum menunjukkan Bagindo Azizchan meninggal karena serangan benda tumpul dan 3 tembakan di bagian wajah. Ia lalu dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukittinggi.

Bagindo Azizchan memang pemimpin yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang walikota. Ia begitu teguh membela kemerdekaan Indonesia. Atas jasa itulah, pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada tahun 2005.

Andi Abdullah Bau Massepe



Lahir: Massepe Sulawesi Selatan 1918| **meninggal:** Pare-pare 2 Februari 1947| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 82/TK/2005| **tanggal penetapan:** 7 November 2005

■ Pejuang Pemberani

Ia seorang pejuang heroik yang tidak takut mati. Ia berpendirian teguh dan berani berkorban demi tegaknya NKRI. Seorang lelaki pemberani, bertanggung jawab, dan tidak mau mengorbankan orang lain demi dirinya. Hingga musuh republik dan juga musuh yang dihadapinya, Raymond Westerling pernah berujar, “...*sikap jantan ini sangat saya hormati*”. Bau Massepe memang pejuang sejati.

Andi Abdullah Bau Massepe merupakan putra pemimpin Kerajaan Bone, Andi Mappanyukki yang juga seorang pejuang dan pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Ibunya bernama Besse Bulu, putri Raja Sidenreng di daerah Massepe. Bau Massepe merupakan pewaris tahta dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan yaitu

Kerajaan Gowa dan kerajaan Bone dan juga seorang pewaris tahta lima kerajaan sebelah barat Danau Sidenreng, yaitu Suppa, Allita, Sidenreng Rappang dan Sawito.

Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan formal pada Sekolah Rakyat selama 1 tahun [1924], serta HIS [*Hollands Inlander School*] yang selesai pada 1932. Ia juga aktif dalam organisasi. Ia ikut dalam organisasi Datu Suppa tahun 1940, Bunken Kanrekan [asisten residen] Pare-Pare di masa Jepang, menjadi ketua Organisasi SUDARA Pare-Pare, ketua Pusat Keselamatan Rakyat, penasihat Pemuda/Pandu Nasional Indonesia, ketua Umum BPRI [Badan Penunjang Republik Indonesia], dan koordinator perjuangan bersenjata bagi pemuda di daerah sekitar Pare-Pare.

Dalam kedudukan terakhirnya itulah ia memimpin rakyat Pare-Pare melawan tentara Belanda [NICA] yang datang ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pada 21 Agustus 1945, ia berpidato dalam rapat raksasa di lapangan La Sinrang untuk mendengungkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, ia seorang nasionalis pendukung republik Indonesia dan segera membentuk laskar pejuang. Pasukan di bawah Komando Andi Abdullah Bau Massepe itu melakukan gerakan gerilya dan beberapa kali terjadi kontak senjata dengan tentara Belanda. Komandan Tentara Belanda kemudian menemui Andi Abdullah Bau Massepe di Suppa. Sang komandan tentara Belanda itu menyodorkan selembar kertas agar ditandatangani. Isi surat itu, agar Andi Abdullah Bau Massepe mau menyetujui keberadaan Belanda di wilayahnya. Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Dan tegas berujar, *"Permintaan tuan tidak dapat dipenuhi. Indonesia pasti merdeka, tidak*

ditawar-tawar kalau perlu saya korban bersama-sama dengan rakyat di Suppa, kalau perlu korban darah dan jiwa pun saya rela.”

Lalu saat Westerling bersama pasukan khususnya, Depot Speciale Troepen [DST] tiba di Sulawesi pada 5 Desember 1946, penangkapan dan pembantaian kaum republik pun terjadi. Saat itu Andi Abdullah Bau Massepe masih memimpin perlawanan. Akan tetapi, perjuangannya akhirnya harus berhenti saat ia tertangkap pasukan baret merah Westerling. Ia lalu ditahan di barak tentara Belanda di kampung Kariango. Selepas 160 hari tertawan, pada 2 Februari 1947, Bau Massepe ditembak mati oleh pasukan Westeling. Ia meninggal berselang 10 hari sesudah konferensi Pacekke [20 Januari 1947].

Andi Abdullah Bau Massepe dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kota Pare-Pare, sekitar 110 kilometer utara Kota Makassar. Dari perjuangannya kemudian lahir Resimen I Paccekke Brigade 16. Karena keberanian dan keteguhannya itulah pada peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Andi Abdullah Bau Massepe.

Teuku Mohammad Hasan



Lahir: Sigli 4 April 1906 | **meninggal:** Jakarta 21 September 1997 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006 | **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Hulubalang Pemberontak Modern

Teuku Muhammad Hasan merupakan Gubernur Wilayah Sumatra Pertama paska kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 1948 hingga 1949 dalam Kabinet Darurat. Pada 1951, ia terpilih sebagai ketua Komisi Perdagangan dan Industri DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara).

Hasan lahir pada 4 April 1906 di Sigli Aceh, dengan nama kecil Teuku Sarong. Ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim adalah seorang hulubalang (bangsawan yang memimpin suatu daerah di Aceh). Ibundanya bernama Cut Manyak. Karena turunan bangsawan, pendidikannya terhitung lancar. Pada 1914-1917 ia

bersekolah di Sekolah Rakyat (*Volksschool*) Lampoeh. Kemudian meneruskan *uropesche Lagere School* (ELS) pada 1924, dilanjutkan ke *Konigen Wilhelmina School* (KWS) Batavia, dan menamatkan *Rechtschoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum).

Di usia 25 tahun Hasan terbang ke Belanda untuk melanjutkan studi di Leiden University. Di negeri kincir angin tersebut, Hasan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Ia juga bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, yang merupakan perhimpunan politik pelajar Indonesia di negeri Belanda. Pada 1933, ia meraih gelar *Meester in de Rechten* (*Master of Laws*). Aktivitas organisasinya terus berlanjut tatkala kembali ke Hindia Belanda, ia pernah tercatat aktif dalam perkumpulan Muhammadiyah Aceh. Selain itu, Hasan pun giat di bidang agama dan pendidikan.

Pada era transisi kemerdekaan Indonesia, Teuku Mohammad Hasan berperan penting dalam mengatasi ketegangan yang terjadi antar tokoh nasional tentang tujuh dalam Pasal 29 ayat (1) Pembukaan UUD 1945 atau Piagam Jakarta. Kala itu, salah seorang peserta rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yakni Ki Bagus Hadikusumo bersikukuh mempertahankan kalimat “Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam Bagi Pemeluknya”. Namun, peserta non-muslim dan nasionalis menginginkan kalimat tersebut diubah untuk menciptakan keberagaman. Karena mentok, Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian menemui dan meminta T. M. Hasan agar berdiskusi dengan Ki Bagus Hadikusumo. Ia berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo dan kalimat Pembukaan UUD 1945 berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Teuku Muhammad Hasan meninggal di Jakarta pada 21 September 1977. Di Aceh, “kenang-kenangan” dapat dilihat di Jl. Teungku Imum Lueng Bata, Batoh - Banda Aceh. Di tempat tersebut berdiri gedung Perguruan Tinggi Universitas Serambi Mekkah yang didirikannya pada 21 Maret 1984.

Raden Mas Tirto Adhi Soerjo



Lahir: Bojonegoro 1880| **meninggal:** Batavia 17 Agustus 1918| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006| **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Bapak Pers Nasional

Tirto Adhi Soerjo atau kerap disingkat T.A.S lahir di Bojonegoro 1880 dengan nama kecil Djokomono. Sebagai seorang turunan bangsawan (kakeknya merupakan Bupati Bojonegoro), T.A.S berkesempatan menjadi siswa di sekolah Belanda, *Hogere Burgerschool* (HBS) dan melanjutkan ke STOVIA di Batavia. Lantaran terlalu asik menulis di koran, alhasil nilai pendidikan formalnya kerap turun. Pada 2 April 1902, ia menjadi redaktur surat kabar *Pembrita Betawi* pimpinan F. Wingers. Sekitar satu bulan menulis, tepatnya pada edisi 13 Mei ia naik pangkat menjadi pemimpin redaksi. Setahun kemudian ia mundur dari *Pembrita Betawi* dan membuat media mingguan yang dikelolanya sendiri,

mulai dari penulisan, layout, keuangan, juga administrasi. Koran independen tersebut dinamai *Soenda Berita*.

Dari karier di *Soenda Berita*, Tirto Adhi Soerjo menjajaki relasi-relasinya dengan para priyayi. Pada tahun 1907 ia mendirikan *Medan Prijaji*. Melalui koran ini T.A.S mencoba menjadi jurnalis yang berpihak kepada rakyat. Kelebihan Tirto adalah kemampuan mendekati nara sumber orang-orang “elite” yang duduk di pemerintahan kolonial. Namun, tak lantas ia menuliskan berita layaknya “pers putih”. Sebaliknya, hasil rangkaian kalimat T.A.S terkenal tajam dan kritis, sempat beberapa kali terseret kasus. Puncaknya kasusnya ia dibuang oleh penguasa kolonial ke Pulau Bacan (dekat Halmahea) pada tahun 1910. Setelah masa pembuangan habis, T.A.S kembali ke Batavia, dan meninggal dunia pada 17 Agustus 1918.

Karier Tirto Adhi Soerjo memang *moncer* sebagai jurnalis. Terdapat sekitar 14 terbitan yang pernah ia geluti, antara lain *Pembrita Betawi*, *Soenda Berita*, *Medan Priyayi*, *Soeloeh Keadilan*, *Poetri Hindia*, *Sarotama*, *Soeara BOW*, *Soeara Spoor dan Tram*, dan *Soearaurna*. T.A.S adalah redaktur kepala pertama bagi sejarah orang pribumi di Hindia Belanda dan perintis persuratkabaran - kewartawanan nasional Indonesia. Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Lalu, tertanggal 3 November 2006, T.A.S mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Kiayi Haji Noer Alie



Lahir: Bekasi 1914| **meninggal:** Bekasi 3 Mei 1992|
gelar: Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres
No. 85/TK/2006| **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Ulama pejuang dari Bekasi

Pada 1937, Saat ia berada di Mekah, semangat kebangsaannya tumbuh ketika ia merasa “tersengat” oleh pelajar asing yang berkata padanya: *“Mengapa Belanda yang negaranya kecil bisa menjajah Indonesia. Harusnya Belanda bisa diusir dengan gampang kalau ada kemauan!”*. Noer Ali pun segera menghimpun para pelajar Hindia [khususnya Betawi] untuk memikirkan nasib bangsanya yang dijajah. Ia lalu diangkat teman-temannya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Betawi di Mekah. Saat kembali ke tanah air, ia menjadi ulama sekaligus pejuang melawan Belanda. Lama kelamaan, orang mengenalnya sebagai “Singa Karawang Bekasi” atau “si Belut Putih”.

Noer Alie berasal dari keluarga petani biasa. Ia adalah putera dari Anwar bin Layu dan Maimunah binti Tarbin. Ia

mendapatkan pendidikan agama dari beberapa guru agama di sekitar Bekasi. Pada 1934, ia pergi ke Mekah dengan meminjam uang dari majikan ayahnya yang harus dicicil selama bertahun-tahun. ia menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di Mekkah selama 6 tahun bermukim di sana. Pada 1937, Noer Ali bersama teman-temannya membentuk organisasi Persatuan Pelajar Betawi, ia menjadi ketuanya.

Sekembalinya ke tanah air, Noer Ali mendirikan pesantren di Ujungmalang. Ketika Indonesia merdeka, ia terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah [KNID] Cabang Babelan. Pada 19 September 1945, saat terjadi Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Jakarta, Noer Ali mengerahkan massa untuk hadir. Lalu saat terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, ia menjadi Ketua Lasykar Rakyat Bekasi, selanjutnya menjadi Komandan Batalyon III Hisbullah Bekasi. Bung Tomo dalam pidato-pidatonya pada radio pemberontak sering menyebut-nyebut namanya.

Saat Agresi Militer I Belanda Juli 1947, Noer Ali menghadap kepala staf angkatan darat di Yogyakarta. Ia lalu diperintahkan bergerilya di Jawa Barat. Noer Ali segera kembali ke Jawa Barat jalan kaki dan mendirikan serta menjadi Komandan Markas Pusat Hisbullah-Sabilillah [MPHS] Jakarta Raya di Karawang. Saat itu, Belanda menganggap tentara Republik sudah tidak ada. Noer Ali meminta rakyat Rawagede untuk memasang ribuan bendera kecil-kecil dari kertas minyak yang ditempel di pepohonan. Tentara Belanda [NICA] yang melihat bendera-bendera itu terkejut karena ternyata RI masih eksis di wilayah kekuasaannya.

Belanda segera memburu laskar Indonesia hingga terjadi peristiwa pembantaian Rawa Gede. Peristiwa ini membangkitkan semangat rakyat sehingga banyak yang bergabung dengan MPHS. Dengan kekuatan mencapai 600 laskar, pasukan Noer Ali menyerang pos-pos Belanda secara gerilya. Ia lalu terkenal dengan sebutan “Singa Karawang-Bekasi” hingga “Belut Putih” karena sulit ditangkap Belanda. Karena kemampuannya itu, pada 1948, Residen Jakarta Raya mengangkatnya menjadi Koordinator Kabupaten Jatinegara.

Selepas Perjanjian Renville, ia hijrah ke Banten dan bertempur melawan Belanda di Banten Utara sampai Perjanjian Roem-Royen diselenggarakan. Dalam KMB, Noer Ali diminta oleh Mohammad Natsir membantu delegasi Indonesia. Ketika pengakuan kedaulatan ditandatangani Belanda, laskar MPHS pimpinannya akhirnya dibubarkan. Jasa-jasanya selama masa perang kemerdekaan dihargai termasuk dari tentara Divisi Siliwangi.

Selepas itu dimulailah perjuangan K.H. Noer Ali dalam pendidikan dan juga politik. Sejak 1949, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Islam di Jakarta dan setahun berikutnya telah mendirikan Madrasah Diniyah di Ujungmalang, dan Sekolah Rakyat Indonesia [SRI] di pelbagai tempat di Bekasi hingga ke luar Jawa. Di lapangan politik, peran Noer Ali tetap menonjol. Ia menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi dan pada 1950, Noer Ali diangkat sebagai Ketua Masyumi Cabang Jatinegara. Enam tahun berselang, ia menjadi anggota Dewan Konstituante dan setahun berikutnya menjadi anggota Pimpinan Harian/Majelis Syuro Masyumi Pusat. Ia bahkan menjadi Ketua Tim Perumus Konferensi Alim Ulama-Umaro

se-Jawa Barat di Lembang Bandung pada 1958, yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Pada periode 1971-1975, ia telah menjadi Ketua MUI Jawa Barat. Di samping itu, sejak 1972 menjadi Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren [BKSP] Jawa Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, ia bersikap sebagai pendamai, tidak pro satu aliran. Dengan para kiai Muhammadiyah, NU, maupun Persis, ia selalu bersikap baik.

Ulama pejuang ini akhirnya menutup mata selamanya dalam usia 78 tahun. Atas jasa-jasanya yang begitu besar dalam perjuangan kemerdekaan, Noer Ali diberi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia pada 2006, empat belas tahun setelah kepergiannya.

Pajonga Daeng Ngalie



Lahir: Takalar Sulawesi Selatan 1901 | **meninggal:** Takalar Sulawesi Selatan 23 Februari 1958 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006 | **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Sang Promotor pembentukan LAPRIS

Tekad Pajonga Daeng untuk gabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah bulat, tidak bisa diganggu gugat. Keinginan kolonial Belanda yang berniat merebut kembali tanah nusantara ia mentahkan. Wilayahnya, Polobongkeng, kemudian dengan cepat menjadi pusat kumpulnya para tokoh pemuda dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.

Pada Juli 1946, diprakarsai oleh Dr. H. J van Mook diadakan Konferensi Malino yang bertujuan untuk membentuk negara boneka, Negara Indonesia Timur (NIT). Melihat gelagat tidak baik, Pajonga berembug beberapa tokoh pemuda dan berhasil mengumpulkan sedikitnya 19 laskar untuk melakukan konferensi

antar laskar se-Sulawesi Selatan di Polongbangkeng hingga terbentuklah Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS), disepakati Ranggong Daeng Romo sebagai ketua dan Robert Walter Monginsidi sebagai sekjen. Terbentuknya LAPRIS ini menyebabkan serangan-serangan yang dilakukan pribumi semakin gencar dalam mengusir pendudukan Belanda dari tanah Sulawesi. Terbentuknya LAPRIS memberikan spirit baru dalam perjuangan dan persatuan pemuda Sulawesi Selatan. Hal tersebut memaksa Belanda meningkatkan operasi-operasi militer dan mendatangkan pasukan khusus di bawah komando Kapten Raymond Westerling pada Desember 1946.

Sebelum terbentuknya APRIS, Pajongga Daeng yang dikenal ulet mengumpulkan masa berhasil mendirikan Gerakan Muda Bajeng (GMB) pada pertengahan Oktober 1945. Mulanya ia sendiri yang menjadi pemimpin. GMB kemudian berganti nama menjadi Laskar Lipan Bajeng dan seorang pejuang asal Polongbangkeng bernama Ranggong Daeng Romo dipilih sebagai pemimpin tertinggi.

Pajongga aktif berembuk serta mengikuti rapat dengan raja-raja Sulawesi Selatan di Jogjakarta, Pajonga Ngalie melalui konferensi yang digelar akhirnya memutuskan untuk mendukung penuh pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di bawah Gubernur Sam Ratulangi. Kemudian wilayah Polobangkeng dijadikan pusat pemerintahan sementara mengingat keadaan Makassar yang sedang tidak aman.

Pada tanggal 13 Februari 1948, Pajonga beberapa anggota Laskar Lipan Bajeng tertangkap di Pangkajene lalu dibawa kembali

Polombangkeng. Ia dibawa ke Makassar dan dijebloskan ke dalam penjara selama dua tahun. Mereka kemudian dibebaskan dari semua tuntutan dan bebas dari tahanan menyusul Pengakuan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.

Opu Daeng Risadju



Lahir: Palopo 1880| **meninggal:** Palopo 10 Februari 1964| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006| **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Bangsawan yang Berjuang demi Rakyat

“Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepatasnya.”
~ Opu Daeng Risaju, 1930 ~

Memiliki nama kecil Famajjah, Opu Daeng Risadju memiliki darah bangsawan dari keturunan Raja Bone generasi ke-22. Meski turunan bangsawan besar, namun Famajjah tidak pernah

[409]

sekalipun mengenyam sekolah umum. Sebagai putri bangsawan di daerah Luwu, ia diajari tentang pola perilaku yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Semasa kecil pendidikan yang ditanamkan kepadanya lebih ditekankan pada persoalan yang menyangkut ajaran dan nilai-nilai moral, baik yang berlandaskan budaya maupun agama.

Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) melalui perkenalannya dengan H. Muhammad Yahya, ketua SI di Pare-Pare. Opu Daeng Risaju, ketika berada di Pare-Pare masuk menjadi anggota SI Cabang Pare-Pare bersama suaminya. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar bertempat di Pasar Lama Palopo, ia sendiri terpilih menjadi ketuanya. Rapat ini dihadiri oleh aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat dan masyarakat umumnya. Hadir juga pengurus PSII pusat yaitu Kartosuwiryo. Ketika berada di Palopo, Kartosuwiryo menginap di rumah Opu Daeng Risaju. Kedatangan Kartosuwiryo diundang langsung oleh Opu Daeng Risaju.

PSII Palopo berkembang pesat dan berhasil membuka ranting, salah satunya di Malangke. Pada akhir tahun 1930, pengurus dan anggota PSII Ranting Malangke mengundang Opu Daeng Risaju untuk menjadi pembicara. Pidato Opu Daeng saat itu, dinilai oleh kepala Distrik Malangke sebagai suatu pidato provokatif penghasutan terhadap rakyat melawan pemerintah. Ia bersama suaminya kemudian ditangkap dan dibawa ke Palopo untuk diadili.

Akan tetapi, atas usaha pemangku adat Kerajaan Luwu bernama Opu Balirante, mereka pun dibebaskan.

Semangat Opu Daeng tidak mati setelah penangkapan di Malange. Ia terus mengobarkan semangat anti penjajahan melalui PSII. Akibat aktivitas politisnya, ia dipanggil oleh Pemerintah Kerajaan Luwu agar menghentikan kegiatannya karena bisa mengganggu hubungan kerajaan dengan pemerintah Belanda. Namun, Opu Daeng menolak, ia memilih dicabut kebangsawanannya. Setelah itu nama-gelar “Opu” tidak pernah digunakan oleh Daeng Risadju. Karena konsistensinya di PSII, Daeng Risadju pun akhirnya berpisah bercerai dengan suaminya.

Pada tahun 1933 Opu Daeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Kedatangan Opu Daeng Risaju ke Jawa, ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak Kerajaan Luwu. Opu Daeng Risaju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan, dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan hadat, Opu Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat. Karena dianggap melanggar hukum, ia dituntut hukuman dibuang atau *diselong*. Namun atas upaya Opu Balirante, hukumannya diganti hukuman penjara selama empat belas bulan. Setelah bebas ia kemudian tinggal di Beloppa.

Di era revolusi, pada tanggal 23 Januari 1946, dipicu tindakan NICA yang mengobrak-abrik sebuah masjid di Luwu, terjadilah konflik senjata antara tentara NICA dengan para pemuda. Peristiwa ini kemudian merambat ke kota-kota lainnya, termasuk Beloppa.

Opu Daeng turut mengompori pemuda agar tidak menyerah terhadap Belanda. NICA kemudian menangkap Opu Daeng Risaju ketika berada di Lantoro. Kemudian ia dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam satu bulan tanpa diadili kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang, lalu ke Bajo.

Penahanan tersebut mengakhiri perjuangan Opu Daeng, selain sudah tua (berumur 67 tahun), ia pun mendapat siksaan hebat di penjara yang membuat telinganya tuli. Setelah 11 bulan masa tahanan, ia dikenakan tahanan luar, kemudian dibebaskan. Opu Daeng di masa tuanya kembali menetap di Belopa. Pada tanggal 10 Februari 1964, ia meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pekuburan raja-raja Lakkoe di Palopo, ada upacara kehormatan.

Izaak Huru Doko



Lahir: Kupang 20 November 1913 | **meninggal:** Kupang 29 Juli 1985 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006 | **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Pejuang dari Timor

Ini seorang lelaki pemberani. Saat fasisme Jepang masuk, tentara negeri matahari itu berdatangan ke Indonesia Timur. Awalnya mengaku saudara tua, tetapi kemudian merampas kebebasan penduduk. Sekali waktu, ia dengan berani menerima tantangan berkelahi seorang tentara Jepang. Dengan berani pula ia melawan tentara NICA yang datang setelahnya. Saat Indonesia telah merdeka, ia menjadi sosok yang bersahaja: menolak jabatan Gubernur NTT dan anggota Konstituante di Jakarta demi fokus mengangkat pendidikan rakyat Timor seperti dirinya.

Izaak Huru Doko atau lebih dikenal dengan nama Cak Doko merupakan putra ke-8 dari 9 bersaudara dari pasangan Kitu Huru

Doko dan Loni Doko. Ia mengenyam pendidikan Sekolah Desa antara tahun 1925-1928 di Sabu, kemudian melanjutkan ke MULO B di Ambon [1928-1934]. Kemudian Ia bersekolah di *Hollands Indlandsche Kweekschool* [HIK] Bandung [1934-1937]. Ia belajar menjadi seorang guru. Di sana, ia ikut mendirikan organisasi pemuda *Timorsche Jongeren* yang bertujuan mempersatukan seluruh pelajar asal Keresidenan Timor yang sedang belajar di pelbagai kota di Hindia Belanda. Sebagai media penghubung dan pemersatu, organisasi ini menerbitkan majalah *De Timorsche Jongeren*. Tahun 1937, dibentuklah organisasi perjuangan dengan nama Perserikatan Kebangsaan Timor [PKT]. Doko dipercaya menjadi ketua.

Setamat belajar di Bandung, Doko diangkat sebagai guru di *Openbare Schakel School* Kupang sejak 1 Maret 1937 hingga 1 Maret 1942, ketika bala tentara Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Kupang. Di masa Jepang ini, Doko diangkat sebagai Bunkyo Kakari yang membawahi bidang pengajaran dan penerangan pada Kantor Minseibu Timor di Kupang sejak 1 Maret 1942 sampai 1 September 1945. Bersamaan dengan itu, pada 1944 ketika terbentuk Syo Sunda Syu [Provinsi Sunda Kecil], Doko juga ditunjuk menjadi anggota Syo Sunda Sukhai Iin, semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di Singaraja Bali. Di masa tugasnya ini, ia mampu memprotes pengumpulan wanita muda dan tenaga perempuan untuk dijadikan romusha di Kupang. Diplomasinya mampu menghindarkan kekejaman tentara Jepang terhadap penduduk pribumi.

Saat Jepang angkat kaki dan tentara NICA datang, Doko sempat ditahan. Akan tetapi, ia bebas dan mengorganisir perjuangan melawan tentara NICA di Timor. Saat Indonesia memasuki fase negara federasi, Doko menjadi orang penting di NIT [negara Indonesia Timur]. Pada 1 Agustus 1947, ia menjadi Wakil Direktur Politik pada Kabinet NIT. Selanjutnya, pada 15 Januari 1948 hingga 12 Januari 1949, ia menjadi Menteri Muda Penerangan NIT. Jabatan selanjutnya adalah Menteri Penerangan NIT sejak 1 Januari 1949 hingga 14 Maret 1950 dan Menteri Pengajaran NIT periode 14 Maret hingga 10 Mei 1950.

Ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan dan provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk, Doko menolak ketika akan dicalonkan sebagai Gubernur NTT yang pertama dan Anggota Konstituante. Ia juga menolak saat akan diangkat menjadi pejabat di Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan di Jakarta. Ia lebih memilih menjadi Kepala dinas Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan NTT hingga pensiun pada 1971. Ia memang lebih memilih berada di kampung halaman-nya untuk meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

Empat belas tahun semenjak pensiun, ia mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 71 tahun. Untuk mengenang kepahlawanannya, sebuah patung torso dirinya dibangun di Kupang. Dan atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan pendidikan, pemerintah RI memberikan gelar Pahlawan Nasional pada 2006.

Sri Sultan Hamengku Buwana I



Lahir: Kupang 20 November 1913 | **meninggal:** Kupang 29 Juli 1985 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006 | **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Cikal Bakal Kesultanan Yogyakarta

Pangeran Mangkubumi adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Sewaktu kecil ia tinggal di Keraton Surakarta dan dilatih olah keprajuritan, berkuda, juga mempergunakan senjata perang. Berkat kemahirannya dalam bertempur, ia kemudian diangkat oleh Susuhunan Paku Buwono II sebagai Pangeran Lurah (yang dituakan di antara para pangeran atau putra raja).

Pada masa pemerintahan Paku Buwono II, pengaruh Belanda di lingkungan kerajaan cukup kuat sehingga membuat raja-raja kesulitan dalam mengambil keputusan. Seperti kasus Pangeran Mangkubumi, Paku Buwono II akan melaksanakan janjinya untuk memberi tanah lungguh di daerah Sukawati (sebelah timur Bengawan

Solo sampai lereng Gunung Lawu) seluas 3.000 cacah. Namun, realisasi tersebut ditentang oleh Patih Keraton Pringgalaya yang kemudian mengadukan perkara ini kepada Gubernur Jenderal VOC Gustav Baron van Imhoff. Saat melakukan kunjungan ke keraton Surakarta, dalam sebuah resepsi, van Imhoff menegur Pangeran Mangkubumi bahwa tanah lungguh-nya melampaui batas, maka diturunkan menjadi 1.000 cacah.

Paska kejadian tersebut, konflik antara Patih Pringgalaya yang memihak VOC dengan Pangeran Mangkubumi semakin memanas. Puncaknya, pagi tanggal 19 Mei 1746 ia pergi meninggalkan keraton, setelah sebelumnya terlibat perseteruan dengan Patih Pringgalaya mengenai tanah pesisir yang disewakan kepada VOC dengan pembayaran 20.000 real setiap tahunnya. Menurut Pangeran Mangkubumi, nominal yang merupakan usulan dari Pringgalaya itu terlalu rendah sehingga hanya akan mendatangkan keuntungan bagi satu pihak dalam hal ini Belanda.

Langkah awal yang dilakukannya adalah dengan membangun kekuatan. Ia berhasil menduduki daerah pesisir seperti Grobogan, Demak, Juana, dan Jipang diserang dan diduduki. Pada 11 Desember 1749, Mangkubumi diangkat oleh para kerabat, rakyat dan para pendukungnya sebagai Susuhunan ing Mataram atau Sunan Kabanaran. Pengangkatan tersebut bertempat di Desa Kabanaran. Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Kasunanan Surakarta selama 9 tahun (1746-1755). Pada 12 Februari 1755 disepakati Perjanjian Giyanti yang isinya wilayah Kasunanan Surakarta dibagi menjadi dua bagian. Mangkubumi mendapat di

bagian barat dan mendirikan Kasultanan Yogyakarta. Mulanya lokasi pendirian Keraton Yogyakarta adalah sebuah tempat pesanggrahan bernama Ngayogya, tempat tersebut kerap disinggahi raja Mataram sebelum nyekar ke makam raja-raja di Imogiri. Setelah kerajaan baru dibangun, nama tersebut Ngayogya kemudian diubah menjadi Ngayogyakarta Hadiringrat dan kini menjadi Yogyakarta.

Hamengku Buwana I meninggal dunia pada 24 Maret 1792. Sebagai raja Mataram baru di Kasultanan Yogyakarta, ia berhasil mengungguli Surakarta. Meski, ia sempat berdamai dengan Belanda, namun paska menjadi sultan Yogyakarta, ia memiliki kebijakan sendiri, Belanda dilarang turut campur dalam pemerintahan. Karena kiprahnya melawan kolonial, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengku Bowono I dianugerahi gelar sebagai Pahlawan pada tanggal 3 November 2006.

Haji Andi Sultan Daeng Raja



Lahir: Gantarang 20 Mei 1894| **meninggal:** Makassar 17 Mei 1963| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 85/TK/2006| **tanggal penetapan:** 3 November 2006

■ Bapak Agung Bulukumba

Kekuasaan Belanda yang sewenang-wenang di Sulawesi Selatan membuatnya benci dengan bangsa kolonial. Secara diam-diam, ia datang ke Batavia dan mengikuti kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Menjelang proklamasi kemerdekaan RI, ia mengikuti rapat panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] sebagai bagian wakil dari Sulawesi Selatan. Setelahnya, Sultan Daeng Radja segera menyampaikan kabar kemerdekaan RI kepada rakyat Bulukumba.

Daeng Radja adalah putra pasangan Passari Petta Tanra Karaeng Gantarang dan Andi Ninong. Awalnya, ia memiliki karier yang cukup cemerlang di zaman pendudukan Belanda. Tahun

1902, ia berkesempatan masuk sekolah *Volksschool* [Sekolah Rakyat] tiga tahun di Bulukumba, lalu melanjutkan pendidikannya ke *Europeesche Lagere School* [ELS] di Bantaeng, hingga ia melanjutkan pendidikannya di *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Makassar. Di usia 20 tahun, ia telah menjadi juru tulis di kantor pemerintahan Onder Afdeeling Makassar. Kariernya terus menanjak hingga di tahun 1930, Sultan Daeng Radja ditunjuk menjadi jaksa pada Landraad Bulukumba.

Lima belas tahun kemudian saat Indonesia memproklamkan kemerdekaan, Belanda yang datang melalui NICA menuduh Daeng Radja ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia ditahan dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara hingga 1950 ketika kedaulatan RI telah diakui oleh pemerintah Belanda. Sebelum ia ditahan, ia sempat mengusulkan dibentuknya Persatuan Pergerakan Nasional Indonesia (PPNI) sebagai wadah mengumpulkan pemuda untuk mengamankan dan membela Indonesia. Para pejuang Bulukumba, kemudian membentuk organisasi perlawanan bersenjata yang dinamakan Laskar Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakyat [PBAR]. Dalam organisasi ini, Daeng Radja didudukkan sebagai Bapak Agung. Meski dipenjara, seluruh kegiatan PBAR dipantau oleh Sultan Daeng Radja. Melalui keluarga yang menjenguknya, Sultan Daeng Radja memberi perintah kepada Laskar PBAR.

Setelah bebas, Daeng Radja kembali ke Bulukumba. Selepas mundur dari jabatan kepala adat Gantarang, pemerintah mengangkatnya menjadi bupati Bantaeng pada 1951. Tahun 1956,

ia diangkat menjadi residen diperbantukan pada Gubernur Sulsel sesuai keputusan presiden. Setahun kemudian beliau diangkat menjadi Anggota Konstituante. Hingga pada 1963, ia dipanggil sang khalik di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dalam usia 70 tahun. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, pemerintah memberi gelar Pahlawan nasional pada 2006.

Mayor Jenderal Adenan Kapau Gani



Lahir: Agam 16 September 1905 | **meninggal:** Palembang 23 Desember 1968 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 66/TK/2007 | **tanggal penetapan:** 9 November 2007

■ Menteri dari Agam

Di tahun 1940-an, Adenan Kapau Gani menjadi artis bersama Djoewarijah membintangi film produksi *The Union Film Coy* dengan disutradarai Rd. Aritin. Karena film tersebut ia menjadi perbincangan banyak orang. Banyak pendapat publik mengomentari bahwa sebagai tokoh kepemudaan yang giat dalam organisasi, Gani dirasa tak pantas terjun dalam dunia sandiwara apalagi menjadi peran utama di film yang berjudul rada panas, “Asmara Moerni”.

Adenan Kapau Gani merupakan Pahlawan Nasional dari Sumatra Selatan. Setelah lulus dari *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA), lelaki kelahiran 16 September 1905 ini mulai bergelut dalam politik dengan menjadi anggota Jong Sumateranen

Bond. Selain itu dalam organisasi kepemudaan ia juga pernah bergabung dengan Jong Java, Jong Islamiten Bond, Indonesia Muda, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan lain-lain. Pada masa perang kemerdekaan ia menjadi koordinator Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan sempat masuk bui karena ikut melaksanakan aksi pemasangan bendera merah putih dan menyebarkan poster guna menumbuhkan jiwa nasionalisme rakyat.

Meski pernah menjadi buah bibir akibat nampang jadi artis, nyatanya karier Gani mulus-mulus saja di organisasi, ia terus aktif di Partindo, GAPI, PNI (menjadi ketua tahun 1947). Antara 1945-1954 menjadi komisari PNI mewakili Sumatra Selatan dan anggota Dewan Eksekutif Pusat PNI di Jakarta. Begitu juga dalam karier di pemerintahan, ia menjabat pelbagai posisi penting, antara lain menjadi Komisariss Keresidenan Palembang, Anggota Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati (1946), Menteri Perekonomian RI dalam Kabinet Syahrir ke III dan IV, menjadi Wakil Perdana Menteri (1947), Menteri Perekonomian dalam Kabinet Amir Syarifudin (1948), Ketua Delegasi RI ke UNO *International Trade And Employment Conference* di Havana, Menteri Perhubungan Kabinet Ali Sastroamijoyo, dan Gubernur Militer Sumatra Selatan.

Adenan Kapau Gani meninggal di usia 63 tahun di RS. Charitas setelah menderita sakit. Ia dimakamkan di makam Pahlawan Siguntang Palembang. Karena jasa-jasanya dalam pemerintahan, pada 9 November 2007 ia mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Ide Anak Agung Gde Agung



Lahir: Gianyar 24 Juli 1921| **meninggal:** 22 April 1999|
gelar: Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres
No. 66/TK/2007| **tanggal penetapan:** 9 November 2007

■ Diplomat Gianyar

Dalam perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, ia berhasil membujuk Wakil Mahkota DR. Beel untuk melupakan niatnya membentuk negara federal dan sebaliknya langsung membentuk negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh melalui suatu perundingan yang mengikutsertakan pihak-pihak utama yang berkepentingan, yaitu Belanda, RI dan BFO [*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*] dalam satu musyawarah, Konferensi Meja Bundar [KMB]. Dalam konferensi itu, Anak Agung menjadi orang yang paling gencar mendesak agar Irian Barat diserahkan pada Indonesia.

Ide Anak Agung Gde Agung merupakan putra raja Gianyar, Anak Agung Ngurah Agung. Gelar Sarjana hukum (Mr.) diraihnya

[424]

di Batavia dan gelar doktor diperolehnya di Universitas Utrecht, Belanda, bidang sejarah. Ia kemudian memilih jalur diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Saat Indonesia masuk dalam fase negara serikat. Anak Agung berada dalam posisi penting. Pada 15 Desember 1947, ia menjadi perdana menteri Negara Indonesia Timur [NIT]. Ia segera menggalang kerja sama dengan Fraksi Progresif pro RI dalam Parlemen NIT. Ia juga membuka hubungan erat dengan pemerintah RI, dengan menggelar program solidaritas perjuangan. Karenanya pada 19 Januari 1948, NIT diakui oleh RI sebagai sesama negara bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Pada Mei 1948, ia membentuk Pertemuan Musyawarah Federal [PMF] atau lebih dikenal dengan sebutan BFO yang terdiri atas sebagian besar negara-negara bagian di Nusantara untuk menentang rencana Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengubah pemerintah Hindia Belanda menjadi *Voorlopige Federale Regering* [VFR] atau Pemerintah Federal Sementara. BFO berhasil melumpuhkan strategi membentuk negara boneka ini dan akibatnya Van Mook mengundurkan diri.

Anak Agung mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri NIT pada 19 Desember 1948, sebagai bentuk protes tindakan Belanda dalam melancarkan aksi polisionil II dan memberi solidaritas pada RI yang dalam keadaan kritis dan tidak berdaya. Tindakan Anak Agung ini banyak meningkatkan simpati terhadap perjuangan RI. Anak Agung Gde Agung tidak berhenti di sini saja. Melalui mosi BFO

3 Maret 1949 yang diprakarsainya, dia mendesak Belanda untuk membebaskan pemimpin RI yang tertawan dan mengembalikan kedaulatan RI di Yogyakarta.

Sebelum KMB berlangsung, ia pemrakarsai Pertemuan Antar Indonesia untuk menyamakan persepsi antara RI dan BFO. Pertemuan ini yang diadakan dalam dua tahap di Yogyakarta dan Jakarta dan menghasilkan permufakatan penting dalam menyatukan visi dan misi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia secara penuh. Setelah itu, Anak Agung [bersama Hatta], ditunjuk Presiden Soekarno menjadi formatur kabinet pertama pasca pengakuan.

Dalam cabinet pertama itulah Anak Agung duduk sebagai Menteri Dalam Negeri. Kemudian ia juga pernah menjabat Luar Negeri Republik Indonesia. Selepas itu, sang diplomat ini pernah juga menjadi Duta besar RI di Belgia tahun 1951, Duta besar RI di Portugal dan Prancis pada 1953 dan juga duta besar RI di Austria. Mengingat jasa-jasanya, terutama periode setelah tahun 1948, Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada raja Gianyar Bali itu tahun 2007.

Mayor Jenderal TNI Prof. Dr.Moestopo



Lahir: Kediri 13 Juli 1913 | **meninggal:** Bandung 29 September 1986 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 66/TK/2007 | **tanggal penetapan:** 9 November 2007

■ Dokter Gigi Penyeru Perdamaian

Meski ia garang terhadap penjajahan dan sering terlibat pertempuran di masa revolusi kemerdekaan, tetapi di masa tuanya ia mendambakan perdamaian dunia. Ia mendirikan pusat perdamaian dunia di Bandung tahun 1964. Sering menulis surat pada tokoh-tokoh dunia, dari Ronald Reagan hingga Ayatullah Khomeini guna menyerukan perdamaian, lalu mendirikan tempat suci keagamaan di sekitar rumahnya. Ia mengembangkan kerukunan. Ia gerakkan perdamaian sebagai langkah nyata mewujudkan Pancasila.

Prof. Dr. Moestopo (lahir di Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juli 1913 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 29 September 1986 pada umur 73 tahun) merupakan pahlawan nasional

Indonesia yang berasal dari Jawa Timur yang ditetapkan sejak 9 November 2007. Sebagai pahlawan, bukan hanya militer saja yang digelutinya, ia dikenal sebagai dokter gigi juga akademisi. Putra keenam dari delapan bersaudara ini memulai pendidikannya di HIS kemudian melanjutkan ke MULO, lalu melanjutkan ke STOVIT (Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi) di Surabaya. Ia mengikuti pelbagai pelatihan pendidikan guna menunjang kariernya antara lain: pendidikan Orthodontle di Surabaya dan UGM Yogyakarta lalu; pendidikan Oral Surgeon di Fakultas Kedokteran UI Jakarta, Amerika Serikat, dan Jepang. Rampung “sekolah” ia mulai bekerja sebagai Asisten Orthodontle dan *Conserven de Tandheeldunda* (1937 – 1941) lalu menjabat sebagai Wakil Direktur STOVIT (1941-1942), kemudian sebagai asisten profesor dari Shikadaigaku (Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi pada masa pendudukan Jepang).

Karier militernya diawali pada saat pendudukan Jepang, Moestopo masuk PETA. Kemudian pada perang kemerdekaan ia membentuk pasukan “setan” yang anak buahnya terdiri pencopet, residivis, dan pelacur. Dalam Pertempuran 10 November di Surabaya ia berpangkat purnawirawan mayor jenderal TNI-AD. Selepas Indonesia merdeka, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Kepala Departemen Kesehatan TNI-AD. Karena jiwa kedokterannya sangat tinggi, ia pun membuka praktik dokter gigi di rumahnya. Merasakan masih terbatasnya dokter gigi di Indonesia, baik kualitas maupun jumlahnya, pada tahun 1952 Moestopo mendirikan Kursus Kesehatan Gigi Dr. R. Moestopo pada tahun 1952. Lalu pada 1957, Moestopo mendirikan lagi Kursus Tukang Gigi Intelek dan kemudian menjadi Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Slamet Riyadi



Lahir: Surakarta 26 Juli 1927 | **meninggal:** Ambon
4 November 1950| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar
penetapan:** Keppres No. 66/TK/2007| **tanggal
penetapan:** 9 November 2007

■ Letkol Berbakat yang Mati Muda

Mulanya, Ignatius Slamet Riyadi yang dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1927 di Solo, Jawa Tengah bernama Soekamto. Karena semasa kecil kerap sakit, kemudian namanya diganti menjadi Slamet. Ketika bersekolah di SMP Negeri II Solo, oleh gurunya namanya diberi tambahan Riyadi karena saat itu banyak anak yang bernama Slamet. Setelah dewasa, ia mengenyam pendidikan di Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT). Ia mendapat ijazah navigasi laut setelah menjadi lulusan peringkat pertama dengan nilai terbaik. Karena prestasinya tersebut, Slamet Riyadi diangkat menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau di Nusantara.

Salah satu tindakan heroik dalam memperjuangkan kemerdekaan yakni tatkala ia berhasil melarikan kapal kayu Jepang.

[429]

Dia diburu oleh Ken Pei tai (Polisi Militer Jepang), tidak pernah tertangkap. Tak hanya itu, Slamet Riyadi menggalang pasukan hingga setingkat batalyon yang terdiri atas para pemuda terlatih eks Peta/Heiho/Kaigun. Pasukan tersebut dipersiapkan untuk merebut kembali kekuasaan politik dan militer kota Solo dan Yogyakarta. Slamet Riyadi kemudian diangkat sebagai Komandan Batalyon Resimen I Divisi X. Sejak itu, ia semakin banyak terlibat dalam usaha merebut kemerdekaan.

Saat Agresi Belanda II, Slamet Riyadi diberi kepercayaan untuk mengomando Batalyon XIV. Setelah itu pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel, dengan jabatan baru Komandan “Wehrkreise I” (Panembahan Senopati) dibawah Komando Kolonel Gatot Subroto. Dalam perang kemerdekaan jilid II tersebut, Letkol Slamet Riyadi membuktikan kepiawainya. Ia mengambil keputusan mengadakan “Serangan Umum Surakarta” yang dimulai tanggal 7 Agustus 1949, dan berlangsung selama 4 hari 4 malam. Dalam pertempuran tersebut 6 orang militer Indonesia gugur, 109 rumah penduduk porak poranda, dan 205 penduduk meninggal. Namun demikian, pasukan Slamet Riyadi berhasil menewaskan 7 orang dan menawan 3 orang tentara Belanda.

Pada tanggal 10 Juli 1950, Letkol Slamet Riyadi ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Kapten Abdul Aziz di Makassar dan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipelopori oleh Dr. Soumokil. Pada tanggal 4 November 1950, terjadi pertempuran di gerbang benteng Victoria, Ambon. Pasukan Slamet Riyadi berhadapan dengan sejumlah pasukan yang bersembunyi di balik

benteng tersebut. Karena pasukan dari balik benteng mengibarkan bendera Merah Putih, Slamet Riyadi memerintahkan pasukannya untuk menghentikan penyerangan. Menurutnya, pasukan itu adalah tentara Siliwangi. Ketika Slamet Riyadi keluar dari panser, seorang sniper berhasil menembaknya. Gerombolan tersebut bukanlah tentara Siliwangi melainkan para pemberontak RMS. Letkol Slamet Riyadi pun mengembuskan napas terakhirnya sebelum ia genap berusia 24 tahun.

Muhammad Natsir



Lahir: Solok 17 Juli 1908 | **meninggal:** Jakarta Februari 1993 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 41/TK/2008 | **tanggal penetapan:** 6 November 2008

■ Pejabat Sederhana

“Saat pertama kali berjumpa dengannya di tahun 1948, pada waktu itu ia Menteri Penerangan RI. Saya menjumpai sosok orang berpakaian paling camping di antara semua pejabat di Yogyakarta; itulah satu-satunya pakaian yang dimilikinya. Beberapa minggu kemudian staf yang bekerja di kantornya berpatungan membelikan sehelai baju yang lebih pantas. Mereka mengatakan pada saya, bahwa pemimpin mereka itu akan kelihatan seperti ‘menteri betulan’”—George McT Kahin, Guru Besar Cornell University.

Mohammad Natsir memang dikenal sebagai pribadi sederhana dan bersahaja meski sudah di puncak karier. Selain kasus “pakaian camping”, beberapa pilihan tindakannya saat menjadi pejabat

kadang memang membuat orang terpingkal heran. Misalnya; saat awal menjadi Perdana Menteri, Natsir tetap tinggal di sebuah gang (hingga Idit Djunaedi menghadiahkan sebuah rumah layak), Natsir juga menolak hadiah mobil Chevy Impala dari cukong, kemudian tatkala mengundurkan diri dari Perdana Menteri, ia pulang dari istana dengan membonceng supirnya naik sepeda.

Mohammad Natsir lahir di Solok, Sumatra Barat, pada 17 Juli 1908, dengan nama Datuk Sinaro Panjang. Pada masa kecilnya, ia belajar agama Islam dengan ulama-ulama Solok. Natsir mengenyam pendidikan umum, mula-mula di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Algemeene Middelbare School* (MULO), lalu ke Bandung guna melanjutkan *Algemeene Middelbare School* (AMS). Ketika di Kota Kembang ini Natsir berinteraksi dengan aktivis pergerakan nasional antara lain Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem dan Sutan Syahrir. Ia juga tetap memperdalam ilmu agamanya dengan berguru pada Ahmad Hassan pada 1932. *Basic* keilmuwan *plus* agama, dipakai Natsir dalam perjuangannya di kemudian hari.

Pengalaman organisasi M. Natsir antara lain; pengalaman perdana menteri ke lima republik Indonesia ini antara lain; Wakil Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), Presiden Liga Muslim se-Dunia (*World Moslem Congress*), ketua Dewan Masjid se-Dunia, serta anggota Dewan Eksekutif Rabithah Alam Islamy yang berpusat di Mekkah.

Rampung menjadi perdana menteri, M. Natsir berjuang melalui partai. Pada pemilihan umum 1955, Partai Islam Masyumi

yang dipimpinnya mendapat suara kedua terbanyak sesudah PNI dan memperoleh kursi yang sama dengan PNI. Pada sidang-sidang konstituante antara 1956-1957 dengan gigih dia mempertahankan pendiriannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Usaha Natsir kandas karena kemudian Soekarno membubarkan parlemen serta konstituante hasil pemilu.

Imbasnya kejadian tersebut kemudian muncul pergolakan politik akibat perebutan hegemoni Islam dan non Islam. Hal ini berujung dengan munculnya kegiatan kedaerahan yang berpuncak pada pemberontakan daerah dan PRRI pada tahun 1958. Natsir turut terlibat dalam gerakan tersebut bersama Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap.

Ketika PRRI berakhir dengan pemberian amnesti, Natsir bersama tokoh lainnya kembali, namun kemudian ia dikarantina di Batu, Jawa Timur (1960-62), kemudian di Rumah Tahanan Militer Jakarta sampai dibebaskan oleh pemerintahan Suharto tahun 1966. Ia dibebaskan tanpa pengadilan dan satu tuduhan pun kepadanya. Paska dibebaskan namanya kembali mencuat meski tidak memiliki jabatan formal di pemerintahan. Natsir pernah ikut membantu pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Melalui hubungan baiknya, Natsir menulis surat pribadi kepada Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman guna mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia yang kemudian segera terwujud. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang didirikannya pada 1967.

Kebebasannya hilang kembali pada tahun 1980, karena ia ikut terlibat dalam kelompok petisi 50 yang mengkritik pemerintahan Suharto. Semua kegiatannya lalu dicekal termasuk bepergian ke luar negeri hingga meninggalnya pada tanggal 6 Februari 1993. Jenazahnya dikuburkan di TPU Karet, Tanah Abang.

Kiai Haji Abdul Halim



Lahir: Majalengka 26 Juni 1887 | **meninggal:** Majalengka 17 Mei 1962 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 41/TK/2008 | **tanggal penetapan:** 6 November 2008

■ Seorang Ulama Pejuang

Tidak banyak yang mengenal namanya, tapi yang pasti ia tokoh penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Buktinya, ia menjadi salah satu anggota *Dokuritsu Zyunbi Choosakai* [Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI] yang bertugas menyusun konsep Undang-Undang Dasar. Ia juga diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP] yang berfungsi seperti parlemen. Ia juga menjadi anggota dewan Konstituante selepas pemilu pertama 1955. Tujuh tahun sebelumnya, saat republik bergolak akibat agresi militer Belanda yang sewenang-wenang, ulama ini bersama rakyat dan tentara mundur ke pedalaman menyusun strategi melawan Belanda. Ia juga gigih menentang keras berdirinya negara Pasundan, negara boneka buatan Belanda.

Abdul Halim merupakan ulama besar dan tokoh pembaharuan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Nama aslinya adalah Otong Syatori atau ada yang menyebut Mohammad Sjatari. Ia anak terakhir dari tujuh bersaudara, anak pasangan KH. Muhammad Iskandar dan Hajjah Siti Mutmainah. Ayahnya merupakan seorang penghulu Kewedanan Jatiwangi Majalengka. Ia mendapat pendidikan agama sejak kecil. Pada usia 10 tahun ia sudah belajar membaca al Qur'an, kemudian menjadi santri pada beberapa orang kiai di pelbagai daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai mencapai usia 22 tahun. Di sela-sela nyantri, ia berdagang batik, minyak wangi, hingga kitab-kitab pelajaran agama.

Pada usia 22 tahun, Syatori berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama. Ia bermukim di sana selama 3 tahun. Mendalami pengetahuan agama di sana dari ulama-ulama Mekkah. Di sana pula ia bertemu dengan KH. Mas Mansyur [tokoh Muhammadiyah] dan KH. Abdul Wahab Hasbullah [tokoh Nahdatul Ulama]. Pada 1911, ia kembali ke Hindia. Ia kemudian berganti nama menjadi Abdul Halim dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda.

Abdul Halim segera mewujudkan cita-citanya, melakukan perbaikan rakyat melalui jalur pendidikan dan penataan ekonomi. Dalam merealisasi cita-citanya, ia mendirikan Majlis Ilmu [1911], sebuah tempat pendidikan agama. Saat itu, ia telah menjadi pimpinan Serikat Islam cabang Majalengka dan pada tahun 1912 ia mendirikan suatu perkumpulan Hayatul Qulub. Ia mengembangkan ide pembaruan pendidikan, juga aktif dalam bidang sosial ekonomi

dan kemasyarakatan. Anggota perkumpulan ini terdiri atas para tokoh masyarakat, santri, pedagang, dan petani. Langkah-langkah perbaikannya meliputi delapan bidang perbaikan yang disebutkan dengan Islah as-Samanyiah. Melihat perkembangan kegiatan Abdul Halim, pemerintah kolonial mulai menaruh curiga. Secara diam-diam pemerintah mengutus PID, polisi rahasia, untuk mengawasi pergerakan Abdul Halim. Benar saja, pada 1915, *Hayatul Qulub* dibubarkan pemerintah kolonial.

Berikutnya, pada 16 Mei 1916 Abdul Halim mendirikan Jam'iyah Tanah al-Muta'alimin, sebuah lembaga pengembang pendidikan. Akan tetapi, setahun berselang, lagi-lagi pemerintah kolonial membubarkannya. Abdul Halim tidak menyerah, ia mendirikan Persyarikatan Ulama yang akhirnya diakui pemerintahan kolonial pada 21 Desember 1917. Organisasi ini berkembang hingga pada 1924 telah dibuka cabang di seluruh Jawa dan Madura.

Di samping kegiatan sosial, ia juga bergiat dalam dagang. Ia mengembangkan pertanian, membuka usaha tenun hingga mendirikan percetakan. Ia lalu mendirikan sekolah bernama Santi Asromo pada April 1942 di Majalengka. Di tahun itu juga ia mengubah Persyarikatan Ulama menjadi Perikatan Umat Islam. Pada 1943, ia menjadi salah seorang pengurus Masyumi [Majlis Syuro Muslimin Indonesia]. Dalam politik fasisme Jepang, ia kemudian masuk menjadi salah satu anggota Badap Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] dan selepas kemerdekaan, ia terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP].

Abdul Halim langsung berubah langkah saat Belanda melancarkan Agresi militer pertama dan kedua. Ia ikut bergerilya dengan basis di sekitar kaki Gunung Ciremai. Memimpin langsung anak buahnya mengadakan pergerakan militer Belanda di wilayah Keresidenan Cirebon. Militer Belanda kemudian menyerang Pasirayu, tempat tinggal Abdul Halim dan sekolah Santi Asromonya. Ia segera ditangkap oleh Belanda dan diinterogasi Nefis, meski kemudian dibebaskan. Ia tidak jera dan justru kemudian menjadi penyuplai logistik gerilyawan republik. Saat Negara Pasundan didirikan oleh Muhammad Musa Suria Kartalegawa pada 18 November 1946 di Bandung, ia segera membentuk Gerakan Muslimin Indonesia [GMI] di Bandung yang memelopori gerakan menentang negara Pasundan, bahkan Abdul Halim menjadi ketuanya. Berbarengan dengan itu, saat Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam yang berpusat di Tasikmalaya, Abdul Halim juga menentang gerakan ini dan menganjurkan rakyat mendukung Republik Indonesia.

Selepas Indonesia kembali ke bentuk kedaulatan, pemerintah kemudian menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955. Abdul Halim kemudian terpilih menjadi anggota Konstituante mewakili Masyumi. Ia berkiprah hingga lembaga ini bubar melalui dekrit presiden 5 Juli 1959. Sebulan sebelum penangkapan Kartosuwiryo yang ditentangnya di gunung Rakutak, Abdul Halim meninggal dunia dalam usia 75 tahun. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan bangsa dan pendidikan bangsa, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan nasional pada 2008, bertepatan dengan perayaan hari pahlawan.

Sutomo



Lahir: Surabaya 3 Oktober 1920 | **meninggal:** Padang Arafah 7 Oktober 1981 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 41/TK/2008 | **tanggal penetapan:** 6 November 2008

■ Agigator Arek Surabaya

Arek Suroboyo yang lahir pada 3 Oktober 1920 ini dikenal dengan panggilan Bung Tomo. Ia adalah agigator ulung yang mampu memompa semangat para pejuang Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Begitu heroiknya perjuangan kala itu, tanggal terjadinya pertempuran kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.

Bermula pada 25 Oktober 1945 tentara Inggris mewakili sekutu mendarat ke Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Belanda melalui *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) ingin menguasai kembali wilayah Indonesia turut “membonceng”

[440]

tentara Inggris. Mengetahui hal tersebut rakyat Indonesia marah dan terjadilah Insiden Bendera 19 September 1945 yang menewaskan empat arek Suroboyo; Cak Sidik, Mulyadi, Hariono Mulyono serta seorang dari Belanda bernama Mr. Ploegman. Insiden tersebut menyulut bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dengan para pejuang di Surabaya. Puncaknya pada 30 Oktober 1945 yang menewas Brigadir Jenderal AWS Mallaby (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur).

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya (Mayor Jenderal Mansergh) mengeluarkan ultimatum. Semua orang pribumi bersenjata beserta pimpinannya wajib melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu adalah jam 06.00 pagi tanggal 10 November 1945. Saat itulah Bung Tomo muncul dengan pidato kerasnya yang mampu membakar semangat para pejuang. *Berikut transkrip pidato Bung Tomo yang disiarkan di Radio Surabaya sehari menjelang pertempuran 10 November 1945*

“Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka!! Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ini ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia. Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian”.

“Hai, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kamu menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kami rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untuk itu, sekalipun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita”

“Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap “Merdeka atau Mati”. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!! Merdeka!!”

Karena pidato tersebut, serentak para pejuang bangkit. Bondo nekat, rakyat Surabaya bertempur sampai titik darah penghabisan. Pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan mengerahkan sekitar 30.000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang. Kota Surabaya dihujani bom dari udara. Hanya berselang sepuluh menit dari batas ultimatum, Surabaya sudah menjadi lautan api. Pertempuran berlangsung lama, ribuan penduduk menjadi korban. Saat pertempuran reda pada 30 November 1945, kota Surabaya

bergelimpangan puluhan ribuan mayat pejuang yang rela setor nyawa untuk mempertahankan kehormatan tanah airnya.

Setelah pertempuran di Surabaya berakhir, Bung Tomo aktif di kehidupan politik. Ia pernah menyandang beberapa jabatan penting antara lain; Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial AD Interim pada (1955-1956), anggota DPR mewakili Partai Rakyat Indonesia (1956-1959). Karena tidak nyaman menjadi pejabat, setelah jabatan anggota DPR-nya selesai, ia mundur dunia politik. Akan tetapi, pada awal tahun 1970-an, Bung Tomo kembali muncul ke kancah politik lantaran ia tidak sepaham dengan pemerintahan Orde Baru, kepemimpinan dianggap melenceng. Bung Tomo dijebloskan ke penjara pada 11 April 1978 karena mengkritik pemerintah. Selepasnya dari bui, Bung Tomo memutuskan untuk pensiun dari dunia politik. Bung Tomo meninggal dunia pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah saat menjalankan ibadah Haji. Jenazahnya dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Ngagel Surabaya.

Jahja Daniel Dharma



Lahir: Manado 9 Maret 1911 | **meninggal:** Jakarta 27 Agustus 1988 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 58/TK/2009 | **tanggal penetapan:** 9 November 2009

■ Menembus Blokade Belanda

Satu kali, Sebuah kapal eskader Angkatan Laut Belanda berlabuh di Manado pada 1921. Ukurannya besar dan canggih. John Lie, yang masih berusia sekitar 10 tahun, berenang menuju kapal. Ia berhasil. Di dekat kapal, ia berkata kepada teman-temannya, “nanti saya mau jadi kapten, suatu waktu akan pimpin kapal begini”. Sekian tahun setelahnya, ia memang memimpin kapal perang RI Rajawali. Di masa sebelum itu, ia bahkan menjadi patriot legendaris dengan kapalnya *The Outlaw* menebus blokade laut Belanda. BBC menyebut, “*The Black Speed Boat*” dan pers asing menjulukinya, “*The Great Smuggler...*”

John Lie Tjeng Tjoan merupakan anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Lie Kae Tae dan Oei Tseng Nie. Lie Kae Tae

merupakan pemilik perusahaan pengangkutan Vetol (*Veem en transportonderneming Lie Kae Tae*) yang terkenal sebelum Perang Dunia II dan tutup sepeninggal Lie Kae Tae pada 1957. Sedari kecil kecintaannya pada dunia maritim begitu kuat. Awalnya, ia mendapat pendidikan di *Hollands Chinese School* [HCS], lalu *Christelijke Lagere School*. Hasrat John Lie untuk jadi pelaut begitu kuat dan ketika menginjak usia 17 tahun ia meninggalkan Manado menuju Batavia. Di sana ia kursus navigasi lalu jadi Klerk Muallim III di KPM [*Koninklijke Paketvaart Mattschappij*], perusahaan pelayaran Belanda. Setelah beberapa kali pindah kapal, ia bertugas di MV Tosari yang pada Februari 1942 membawanya ke Pangkalan AL Inggris Koramshar Iran. Saat itu Perang Dunia II sedang berlangsung. MV Tosari dijadikan kapal logistik pendukung armada Sekutu. Awak MV Tosari, termasuk John Lie, diberi pelatihan militer.

Pada Februari 1946, kapal MV Ophir membawa John Lie singgah di Singapura selama 10 hari. Di sini, Lie belajar menyapu ranjau dan taktik pertempuran laut. Setelahnya, ia datang ke Jakarta dan terlibat dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) sebelum akhirnya bergabung dengan angkatan laut RI. Atas permintaannya, ia ditempatkan di Pelabuhan Cilacap. Selama beberapa bulan dia menorehkan prestasi dengan berhasil membersihkan semua ranjau yang ditanam Jepang. Atas jasanya ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor.

Dimulailah misi-misi menembus blokade Belanda untuk melakukan penyelundupan. Lie menggunakan kapal boat kecil yang dinamainya *the outlaw*. Ia secara rutin melakukan operasi menembus

blokade Belanda, membawa barang-barang keperluan untuk perjuangan melawan Belanda, termasuk menyelundupkan senjata. Perjuangannya tidak ringan, selain menghindari patroli Belanda, ia juga harus menghadapi gelombang samudera yang ganas. Berkali-kali dia juga berhasil mengelabui Belanda. Berulang kali John selamat dari kejaran kapal-kapal musuh.

Pada awal 1950 ketika berada di Bangkok, Lie dipanggil pulang ke Surabaya oleh KSAL Subiyakto dan ditugaskan menjadi komandan kapal perang Rajawali dan juga Gajah Mada. Pada masa berikut dia aktif dalam penumpasan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku. Lie kemudian mengubah namanya menjadi Jahja Daniel Dharma pada 30 Agustus 1966 dan mengakhiri pengabdianya di TNI Angkatan Laut pada Desember 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda.

Jahja Daniel Dharma meninggal dunia karena stroke pada usia 77 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas segala jasa dan pengabdianya kepada republik Indonesia, pemerintah memberi gelar Pahlawan Nasional pada 2009.

Herman Johannes



Lahir: Rote 28 Mei 1912 | **meninggal:** Yogyakarta
17 Oktober 1992 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar**
penetapan: Keppres No. 58/TK/2009 | **tanggal**
penetapan: 9 November 2009

■ Ilmuwan Pejuang

Perjuangannya begitu besar. Ia mendirikan laboratorium untuk merakit bom. Ia diberi pangkat mayor. Sebagai gerilyawan, ia bertugas meledakkan jembatan jalan raya dan kereta api. Tindakan sabotase untuk menghambat tentara Belanda. Ia juga menyusun buku tentang pembuatan bahan peledak. Sekali waktu, di akhir tahun 1948, ia nyaris gugur saat 70 buah ranjau darat di gudang persenjataan meledak.

Herman Johannes atau yang sering disebut dengan panggilan Pak Jo merupakan pejuang yang merangkap seorang ilmuwan Indonesia. Ia anak keempat pasangan Daniel Abia Johannes dengan istrinya, Aranci Dirk. Herman Johannes

muda harus meninggalkan desa dan Sekolah Melayu yang hanya diikutinya selama setahun, agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu *Europesche Lagere School* [ELS] di Kupang. Selepas itu, ia kemudian berangkat ke Makassar untuk melanjutkan pendidikannya di MULO [*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*] dan kemudian meneruskan ke AMS [*Algemeene Middelbare School*] di Batavia. Berkat nilainya yang tinggi di AMS, ia diberi beasiswa untuk melanjutkan studinya di *Technische Hooge School* [THS] Bandung pada 1934 dan baru dapat diselesaikannya pada 1946.

Semasa kuliah inilah, ia mulai mengasah kemampuannya dalam menulis karangan ilmiah. Tulisan-tulisannya selalu mendapat perhatian besar dan pujian dari pimpinan fakultas dan kalangan akademisi hingga akhirnya lolos seleksi untuk dimuat dalam majalah *De Ingenieur in Nederlandsch Indie* dan akhirnya mendapat penghargaan dari *Koninklijk Instituut van Ingenieurs* di Belanda.

Herman Johanes juga aktif berorganisasi. Ia merupakan salah seorang pendiri perkumpulan Timorsche Jongeren yang kemudian berubah jadi Perkumpulan Kebangsaan Timor [PKT]. Ini merupakan awal keterlibatan Herman dalam bidang politik yang mengantarnya menjadi salah seorang pendiri Partai Indonesia Raya [Parindra] dan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP].

Karena pengetahuannya yang tinggi dalam bidang ilmu fisika dan kimia, Herman sering dimintai bantuan oleh para pemuda pejuang untuk merakit senjata api dan membuat detonator serta alat peledak. Kepiawaiannya dalam persenjataan akhirnya menarik

perhatian Markas Tertinggi Tentara di Yogyakarta, yang kemudian memerintahkannya untuk segera datang ke Yogya guna membuka dan sekaligus memimpin sebuah laboratorium persenjataan.

Jasanya begitu besar dalam memblokade gerak pasukan Belanda selama clash I dan II. Pada Desember 1948, ia memasang bom di jembatan kereta api Sungai Progo. Karena ia menguasai teori jembatan saat bersekolah di THS Bandung, Johannes bisa membantu pasukan Resimen XXII membom jembatan itu. Awal tahun 1949, ia bergabung dengan pasukan Akademi Militer di sektor Sub-Wehrkreise 104 Yogyakarta di Kalasan untuk meledakkan Jembatan Bogem yang membentang di atas Sungai Opak. Jembatan akhirnya hancur dan satu persatu jembatan antara Yogya-Solo dan Yogya-Kaliurang berhasil dihancurkan Johannes bersama para taruna Akademi Militer. Aksi gerilya ini melumpuhkan aktivitas pasukan Belanda karena mereka harus memutar jauh mengelilingi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu melewati Magelang dan Salatiga untuk bisa masuk Yogyakarta.

Pada tahun 1950 setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, ia menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam kabinet Mohammad Natsir. Selepas itu ia mengabdikan dibidang pendidikan. Ia mendidik dalam bidang teknik hingga menjadi rektor UGM pada periode 1961 hingga 1966. Herman Johannes meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada 1992 karena kanker prostat. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Nasional pada 2009.

Achmad Subardjo



Lahir: Karawang 23 Maret 1896 | **meninggal:** 15 Desember 1978 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 58/TK/2009 | **tanggal penetapan:** 9 November 2009

■ Diplomat dari Karawang

Ia memang seorang diplomat sejati. Pada Februari 1927, ia menjadi salah satu wakil Indonesia untuk menghadiri persidangan antar bangsa “Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah” pertama di Brussels dan dilanjutkan di Jerman. Ia juga yang menjembatani golongan tua dengan golongan muda dalam kisruh peristiwa Rengasdengklok, hingga semua sepakat proklamasi di kumandangkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945.

Sang diplomat ini bernama lengkap Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoebo. Nama Achmad Soebardjo adalah nama pemberian ibunya setelah sebelumnya ia mempunyai nama Teuku Muhammad Yusuf, pemberian ayahnya yang masih mempunyai keturunan

bangsawan Aceh dari Pidie, nama belakang Djojoadisoerjo ia tambahkan sendiri saat dewasa. Semasa remaja ia sekolah di *Hogere Burger School* [HBS] Batavia tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah *Meester in de Rechten* [Sarjana Hukum] pada 1933. Saat di Belanda itulah ia aktif dalam *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia, kumpulan pelajar Hindia [Indonesia] di Belanda.

Sekembalinya di Hindia Belanda [Indonesia], Achmad Soebardjo yang pernah aktif dalam organisasi Jong Java melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI].

Ia juga ikut serta dalam penyusunan naskah proklamasi di rumah petinggi Jepang, Laksaman Maeda. Kariernya terus naik saat dilantik menjadi Menteri Luar Negeri tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi menteri luar negeri pertama Indonesia. Kemudian ia menjabat Menteri Luar Negeri sekali lagi pada periode 1951 - 1952. Setelahnya, ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland sejak tahun 1957 hingga 1961.

Tidak hanya dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan Achmad Subardjo juga memiliki peran penting. Ia merupakan profesor dalam bidang Sejarah Perlembagaan dan Diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusasteraan, Universitas Indonesia.

Selepas tidak lagi aktif dalam politik, di usia yang telah senja, Achmad Subardjo meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Jakarta akibat komplikasi. Ia lalu dimakamkan di Cipayung, Bogor. 31 tahun kemudian, Pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Nasional pada Achmad Subardjo.

Johanes Leimena



Lahir: Ambon 6 Maret 1905 | **meninggal:** Jakarta 29 Maret 1977 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 52/TK/2010 | **tanggal penetapan:** 11 November 2010

■ Sang Mutiara Timur

Ia seorang dokter sekaligus politisi. Seorang negarawan besar. Ia merupakan tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai menteri kabinet Indonesia, ia masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda di masa Orde Lama. Satu-satunya menteri Indonesia yang menjabat selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus. Ia seorang pemimpin yang tenang. Dalam sebuah rapat yang sering tegang, ia mencairkan suasana dengan kata teduhnya, “*Rustig, Rustig*” [tenang, tenang]. Sumbangan berharganya adalah “Bandung Plan” atau “rencana Leimena”, setiap kecamatan akan dibangun pusat kesehatan. Inilah yang menjadi cikal bakal Puskesmas dimasa berikutnya.

Johannes Leimena merupakan putra Maluku pasangan Dominggus Leimena dan Elisabeth Sulilatu. Pada 1914, Leimena hijrah ke Batavia, ia meneruskan studinya di ELS [*Europeesch Lagere School*], lalu pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool. Dari sini ia melanjutkan studinya ke MULO. Selepas lulus, ia melanjutkan pendidikan kedokteran di STOVIA [*School Tot Opleiding Van Indische Artsen*]. Di sekolah ini, ia mulai mengenal isu nasionalisme dan membuatnya aktif dalam “Gerakan Oikumene”.

Pada 1926, Leimena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama organisasi oikumene di kalangan pemuda Kristen. Yang merupakan cikal bakal berdirinya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ia juga aktif dalam Jong Ambon dan menjadi anggota panitia penyelenggara Kongres Pemuda Indonesia pada 1928. Pada tahun 1930, ia kemudian lulus dan mendapat gelar dokter.

Sejak kelulusannya, Leimena mulai bekerja sebagai dokter. Pertama kali diangkat sebagai dokter pemerintah di “CBZ Batavia”, lalu pindah ke Karesidenan Kedu saat Gunung Merapi meletus. Setelah itu dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung. Di rumah sakit ini ia bertugas dari tahun 1931 sampai 1941.

Beberapa tahun berselang, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terbentuk dan baru pada 1950 Leimena terpilih menjadi ketua umum yang diembannya hingga 1957. Pada periode yang sama, Leimena juga menjadi salah satu pembentuk Dewan Gereja-

gereja di Indonesia (DGI). Di masa Orde Lama, ia menjadi orang penting. Selama 21 tahun ia menjabat Menteri Kesehatan [1946 – 1956], ia menggagas “Bandung Plan”, Menteri Sosial [1957 – 1959], Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi [1959 – 1963], Wakil Perdana Menteri II/Menko Distribusi [1963 dan 1964], dan terakhir Wakil Perdana Menteri/ Ketua Kabinet Inti [1966]. Pasca Orde Lama, Leimena mengundurkan diri sebagai menteri. namun ia masih dipercaya menjadi anggota DPA [Dewan Pertimbangan Agung] hingga tahun 1973. Selepas itu, ia menyibukkan diri dengan penasihat dewan direksi rumah sakit Cikini hingga akhir hayatnya tahun 1977 dalam usia 72 tahun.

Setelah 33 tahun kepergiannya, pengakuan negara terhadap apa yang dilakukan Leimena semasa hidupnya diwujudkan dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Johannes Leimena. Bagaimanapun gelar itu diberikan untuk menghormati jasa-jasa Leimena dalam perjuangan bangsa dan pengabdian kepada negara selama lebih dari 21 tahun.

Johannes Abraham Dimara



Lahir: Biak Utara 16 April 1916 | **meninggal:** Jakarta 20 Oktober 2000 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 52/TK/2010 | **tanggal penetapan:** 11 November 2010

■ Merebut Irian Barat

Pada pertengahan Oktober 1954, bersama 40 anggota pasukan gerilyawan, Dimara melakukan infiltrasi ke Irian Barat. Tujuannya membangkitkan perlawanan penduduk terhadap Belanda. Rencana ini telah diketahui Belanda dan terjadilah pertempuran antara gerilyawan republik dengan tentara Belanda. Sebelas gerilyawan gugur dan ia tertangkap lalu di penjara hingga 1961.

Johannes Abraham Dimara merupakan putra asli Irian, keturunan kepala kampung bernama Wiliam Dimara. Ketika mulai beranjak 13 tahun, saat masih sekolah desa, ia diangkat anak oleh orang Ambon bernama Elisa Mahubesi dan dibawa ke kota Ambon. Anak Biak yang tumbuh cepat dengan postur atletis ini mulai masuk

agama Kristen dan diberi nama Johanes Abraham. Nama kecilnya Arabel berganti menjadi Anis Papua yang berarti Johannes dari Papua. Ia tamat Pendidikan Dasar di Ambon pada 1930, kemudian masuk Sekolah Pertanian. Pada 1940, ia masuk Sekolah Pendidikan Injil dan segera menjadi seorang guru penginjil di Pulau Buru.

Ketika zaman Jepang tiba, Dimara masuk menjadi anggota Heiho. Selepas kemerdekaan Indonesia, jiwa nasionalisme tumbuh. Saat itu Dimara bekerja dipelabuhan Namlea Ambon. Suatu hari ditahun 1946, masuk kapal berbendera Merah Putih yang membawa sejumlah Anggota ALRI asal Maluku melakukan penyusupan di Ambon untuk memberitakan peristiwa Proklamasi dan tentu saja untuk berjuang. Dimara segera membantu agar kapal bisa mendarat penuh. Ia menganjurkan kapal didaratkan di Tanjung Nametek sekitar satu kilometer dari Namlea. Selepas itu, ia kembali ke Irian dan ikut serta dalam pengibaran bendera Merah Putih di Biak dan terus berjuang melawan Belanda yang menguasai tanah Irian.

Dimara terus membantu perjuangan tentara Indonesia. Pada 1949, setelah penyerahan kedaulatan Indonesia, ia menuju Maluku dan bergabung dengan Batalyon Patimura APRIS dan ikut dalam penumpasan RMS. Setahun berselang, pada 1950, ia diangkat menjadi ketua OPI[Organisasi Pembebasan Irian Barat]. Ia pun melakukan Infiltrasi ke Irian pada 1954, yang menyebabkannya tertangkap tentara Belanda dan ditahan selama lebih dari 5 tahun hingga pembebasannya pada 1961. Ketika Presiden Soekarno mengumandangkan TRIKORA, ia menyeru kepada seluruh rakyat Irian Barat agar mendukung penyatuan Irian Barat dengan Indonesia.

Pada 1962, diadakanlah Persetujuan New York yang membahas soal Irian Barat. Ia menjadi salah satu delegasi pro integrasi. Akhirnya isi persetujuan itu berhasil manis, Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia. Maka mulai saat itu Irian Barat menjadi salah satu bagian dari Indonesia.

Johannes Abraham Dimara adalah salah seorang pejuang yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat. Ia pejuang RI di wilayah timur dengan pangkat Mayor TNI menjelang pensiun. Dimara adalah putra Irian sederhana yang mencintai tanah air Indonesia. Ia meninggal dalam usia 84 tahun. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan bangsa, terutama dalam perjuangan merebut Irian Barat, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Johannes Abraham Dimara pada tahun 2000, sebulan setelah kematiannya.

Syafruddin Prawiranegara



Lahir: Serang 28 Februari 1911 | **meninggal:** Jakarta 15 Februari 1989 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 113/TK/2011 | **tanggal penetapan:** 7 November 2011

■ Penyelamat RI

Kuding lahir di Banten pada 28 Februari 1911. Ia berdarah campuran Banten dan Minangkabau. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Kuding kecil gemar membaca, apalagi kisah petualangan sejenis *Robinson Crusoe*. Ia pun memiliki keinginan untuk menjadi “orang besar”. Untuk mewujudkannya Kuding sengaja merantau ke Batavia demi melanjutkan studinya di *Rechtshogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) pada tahun 1939. Ia pun berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten*.

“Si Kuding” adalah panggilan kecil Syafruddin Prawiranegara, seorang negarawan yang dikenal sebagai “PENYELAMAT

REPUBLIK” karena jasanya membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Saat itu, Ia merupakan tangan kanan Soekarno-Hatta. Tatkala Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Syafruddin berhasil menyelamatkan Negara dengan membentuk pemerintahan darurat. Dalam peristiwa tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan Belanda ke Pulau Bangka. Guna mengisi kekosongan kursi pemerintahan, Syafruddin kemudian mendapat tugas untuk membentuk sekaligus bertindak selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Mandat tersebut disampaikan Soekarno-Hatta lewat telegramnya yang berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibu-Kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Karena sulitnya sistem komunikasi di masa itu, telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Namun, di saat yang bersamaan, begitu mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan negara, Syafruddin langsung mengambil inisiatif senada. Ia mengumpulkan beberapa tokoh dan mengusulkan pembentukan pemerintahan darurat dalam rapat di Bukittinggi. Ide Syafruddin mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan.

Guna menjalankan tugasnya sebagai Ketua PDRI, Syafruddin Prawiranegara membentuk kabinet yang terdiri atas beberapa orang menteri. Meskipun jabatan yang disandanginya ketika itu “ketua”, namun kedudukannya sama dengan presiden. PDRI di bawah komando Syafruddin terus melakukan berbagai upaya agar para pemimpin bangsa bisa segera dibebaskan. Usahnya membuahkan hasil, Belanda akhirnya terpaksa berunding dengan Indonesia. Usaha Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di nusantara pun berakhir yang ditandai dengan Perjanjian Roem-Royen. Soekarno-Hatta beserta tokoh lain kembali dibebaskan.

Dengan bebasnya dwitunggal proklamator itu, usai sudah tugas Syafruddin memimpin PDRI yang sudah ia jalankan selama kurang lebih delapan bulan. Pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta, ia menyerahkan jabatannya kepada Presiden Soekarno. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi dilakukan pada 14 Juli 1949 di Jakarta. Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri RI. Lalu ditunjuk menjadi menteri keuangan Kabinet Hatta. Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan, ia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan ‘Gunting Syafruddin’. Yakni pemotonga nilai uang dari lima rupiah ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh, sisanya dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana. Karier Syafruddin berikutnya adalah sebagai Presiden Direktur The Javasche Bank atau Bank Sentra Indonesia pada tahun 1951.

Namun, seiring berjalannya pemerintahan dan kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia mengakibatkan ketidakpuasan beberapa pihak, termasuk Syafruddin. Ia bersama

rekan-rekannya dari partai Masyumi menentang Soekarno yang membubarkan Konstituante. Puncak pecahnya hubungan Soekarno-Syafruddin terjadi pada 1958. Di Sumatra Tengah berdiri Pasukan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) akibat wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Syafruddin diangkat menjadi Presiden PRRI. Karena PRRI inilah, Syafurddin lalu dicap pemberontak, Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan perintah untuk menumpas PRRI.

Sekitar 4 tahun, Syafruddin beserta istri dan kedelapan anaknya terpaksa hidup di Hutan Bukit Barisan untuk menghindari penangkapan. Pemerintah berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.449/1961 orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI diberikan amnesti dan abolisi.

Setelah tak lagi terlibat dalam pemerintahan, Syafruddin menjadi pendakwah meski beberapa kali dilarang naik mimbar lantaran ceramahnya dinilai terlalu keras oleh pemerintah. Ia menjalani masa tuanya dengan penuh kesederhanaan. Ia bahkan pernah menolak sebuah rumah pemberian Presiden Soekarno, dengan alasan tidak ingin menerima sesuatu yang dibayar dari pajak rakyat. Syafruddin Prawiranegara tutup usia pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Idham Chalid



Lahir: Satui Kalimantan Selatan 27 Agustus 1921
| **meninggal:** Jakarta 11 Juli 2010 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 113/TK/2011 |
tanggal penetapan: 7 November 2011

■ Pahlawan dari Amuntai

Ia mungkin tokoh fenomenal di Indonesia. Ia telah melampaui lima zaman, sejak berjuang di masa kolonial Belanda hingga masih berperan di masa reformasi. Ia lama berkiprah dipelbagai ranah pengabdian. Ia pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif, dan ormas [Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama). Juga pernah menjadi pemimpin tiga partai politik berbeda, Masyumi, NU, dan PPP. Ia tokoh nasional yang luar biasa.

Seperti air, Chalid—peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar Kairo—mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni menjadi ulama dan politisi. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan

akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya, sedang sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, hingga pragmatis.

Chalid merupakan anak sulung lima bersaudara dari pasangan H Muhammad Chalid, penghulu di Setui dengan Umi Hani. Chalid telah terlihat cerdas saat kecil. Ia telah gemar membaca buku sejak ia duduk di *Vervolgschool* [sekolah melayu] Ujung Murung pada 1933. Setahun berselang, ia pindah ke Madrasatur Rasyidiyah dimana ia segera menerima pengajaran kitab-kitab klasik Islam. Pada 1938, ia melanjutkan studi ke Pondok Modern Gontor Ponorogo dan diterima di kelas I *Kuliyatul Mu'allimin al Islamiyah* [KMI] atau Sekolah Pendidikan Guru Islam. Di Gontor, ia lalu mengembangkan bakat berorganisasi dan berpidato. Ia juga bersentuhan dengan semangat Nasionalisme yang tumbuh saat itu.

Di masa revolusi, Chalid ikut berjuang. Saat itu ia masih muda, 27 tahun, tetapi ikut pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai risikonya, ia pernah ditahan tentara Belanda pada periode 1947-1949 di penjara Amuntai, lalu ke Kandangan dan terakhir dibawa ke Banjarmasin. Selama 40 hari ditahan di Kandangan, ia mengalami penyiksaan hebat oleh tentara Belanda bahkan hampir dieksekusi mati. Akan tetapi, kemudian di awal November 1949, ia bebas.

Idham Chalid lalu menjadi anggota dewan daerah Kalimantan selatan, lalu melesat ke pusat pemerintahan saat menjadi Wakil Perdana Menteri era Orde Lama, menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial pada era Orde Baru dan menjadi Ketua

DPR/MPR selepas pemilu tahun 1971. Di samping bergiat dalam pemerintahan, Chalid juga menjadi seorang ulama karismatik, yang selama 28 tahun memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Masyumi, Pendiri sekaligus memimpin Partai Nahdlatul Ulama, dan terakhir memimpin Partai Persatuan Pembangunan [PPP] di masa Orde Baru.

Tokoh multi zaman ini akhirnya meninggal dunia pada usia 88 tahun di hari ahad. Jenazahnya kemudian dimakamkan di kompleks Perguruan Darul Qur'an Cisarua Bogor Jawa Barat. Setahun berikutnya, pemerintah Indonesia mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional atas peranannya dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta jasa-jasanya dalam mengisi kemerdekaan hingga masa reformasi.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah



Lahir: Maninjau 17 Februari 1908 | **meninggal:** Jakarta 24 Juli 1981 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan** Keppres No. 113/TK/2011: | **tanggal penetapan:** 7 November 2011

■ Pejuang Pena dari Maninjau

Jika menyebut sastra generasi Pujangga Lama, nama HAMKA akan mudah dikenal. Ia memang sastrawan mumpuni. Menulis sejak masa muda hingga masa tuanya. Ia tokoh ulama sekaligus seorang nasionalis. Ia ikut membesarkan Muhammadiyah sekaligus penyokong kemerdekaan RI. Ia menulis novel juga ikut bergerilya di hutan saat perang kemerdekaan berkecamuk.

Nama lengkapnya Haji Abdul Karim Amrullah merupakan anak seorang ulama ternama, Abdul Karim Amrullah. Ia mendapat pendidikan rendah pada usia 7 tahun di Sekolah Dasar Maninjau selama dua tahun. Pada usia 10 tahun, ia masuk Sumatra Thawalib, sekolah Islam modern pertama, yang didirikan oleh ayahnya pada

1919 di Padang Panjang. Di situ Hamka kemudian mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab, salah satu pelajaran yang paling disukainya. Pada 1924, Hamka yang ketika itu masih remaja sempat berkunjung ke Jawa. Di sana ia banyak menimba ilmu pada pemimpin gerakan Islam Indonesia, seperti Haji Omar Said Chakraminato, Haji Fakharudin, Hadi Kesumo, Soerjapranoto, hingga pada Rashid Sultan Mansur yang merupakan saudara iparnya sendiri.

Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. berbekal ilmu agama yang didapatnya dari berbagai tokoh Islam berpengaruh, Hamka memulai kariernya sebagai Guru Agama di Padang Panjang. Ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan mengetuai cabang Muhammadiyah tersebut pada tahun 1928. Pada tahun 1931, ia diundang ke Bengkalis untuk kembali mendirikan cabang Muhammadiyah. Dari sana ia melanjutkan perjalanan ke Bagansiapiapi, Labuhan Bilik, Medan, dan Tebing Tinggi, sebagai mubaligh Muhammadiyah. Pada tahun 1932 ia dipercayai oleh pimpinan Muhammadiyah sebagai mubaligh ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana ia mulai aktif menulis dengan menerbitkan majalah pengetahuan Islam, *Al-Mahdi*.

Pada 1934, Hamka menuju Medan. Di sana ia memimpin majalah mingguan *Pedoman Masyarakat*. Dari majalah inilah pertama kali ia memperkenalkan nama pena Hamka, melalui rubrik tasawuf modern, tulisannya telah mengikat hati para pembacanya, baik orang awam maupun kaum intelektual. Pada 1945, Hamka kembali ke Padang Panjang lalu dipercaya memimpin *Kulliyatul Muballighin*

dan menyalurkan kemampuan jurnalistiknya dengan menghasilkan beberapa karya tulis. Dimasa ini juga perang revolusi kemerdekaan berkecamuk. Hamka turut berjuang mengusir Belanda. Lewat pidato, ia mengobarkan semangat pejuang merebut kedaulatan negara. Ia ikut serta bergerilya di dalam hutan. Semangat perjuangan Hamka senantiasa berkobar tiap kali mengingat pesan ayahnya, *"Ulama harus tampil ke muka masyarakat, memimpin menuju kebenaran"*.

Pasca kemerdekaan, Konferensi Muhammadiyah memilih Hamka untuk menduduki posisi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatra Barat pada 1946. Setahun berikutnya, ia menjabat sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. Ia juga mendapat amanah dari Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjabat sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional.

Tepatnya tahun 1949, Hamka hijrah ke Jakarta dan menekuni dunia jurnalistik dengan menjadi koresponden majalah *Pemandangan* dan *Harian Merdeka*. Tahun 1953, Hamka terpilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga pernah menjadi Pejabat Tinggi Agama meski kemudian ia mengundurkan diri.

Dalam politik, Hamka aktif melalui Masyumi. Pada Pemilu pertama 1955, Hamka terpilih menjadi anggota Konstituante mewakili Jawa Tengah. Pada 1956, ia menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Al-Azhar Mesir. Setahun kemudian, Hamka kembali ke dunia pendidikan setelah resmi diangkat menjadi dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang. Kariernya sebagai pendidik terus menanjak, setelah ia terpilih sebagai rektor pada Perguruan Tinggi Islam, Jakarta,

kemudian dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Moestopo, Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Di masa Orde Baru, pada 1977, Hamka menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia [MUI]. Ia hanya bertahan empat tahun setelah akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1981. Dua bulan selepas mundur, Hamka masuk rumah sakit Pusat Pertamina, terkena komplikasi, dan tiga hari berikutnya ia akhirnya menghadap Sang Khalik di usia 73. Setelah disholatkan di Masjid Al-Azhar, jenazahnya kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta. Atas jasa-jasanya kepada negara, pemerintah RI memberi gelar Pahlawan nasional pada Hamka di tahun 2011.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro



Lahir: 23 Mei 1904| **meninggal:** 8 Juni 1957| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 113/TK/2011| **tanggal penetapan:** 7 November 2011

■ Pejuang Pendidik

Ki Mangunsarkoro merupakan menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang dikenal sederhana dan bersahaja. ia tidak pernah berbusana mewah. Meski seorang menteri, ke mana pun pergi, ke istana maupun gedung parlemen, ia tetap setia mengenakan peci dan sarung. Lama-lama, namanya dipelesetkan jadi Ki Mangun Sarungan. Ia tetap setia dengan kesederhanaannya itu. Lebih bersahaja lagi, ia tidak pernah mau tinggal di rumah dinas menteri. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana memajukan bangsa dan negara. Orang kepercayaan Ki Hajar Dewantoro ini kemudian menjadi salah satu peletak dasar sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Dalam Kongres PGRI tahun 1950, ia pernah berujar tegas, “... *Sekarang tiap-tiap guru harus bersifat sebagai pandita yang menunjukkan kewajiban murid-muridnya sebagai satria bangsa, sebagai perjurit bangsa, perjurit yang akan mewujudkan perikemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia... guru yang kurang karakternya adalah racun masyarakat. Sebaliknya guru yang baik dan kuat karakternya adalah saka guru dan sumber kebahagiaan masyarakat...*” saat itu menteri pendidikan itu membahas soal karakter pendidikan terutama di bagian “hulu”, para pengajar menjadi garda depan kualitas pendidikan Indonesia.

Nama lengkap sang menteri pendidikan ini adalah Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Ia seorang yang dibesarkan di lingkungan keraton Solo. Pengabdianya dalam pendidikan diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru di Batavia. Ia langsung diangkat menjadi guru HIS Tamansiswa Yogyakarta. Ia lalu ikut dalam pergerakan. Pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, ia menjadi salah satu pembicara dan menyampaikan pidatonya tentang Pendidikan Nasional. Ia mengatakan bahwa anak-anak pribumi harus mendapat pendidikan kebangsaan secara demokratis, serta perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah.

Pada 1929, ia diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Batavia. Satu tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hadjar Dewantara, ia mendirikan Perguruan Tamansiswa di Batavia. Perguruan Tamansiswa ini merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin olehnya.

Selanjutnya pada tahun 1931, Ki Sarmidi mendapat tugas untuk menyusun Rencana Pelajaran Baru yang pada tahun berikutnya disahkan menjadi 'Daftar Pelajaran Mangunsarkoro' yang mencerminkan cita-cita Tamansiswa. Atas dasar tugas tersebut, di tahun yang sama, ia menulis buku *Pengantar Guru Nasional* yang kemudian dicetak ulang pada tahun 1935.

Nama Ki Sarmidi tidak hanya dikenal di lingkungan pendidikan namun juga politik. Kiprahnya di panggung politik ditandai dengan peran sertanya di Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada Kongres Serikat Rakyat Indonesia [Serindo] di Kediri, ia terpilih menjadi Ketua PNI Pertama. Sebagai politisi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, Sarmidi menentang politik kompromi dengan Belanda seperti yang tertuang dalam Perjanjian Linggarjati dan Renville. Penjara menjadi tempat yang tidak asing lagi baginya. Pada saat agresi Belanda II di Yogyakarta, ia pernah ditahan di penjara Wirogunan.

Pasca kemerdekaan, Ki Sarmidi duduk di pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam Kabinet Hatta II sejak Agustus 1949 hingga Januari 1950. Sewaktu menjabat sebagai menteri, ia mendirikan dan meresmikan Akademi Seni Rupa Indonesia [ASRI] Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, serta ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada [UGM] Yogyakarta. Pada masa Kabinet Halim, ia juga dipercaya menduduki jabatan Menteri pendidikan. Saat itu ia berhasil menyusun dan memperjuangkan Undang Undang No 4/1950 di parlemen. UU ini berisi Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran

di Sekolah untuk seluruh Indonesia dan menjadi Undang Undang Pendidikan Nasional pertama.

Pada 1957, Ki Mangunsarkoro meninggal di Jakarta dan jenazahnya segera di bawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan di makam Keluarga Besar Tamansiswa “Taman Wijaya Brata” Celeban. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya pada negara khususnya di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia menganugerahkannya Pahlawan Nasional pada 2011.

I Gusti Ketut Pudja



Lahir: Singaraja 19 Mei 1908 | **meninggal:** 4 Mei 1977 |
gelar: Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres
No. 113/TK/2011 | **tanggal penetapan:** 7 November
2011

■ Pahlawan Singaraja

Ia ikut ambil bagian pada saat penyusunan naskah proklamasi dan memegang peranan sangat penting dalam memperbaiki butir pertama dari Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila. Ia yang menyarankan agar butir pertama pancasila berbunyi, “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Putra pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma ini berhasil menyelesaikan kuliah di bidang hukum dan meraih gelar *Meester in de Rechten* dari *Rechts Hoge School*, Batavia. Selepas itu, ia mulai mengabdikan diri pada kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja.

Pada 7 Agustus 1945, Pemerintah Jepang yang berkedudukan di Jakarta membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] yang beranggotakan 27 orang. I Gusti Ketut Pudja kemudian terpilih sebagai salah satu anggota PPKI mewakili Sunda Kecil [Bali dan Nusa Tenggara]. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, telah berdiri BPUPKI. Selanjutnya pada 16 Agustus hingga 17 Agustus 1945 dinikmati, Pudja turut hadir dalam perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat. Pudja juga menyaksikan momen bersejarah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan rapat guna membahas Piagam Jakarta [Jakarta Charter] yang merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia. Piagam tersebut merupakan hasil rumusan Panitia Sembilan yakni panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Di dalam Piagam yang disetujui pada 22 Juni 1945 itu berbunyi, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pudja mengusulkan perubahan butir pertama dan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini diterima. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah butir pertama diganti, pada sidang kedua

yang beragendakan penyusunan UUD, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah [preamble]. Bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I, 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pudja selalu hadir dalam proses-proses penting itu.

Pada 22 Agustus 1945, presiden kemudian mengangkat Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil yang waktu itu disebut Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Sunda Kecil. Keesokan harinya, Pudja tiba di kampung halamannya, Bali, dengan membawa mandat pengangkatannya sebagai Gubernur dan langsung memulai tugasnya.

Hal pertama yang dilakukannya adalah menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga ke desa-desa terpencil di Bali. Pudja menjelaskan latar belakang proklamasi dan struktur pemerintahan Republik Indonesia serta menyampaikan bahwa ia adalah Gubernur Sunda Kecil hasil pemilihan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disahkan oleh Presiden RI. Pudja juga mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mewujudkan susunan pemerintahan di Bali sebagai daerah Sunda Kecil dengan ibu kotanya Singaraja.

Pudja juga pernah mendapat amanat dari presiden untuk menjadi pejabat di Departemen Dalam Negeri. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] hingga ia memasuki masa purnabakti di tahun 1968.

I Gusti Ketut Pudja meninggal dunia usia 68 tahun. Pada 2011, I Gusti Ketut Pudja ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pakubuwana X



Lahir: Surakarta 29 November 1866 | **meninggal:** Surakarta 1 Februari 1939 | **gelar:** Pahlawan Nasional | **dasar penetapan:** Keppres No. 113/TK/2011 | **tanggal penetapan:** 7 November 2011

■ Sunan Pendukung Pergerakan Kebangsaan

Pakubuwono X dinilai sebagai sosok membingungkan. Selama memerintah Keraton Surakarta di bawah Pemerintah Hindia Belanda, ia bisa tampil sebagai “teman” pemerintah kolonial, tetapi kewibawaannya sebagai raja Jawa di mata rakyat tidak luntur. Tatkala pelbagai wilayah di nusantara mengibarkan bendera Belanda, Surakarta malah menjadi satu-satunya daerah di Hindia Belanda yang bebas mengibarkan bendera merah putih, yang saat itu mendapat sebutan bendera Gula Kelapa. Hal itu tentu saja tidak lepas dari upaya lobi Pakubuwono X. Ia memang dikenal setia kepada pemerintah, dalam surat perjanjian pengangkatannya, terdapat syarat yang mengatakan bahwa Pakubowono X rela dicopot jika ia

tidak loyal kepada Belanda. Akan tetapi, sang Sunan punya peran vital dalam pergerakan nasional.

Pakubuwana X lahir 29 November 1866 dengan nama Raden Mas Malikul Kusno. Sang putra mahkota Solo tersebut diangkat menjadi Raja Surakarta pada 30 Maret 1893, menggantikan ayahnya yang meninggal dua minggu sebelumnya. Permaisuri Pakubuwana X adalah putri Sultan Hamengkubuwono VII, Ratu Hemas. Sejalan dengan perubahan iklim politik di Hindia Belanda waktu itu, kraton pun mengalami era transisi menuju modernisasi. Masa pemerintahan Pakubuwono berlangsung pada 1893 hingga 1939, yakni era Pergerakan Nasional. Di era tersebut banyak bermunculan organisasi-organisasi kemanusiaan juga politik.

Dari situlah peran Pakubono X terhadap perjuangan kemerdekaan bisa dilihat. Ia memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa di wilayah Surakarta. Meski mendapat tekanan, namun karena sikapnya yang kooperatif dan pandai membawa diri, pemerintah kolonialpun tidak bisa berbuat banyak. Ia membantu organisasi Budi Utomo dan pendirian organisasi Serikat Islam. Ia juga mengizinkan Surakarta menjadi tempat Kongres Bahasa Indonesia I pada 1938. Dalam hal integrasi nasional, Pakubuwono X kerap mengunjungi dan melakukan hubungan baik dengan pelbagai lapisan masyarakat di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Bali, Madura, Banjarmasin, Makassar, Lampung, Palembang, Riau, dan Medan. Dalam setiap kunjungannya, ia tak lupa membangkitkan semangat kebangsaan serta menekankan arti penting kesadaran multikulturalisme, toleransi, dan kebersamaan.

Infrastruktur moderen kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahannya, seperti bangunan Pasar Gede Harjonagoro, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari, Kebun Binatang Jurug, jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, Taman Balekambang, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah bagi tunawisma, dan rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa. Di bidang pendidikan, ia membangun sekolah umum, madrasah *Mambaul Ulum*, dan Jamsaren untuk menghapus buta aksara dan kebodohan. Beasiswa dipersiapkan bagi anak-anak berprestasi, supaya kelak mampu mengisi kemerdekaan Indonesia.

Pelbagai penghargaan ia dapat dari negara asing, antara lain Bintang *Grootkruis koninglijke Orde* dari Raja Kamboja, Bintang Emas dari Raja Wilhelm II dari Pruisen, Bintang *Commander Met de ster* dari Raja Hongaria, Bintang *Orde Van Leopold* dari Raja Belgia, dan Bintang *Grootkruis Oranye Nassau* dari Ratu Belanda.

Pakubuwono X meninggal di Surakarta pada 1 Februari 1939 dan dimakamkan di pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Tahun 2011, ia mendapat gelar Pahlawan Nasional. Dua tahun sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia juga menganugerahkannya Bintang Mahaputera Adipradana kepadanya.

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono



Lahir: Yogyakarta 1900| **meninggal:** Jakarta 1 Agustus 1986| **gelar:** Pahlawan Nasional| **dasar penetapan:** Keppres No. 113/TK/2011| **tanggal penetapan:** 7 November 2011

■ Kasimo Plan

Di tengah–tengah kekacauan Indonesia yang baru merdeka dan berkali-kali ditempa masalah dengan perjuangan melawan Belanda dan perpecahan integral, pemerintah harus segera membuat rencana pembangunan ekonomi berkala yang matang. Pada 19 Januari 1947 dibentuklah *Planning Board* [badan perancang ekonomi] yang bertugas menyusun rancangan pembangunan ekonomi berjangka untuk rakyat Indonesia. Lalu tampillah ia membeberkan rencana produksi 5 tahun. Pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, revitalisasi tanah untuk perkebunan, serta yang terpenting: pemindahan penduduk [transmigrasi] 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka 1 hingga 15 tahun. Rencana ini tersendat, tapi 20 tahun berselang, pemerintah Orde Baru sukses

dengan REPELITA. Presiden Soeharto tidak pernah lupa dan selalu menyebut-nyebut, “rencana Kasimo”.

“Rencana Kasimo” memang dicetuskan oleh Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono yang saat itu menjabat menteri Kemakmuran. Ia bernama kecil Kasimo Hendrowahyono putra kedua dari sebelas bersaudara pasangan Dalikem dan Ronosentika, seorang prajurit Keraton Yogyakarta sekaligus tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Sebagai putra prajurit keraton, sejak kecil ia dididik dalam tradisi Jawa.

Selepas lulus belajar di Bumi Putra Gading, Kasimo segera ke Muntilan dan masuk sekolah keguruan yang didirikan oleh Romo van Lith. Di sana, ia tinggal di asrama dan tepat pada hari Paskah, April 1913, Kasimo yang saat itu berusia 13 tahun dibaptis secara Katolik dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph. Setelah menamatkan pendidikannya di Muntilan, Kasimo pindah ke Bogor guna meneruskan pendidikannya di *Landbouwschool*. Begitu lulus, Kasimo mulai bekerja sebagai guru pertanian di Tegal dan Surakarta.

Kasimo terjun ke politik dengan ikut mendirikan dan menjadi ketua pertama partai politik Katholiek Djawi. Tahun 1925, partai tersebut berubah nama menjadi Perkoempoelan Politiek Katholiek di Djawa. Lima tahun kemudian, berganti nama lagi menjadi Partai Politik Katolik Indonesia (PPKI). Pada 1931, ia diangkat menjadi anggota *Volksraad*, dimana lima tahun berikutnya ia ikut menandatangani petisi Soetardjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia-Belanda. Kasimo berada dalam dewan rakyat hingga tahun 1942.

Selepas itu, saat Jepang menggantikan Belanda di Hindia, partainya, PPKI, sempat dilarang keberadaannya. Di masa awal kemerdekaan, Kasimo menghidupkan kembali PPKI yang kemudian berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Kasimo sekali lagi memimpin partai ini hingga tahun 1961.

Kasimo masuk menjadi anggota KNIP pada 1945. Kasimo juga beberapa kali mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai menteri. Diawali pada 1947 saat ia diangkat menjadi Menteri Muda Kemakmuran [3 Juli 1947 - 29 Januari 1948], setahun kemudian di bawah Pemerintahan Darurat ia menjadi menteri Persediaan Makanan Rakyat [19 Desember 1948 - 13 Juli 1949]. Di masa inilah, saat Belanda melancarkan agresi militer kedua, Kasimo segera ikut bergerilya dengan tentara dan pergi keluar ibu kota. Selepas itu, ia kemudian menjadi menteri kemakmuran pada kabinet Hatta [4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949] serta menteri perekonomian dalam kabinet Burhanuddin Harahap [12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956].

Setelah RIS dilebur, ia diangkat menjadi anggota DPR selama sepuluh tahun hingga 1960. Kala duduk sebagai anggota dewan, Kasimo turut memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan lain yang ditunjukkan Kasimo adalah saat ia ikut mendukung perebutan Irian Barat. Pada 1960, ia menjabat sebagai anggota DPA [Dewan Pertimbangan Agung], yang kemudian dibubarkan pemerintah. Saat pemerintah Orde Baru mulai berkuasa pada 1967, Kasimo bergabung dalam Tim Pemberantasan Korupsi. Setahun kemudian, ia kembali duduk di DPA hingga 1973. Pada

1980, sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya, Paus Yohanes Paulus II menganugerahkan Kasimo penghargaan Bintang Ordo Gregorius Agung serta diangkat menjadi Ksatria Komandator Golongan Sipil dari Ordo Gregorius Agung.

Enam tahun semenjak mendapat bintang penghargaan dari Vatikan, Kasimo akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta pada usia 86 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Seperempat abad setelah kepergiannya, pemerintah Indonesia memberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011.

Daftar Pustaka

Abdul Gafur, *Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1996

Ade Soekirno, *Cerita Rakyat Jawa Tengah Pangeran Sember Nyawa*, Jakarta: Grasindo, 1993

Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2004

Anhar Gonggong, *Pahlawan nasional Muhammad Husni Thamrin: riwayat hidup singkat dan kutipan-kutipan buah pikirannya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992

Arya Ajisaka, *Mengenal Pahlawan Indonesia*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2006

Budiawan, *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*. Yogyakarta: LKiS, 2006

Deliar Noer, *Mohammad Hatta*. Biografi Politik, Jakarta: LP3ES, 1990

Gamal Komandoko, *Kisah 124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007.

H.M Zainuddin, *Srikandi Aceh*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966

J. B. Sudarmanto, *Jejak-jejak pahlawan: perekat kesatuan bangsa Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2007

M. Nursam, *Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie*. Yogyakarta: Ombak, 2008.

Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, Hermawan Sulisty (Terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim*. Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008

Mohammad Hatta, *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1982

Muchtaruddin Ibrahim, *Cut Nyak Din*. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996

Osman Raliby, *Documenta Historica. Sedjarah Dokumenter Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

Patrik Matanasi (ed), *7 Ibu Bangsa*. Jakarta: Rahzenbook, 2008

Petrik Matanasi, *Pemberontak Tak (Selalu) Salah: Seratus Pembangkangan di Nusantara*. Yogyakarta: Indonesia Buku, 2009.

Rochiati Wiriaatmadja, *Dewi Sartika*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983

Rosihan Anwar, *In Memoriam: mengenang yang wafat*. Jakarta: Kompas, 2002

Sagiman M D, *Mengenal Pahlawan Nasional Kita*. Jakarta: Baharatara, 1975

Sagimun M.D., *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan Tak Kunjung Padam)*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Szekely Lulofs, *Tjoet Nja Din: Riwayat Hidup Seorang Putri*. Jakarta: Chailan Syamsoe, 1954

Takashi Shiraishi, “Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Soeryaningrat. Impian Mereka Masih Bersama Kita”, dalam J.B. Kristanto, *Seribu Tahun Nusantara*. Jakarta: Kompas, 2000.

Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997

Taufik Rahzen, dkk, *Tanah Air Bahasa. Seratus Jejak Pers Indonesia*. Jakarta: IBOEKOE, 2007

Tim Grasindo, *Ensiklopedia Pahlawan Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2011

Tim Media Pusindo, *Pahlawan Indonesia*. Jakarta: Media Pusindo, 2008

Majalah

Tempo, edisi 12-18 November 2012

Website

<http://albumpahlawanbangsa.wordpress.com>

<http://aligufron.multiply.com>

<http://aryopamungkas.blogspot.com>

<http://atjehpost.com>

<http://badrislam.blogspot.com>

<http://belajarsejarah.com>

<http://biografi.gudangmateri.com>

<http://biografi-biodata-profile.blogspot.com>

<http://biografinya.blogspot.com>

<http://biografiteladan.blogspot.com>

<http://bpn16.wordpress.com>

<http://buatblog-masrul.blogspot.com>

<http://budisusilo85.blogspot.com>

<http://bunga-bangsa.blogspot.com>

<http://bunga-rumput.blogspot.com>

<http://en.wikipedia.org>

<http://id.scribd.com>

<http://id.shvoong.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://ilmuenjoy.blogspot.com>

<http://iqbal1.wordpress.com>

<http://kolom-biografi.blogspot.com>

<http://malukueyes.com>

<http://manado.tribunnews.com>

<http://mangunsarkoro.wordpress.com>

<http://melayuonline.com>

<http://mentarinusantara.blogspot.com>

<http://meukeutop.blogspot.com>

<http://moslem-diki.blogspot.com>

<http://muslimdaily.net>

<http://oase.kompas.com>

<http://pedomannusantara.com>

<http://peterkasenda.wordpress.com>

<http://profil.merdeka.com>

<http://rifaimovic.wordpress.com>

<http://rifaimovic.wordpress.com>

<http://royfachrabyginting.blogspot.com>

<http://sejarah.kompasiana.com>

<http://sejarahkita.blogspot.com>

<http://serbasejarah.wordpress.com>

<http://sundaislam.wordpress.com>

<http://terselubung.blogspot.com>

<http://tokoh.univpancasila.ac.id>

<http://www.andreasharsono.net>

<http://www.anneahira.com>

<http://www.balipost.co.id>

<http://www.fauzibowo.com>

<http://www.gudangmateri.com>

<http://www.jakarta.go.id>

<http://www.jawaban.com>

<http://www.kidnesia.coms>

<http://www.mabesad.mil.id>

<http://www.muhammadiyah.or.id>

<http://www.presidensby.info>

<http://www.presidensby.info/>

<http://www.tokohindonesia.com>

<http://www.voa-islam.com>

<http://www.infonusantara.blogspot.com>

Kuncoro Hadi



Lahir di Klaten tahun 1984. Menjadi sejarawan muda sejak lulus dari studi sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2009. Di tahun itu terlibat dalam proyek “Almanak Seni Rupa Jogja” di lembaga Indonesia Buku [IBoekoe] dan menulis beberapa biografi singkat maestro seni lukis Indonesia.

Menulis beberapa buku diantaranya, Soekarno, Vatikan, dan Yakuza [Pustaka Solomon/2011] dan Ensiklopedia Tentara Bayaran [Pustaka Radja/2011]. Saat ini aktif meneliti sejarah klasik dan kontemporer Nusantara.

Sustianingsih



Lahir di Sampang Madura tahun 1985. Sejak tahun 2003 menempuh pendidikan ilmu Biologi di Universitas Negeri Yogyakarta dan meraih gelar sarjana pada tahun 2008. Sejak tahun 2012 mulai tertarik dalam penulisan sejarah Nusantara. Dan saat ini masih menyibukkan diri dalam dunia pendidikan.

